



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Intress



GFS

**Government Finance Statistics
2025 Audited**

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK - TW)
dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP - TW)
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025 *Audited*

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKP-TW) periode *Audited* Tahun 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) merupakan laporan yang mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. LKPK disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

LKPK menjadi suatu upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan pemerintah, yang tidak hanya mencerminkan pencapaian dan kondisi keuangan pemerintah tetapi juga merupakan komitmen untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

LSKP-TW yang disusun berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan anggaran yang aktual dan efektif serta analisis perbandingan kondisi fiskal antar negara, dan diharapkan dapat menyediakan informasi fiskal yang andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai aktivitas pemerintahan serta berguna untuk menilai kinerja fiskal Pemerintah.



HARI UTOMO
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel

Kata Pengantar

LSKP-TW merupakan penghubung yang menerjemahkan informasi akuntansi menjadi lebih dapat dimengerti secara luas dan selaras dengan konsep makro ekonomi dan kaidah statistik.

LKPK-TW dan LSKP-TW periode *Audited* Tahun 2025, terdiri LRA Konsolidasian dan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. LKPK-TW dan LSKP-TW secara umum telah menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta posisi keuangan pemerintah pada tingkat wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini dan berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik melalui penerapan Statistik Keuangan Pemerintah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Makassar, 27 Agustus 2026
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Selatan



Ditandatangani secara elektronik
Hari Utomo



Tim Penyusun GFS

Pengarah

Hari Utomo

Penyunting

Syamsul Bahri

Kontributor

Mukhamad Masykur Mubarak

Untara

Hermono

Nur Achmad Kartikajaya

Siti Nurfadhila

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GRAFIK	IX
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW)	
Periode Tahun 2025	3
Ringkasan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW)	7
FACE LKPK DAN LSKP	10
CALK LKPK TINGKAT WILAYAH	22
A. Penjelasan Umum	23
B. Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	38
C. Catatan Atas Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	46
D. Catatan Atas Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	57
E. Catatan Atas Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	59
CALK LSKP TINGKAT WILAYAH	71
A. Penjelasan Umum	72
B. Pendekatan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah	73
C. Penjelasan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah	75
D. Penjelasan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah	79
E. Penjelasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Tingkat Wilayah	83
METADATA	86
Analisis Rasio	90
Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	91
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	97
Simpulan	105
LAMPIRAN	i

DAFTAR TABEL

Tabel A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)	4
Tabel B. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)	4
Tabel C. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)	5
Tabel D. Ringkasan Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 (dalam Rupiah)	6
Tabel E. Ringkasan Laporan Operasional Statistik Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)	7
Tabel F. Ringkasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)	9
Tabel 1. Komposisi Pendapatan Perpajakan konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	39
Tabel 2. Komposisi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024	40
Tabel 3. Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	42
Tabel 4. Transfer Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	44
Tabel 5. Surplus/Defisit Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024	44
Tabel 6. Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024	45
Tabel 7. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam Rupiah)	47
Tabel 8. Komposisi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam Rupiah)	47
Tabel 9. Komposisi Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	48
Tabel 10. Komposisi Pendapatan Transfer Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	48
Tabel 11. Komposisi Pendapatan BLU - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	48
Tabel 12. Komposisi Pendapatan Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	49
Tabel 13. Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	50
Tabel 14. Komposisi Beban Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan Tahun 2024	51
Tabel 15. Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024	52
Tabel 16. Komposisi Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024	53
Tabel 17. Komposisi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024	53
Tabel 18. Komposisi Beban AkruaL Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	54
Tabel 19. Komposisi Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024	55
Tabel 20. Komposisi Beban Transfer Pemda Tahun 2025 dan Tahun 2024	55
Tabel 21. Komposisi Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024	56
Tabel 22. Komposisi Koreksi- koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas Tahun 2025	57
Tabel 23. Komposisi Aset Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	59
Tabel 24. Aset Lancar Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	60
Tabel 25. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	61
Tabel 26. Komposisi Aset Tetap Tahun 2025 dan Tahun 2024	61
Tabel 27. Komposisi Piutang jangka Panjang Tahun 2025 dan Tahun 2024	64
Tabel 28. Komposisi Aset Lainnya Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	64
Tabel 29. Komposisi Kewajiban Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	66
Tabel 30. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	67
Tabel 31. Komposisi Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2025 dan Tahun 2024	75
Tabel 32. Komposisi Beban Operasional Statistik Tahun 2025 dan Tahun 2024	76

Tabel 33. Komposisi GOB-NOB Tahun 2025 dan Tahun 2024	77
Tabel 34. Komposisi Akuisisi Aset non Keuangan Neto Tahun 2025 dan Tahun 2024	78
Tabel 35. Komposisi Saldo Utang/Piutang Neto Tahun 2025 dan Tahun 2024	78
Tabel 36. Komposisi Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Tahun 2025 dan Tahun 2024	78
Tabel 37. Komposisi Kekayaan Bersih Tahun 2025 dan Tahun 2024	79
Tabel 38. Komposisi Aset non Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024	80
Tabel 39. Komposisi Aset Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024	81
Tabel 40. Komposisi Kewajiban Tahun 2025 dan Tahun 2024	82
Tabel 41. Komposisi Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	83
Tabel 42. Komposisi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	84
Tabel 43. Komposisi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	84
Tabel 44. Komposisi Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi Aset non Finansial Tahun 2025 dan Tahun 2024	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik A. Proporsi Pendapatan Konsolidasi Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan Periode Tahun 2025	3
Grafik B. Proporsi Aset dalam Neraca Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	5
Grafik C. Proporsi Aset dalam Neraca Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	8
Grafik 1. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	38
Grafik 2. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	38
Grafik 3. Komposisi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	39
Grafik 4. Komposisi Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	40
Grafik 5. Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	42
Grafik 6. Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 (diluar belanja transfer)	43
Grafik 7. Perbandingan Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 (sebelum eliminasi akun resiprokal)	46
Grafik 8. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2025	46
Grafik 9. Komposisi Beban Operasional Konsolidasian	50
Grafik 10. Komposisi Ekuitas Awal Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025	57
Grafik 11. Perbandingan Komposisi Aset Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	59
Grafik 12. Komposisi Aset Konsolidasian Tahun 2025	59
Grafik 13. Komposisi Aset Tetap Konsolidasian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	61
Grafik 14. Perbandingan Komposisi Kewajiban Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	66
Grafik 15. Komposisi Kewajiban Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024	66
Grafik 16. Cakupan Statistik Keuangan Sektor Publik Berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah	72
Grafik 17. Proporsi Komponen Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025	76
Grafik 18. Proporsi Komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025	76
Grafik 19. Proporsi Akuisisi Aset non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025	77
Grafik 20. Perbandingan Komposisi Aset Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024	80
Grafik 21. Perbandingan Komposisi Aset Non Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024	80
Grafik 22. Perbandingan Komposisi Aset Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024	81
Grafik 23. Perbandingan Komposisi Kewajiban Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024	82

RINGKASAN EKSEKUTIF



LKPK dan LSKP Tingkat Wilayah Periode Tahun 2025
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics / GFS*), maka dilakukan konsolidasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan. GFS disusun guna memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, evaluasi kegiatan pemerintahan, serta perbandingan lintas wilayah dan negara (*cross-country studies*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebutuhan konsolidasi LKPP dan LKPD diperkuat oleh hasil tinjauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan transparansi fiskal, yang menekankan pentingnya kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah serta penyediaan informasi fiskal yang akuntabel dan dapat diakses publik.

Keluaran dari Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW), dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW). Kedua laporan tersebut berfungsi sebagai instrumen manajerial dalam rangka peningkatan tata kelola sistem keuangan negara di wilayah Sulawesi Selatan. LSKP disusun melalui proses pemetaan (*mapping*) atas laporan keuangan konsolidasian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sumber data dalam penyusunan kedua laporan adalah data/informasi keuangan pemerintah yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Ringkasan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) Periode Tahun 2025

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) merupakan hasil konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam satu periode pelaporan. LKPK-TW memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang mencerminkan kondisi fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

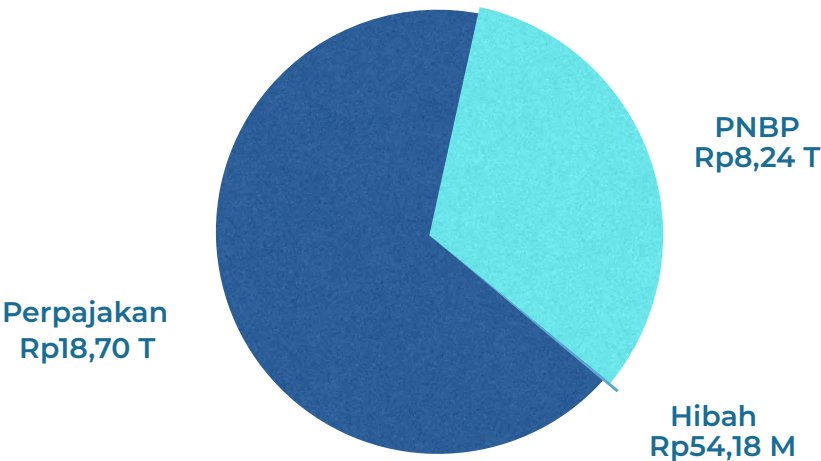
Laporan Realisasi Anggaran LKPK-TW

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian mencakup konsolidasian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, baik untuk LRA Pemerintah Pusat, maupun untuk LRA Pemerintah Daerah.

Pendapatan konsolidasian mengalami penurunan senilai Rp2,36 triliun, atau 8,06% dengan realisasi tahun 2025 tercatat Rp26,99 triliun dibandingkan Rp29,36 triliun pada tahun anggaran sebelumnya. Komponen pendapatan perpajakan konsolidasi tercatat sebesar Rp18,70 triliun,

berkontribusi 69,28% terhadap total pendapatan konsolidasian. Selanjutnya, pendapatan penerimaan bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp8,24 triliun, berkontribusi 30,52% terhadap total pendapatan konsolidasian. Memberikan kontribusi 0,20% terhadap total pendapatan konsolidasian adalah pendapatan hibah yang tercatat sebesar Rp54,18 miliar. Proporsi pendapatan konsolidasian tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik A. Proporsi Pendapatan Konsolidasi Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan Periode Tahun 2025



Realisasi belanja dan transfer konsolidasian pada tahun 2025 tercatat Rp65,30 triliun, mengalami penurunan senilai Rp4,90 triliun atau 6,99%, dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, Rp70,21 triliun.

Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp30,45 triliun atau 46,63% dari total belanja dan transfer konsolidasian, diikuti belanja barang dan jasa sebesar Rp21,05

triliun (32,24%), belanja modal sebesar Rp8,99 triliun (13,76%), dan belanja transfer sebesar Rp3,58 triliun (5,49%). Komponen utama lainnya berkontribusi total 1,88%, terdiri dari belanja hibah Rp974,33 miliar, belanja bantuan sosial Rp127,52 miliar, belanja pembayaran kewajiban utang Rp45,58 miliar, belanja lain-lain Rp51,97 miliar, dan belanja subsidi Rp28,20 miliar.

Selain itu tercatat Belanja Transfer

Konsolidasian sebesar Rp3,58 triliun, mengalami penurunan Rp246,32 miliar atau 6,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Konsolidasian pada tahun anggaran sebelumnya.

Dari realisasi Pendapatan Konsolidasian dan Belanja dan Transfer Konsolidasian, didapati Defisit Anggaran sebesar Rp38,30 triliun pada tahun 2025. Sementara itu, Pembiayaan Neto pada tahun 2025

tercatat sebesar Rp749,20 miliar atau turun sebesar 37,06% dari Rp1,19 triliun pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, pada tahun 2025, terdapat SiKPA sebesar Rp37,55 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 disajikan Tabel sebagai berikut.

Tabel A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan	26.999.399.893.557	29.366.084.668.810	-8,06%
Belanja dan Transfer	65.303.319.417.609	70.208.323.136.033	-6,99%
Surplus / (Defisit)	-38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%
Pembiayaan Neto	749.205.766.083	1.190.323.737.584	-37,06%
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-37.554.713.757.969	-39.651.914.729.639	5,29%

Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah memberikan ringkasan sumber daya ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan ekuitas Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Dari kegiatan operasional, Pendapatan Operasional Pemerintah Konsolidasian pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp30,68 triliun mengalami penurunan sebesar 7,32% atau Rp2,42 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, Beban Operasional pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp69,39 triliun, atau

mengalami penurunan sebesar 5,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp73,33 triliun. Dari pendapatan dan beban operasional tersebut, didapatkan defisit kegiatan operasional sebesar Rp38,71 triliun.

Untuk kegiatan non operasional, tercatat defisit dengan nilai sebesar Rp299,79 miliar. Dengan demikian jumlah defisit pada Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp39,03 triliun. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel B. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan Operasional	30.678.321.199.376	33.101.855.259.525	-7,32%
Beban Operasional	69.388.408.647.613	73.333.201.368.646	-5,38%
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional	-38.710.087.448.237	-40.231.346.109.121	3,78%
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan non Operasional	-299.792.625.690	-169.633.975.369	-76,73%
Pos Luar Biasa	-22.879.899.866	391.456.586.011	-105,84%
Surplus (Defisit) LO	-39.032.759.973.793	-40.009.523.498.479	2,44%

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian memberikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan ekuitas pemerintah konsolidasian pada periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebesar Rp357,20 triliun. Peningkatan Ekuitas pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,78 triliun, atau 0,78% yang berasal dari Defisit Laporan Operasional sebesar Rp39,03 triliun, jumlah koreksi - koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar - Rp1,24 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp42,40 triliun. Dengan demikian, ekuitas akhir pemerintah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp359,58 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Tahun 2025 dan 204 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel C. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)

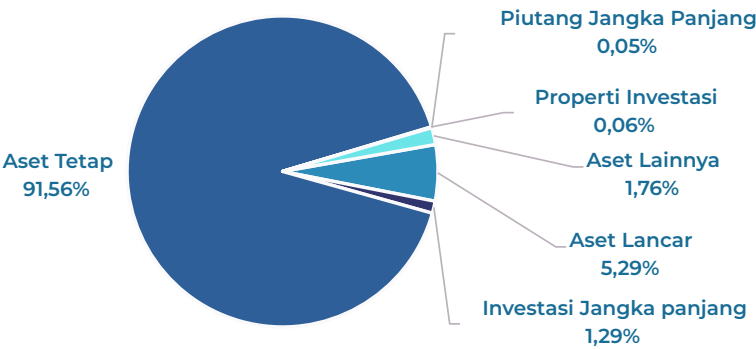
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Ekuitas Awal	356.992.870.063.848	352.023.730.911.924	1,47%
Kenaikan / Penurunan Ekuitas	2.566.077.403.127	6.380.158.836.904	-56,46%
Defisit - LO	-38.379.531.336.821	-40.009.523.498.479	2,44%
Koreksi yg Lgsg +/- Ekuitas	-2.103.871.581.464	81.418.341.603	-1.621%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	43.049.480.321.412	46.308.263.993.780	-8,45%
Ekuitas Akhir	359.558.947.466.976	357.205.408.400.085	0,78%

Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah menyajikan informasi yang komprehensif tentang posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025, meliputi Aset, Kewajiban, serta Ekuitas.

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah Aset Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp370,12 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 0,56% dari posisi per 31 Desember 2024 yang tercatat senilai Rp368,08 triliun. Komposisi Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp19,56 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp4,76 triliun, Aset Tetap sebesar Rp338,88 triliun, dan Properti Investasi sebesar Rp230,69 miliar, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp172,96 miliar dan Aset Lainnya sebesar Rp6,50 triliun. Proporsi aset dalam neraca konsolidasian tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 tersebut disajikan pada Grafik berikut.

Grafik B. Proporsi Aset dalam Neraca Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Jumlah kewajiban pemerintah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp10,56 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,86% dari posisi per 31 Desember 2024 yang tercatat senilai Rp10,87 triliun. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 tersebut berasal dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp4,18 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp6,37 triliun.

Dengan demikian, jumlah Ekuitas Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp359,56 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 0,66% dibandingkan tahun 2024 yang memiliki nilai Rp357,20 triliun.

Ringkasan Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel D. Ringkasan Neraca Pemerintah Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Aset Konsolidasian	370.119.783.990.077	368.076.682.019.588	0,56%
Aset Lancar	19.561.256.343.737	17.240.476.332.101	13,46%
Investasi Jangka Panjang	4.766.089.585.223	4.595.972.200.024	3,70%
Aset Tetap	338.887.820.994.270	339.446.209.208.587	-0,16%
Properti Investasi	230.693.560.525	232.597.001.161	-0,82%
Piutang Jangka Panjang	172.956.936.636	115.098.270.054	50,27%
Aset Lainnya	6.500.966.569.685	6.446.329.007.661	0,85%
Kewajiban Konsolidasian	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Kewajiban Jangka Pendek	4.184.028.018.246	3.856.476.211.765	8,49%
Kewajiban Jangka Panjang	6.376.808.504.855	7.014.797.407.738	-9,09%
Ekuitas Konsolidasian	359.558.947.466.976	357.205.408.400.085	0,66%

Ringkasan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW)

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW) merupakan pelaporan statistik yang menyajikan data ekonomi dan keuangan pemerintah secara komprehensif, sesuai dengan metodologi internasional. Penyusunan LSKPU-TW mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah melalui tahapan estimasi, analisis, penyesuaian, serta reklasifikasi atas laporan keuangan konsolidasian guna memberikan gambaran aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dalam suatu periode tertentu.

Laporan Operasional Statistik Keuangan Tingkat Wilayah

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum menyajikan data transaksi yang dilakukan oleh unit-unit sektor pemerintah umum selama periode pelaporan dengan basis akrual. Laporan ini meliputi unsur-unsur Pendapatan, Beban, Transaksi Aset Non Keuangan Neto, serta Transaksi Aset Keuangan Neto.

Kinerja Pendapatan (*revenue*) Statistik Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp26,71 triliun. Pendapatan tertinggi berasal dari *taxes* (pajak) yang tercatat sebesar Rp18,69 triliun atau 69,99% dari total *revenue*, diikuti oleh *other revenue* (pendapatan lain) yang tercatat sebesar Rp7,97 triliun, dan terakhir *grants* (hibah) dengan capaian Rp40,29 miliar. Sementara itu beban (*expense*) statistik Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp53,28 triliun.

Dari Pendapatan Statistik dan Beban Statistik tersebut dihasilkan Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*) sebesar minus Rp26,57 triliun dan Saldo Operasi Neto (*Net Operating Balance*) dengan nilai yang sama. Saldo Operasi Neto tersebut, setelah dikurangi akuisisi aset non keuangan neto sebesar Rp11,73 triliun, menghasilkan Peminjaman Neto (*net lending/borrowing*) sebesar minus Rp38,30 triliun yang setara dengan akuisisi neto aset keuangan sebesar minus Rp38,65 triliun dikurangi pengakuan neto kewajiban sebesar minus Rp349,70 miliar. *Net Operating Balance* mengalami pengurangan sebesar Rp768,81 miliar atau 2,80% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat senilai Rp27,33 triliun.

Tabel E. Ringkasan Laporan Operasional Statistik Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Revenue	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%
Expense	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%
Gross Operating Balance	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
Net Operating Balance	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%

Neraca Statistik Keuangan Tingkat Wilayah

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum memberikan gambaran mengenai posisi atau saldo Aset, Kewajiban, serta Kekayaan Bersih pemerintah umum pada awal dan akhir periode akuntansi. Laporan ini juga mencerminkan dinamika arus kas serta perubahan posisi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan, dengan memperhatikan seluruh komponen utama

seperti penerimaan, pengeluaran, dan hasil operasional. Melalui pemetaan yang komprehensif, statistik ini memberikan acuan bagi analisis kinerja fiskal daerah, transparansi penggunaan anggaran, serta identifikasi potensi risiko dan peluang perbaikan tata kelola di tingkat wilayah. Neraca Statistik Pemerintah Umum Tahun 2025 menunjukkan posisi *Net Worth*

sebesar Rp359,56 triliun, nilai tersebut tumbuh sebesar 0,66% dari tahun 2024 yang tercatat Rp357,20 triliun.

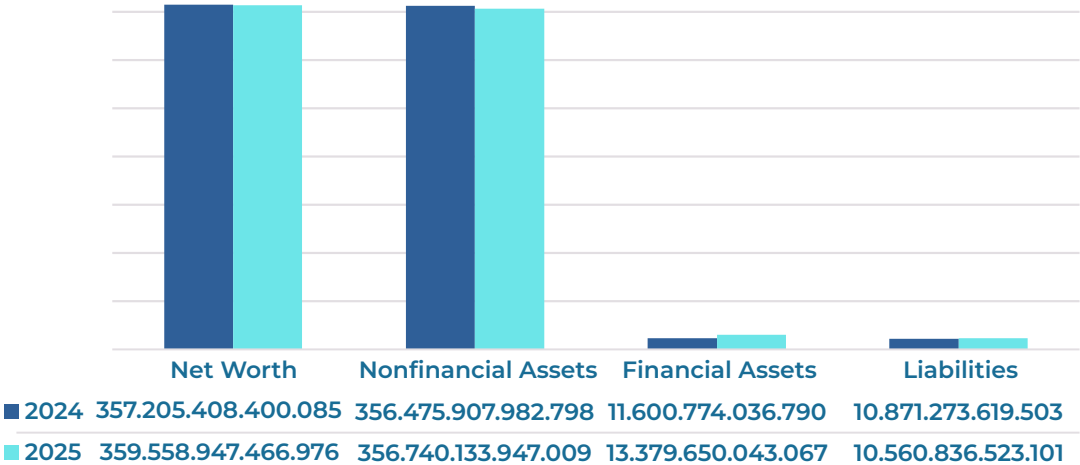
Aset non keuangan (*non-financial assets*) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp356,74 triliun yang terdiri dari aset tetap (*Fixed Assets*) sebesar Rp133,37 triliun, persediaan (*inventories*) sebesar Rp11,94 triliun, dan aset non produksi (*non produced assets*) sebesar Rp211,42 triliun. Sementara itu, aset keuangan (*financial assets*) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp13,38 triliun yang terdiri dari *Currency and Deposits* sebesar Rp5,33 triliun, *debt securities* sebesar Rp15,24 miliar, *equity and investment fund* sebesar Rp4,76 triliun, dan *other account receivable* sebesar Rp3,27 triliun. Seluruh aset keuangan pada neraca statistik

keuangan pemerintah tingkat wilayah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 berasal dari debitur dalam negeri (*domestic debtors*).

Kewajiban (*liabilities*) Statistik per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp10,56 triliun yang terdiri dari *Loans* sebesar Rp1,31 triliun dan *Other Accounts Payable* sebesar Rp9,25 triliun. Seluruh kewajiban pada neraca statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 berasal dari kreditur dalam negeri (*domestic creditors*).

Ringkasan neraca konsolidasian statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik C. Proporsi Aset dalam Neraca Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Laporan Sumber dan Penggunaan Kas

Laporan sumber dan penggunaan kas memberikan gambaran mengenai jumlah kas yang diterima atau digunakan oleh unit pemerintah umum sepanjang tahun berjalan melalui kegiatan operasional, transaksi aset non-keuangan, serta transaksi aset dan kewajiban keuangan (tidak termasuk uang tunai dalam bentuk mata uang dan deposito).

Berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sampai dengan 31

Desember 2025 diketahui arus kas neto dari aktivitas operasi (*net cash inflow from operating activities*) tercatat sebesar -Rp26,57 triliun yang berasal dari arus kas masuk dari aktivitas operasi (*cash receipts from operating activities*) sebesar Rp26,71 triliun dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi (*cash payments for operating activities*) sebesar Rp53,28 triliun.

Sementara itu, arus kas dari investasi pada aset non finansial (*cash flows from transactions in nonfinancial assets / NFAS*)

tercatat sebesar Rp11,73 triliun yang berasal dari perolehan aset non finansial (*purchases of nonfinancial assets*) sebesar Rp14,02 triliun dikurangi penjualan aset non finansial (*sales of nonfinancial assets*) sebesar Rp2,29 triliun.

Berdasarkan transaksi yang terjadi pada aset finansial dan non finansial, didapati defisit kas (*cash deficit*) sebesar Rp38,30 triliun.

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan (*net cash flows from financing activities*) tercatat sebesar Rp426,47 miliar, yang berasal dari akuisisi neto aset keuangan selain kas sebesar Rp76,77 miliar dikurangi pengakuan neto kewajiban (*net incurrence of liabilities*) sebesar minus Rp349,70 miliar..

Ringkasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel F. Ringkasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
<i>Cash Flows from Operating Activities</i>			
<i>Cash receipts from operating activities</i>	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%
<i>Cash payments for operating activities</i>	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%
<i>Net Cash Inflow from Operating Activities</i>	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
<i>Cash Flow from Transactions in Non-Financial Assets</i>			
<i>Purchases of nonfinancial assets</i>	14.020.173.111.706	16.062.464.152.217	-12,71%
<i>Sales of nonfinancial assets</i>	2.288.930.002.691	2.558.712.474.790	-10,54%
<i>Net Cash Outflow from Investments in Nonfinancial Assets</i>	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%
<i>Cash Surplus/Deficit</i>	- 38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%
<i>Cash Flow from Transactions in Financial Assets and Liabilities (Financing)</i>			
<i>Net Acquisition of Financial Assets Other Than Cash</i>	76.769.280.506	27.931.373.129	174,85%
<i>Net Incurrence of Liabilities</i>	- 349.696.400.058	-434.385.078.700	19,50%
<i>Net Cash Inflow from Financing Activities</i>	426.465.680.564	462.316.451.829	-7,75%
<i>Net Change in the Stock of Cash</i>	- 38.730.385.204.616	- 41.304.554.919.052	6,23%

FACE LKPK DAN LSKP



Pantai Tanjung Bira, di Kabupaten Bulukumba

LKPK dan LSKP Tingkat Wilayah Periode Tahun 2025
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI	26.999.399.893.557	29.366.084.668.810	-8,06%
Pendapatan Perpajakan konsolidasi	18.705.293.325.969	21.605.150.488.987	-13,42%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	18.420.409.247.969	21.218.190.433.987	-13,19%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	284.884.078.000	386.960.055.000	-26,38%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.239.921.516.895	7.489.985.770.926	10,01%
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	416.233.660.762	389.319.600.691	6,91%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.416.973.017.059	2.621.134.809.625	68,51%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	-	208.711.381.960	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	-	90.651.640.000	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	26.833.963.650	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	13.205.889.750	-	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	3.366.674.985.675	4.180.168.338.650	-19,46%
Pendapatan hibah	54.185.050.693	270.948.408.897	-80,00%
Pendapatan hibah dalam negeri	54.185.050.693	270.948.408.897	-80,00%
Pendapatan hibah luar negeri	-	-	-
B. Belanja	65.303.319.417.609	70.208.323.136.033	-6,99%
Belanja pegawai	30.454.074.177.543	28.372.941.927.615	7,33%
Belanja gaji dan tunjangan	27.806.397.801.307	26.030.562.040.624	6,82%
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transit	2.326.173.161.319	1.993.681.722.469	16,68%
Belanja kontribusi sosial	321.503.214.916	348.698.164.522	-7,80%
Belanja barang dan jasa	21.051.436.109.419	23.829.198.279.204	-11,66%
Belanja barang	4.824.952.725.074	7.225.829.698.849	-33,23%
Belanja Jasa	4.817.474.424.266	4.960.543.868.200	-2,88%
Belanja Pemeliharaan	1.284.821.329.997	1.405.624.977.788	-8,59%
Belanja Perjalanan Dinas	1.481.773.812.917	2.860.407.218.897	-48,20%
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	2.274.780.579.175	2.180.922.646.835	4,30%
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	4.924.904.124.811	3.961.243.128.085	24,33%
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	1.442.729.113.180	1.234.626.740.550	16,86%
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden	-	-	-
Belanja Modal	8.987.534.637.607	11.586.464.705.116	-22,43%
Belanja Modal Tanah	246.119.223.858	40.780.429.189	503,52%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.069.356.777.932	2.377.210.822.545	-12,95%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.524.651.941.023	3.264.033.839.028	-22,65%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.681.664.019.995	5.232.613.967.955	-29,64%
Belanja Modal Lainnya	212.506.012.283	209.977.027.578	1,20%
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	253.236.662.516	461.848.618.821	-45,17%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Belanja Pembayaran Bunga Utang	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	-	-	-
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	-	-	-
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-
Belanja Denda	-	-	-
Belanja Subsidi	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	-	-	-
Belanja Hibah	974.333.272.548	2.373.306.786.096	-58,95%
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	-	-	-
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	-	-
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	159.694.873.324	952.581.535.314	-83,24%
Belanja Hibah Lainnya	814.638.399.224	1.420.725.250.782	-42,66%

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Belanja Bantuan Sosial	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	16.744.339.268	13.838.010.647	21,00%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	84.840.050.000	80.503.150.000	5,39%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	25.939.699.870	23.740.269.843	9,26%
Belanja Lain-lain	51.967.081.549	35.424.119.740	46,70%
Belanja Lain-lain	51.967.081.549	35.424.119.740	46,70%
C. BELANJA TRANSFER	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	129.219.519.332	89.376.519.986	44,58%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	118.859.959.615	81.292.125.095	46,21%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	10.359.559.718	8.084.394.891	28,14%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.453.448.745.308	3.739.609.830.438	-7,65%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	918.787.524.466	288.841.196.563	218,09%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.313.046.320.146	3.450.768.633.875	-32,97%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	221.614.900.696	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	-	-	-
Dana Bagi Hasil	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-
Dana Bagi Hasil Cukai	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Dana Desa	-	-	-
Dana Desa	-	-	-
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	-38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%
E. Pembiayaan	749.205.766.083	1.190.323.737.584	-37,06%
Penerimaan Pembiayaan	1.207.671.446.647	1.653.683.290.482	-26,97%
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.207.671.446.647	1.653.683.290.482	-26,97%
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	-	-	-
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	-	-	-
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	-	-	-
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	-	-	-
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	458.465.680.564	463.359.552.898	-1,06%
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	418.691.680.564	437.359.552.898	-4,27%
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	-	-	-
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	-	-	-
Penyertaan Modal Negara	39.774.000.000	26.000.000.000	52,98%
RDI/RPD	-	-	-
Dukungan Infrastruktur	-	-	-
Pengeluaran Investasi Pemerintah	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
Suspense Pembiayaan	-	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	-37.554.713.757.969	-39.651.914.729.639	5,29%

Laporan Operasional Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
KEGIATAN OPERASIONAL	-42.643.441.430.477	-44.362.682.514.104	3,88%
Pendapatan Operasional-LO	30.678.321.199.376	33.101.855.259.525	-7,32%
Pendapatan perpajakan-LO	19.411.850.290.367	22.303.741.429.503	-12,97%
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	19.127.635.760.367	21.918.437.581.503	-12,73%
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	284.214.530.000	385.303.848.000	-26,24%
Pendapatan bukan pajak-LO	4.976.321.977.159	3.117.798.666.983	59,61%
Pendapatan sumber daya alam-LO	-	-	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	489.666.676.358	416.829.589.273	17,47%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	4.486.655.300.800	2.700.969.077.710	66,11%
Pendapatan Transfer - LO	1.015.413.783.532	1.398.376.226.611	-27,39%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	688.255.758.365	1.185.823.308.958	-41,96%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	210.154.380.000	633.997.160.000	-66,85%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	386.940.558.710	-	-
Bantuan Keuangan - LO	267.448.531.296	149.153.201.653	79,31%
Pendapatan BLU-LO	3.307.578.529.562	4.006.979.534.058	-17,45%
Pendapatan Jasa BLU - LO	3.161.753.622.047	3.883.664.446.663	-18,59%
Pendapatan Hibah BLU - LO	26.751.931.440	3.585.190.372	646,18%
Pendapatan Lainnya BLU - LO	119.072.976.075	119.729.897.023	-0,55%
Pendapatan hibah-LO	1.653.851.048.066	2.270.296.211.138	-27,15%
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	1.653.851.048.066	2.270.296.211.138	-27,15%
Pendapatan lainnya-LO	313.305.570.691	4.663.191.232	6.618,69%
Pendapatan lainnya Pemda	296.568.172.601	-	-
Pendapatan Penyesuaian Akruai	16.737.398.090	4.663.191.232	258,93%
Beban Operasional	69.388.408.647.613	73.333.201.368.646	-5,38%
Beban pegawai	31.507.081.696.985	29.436.384.947.496	7,03%
Beban gaji dan tunjangan	29.185.001.446.551	27.419.806.821.899	6,44%
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transit	2.322.080.250.434	2.016.578.125.597	15,15%
Beban kontribusi sosial	-	-	-
Beban persediaan	1.743.129.003.821	2.133.074.573.534	-18,28%
Beban barang dan jasa	19.104.546.243.428	22.570.793.830.721	-15,36%
Beban barang	7.841.530.388.990	9.823.450.467.039	-20,18%
Beban jasa	5.544.774.534.205	5.780.842.321.587	-4,08%
Beban pemeliharaan	1.773.541.503.153	1.655.120.910.110	7,15%
Beban perjalanan dinas	1.605.165.360.006	3.009.823.594.415	-46,67%
Beban BLU/BLUD	722.258.011.702	749.115.615.077	-3,59%
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	1.617.276.445.373	1.552.440.922.493	4,18%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden	-	-	-
Beban bunga	44.466.756.915	58.016.818.159	-23,36%
Beban Pembayaran Bunga Utang	44.466.756.915	58.016.818.159	-23,36%
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	-	-	-
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	-	-	-
Beban Denda	-	-	-
Beban subsidi	29.748.499.073	6.462.995.127	360,29%
Beban subsidi kepada perusahaan publik	29.748.499.073	6.462.995.127	360,29%
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	-	-	-
Beban Subsidi - Estimasi	-	-	-
Beban hibah	965.496.614.650	2.254.425.547.273	-57,17%
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	-	-	-
Beban hibah kepada organisasi internasional	-	-	-
Beban hibah kepada pemerintah daerah	283.749.926.506	811.202.045.383	-65,02%
Beban Hibah Lainnya	681.746.688.145	1.443.223.501.890	-52,76%

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban bantuan sosial	133.273.135.986	131.054.845.223	1,69%
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	22.841.772.616	24.985.143.330	-8,58%
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	84.840.050.000	80.503.150.000	5,39%
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	25.591.313.370	25.566.551.893	0,10%
Beban lain-lain/beban tidak terduga	15835095485	31520696793	-49,76%
Beban Lain-lain	15835095485	31520696793	-49,76%
Beban akrual lainnya	11.911.477.619.030	12.580.130.709.337	-5,32%
Beban Penyusutan Aset Tetap	11.237.284.319.110	11.922.201.663.942	-5,74%
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	152.481.832.788	174.398.663.994	-12,57%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	521.711.467.133	483.530.381.401	7,90%
BEBAN TRANSFER	3.933.353.982.240	4.131.336.404.983	-4,79%
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	1.818.644.491.884	2.079.607.659.137	-12,55%
Dana Bagi Hasil	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-
Dana Bagi Hasil Cukai	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Dana Desa	1.818.644.491.884	2.079.607.659.137	-12,55%
Dana Desa	1.818.644.491.884	2.079.607.659.137	-12,55%
Beban Transfer Lain-lain	-	-	-
Beban Suspense Transfer	-	-	-
BEBAN TRANSFER PEMDA	2.114.709.490.356	2.051.728.745.846	3,07%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	159.646.506.606	86.188.765.852	85,23%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	135.955.362.098	10.389.312.039	1208,61%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	347.046.730.688	240.136.939	144,420%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.472.060.890.964	1.954.910.531.016	-24,70%
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-38.710.087.448.237	-40.231.346.109.121	3,78%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	-	3494991	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	-280.587.404.722	-134.128.758.365	-109,19%
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	109.729.708.233	112.080.479.162	-2,10%
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	-68133312909	-80877723075	15,76%
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-22908490257	-	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	-37893126035	-66711468082	43,20%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	-299.792.625.690	-169.633.975.369	-76,73%
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	-39.009.880.073.927	-40.400.980.084.490	3,44%
POS LUAR BIASA	-22879899866	391.456.586.011	-105,84%
PENDAPATAN LUAR BIASA	5471658565	14.319.994.324	-98,68%
BEBAN LUAR BIASA	-28351558431	-22863408313	-24,00%
SURPLUS (DEFISIT) LO	-39.032.759.973.793	-40.009.523.498.479	2,44%

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
EKUITAS AWAL	357.205.408.400.085	352.023.730.911.924	1%
Ekuitas Awal pemerintah Pusat	235.681.387.708.041	231.819.949.843.268	2%
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	121.459.291.020.860	120.203.781.068.656	1%
Penyesuaian Ekuitas Awal			
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	357.205.408.400.085	232.057.025.464.076	54%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	-39.032.759.973.793	-40.009.523.498.479	2%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi SILPA			
Koreksi Nilai Persediaan	773.446.780	-121.306.879.321	101%
Selisih Revaluasi Aset			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-2.730.879.456.506	314.662.076.966	-968%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	2.317.421.298.419	76.531.776.404	2928%
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker			
Koreksi Lain-lain	-826.356.584.995	-188.468.632.446	-338%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-1.239.041.296.302	81.418.341.603	-1622%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42.396.251.684.440	46.308.263.993.780	-8%
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI			
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS			
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2.777.679.051.317	6.380.158.836.904	-56%
EKUITAS AKHIR	359.983.087.451.402	357.205.408.400.085	1%

**Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Aset	370.119.783.990.077	368.076.682.019.588	0,56%
Aset lancar	19.561.256.343.737	17.240.476.332.101	13,46%
Kas dan setara kas	4.669.644.806.736	3.613.266.690.213	29,24%
Uang muka rekening BUN-khusus pusat	-	-	-
Investasi jangka pendek	95.500.000.000	75.500.000.000	26,49%
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	62.445.434.697	118.760.853.014	-47,42%
Piutang	2.789.710.926.173	2.429.709.574.048	14,82%
Piutang Perpajakan	1.939.506.542.826	1.620.350.557.466	19,70%
Piutang Bukan Pajak	3.021.690.409.816	2.676.912.047.585	12,88%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	23.975.783.858	9.079.865.728	164,05%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	28.445.000	28.445.000	0,00%
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	-	-	-
Piutang lain-lain	243.936.651.434	231.514.560.968	5,37%
Penyisihan piutang tak tertagih	-2.439.426.906.762	-2.108.175.902.699	-15,71%
Persediaan	11.943.955.176.131	11.003.239.214.826	8,55%
Piutang PFK	-	-	-
Investasi jangka panjang	4.766.089.585.223	4.595.972.200.024	3,70%
Investasi jangka panjang non permanen	5.242.733.097	5.401.144.409	-2,93%
Investasi jangka panjang permanen	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-	-	-
Aset tetap	338.887.820.994.270	339.446.209.208.587	-0,16%
Tanah	211.344.110.589.031	210.248.806.811.208	0,52%
Peralatan dan mesin	64.197.383.678.014	60.838.163.960.093	5,52%
Gedung dan bangunan	60.512.012.605.308	57.454.233.214.818	5,32%
Jalan, irigasi, dan jaringan	126.030.971.963.983	122.497.050.955.142	2,88%
Aset tetap lainnya	3.261.878.693.809	4.343.637.685.861	-24,90%
Konstruksi dalam pengerjaan	7.923.169.191.186	7.710.411.284.126	2,76%
Konsesi Jasa	6.384.888.583.525	6.532.578.329.525	-2,26%
Akumulasi penyusutan	-140.766.594.310.585	-130.178.673.032.186	-8,13%
Aset Tetap Yang Belum Diregister	-	-	-
Properti Investasi	230.693.560.525	232.597.001.161	-0,82%
Dana cadangan	-	-	-
Dana cadangan	-	-	-
Piutang jangka panjang	172.956.936.636	115.098.270.054	50,27%
Tagihan piutang penjualan angsuran	39.257.865.581	40.011.745.045	-1,88%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	135.324.341.055	76.711.295.069	76,41%
Piutang jangka panjang kredit pemerintah	-	-	-
Piutang jangka panjang lainnya	-	-	-
Penyisihan piutang jangka panjang	-1.625.270.000	-1.624.770.060	-0,03%
Aset lainnya	6.500.966.569.685	6.446.329.007.661	0,85%
Kemitraan dengan pihak ketiga	250.240.838.543	247.521.872.143	1,10%
Aset tidak berwujud	1.762.415.839.314	1.398.896.008.132	25,99%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	573.061.515.059	404.944.577.294	41,52%
Dana Penjaminan	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-
Aset lain-lain	8.296.459.422.605	6.759.726.468.966	22,73%
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya	-	-	-
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	-	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-4.381.211.045.837	-2.364.759.918.874	-85,27%
Kewajiban / Utang	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Kewajiban jangka pendek	4.184.028.018.246	3.856.476.211.765	8,49%
Utang perhitungan pihak ketiga	13.338.425.066	3.474.833.812	283,86%
Utang kepada pihak ketiga	2.730.708.837.068	3.123.025.728.163	-12,56%
Utang bunga	2.379.756.412	65.843.529.903	-96,39%
Utang subsidi	-	-	-
Utang Transfer	59.038.778.540	-	-
Bagian lancar utang jangka panjang	429.751.783.743	380.543.043.924	12,93%
Utang surat perbendaharaan negara	-	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	18.000.000.000	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	76.105.707.517	69.986.473.865	8,74%
Pendapatan Diterima Dimuka	774.412.709.001	88.925.710.034	770,85%
Uang Muka	2.3078.000	7519.054	206,93%
Utang Jangka Pendek Lainnya	80.268.942.900	124.669.373.010	-35,61%
Kewajiban jangka panjang	6.376.808.504.855	7.014.797.407.738	-9,09%
Utang jangka panjang dalam negeri	881.453.969.525	1.269.037.813.293	-30,54%
Utang jangka panjang luar negeri	-	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	5.495.354.535.330	5.745.759.594.445	-4,36%
Ekuitas	359.558.947.466.976	357.205.408.400.085	0,66%

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
REVENUE	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%
Taxes	18.692.525.690.612	21.589.867.976.422	-13,42%
Social contributions			
Grants	40.289.984.954	517.386.891.378	-92,21%
Other revenue	7.975.521.447.260	7.211.313.030.325	10,60%
EXPENSE	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%
Compensation of employees	29.744.821.791.039	27.951.993.319.603	6,41%
Use of goods and services	18.284.209.090.972	21.612.813.718.658	-15,40%
Consumption of fixed capital			
Interests	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Subsidies	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Grants	3.520.748.237.268	4.781.567.885.738	-26,37%
Social benefits	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Other expense	1.529.928.544.280	2.128.678.796.084	-28,13%
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
Net operating balance (1-2+NOBz)	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
Net/gross investment in nonfinancial assets	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%
Fixed Assets	8.704.737.373.510	11.519.678.407.346	-24,44%
Weapon systems			
Inventories	2.791.671.485.877	1.939.146.590.841	43,96%
Nonproduced assets	234.834.249.627	44.926.679.240	422,71%
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	- 38.303.919.524.052	- 40.842.238.467.223	6,21%
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):			
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	- 38.653.615.924.110	- 41.276.623.545.923	6,35%
Domestic debtors	- 38.653.615.924.110	- 41.276.623.545.923	6,35%
External debtors			
Net incurrence of liabilities [331+332]	- 349.696.400.058	- 434.385.078.700	19,50%
Domestic creditors	- 349.696.400.058	- 434.385.078.700	19,50%
External creditors			

Neraca Konsolidasian Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
NET WORTH	359.558.947.466.976	357.205.408.400.085	0,66%
Nonfinancial assets	356.740.133.947.009	356.475.907.982.798	0,07%
Fixed assets	133.374.844.994.984	135.223.705.950.764	-1,37%
Buildings and structures	118.581.320.651.381	114.773.545.685.549	3,32%
Dwellings	17.846.660.374.264	17.925.726.879.965	-0,44%
Buildings other than dwellings	45.297.159.996.863	40.506.455.302.939	11,83%
Other structures	55.437.500.280.254	56.341.363.502.645	-1,60%
Land improvements			
Machinery and equipment	9.935.017.168.888	14.332.441.219.664	-30,68%
Transport equipment	- 1.445.751.402.135	3.155.218.563.354	-145,82%
Machinery and equipment other than transport equipment	11.380.768.571.022	11.177.222.656.310	1,82%
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	3.352.225.460.620	4.334.718.709.485	-22,67%
Machinery and equipment not elsewhere classified	8.028.543.110.402	6.842.503.946.825	17,33%
Other fixed assets	4.858.507.174.715	6.117.719.045.551	-20,58%
Cultivated biological resources	26.485.310.510	26.464.527.991	0,08%
Animal resources yielding repeat products	10.159.289.012	10.169.733.784	-0,10%
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	16.326.021.498	16.294.794.207	0,19%
Intellectual property products	4.832.021.864.205	6.091.254.517.560	-20,67%
Research and development	556.109.562.253	303.403.475.152	83,29%
Mineral exploration and evaluation			
Computer software and databases	1.351.519.518.630	1.340.096.655.220	0,85%
Entertainment, literary, and artistic originals	1.126.934.310.870	1.116.283.175.560	0,95%
Other intellectual property products	1.797.458.472.452	3.331.471.211.628	-46,05%
Weapon systems			
Inventories	11.943.955.176.131	11.003.239.214.826	8,55%
Strategic stocks	12.005.379.160	12.034.572.960	-0,24%
Other inventories	11.931.949.796.971	10.991.204.641.866	8,56%
Materials and supplies	6.304.753.208.548	6.179.411.011.641	2,03%
Work in progresss			
Finished goods			
Goods for resale	5.627.196.588.423	4.811.793.630.225	16,95%
Military inventories			
Valuables			
Nonproduced assets	211.421.333.775.894	210.248.962.817.208	0,56%
Land	211.344.696.995.031	210.248.962.817.208	0,52%
Mineral and energy resources			
Other naturally occurring assets			
Noncultivated biological resources			
Water resources			
Other natural resources			
Radio spectrum			
Natural resources not elsewhere classified			
Intangible nonproduced assets	76.636.780.863		
Contracts, leases, and licenses			
Marketable operating leases			
Permits to use natural resources			
Permits to undertake specific activities			
Goodwill and marketing assets	76.636.780.863		
Financial assets [621+622]	13.379.650.043.067	11.600.774.036.790	15,33%
Monetary gold and SDRs			
Currency and deposits [6212+6222]	5.328.206.321.795	4.093.711.267.507	30,16%
Debt securities [6213+6223]	15.242.733.097	5.401.144.409	182,21%
Loans [6216+6226]			
Equity and investment fund shares [6215+6225]	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Equity [62151+62251]	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Investment fund shares [62152+62252]			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]			
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]			
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]			
Pension entitlements [62163 + 62263]			
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]			
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]			
Financial derivatives [62171 + 62271]			
Employee stock options [62172 + 62272]			
Other accounts receivable [6218+6228]	3.275.354.136.050	2.911.090.569.259	12,51%
Trade credit and advances [62181 + 62281]	72.017.555.500	66.325.684.873	8,58%
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	3.203.336.580.550	2.844.764.884.386	12,60%

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Domestic debtors	13.379.650.043.067	11.600.774.036.790	15,33%
Monetary gold and SDRs			
Currency and deposits	5.328.206.321.795	4.093.711.267.507	30,16%
Debt securities	15.242.733.097	5.401.144.409	182,21%
Loans			
Equity and investment fund shares	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Equity	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Investment fund shares			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Life insurance and annuities entitlements			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable	3.275.354.136.050	2.911.090.569.259	12,51%
Trade credit and advances	72.017.555.500	66.325.684.873	8,58%
Miscellaneous other accounts receivable	3.203.336.580.550	2.844.764.884.386	12,60%
External creditors			
Monetary gold and SDRs			
Currency and deposits			
Debt securities			
Loans			
Equity and investment fund shares			
Equity			
Investment fund shares			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Life insurance and annuities entitlements			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable			
Trade credit and advances			
Miscellaneous other accounts receivable			
Liabilities [631+632]	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]			
Currency and deposits [6212+6222]			
Debt securities [6213+6223]			
Loans [6216+6226]	1.311.205.753.269	1.649.580.857.217	-20,51%
Equity and investment fund shares [6215+6225]			
Equity [62151+62251]			
Investment fund shares [62152+62252]			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]			
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]			
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]			
Pension entitlements [62163 + 62263]			
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]			
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]			
Financial derivatives [62171 + 62271]			
Employee stock options [62172 + 62272]			
Other accounts payable [6218+6228]	9.249.630.769.832	9.221.692.762.286	0,30%
Trade credit and advances [62181 + 62281]	380.075.079.324	293.880.962.482	29,33%
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	8.869.555.690.509	8.927.811.799.804	-0,65%
Domestic creditors	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Currency and deposits			
Debt securities			
Loans	1.311.205.753.269	1.649.580.857.217	-20,51%
Equity and investment fund shares			
Equity			
Investment fund shares			

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Life insurance and annuities entitlements			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable	9.249.630.769.832	9.221.692.762.286	0,30%
Trade credit and advances	380.075.079.324	293.880.962.482	29,33%
Miscellaneous other accounts payable	8.869.555.690.509	8.927.811.799.804	-0,65%
External creditors			
Special Drawing Rights (SDRs)			
Currency and deposits			
Debt securities			
Loans			
Equity and investment fund shares			
Equity			
Investment fund shares			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable			
Trade credit and advances			
Miscellaneous other accounts receivable			

**Laporan Sumber Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Cash receipts from operating activities	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%
Taxes	18.692.525.690.612	21.589.867.976.422	-13,42%
Social Contribution			
Grants	40.289.984.954	517.386.891.378	-92,21%
Other Receipts	7.975.521.447.260	7.211.313.030.325	10,60%
Cash payments for operating activities	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%
Compensation of Employees	29.744.821.791.039	27.951.993.319.603	6,41%
Purchase of Goods and Service	18.284.209.090.972	21.612.813.718.658	-15,40%
Interest	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Subsidies	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Grants	3.520.748.237.268	4.781.567.885.738	-26,37%
Social Benefits	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Other Payments	1.529.928.544.280	2.128.678.796.084	-28,13%
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	-26.572.676.415.037	-27.338.486.789.796	2,80%
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS			
Purchases of nonfinancial assets	14.020.173.111.706	16.062.464.152.217	-12,71%
Fixed Assets	8.741.415.413.749	11.539.676.291.476	-24,25%
Inventories	5.032.638.474.099	4.475.999.447.101	12,44%
Valuables			
Nonproduced Assets	246.119.223.858	46.788.413.640	426,03%
Sales of nonfinancial assets	2.288.930.002.691	2.558.712.474.790	-10,54%
Fixed Assets	36.678.040.239	19.997.884.130	83,41%
Inventories	2.240.966.988.222	2.536.852.856.260	-11,66%
Valuables			
Nonproduced Assets	11.284.974.231	1.861.734.400	506,15%
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%
CASH SURPLUS/DEFISIT	-38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)			
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	76.769.280.506	27.931.373.129	174,85%
Domestic debtors	76.769.280.506	27.931.373.129	174,85%
External creditors			
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	-349.696.400.058	-434.385.078.700	19,50%
Domestic creditors	-349.696.400.058	-434.385.078.700	19,50%
External creditors			
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	426.465.680.564	462.316.451.829	-7,75%
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	-38.730.385.204.616	-41.304.554.919.052	6,23%

CALK LKPK TINGKAT WILAYAH

LKPK dan LSKP Tingkat Wilayah Periode Tahun 2025
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan



Patung Yesus Memberkati di Kabupaten Tana Toraja

A. Penjelasan Umum

A. 1. Dasar Hukum

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan merujuk berbagai regulasi dan pengaturan sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK-TW dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

A.1.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (Lampiran II PP 71 tahun 2010) menyatakan laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu laporan

tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) wajib menyusun Laporan LKPK-TW dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW). Sumber data dalam penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW tersebut adalah data/informasi keuangan pemerintah yang dihasilkan dari sistem akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cakupan LKPK-TW dan LSKP-TW adalah seluruh entitas akuntansi Pemerintah Pusat dan seluruh entitas pelaporan Pemerintah Daerah dalam wilayah kerja Kanwil DJPb. Entitas akuntansi Pemerintah Pusat di tingkat wilayah meliputi seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil). Konsolidasi data laporan keuangan seluruh entitas akuntansi Pemerintah Pusat di tingkat wilayah menghasilkan kertas kerja LKPP-TW.

Entitas pelaporan Pemerintah Daerah di tingkat wilayah merupakan seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Konsolidasi data laporan seluruh Pemerintah Daerah di tingkat wilayah menghasilkan kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW). LKPK-TW dihasilkan dari proses konsolidasi akuntansi antara kertas kerja LKPP-TW dengan kertas kerja LKPDK-TW.

Sedangkan LSKP-TW dihasilkan dari proses konsolidasi antara kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW. Kertas kerja LSKPP-TW dan LSKPDK-TW merupakan hasil pemetaan dari BAS kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang terdapat BAS Statistik Keuangan Pemerintah yang mengacu pada *Government Finance Statistics Manual* (GFSM) 2014.

A.1.2 Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW)

Sesuai dengan amanat dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2017, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja serta data neraca sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data Barang Milik Negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN yang terdiri dari beberapa subsistem yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi Belanja Lain-lain (SA-BL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). Laporan SiAP sendiri terdiri dari 2 (dua) subsistem lagi yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan di rekonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

SAPP menghasilkan data keuangan yang dapat digunakan untuk menyusun LKPP Nasional dan Kertas Kerja LKPP-TW. Penyusunan Kertas Kerja LKPP-TW dilakukan melalui konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN) Kanwil dengan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Konsolidasian Tingkat Wilayah. Kertas kerja LKPP-TW merupakan konsolidasi transaksi-transaksi keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Kertas kerja LKPP-TW juga mencakup seluruh posisi dan transaksi keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat di wilayah, yang terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah dan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kertas kerja LKPP-TW tidak mencakup entitas Pemerintahan Daerah yang dibiayai dari APBD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyusunan dan penyajian kertas kerja LKPP-TW mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Proses konsolidasi dalam penyusunan LKPP-TW mengacu pada kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP Tingkat Nasional yaitu meliputi penggabungan (agregasi) akun yang sama, pemilihan angka, reklasifikasi, serta eliminasi. Penjelasan atas kebijakan konsolidasi pada LKPP-TW adalah sebagai berikut:

1. Penggabungan (Agregasi)
Dilakukan dengan menjumlahkan akun yang sama pada LK UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah dengan

LK UAKKBUN Kanwil.

2. Pemilihan Angka
Dilakukan dengan memilih salah satu angka dari akun yang sama atas suatu objek yang sama yang disajikan pada LK UAKKBUN Kanwil dan LK UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah.
3. Reklasifikasi
Reklasifikasi akun-akun tertentu dari satu komponen laporan ke komponen yang lain.
4. Eliminasi Akun Resiprokal (Timbal Balik)
Eliminasi Akun Resiprokal (Timbal Balik) jika terdapat akun resiprokal antara UAKKBUN Kanwil dengan UAKPA, atau antar UAKPA yang jumlahnya dapat diukur dengan andal, maka dilakukan eliminasi atas akun-akun tersebut.

Kertas Kerja LKPP-TW periode 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LKPP-TW disusun berdasarkan penggabungan dari LRA LK seluruh UAKPA Konsolidasian di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak mencakup LRA pada UAKKBUN Kanwil karena UAKKBUN Kanwil tidak memiliki anggaran sehingga tidak menyusun LRA. Kebijakan penyusunan LRA kertas kerja LKPP-TW adalah sebagai berikut:
 - a. Angka yang disajikan pada LRA kertas kerja LKPP-TW adalah angka realisasi pendapatan neto dan belanja neto, setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja, berdasarkan data realisasi basis kas dari SAI yang telah direkonsiliasi dan disesuaikan dengan angka realisasi berdasarkan data dari SiAP.
 - b. LRA kertas kerja LKPP-TW tidak menyajikan angka realisasi pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN Pusat.

- c. Walaupun pembayaran Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara terpusat, namun data set hasil *split* oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersedia di SIKRI MP juga berisi realisasi Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam wilayah kerja Kanwil. Namun demikian, atas transfer tersebut hanya belanja transfer yang diakui, sedangkan pendapatan transfer tidak diakui.
2. Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
Neraca kertas kerja LKPP-TW disusun berdasarkan konsolidasi dari Neraca UAKPA Konsolidasi Tingkat Wilayah dengan Neraca UAKKBUN-Kanwil. Kebijakan penyusunan Neraca LKPP-TW adalah sebagai berikut:
 - a. Kas dan Bank meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU. Kas di KPPN menggunakan angka dari Neraca UAKKBUN Kanwil. Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya dan Setara Kas dari Hibah, Kas di BLU, dan Kas di Bendahara Penerimaan menggunakan angka dari Neraca UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah.
 - b. Pos lain dalam klasifikasi Aset menggunakan angka dari Neraca UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah.
 - c. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan penjumlahan antara Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah dengan Neraca UAKKBUN Kanwil.
 - d. Uang Muka dari KPPN pada Neraca UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah di-reklasifikasi ke Ekuitas pada Neraca LKPP-TW.
 - e. Utang Pajak yang Belum Disetor oleh Bendahara Pengeluaran dari Neraca UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah di-reklasifikasi ke Pendapatan Perpajakan-LO pada LO LKPP-TW.
 - f. Pos Lain dalam klasifikasi Kewajiban menggunakan angka dari Neraca LK UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah.
 - g. Ekuitas merupakan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas periode berkenaan.
 3. Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
Laporan Operasional (LO) kertas kerja LKPP-TW disusun berdasarkan konsolidasi LO UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah. Kebijakan penyusunan LO LKPP-TW adalah sebagai berikut:
 - a. LO kertas kerja LKPP-TW hanya disusun dari data LK UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah karena LK UAKKBUN Kanwil tidak menyajikan LO.
 - b. Penyusunan LO kertas kerja LKPP-TW dilakukan dengan konsolidasi seluruh Pendapatan-LO dan Beban, dan menambahkan hasil reklasifikasi Utang Pajak yang Belum Disetor Bendahara Pengeluaran ke Pendapatan Perpajakan-LO.
 - c. Walaupun pembayaran Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara terpusat, namun data set hasil *split* oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersedia di SIKRI MP juga berisi realisasi Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam wilayah kerja Kanwil. Atas realisasi Transfer tersebut, baik Belanja maupun Pendapatan Transfer diakui sehingga tidak mengakibatkan defisit.
 4. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) kertas

kerja LKPP-TW disusun dengan mengonsolidasikan LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil dengan penyesuaian dari beberapa akun Neraca UAKKBUN Kanwil. Kebijakan penyusunan LPE LKPP-TW adalah sebagai berikut:

- a. Angka Ekuitas Awal pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Ekuitas Akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW pada periode pelaporan sebelumnya.
 - b. Surplus/Defisit LO pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Surplus/Defisit LO kertas kerja LKPP-TW.
 - c. Koreksi yang Menambah/Mengurangi merupakan pos untuk menampung selisih catatan kas antara UAKPA Konsolidasian dengan UAKBUN Daerah Tingkat Wilayah, Koreksi Kas dalam Transito, serta Koreksi Lainnya.
 - d. Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas merupakan pos untuk menampung reklasifikasi akun Uang Muka dari KPPN pada Neraca UAKPA Konsolidasian.
 - e. Transaksi antar Entitas, seperti Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL), Transfer Masuk, Transfer Keluar, dan Pengesahan Hibah menggunakan angka dari LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Wilayah.
 - f. Ekuitas Akhir pada LPE kertas kerja LKPP-TW dituangkan sebagai akun Ekuitas Akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW.
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
- Laporan Arus Kas (LAK) kertas kerja LKPP-TW disusun dari Laporan Arus Kas LK UAKKBUN Kanwil. Apabila terdapat selisih antara saldo Kas dalam LAK dengan saldo Kas dalam Neraca kertas kerja LKPP-TW, perlu diberikan penjelasan atas perbedaan tersebut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar rinci atau analisis aras nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat, Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.1.3 Penyusunan Kertas Kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, Laporan Operasional Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, dan Catatan atas LKPD Konsolidasian.

Untuk LKPD 31 Desember 2024, proses konsolidasi dilakukan terhadap 25 LKPD, yaitu LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kota Pare - Pare, Kota Palopo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana tunai yang masuk ke sektor pemerintahan, baik yang berasal dari transfer Pemerintah

Pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh Pemerintah Daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan Konsolidasi juga menunjukkan dana tunai yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Penyusunan dan penyajian LKPD-KTW mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Proses konsolidasi penyusunan LKPD-KTW dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penggabungan (agregasi)
Dilakukan dengan menjumlahkan akun yang sama pada LKPD Provinsi dengan LKPD seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
2. Eliminasi Akun Resiprokal (Timbal Balik)
Eliminasi akun resiprokal (timbal balik) antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Akun resiprokal (timbal balik) adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antar pemerintah daerah Kabupaten, Kota, dan Provinsi dalam wilayah Kanwil DJPb. Eliminasi resiprokal dilakukan menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi.
3. Kebijakan Eliminasi Akun Resiprokal yang Tidak Sama Jumlahnya.
Dalam hal terdapat perbedaan angka antara akun resiprokal, perlu dibuat kebijakan eliminasi agar terdapat keseragaman perlakuan, yaitu eliminasi dilakukan menggunakan satu angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi. Dalam konsolidasi kertas kerja LKPD-KTW, eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya dilakukan dengan kebijakan sebagai

berikut:

- a. Kebijakan Eliminasi Akun Resiprokal yang Tidak Sama Jumlahnya.
- b. Jika akun tandinggannya yang ada pada LKPD Kabupaten/Kota lebih kecil daripada angka yang ada pada LKPD Provinsi maka dilakukan penyesuaian jumlah dengan mengurangi akun yang paling dekat dalam skala resiprokal.
- c. Dalam hal jumlah akun skala resiprokal dan akun resiprokal pada LKPD Kabupaten/Kota tidak mencukupi, maka jumlah yang dieliminasi adalah maksimal sebesar jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal Pemerintah Kota/Kabupaten.

Transaksi resiprokal antar Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Belanja Transfer dan Pendapatan Transfer Daerah.
Transaksi Belanja Transfer dan Pendapatan Transfer Daerah, yaitu DBH Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Transfer untuk Dana Desa tidak dieliminasi mengingat LK Desa tidak terkonsolidasi dalam LKPD Provinsi maupun LKPD Kabupaten/Kota. Transfer vertikal ke atas dari Pemkab/Pemkot kepada Pemprov secara akuntansi dimungkinkan, namun dalam praktiknya tidak lazim terjadi. Sehingga apabila terdapat Transfer vertikal ke atas perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah terkait.
2. Hibah antar Pemda dalam satu wilayah Provinsi.
Hibah antar Pemerintah Daerah merupakan transaksi resiprokal, sehingga transaksi tersebut perlu dieliminasi dalam rangka penyusunan LKPD-KTW.

3. Transaksi Utang dan Piutang antar Pemerintah Daerah dalam satu wilayah provinsi.
4. Transaksi Utang dan Piutang antar Pemerintah Daerah
Transaksi Utang dan Piutang antar Pemerintah Daerah merupakan transaksi resiprokal sehingga transaksi tersebut perlu dieliminasi dalam rangka penyusunan LKPDK-TW. Utang dan Piutang antar Pemerintah Daerah yang sering terjadi dalam wilayah provinsi adalah Utang dan Piutang terkait transfer.

Kertas Kerja LKPDK-TW periode 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah
LRA kertas kerja LKPDK-TW disusun dengan mengonsolidasikan LRA seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kebijakan penyusunan LRA LKPDK-TW adalah sebagai berikut:
 - a. Angka realisasi Pendapatan, Pengembalian Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang disajikan pada LRA dijumlahkan untuk jenis Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang sama.
 - b. Surplus/ Defisit LRA Konsolidasian merupakan selisih antara Pendapatan Pemerintah Daerah Konsolidasian dikurangi Belanja Pemerintah Daerah Konsolidasian, yang jumlahnya sama dengan Surplus/Defisit masing-masing Pemerintah Daerah dijumlahkan.
 - c. Eliminasi akun-akun resiprokal dan skala resiprokal antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Transaksi resiprokal antar pemerintah daerah di tingkat wilayah seperti Pendapatan Transfer Pemerintah Kota/Kabupaten dengan Belanja Transfer Pemerintah Provinsi, dan Pendapatan Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.

- d. Jumlah Surplus/Defisit LRA dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Konsolidasian harus tetap sama dengan penjumlahan Surplus/Defisit LRA dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) pada poin b.
2. Neraca Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah
Neraca kertas kerja LKPDK-TW disusun berdasarkan konsolidasi dari Neraca Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kebijakan penyusunan Neraca LKPDK-TW adalah sebagai berikut:
 - a. Menjumlahkan angka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk jenis Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
 - b. Selanjutnya dilakukan eliminasi akun-akun resiprokal dalam skala resiprokal antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti Piutang dan Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Eliminasi akun resiprokal dilakukan menggunakan akun yang sama pada entitas yang dikonsolidasi.
 3. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah
LO kertas kerja LKPDK-TW disusun dengan konsolidasi LO Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kebijakan penyusunan LO LKPDK-TW adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan LO LKPDK-TW dilakukan dengan menjumlahkan seluruh Pendapatan-LO dan

- Beban yang sama jenisnya pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Selanjutnya dilakukan eliminasi akun resiprokal menggunakan angka yang sama. Dalam hal angka akun resiprokal tidak sama, maka eliminasi dilakukan tetap menggunakan angka yang sama berdasarkan aturan dalam kebijakan eliminasi. Contoh transaksi resiprokal dalam LO kertas kerja LKPD-KT adalah Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari Pemerintah Provinsi dengan Beban Transfer Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah
LPE kertas kerja LKPD-KT disusun dengan mengonsolidasikan LPE seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kebijakan penyusunan LPE LKPD-KT adalah sebagai berikut:
 - a. Angka Ekuitas Awal pada LKPD-KT merupakan penjumlahan angka Ekuitas Awal Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota.
 - b. Surplus/Defisit-LO pada LKPD-KT merupakan penjumlahan angka Surplus/Defisit-LO Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kesalahan Mendasar dan Koreksi SAL LKPD-KT merupakan penjumlahan angka Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d. Koreksi dan Penyesuaian.
 - e. Ekuitas Akhir LKPD-KT merupakan penjumlahan angka Ekuitas Akhir pada Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 5.
 6. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah
LAK kertas kerja LKPD-KT disusun dengan mengonsolidasikan LAK seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kebijakan penyusunan LAK LKPD-KT adalah sebagai berikut:
 - a. Angka Arus Kas dari Kegiatan Operasional Konsolidasian merupakan penjumlahan angka Arus Kas dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Angka Arus Kas dari Kegiatan Investasi Konsolidasi merupakan penjumlahan angka Arus Kas dari Kegiatan Investasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Angka Arus Kas dari Kegiatan Pembiayaan Konsolidasian merupakan penjumlahan angka Arus Kas dari Kegiatan Pembiayaan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d. Angka Arus Kas dari Kegiatan Transitoris Konsolidasian merupakan penjumlahan angka Arus Kas dari Kegiatan Transitoris Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah
LPSAL kertas kerja LKPD-KT disusun dengan mengonsolidasikan LPSAL seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyusunan LPSAL kertas kerja LKPD-KT dilakukan dengan menjumlahkan angka SAL Awal, Penggunaan SAL, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan, Koreksi Lain - Lain, dan SAL Akhir pada LKPD Provinsi dengan LKPD seluruh Kabupaten/Kota.

A.1.4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW)

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah, yang selanjutnya disingkat LKPK-TW, adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun resiprokal.

LKPK-TW tidak disusun untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui LKPK-TW ini dapat menunjukkan peran pemerintah pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan.

Kebutuhan penyusunan LKPK-TW dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan, dan perbandingan antara negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara butir 1.5 (Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang juga ditegaskan dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007.

Penyusunan dan penyajian LKPK-TW mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan penyusunan dan penyajian LKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Nomor 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah juga dilakukan dalam rangka menjawab laporan hasil peninjauan BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2013, yang mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah dan ketersediaan informasi bagi publik. Menurut hasil peninjauan tersebut, secara umum, pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (integrasi LKPP dengan LKPD) sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

Penyusunan LKPK-TW dilakukan melalui konsolidasi kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW. Konsolidasi dalam penyusunan LKPK-TW dilakukan dengan menggabungkan (agregasi) akun sejenis serta dengan mengeliminasi akun transaksi resiprokal antara entitas Pemerintah Pusat dengan entitas pemerintah daerah.

Proses konsolidasi penyusunan LKPDK-TW dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penggabungan (Agregasi)
Dilakukan dengan menjumlahkan akun yang sama pada LKPP-TW dengan LKPDK-TW.
2. Eliminasi Akun Timbal Balik (*Reciprocal Accounts*)
Proses konsolidasi laporan keuangan meliputi eliminasi akun resiprokal atau timbal balik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dalam wilayah kerja Kanwil DJPb. Eliminasi dilakukan menggunakan satu angka yang sama, baik pada LKPP-TW maupun LKPDK-TW.
3. Kebijakan Eliminasi Akun Timbal Balik yang Tidak Sama Jumlahnya
Jika ditemukan akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, maka eliminasi tetap dilakukan menggunakan satu angka yang sama menggunakan angka yang ada pada Pemerintah Pusat. Jika angka tandingan pada LKPDK-TW lebih besar/lebih kecil maka dapat dilakukan penyesuaian dengan menambah atau mengurangi pos-pos yang memiliki keterkaitan paling dekat dalam skala resiprokal. Dalam hal jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal pada LKPDK-TW tidak mencukupi, maka jumlah yang dieliminasi maksimal sebesar jumlah akun skala resiprokal dan resiprokal pada LKPDK-TW.

Kertas Kerja LKPK-TW periode 31 Desember 2024 terdiri dari:

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

LRA LKPK-TW disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LRA kertas kerja LKPP-TW dengan LRA kertas kerja LKPDK-TW. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun LRA LKPK-TW adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan Akun Pendapatan dan Belanja pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan transaksi sejenis dikonsolidasi dengan cara menjumlahkan angka pada kertas kerja LKPP-TW dengan angka pada kertas kerja LKPDK-TW. Jika terdapat perbedaan dalam klasifikasi antara pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka atas perbedaan tersebut diselesaikan dengan melakukan konversi dan pemetaan antara akun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- b. Melakukan identifikasi akun resiprokal untuk dieliminasi.. Eliminasi dilakukan terhadap akun resiprokal pada kertas kerja LKPP-TW dengan kertas kerja LKPDK-TW, yaitu akun yang terjadi akibat transaksi resiprokal antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Eliminasi akun resiprokal dilakukan menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi. Transaksi resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah antara lain transaksi Transfer dan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, atau sebaliknya.
- c. Jika angka akun resiprokal antara pada kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW tidak sama, maka eliminasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Akun resiprokal dieliminasi menggunakan angka pada kertas kerja LKPP-TW.
 - ii. Jika akun tandingannya, yang ada pada kertas kerja LKPDK-TW kurang dari angka yang

- ada pada kertas kerja LKPP-TW, maka dilakukan penyesuaian jumlahnya dengan mengurangi akun yang paling dekat dalam skala resiprokal.
- iii. Dalam hal jumlah akun resiprokal dan akun skala resiprokal pada LKPPDK-TW tidak mencukupi, maka jumlah yang dieliminasi maksimal sebesar jumlah akun resiprokal dan skala resiprokal pada LKPPDK-TW.

2. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Neraca LKPK-TW disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LKPP-TW dengan Neraca LKPPDK-TW. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun Neraca Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

- Melakukan Identifikasi Transaksi dan Akun yang Sejenis untuk Dijumlahkan Secara umum, aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun aset Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun aset Pemerintah Daerah, dan akun kewajiban Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban Pemerintah Daerah.
- Melakukan Identifikasi Akun Resiprokal untuk Dieliminasi
- Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca LKPK-TW, yaitu berupa akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, antara lain seperti akun Utang dan Piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Eliminasi akun timbal balik dilakukan menggunakan angka yang sama pada entitas yang dikonsolidasi.

3. Penyusunan kertas kerja Laporan

Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
LO LKPK-TW disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara kertas kerja LO LKPP TW dengan kertas kerja LO LKPPDK-TW. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun LO LKPK-TW adalah sebagai berikut:

- Melakukan Identifikasi Transaksi dan Akun yang Sejenis untuk Dijumlahkan Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan akun yang sejenis dapat dijumlahkan. Walaupun masih terdapat perbedaan BAS Pendapatan-LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perbedaan tersebut diatasi melalui konversi dan pemetaan.
- Melakukan Identifikasi Akun Resiprokal untuk Dieliminasi
- Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada LO LKPK-TW, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akun resiprokal pada LO LKPK-TW antara lain seperti Pendapatan Transfer pada LO LKPPDK-TW dan Beban Transfer pada LO LKPP-TW. Pendekatan eliminasi yang diambil pada penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Pemerintah Tingkat Wilayah sama dengan pendekatan yang dilakukan pada penyusunan LRA Konsolidasian Pemerintah Tingkat Wilayah.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

LPE LKPK-TW disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara LPE kertas kerja LKPP-TW dengan LPE kertas kerja LKPPDK-TW. Secara umum pos-pos yang disajikan pada LPE kertas kerja LKPP-TW dan LPE kertas kerja LKPPDK-TW adalah sejenis sehingga proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan (agregasi) akun pada LPE Pemerintah Pusat dengan akun

LPE pemerintah daerah, yaitu Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi yang Menambah/Mengurangi, Transaksi Antar Entitas, Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi, Koreksi karena Dobel Pencatatan, Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas, dan Ekuitas Akhir.

5. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
LAK LKPK-TW disusun berdasarkan hasil konsolidasian LAK kertas kerja LKPP- TW dengan LAK kertas kerja LKPKD-TW.
6. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
CaLK LKPK-TW merupakan penjelasan atas penyajian angka pada lembar muka LKPK-TW dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan menyediakan pemahaman yang lebih baik terhadap LKPK-TW. CaLK LKPK-TW harus disajikan secara sistematis, meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan LO.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan Umum tentang LKPK-TW yang meliputi:
 - i. Dasar Hukum Penyusunan LKPK-TW.
 - ii. Pendekatan Penyusunan LKPK-TW.
- iii. Sumber, Cakupan, dan Status Data.
- b. Penjelasan tentang kebijakan akuntansi dan eliminasi akun resiprokal, antara lain transaksi Transfer dan Pendapatan Transfer, Hibah, serta Utang dan Piutang antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.
- c. Penjelasan rinci mengenai LRA LKPK-TW yang meliputi:
 - i. Pendapatan konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berdasarkan jenis

pendapatan dan lokasi kabupaten/kota disertai dengan ilustrasi tabel dan grafik.

- ii. Belanja konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berdasarkan jenis belanja, lokasi kabupaten/kota, dan fungsi disertai dengan ilustrasi tabel dan grafik.
- d. Penjelasan rinci mengenai Neraca LKPK-TW yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah disertai dengan ilustrasi tabel dan grafik.
- e. Penjelasan rinci mengenai LO LKPK-TW yang meliputi pendapatan dan beban konsolidasian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
- f. Penjelasan rinci mengenai LPE LKPK-TW yang meliputi Surplus/Defisit LO, Penyesuaian Saldo Awal, Koreksi yang Menambah/Mengurangi, Transaksi Antar Entitas, Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi, Transaksi Dobel Pencatatan, Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas, dan Ekuitas Akhir.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

A.2. Sumber, Cakupan, dan Status Data

A.2.1 Sumber Data

1. Sumber data laporan LKPP-TW berasal dari Konsolidasian data SiAP yang telah direkonsiliasi dengan data SAI.
2. Sumber data laporan LKPKD-TW berasal dari Konsolidasian LKPD.
3. Sumber data LRA Pemerintah Pusat diperoleh dari aplikasi SIKRI MP yang telah disediakan oleh Direktorat APK.
4. Sumber data laporan LKPD berasal dari Laporan Keuangan s.d. 31 Desember 2025 yang disampaikan oleh 25 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap.

A.2.2. Cakupan Data

1. Lembar muka LRA Konsolidasian Data *Audited* per 31 Desember 2025.
2. Lembar muka LO Konsolidasian Data *Audited* per 31 Desember 2025.
3. Lembar muka LPE Konsolidasian Data *Audited* per 31 Desember 2025.
4. Lembar muka Neraca Konsolidasian Data *Audited* per 31 Desember 2025.
5. Lembar muka LAK Konsolidasian Data *Audited* per 31 Desember 2025.
6. Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari penjelasan per pos LKPK-TW.

A.2.3. Status Data

Data Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penyusunan LKPK-TW ini adalah data *Audited* per 31 Desember 2024.

Proses Konsolidasi dilakukan terhadap data-data sebagai berikut:

1. 25 LRA Pemda Data *Audited* per 31 Desember 2024 yang disampaikan oleh masing-masing Pemda secara lengkap.
2. Laporan pendukung lainnya dari 25 Pemda Data *Audited* per 31 Desember 2024 yang disampaikan oleh Pemda secara lengkap.

A.2.4. Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbul kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D. Penyusunan dan penyajian LKPP Tingkat Wilayah s.d. 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian

LKPD Konsolidasian Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dengan konversi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD telah diterapkan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

A.2.5. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

A.2.6. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN/D yang mengurangi ekuitas lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN/D. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada pemerintah pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada tampilan muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut fungsi.

A.2.7 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

A.2.8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

A.2.9. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

A.2.10. Bagan Akun Standar

Pos-pos yang disajikan pada Laporan

Realisasi APBN Tahun 2024 adalah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 dan peraturan di bawahnya. Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2024 adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya.

A.2.11. Kebijakan Treasury Deposit Facility

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Non Tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, dapat dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut:

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disebut TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah secara non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara. DBH dan/DAU yang disalurkan

secara non tunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, termasuk DBH kurang bayar.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF dilakukan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan daerah, besaran DBH dan/DAU yang akan disalurkan secara non tunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.

Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum memproses penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana TDF tersebut diberikan renumerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas saldo dana TDF dan besaran renumerasi atas pengelolaan TDF.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF memiliki *holding period*. *Holding period* ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU di fasilitas TDF pada Bank Indonesia. Setelah *holding period* berakhir, DBH dan/atau DAU dapat

dilakukan penyaluran ke RKUD.

Penarikan dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh kepala daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa *holding period* atau setelah masa *holding period*. Kepala daerah bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan untuk penarikan dana TDF tersebut.

Pengelolaan atas DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

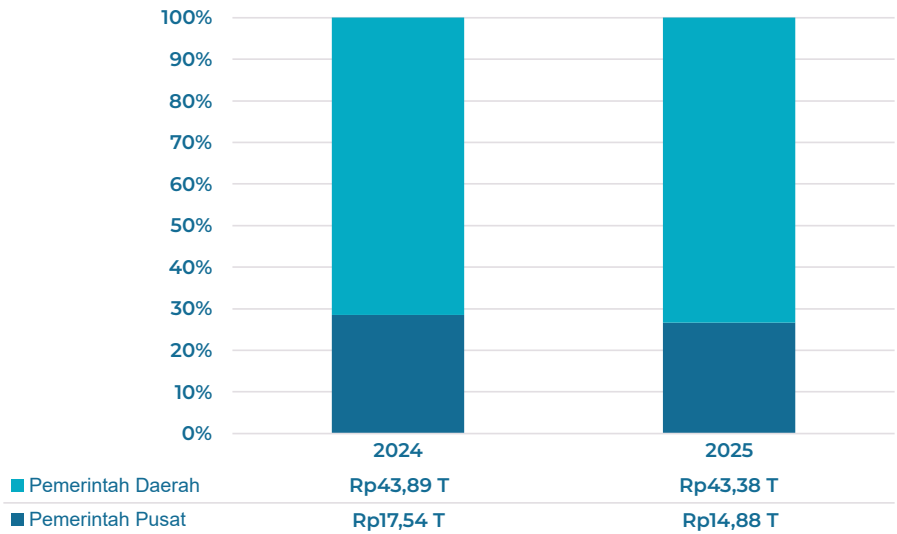
Pemerintah daerah menata usahakan dan mencatat transaksi TDF dan renumerasinya sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mengikuti kebijakan akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah. Secara umum perlakuan akuntansi yang perlu dilakukan pemda adalah mencatat penyaluran DBH non tunai TDF-TKD sebagai realisasi pendapatan transfer, dan mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/ Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan), dan mencatat renumerasi sebagai Pendapatan Bunga.

B. Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

B.1. Pendapatan Konsolidasian

Jumlah pendapatan pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp26.999.399.893.557,-. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp14.882.399.829.265,- dan pendapatan Pemerintah Daerah (sebelum eliminasi akun resiprokal) sebesar Rp43.388.821.564.585,-.

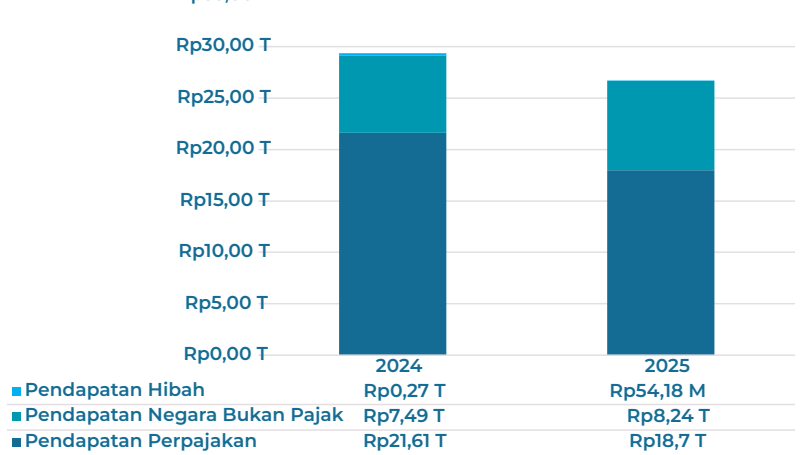
Grafik 1. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024



Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tahun 2025 tercatat sebesar Rp26.999.399.893.557. Dari jumlah tersebut, pendapatan perpajakan konsolidasi mencapai Rp18.705.293.325.969 atau berkontribusi 69,28% terhadap total pendapatan. Sementara itu, pendapatan penerimaan negara bukan pajak tercatat senilai Rp8.239.921.516.895 atau 30,52% dari total pendapatan konsolidasian. Adapun pendapatan hibah tercatat sebesar

Rp54.185.050.693 mencapai kontribusi 0,20%. Dengan demikian, struktur pendapatan Pemerintah Konsolidasian tahun 2025 didominasi oleh pendapatan perpajakan, diikuti oleh pendapatan negara bukan pajak, sedangkan pendapatan hibah memberikan kontribusi yang relatif sangat kecil. Komposisi Pendapatan Konsolidasian tahun 2025 dan 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Grafik 2. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024



Dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan pemerintah konsolidasian tahun 2025 menunjukkan kontraksi. Total pendapatan turun menjadi Rp26.999.399.893.557 pada tahun 2025 dari Rp29.366.084.668.810 pada tahun 2024, atau turun 8,06%.

Penurunan terjadi terutama karena terdapat penurunan pendapatan perpajakan sebesar 13,42% atau Rp 2.899.857.163.018 dari Rp21.605.150.488.987 pada periode yang sama tahun 2024.

Semenjak pendapatan perpajakan memiliki proporsi yang besar dalam pendapatan di wilayah Sulawesi Selatan, meskipun terjadi peningkatan pendapatan PNPB, yaitu sebesar Rp749.935.745.969 atau 10,01%, peningkatan ini tidak cukup untuk menjaga momentum pendapatan konsolidasian di wilayah Sulawesi Selatan.

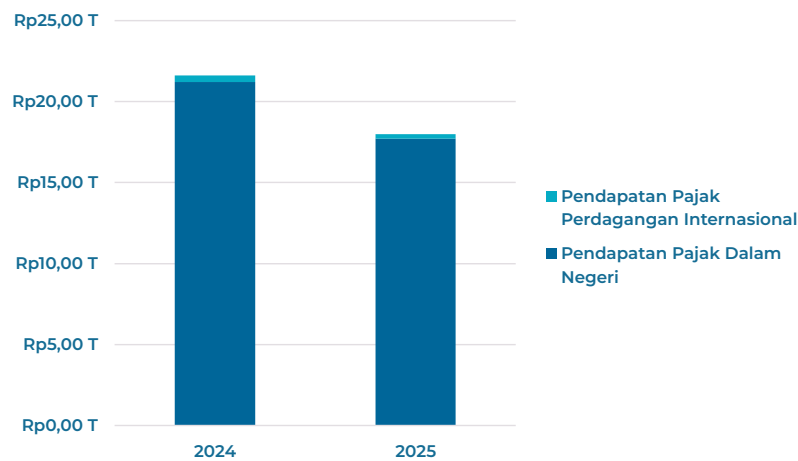
Untuk pendapatan hibah terjadi penurunan sebesar Rp 216.763.358.204 atau setara 80%

B.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan tetap merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Pemerintah Konsolidasian, sehingga pemerintah mendukung keberlanjutan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta penguatan administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax dan reformasi kelembagaan.

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, struktur pendapatan pemerintah konsolidasian didominasi oleh pendapatan perpajakan. Jumlah pendapatan perpajakan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp18.705.293.325.969, atau berkontribusi sekitar 69,28% dari total pendapatan konsolidasian. Komposisi pendapatan perpajakan konsolidasian tahun 2025 dan 2024 disajikan pada grafis sebagai berikut.

Grafik 3. Komposisi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024



Tabel 1. Komposisi Pendapatan Perpajakan konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pajak Dalam Negeri	18.420.409.247.969	21.218.190.433.987	-13,19%
Pajak Perdagangan Internasional	284.884.078.000	386.960.055.000	-26,38%
Jumlah Pendapatan Perpajakan	18.705.293.325.969	21.605.150.488.987	-13,42%

Realisasi pendapatan perpajakan konsolidasian tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Pendapatan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp18.420.409.247.969 atau turun

13,19%, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional tercatat sebesar Rp284.884.078.000 atau turun 26,38%. Secara total, pendapatan perpajakan konsolidasian menurun 13,42%

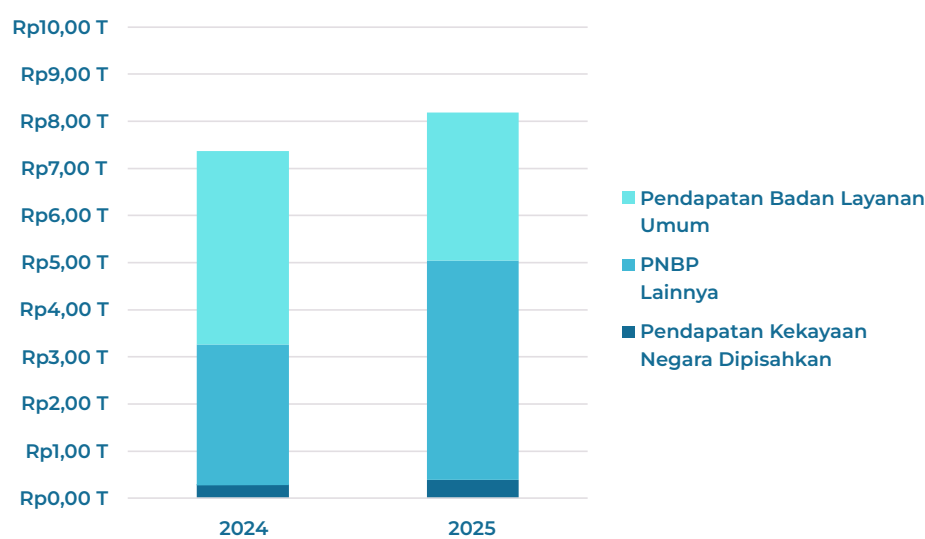
menjadi Rp18.705.293.325.969 pada tahun 2025 dari Rp21.605.150.488.987 pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan pada tahun

2025 masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi domestik dan perdagangan internasional.

B.1.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp8.239.921.516.895. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan 31 Desember 2024 yang sebesar Rp7.489.985.770.926, atau meningkat sebesar Rp749.935.745.969, setara 10,01%. Komposisi realisasi PNBP sampai dengan tahun 2025 disajikan pada grafis sebagai berikut.

Grafik 4. Komposisi Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024



Tabel 2. Komposisi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	416.233.660.762	389.319.600.691	6,91%
Pendapatan PNBP Lainnya	4.416.973.017.059	2.621.134.809.625	68,51%
Pendapatan BLU	3.366.674.985.675	4.180.168.338.650	- 19,46%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.239.921.516.895	7.489.985.770.926	10,01%

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp416.233.660.762, meningkat sebesar 6,91% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp389.319.600.691. Pendapatan ini mencerminkan bagian laba atas penyertaan modal pemerintah pada badan usaha, sehingga kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kontribusi hasil usaha entitas yang menjadi tempat investasi pemerintah.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat sebesar Rp3.366.674.985.675, mengalami penurunan 19,46% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp4.180.168.338.650.

B.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp54.185.050.693. Nilai tersebut mengalami

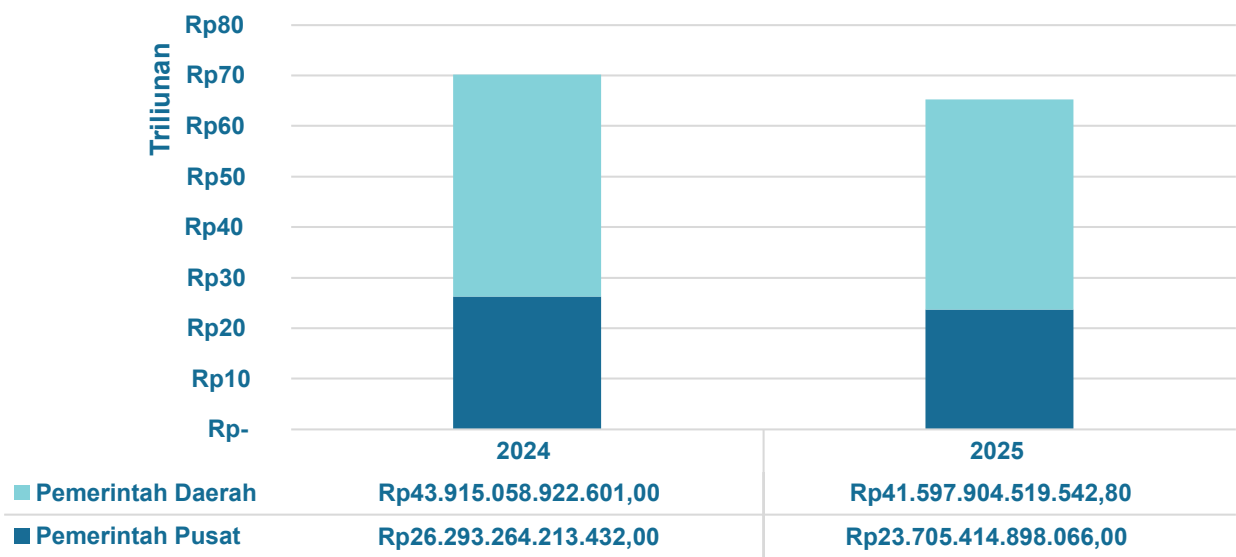
penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp270.948.408.897, atau turun 80,00%. Seluruh pendapatan hibah tahun 2025 berasal dari pendapatan hibah dalam negeri. Kontribusi pendapatan hibah dalam struktur pendapatan pemerintah konsolidasian tahun 2025 relatif kecil dibandingkan komponen pendapatan lainnya.

B.2. Belanja dan Transfer Konsolidasian

Belanja dan transfer konsolidasian tahun 2025 tercatat sebesar Rp65.303.319.417.609 ,- yang terdiri dari konsolidasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp54.977.236.398.359,- dan belanja pemerintah daerah (sebelum eliminasi akun resiprokal) sebesar Rp41.597.904.519.543,-. Setelah dikurangi akun-akun resiprokal, belanja pemerintah pusat berkontribusi sebesar 36,3% dari total Belanja Pemerintah Konsolidasian, sedangkan belanja pemerintah daerah berkontribusi sebesar 63,7%.

Belanja dan transfer konsolidasian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.905.003.718.424,- atau 6,99% dari Belanja dan transfer konsolidasian tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp70.208.323.136.033,-. Adapun perbandingan belanja dan transfer konsolidasian tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

Grafik 5. Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024



B.2.1 Belanja Pemerintah Konsolidasian

Realisasi belanja pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp61.720.651.152.969. Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 yang sebesar Rp66.379.336.785.609, atau kontraksi sebesar Rp4.658.685.632.640 yang setara 7,02%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah konsolidasian pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah konsolidasian tahun 2025 secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Belanja Pegawai	30.454.074.177.543	28.372.941.927.615	7,33%
Belanja Barang dan Jasa	21.051.436.109.419	23.829.198.279.204	-11,66%
Belanja Modal	8.987.534.637.607	11.586.464.705.116	-22,43%
Pembayaran Bunga Utang	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Subsidi	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Hibah	974.333.272.548	2.373.306.786.096	-58,95%
Belanja Bantuan Sosial	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Belanja Lain - Lain	51.967.081.549	35.424.119.740	46,70%
Jumlah Belanja Pemerintah	61.720.651.152.969	66.379.336.785.609	-7,02%

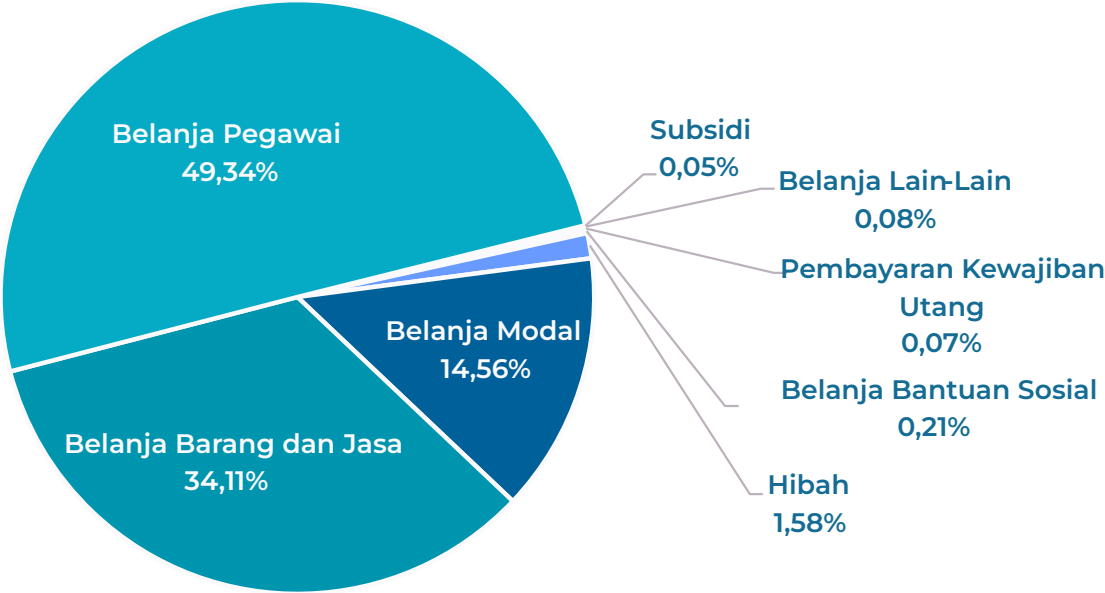
Komposisi belanja pemerintah konsolidasian pada tahun 2025 secara umum menunjukkan penurunan pada sebagian besar jenis belanja dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut paling signifikan terjadi pada belanja barang dan jasa yang turun sebesar 11,66%, belanja modal yang turun sebesar 22,43%, belanja pembayaran kewajiban utang yang turun sebesar 22,34%, serta belanja hibah yang turun signifikan sebesar 58,95%. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian struktur belanja pemerintah konsolidasian, khususnya pada komponen belanja operasional dan belanja modal.

Di sisi lain, beberapa jenis belanja

mengalami peningkatan. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp30.454.074.177.543, meningkat 7,33% dibandingkan tahun 2024. Selain itu, belanja subsidi meningkat sebesar 439,61%, belanja bantuan sosial meningkat sebesar 8,00%, dan belanja lain-lain meningkat sebesar 46,70%. Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan belanja pemerintah konsolidasian tahun 2025 mengalami penurunan, struktur belanja masih didominasi oleh belanja pegawai, diikuti oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Komposisi belanja pemerintah konsolidasian tahun 2025 disajikan dalam grafis sebagai berikut.

Grafik 6. Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 (diluar belanja transfer)



B.2.2 Transfer Konsolidasian

Belanja transfer konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp3.582.668.264.640. Nilai tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp3.828.986.350.424. Dengan demikian, realisasi belanja transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 246.318.085.784 atau 6,43% dibandingkan tahun sebelumnya.

Transfer pemerintah daerah sebesar Rp3.582.668.264.640,- terdiri atas transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp129.219.519.332,- dan transfer bantuan

keuangan sebesar Rp3.453.448.745.308,-. Dalam kelompok transfer bagi hasil pendapatan, transfer bagi hasil pajak daerah tercatat sebesar Rp118.859.959.615,- dan transfer bagi hasil pendapatan lainnya sebesar Rp10.359.559.718,-. Dalam transfer bantuan keuangan, komponen terbesar berasal dari transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp2.313.046.320.146,-, diikuti transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya sebesar Rp918.787.524.466,- dan transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp221.614.900.696,-. Realisasi transfer pemerintah konsolidasian tahun 2025 secara rinci disajikan pada laman berikut.

Tabel 4. Transfer Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	129.219.519.332	89.376.519.986	44,58%
Transfer Bantuan Keuangan	3.453.448.745.308	3.739.609.830.438	-7,65%
Jumlah Transfer Pemerintah	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%

B.3. Surplus/Defisit Anggaran

Nilai surplus/defisit anggaran pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar defisit Rp38.303.919.524.052. Defisit tersebut merupakan selisih antara realisasi pendapatan pemerintah konsolidasian sebesar Rp26,99 triliun dengan realisasi belanja dan transfer pemerintah konsolidasian sebesar Rp65,30 triliun selama tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, defisit anggaran tahun

2025 menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2024, defisit anggaran tercatat sebesar Rp40.842.238.467.223, sehingga pada tahun 2025 nilai defisit berkurang sebesar Rp2.538.318.943.171 atau membaik 6,21%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah konsolidasian masih mengalami defisit anggaran, tingkat defisit pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5. Surplus/Defisit Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Jumlah Pendapatan Konsolidasian	26.999.399.893.557	29.366.084.668.810	-8,06%
Jumlah Belanja Konsolidasian	61.720.651.152.969	66.379.336.785.609	-7,02%
Jumlah Transfer Konsolidasian	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%
Surplus (Defisit) Anggaran	-38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%

Jumlah defisit pemerintah konsolidasian berasal dari defisit pemerintah pusat sebesar Rp40.094.836.569.094,- (sebelum eliminasi) dan surplus pemerintah daerah sebesar Rp1.790.917.045.042,- (sebelum eliminasi).

Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan masih terjadi defisit anggaran,

kondisi fiskal tahun 2025 menunjukkan adanya dukungan dari kinerja fiskal pemerintah daerah dalam menahan tingkat defisit konsolidasian. Ke depan, kondisi ini perlu terus diperbaiki melalui penguatan kualitas pendapatan, efisiensi belanja, dan pengendalian pengeluaran agar tercipta pengelolaan fiskal yang lebih sehat, efektif, dan berkelanjutan.

B.4. Pembiayaan Konsolidasian

Nilai pembiayaan pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp749.205.766.083. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.207.671.446.647 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp458.465.680.564. Dengan demikian, pembiayaan tahun 2025 memberikan kontribusi neto positif terhadap struktur anggaran pemerintah konsolidasian, meskipun nilainya relatif lebih kecil dibandingkan defisit anggaran yang terjadi pada periode yang sama selaras dengan penurunan defisit anggaran.

Tabel 6. Pembiayaan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Penerimaan Pembiayaan	1.207.671.446.647	1.653.683.290.482	-26,97%
Pengeluaran Pembiayaan	458.465.680.564	463.359.552.898	-1,06%
Jumlah Pembiayaan	749.205.766.083	1.190.323.737.584	-37,06%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, nilai pembiayaan pemerintah konsolidasian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 441.117.971.501 atau 37,06%, menjadi Rp749.205.766.083 dari Rp1.190.323.737.584. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan pembiayaan menjadi Rp1.207.671.446.647 pada tahun 2025 dari Rp1.653.683.290.482 pada tahun 2024, atau turun 26,97%. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan juga menurun menjadi Rp458.465.680.564 dari Rp463.359.552.898 pada tahun 2024, atau turun 1,06%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan neto pemerintah

konsolidasian pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci, penerimaan pembiayaan tahun 2025 seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan dalam negeri, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri atas pengeluaran pembiayaan dalam negeri sebesar Rp418.691.680.564 dan penyertaan modal negara sebesar Rp39.774.000.000. Dengan demikian, struktur pembiayaan pemerintah konsolidasian tahun 2025 masih didominasi oleh transaksi pembiayaan dalam negeri, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar minus Rp37.554.713.757.969. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar minus Rp39.651.914.729.639 nilai tersebut menunjukkan perbaikan sebesar Rp2.097.200.971.670 atau 5,29%. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun pemerintah konsolidasian masih mengalami sisa kurang pembiayaan anggaran, tekanan fiskal pada tahun 2025 relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

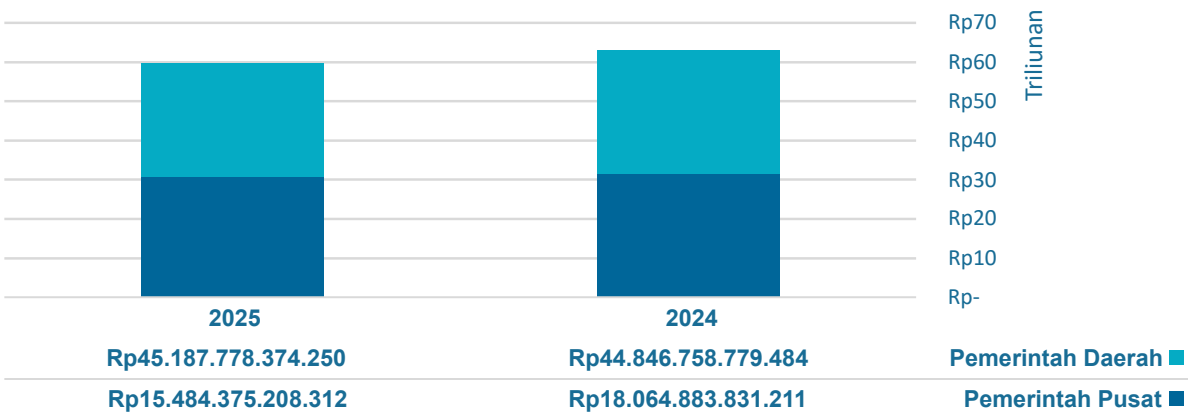
C. Catatan Atas Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

C.1. Pendapatan Operasional - LO

Pendapatan Operasional - LO Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp30.678.321.199.376,-, turun sebesar Rp2.423.534.060.149 ,- atau 7,32% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp33.101.855.259.525, -. Penurunan dengan nominal terbesar terjadi pada Pendapatan Perpajakan - LO yang pada tahun 2025 mencapai

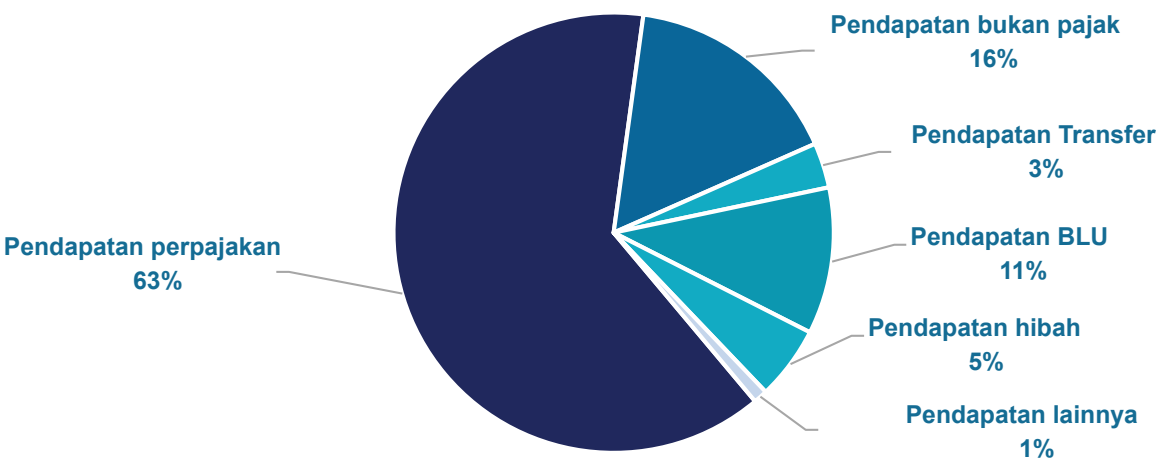
Rp19.411.850.290.367,-, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp22.303.741.429.503,-. Selain itu, Pendapatan Bukan Pajak - LO meningkat menjadi Rp4.976.321.977.159,- dari Rp3.117.798.666.983,- pada tahun sebelumnya. Pendapatan Hibah-LO turun menjadi Rp1.653.851.048.066,- pada tahun 2025 dari Rp2.270.296.211.138,- pada tahun 2024 atau 27,15%.

Grafik 7. Perbandingan Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 (sebelum eliminasi akun resipokal)



Pendapatan operasional konsolidasian (sebelum eliminasi) terdiri dari pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp15.484.375.208.312,- dan pendapatan pemerintah daerah sebesar Rp45.187.778.374.250,-. Detail komposisi pendapatan operasional konsolidasian tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Grafik 8. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2025



Tabel 7. Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan Perpajakan - LO	19.411.850.290.367	22.303.741.429.503	-12,97%
Pendapatan bukan pajak-LO	4.976.321.977.159	3.117.798.666.983	59,61%
Pendapatan Transfer - LO	1.015.413.783.532	1.398.376.226.611	-27,39%
Pendapatan BLU – LO	3.307.578.529.562	4.006.979.534.058	-17,45%
Pendapatan hibah-LO	1.653.851.048.066	2.270.296.211.138	-27,15%
Pendapatan lainnya-LO	313.305.570.691	4.663.191.232	6.618%
Pendapatan Operasional-LO	30.678.321.199.376	33.101.855.259.525	-7,32%

C.1.1. Pendapatan Perpajakan - LO

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tingkat Wilayah tercatat sebesar Rp19.411.850.290.367,-, lebih rendah dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 yang sebesar Rp22.303.741.429.503,-. Dengan demikian, pada tahun 2025 Pendapatan Perpajakan Konsolidasian mengalami penurunan sebesar

Rp2.891.891.139.136,- atau 12,97% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan pada tahun 2025 belum setinggi capaian tahun sebelumnya. Komposisi pendapatan perpajakan konsolidasian tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Komposisi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pajak Dalam Negeri - LO	19.127.635.760.367	21.918.437.581.503	-12,73%
Pajak Perdagangan Internasional - LO	284.214.530.000	385.303.848.000	-26,24%
Jumlah Pendapatan Perpajakan - LO	19.411.850.290.367	22.303.741.429.503	-12,97%

Penurunan pendapatan perpajakan dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan pajak dalam negeri yang menjadi Rp19.127.635.760.367,- pada tahun 2025 dari Rp21.918.437.581.503,- pada tahun 2024, serta berkurangnya pendapatan pajak perdagangan internasional yang menjadi Rp284.214.530.000,- dari Rp385.303.848.000,-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan perpajakan pada tahun 2025 belum sekuat tahun sebelumnya, baik dari sisi

perpajakan domestik maupun aktivitas perdagangan internasional. Dalam hal ini, APBN dan APBD tetap memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah melalui kebijakan belanja yang efektif, terarah, dan produktif, sehingga mampu mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

C.1.2 Pendapatan Bukan Pajak - LO

Pada tahun 2025, Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Tingkat Wilayah tercatat sebesar Rp4.976.321.977.159,- meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp3.117.798.666.983,-. Dengan demikian, pendapatan bukan pajak pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.858.523.310.176,- atau 59,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang menjadi Rp4.486.655.300.800,- pada tahun 2025 dari Rp2.700.969.077.710,- pada tahun 2024, yang juga diikuti peningkatan Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan yang menjadi Rp489.666.676.358,- dari Rp416.829.589.273,-. Komposisi pendapatan bukan pajak konsolidasian tahun 2025 dan 2024 disajikan pada grafis di laman berikut.

Tabel 9. Komposisi Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan sumber daya alam - LO	-	-	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/ Kekayaan Negara Dipisahkan - LO	489.666.676.358	416.829.589.273	-1,25%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	4.486.655.300.800	2.700.969.077.710	80,42%
Pendapatan Bukan Pajak	4.976.321.977.159	3.117.798.666.983	69,50%

Pada tahun 2025, peningkatan pendapatan negara bukan pajak konsolidasian terutama didorong oleh kenaikan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan pendapatan bukan pajak, diperlukan penguatan kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan PNBP, serta peningkatan tata kelola badan usaha milik pemerintah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih stabil terhadap pendapatan pemerintah konsolidasian.

C.1.3. Pendapatan Transfer - LO

Pada tahun 2025, Pendapatan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah tercatat sebesar Rp1.015.413.783.532,- berkurang dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.398.376.226.611,-. Dengan demikian, pendapatan transfer konsolidasian pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp382.962.443.079,- atau turun 27,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dari

yang menjadi Rp688.255.758.365,- pada tahun 2025 dari Rp1.185.823.308.958,- pada tahun 2024. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya menurun menjadi Rp21.015.438.000 dari Rp63.399.716.000,-. Sementara itu, komponen Bantuan Keuangan-LO meningkat menjadi Rp267.448.531.296,- pada tahun 2025 dari Rp149.153.201.653,- pada tahun 2024. Komposisi pendapatan transfer konsolidasian tahun 2025 dan 2024 disajikan pada grafis sebagai berikut.

Tabel 10. Komposisi Pendapatan Transfer Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO	688.255.758.365	1.185.823.308.958	-41,96%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO	21.015.438.000	63.399.716.000	-66,85%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	38.694.055.871	-	-
Bantuan Keuangan - LO	267.448.531.296	149.153.201.653	79,31%
Jumlah Pendapatan Transfer	1.015.413.783.532	1.398.376.226.611	-27,39%

C.1.4. Pendapatan BLU - LO

Pada tahun 2025, Pendapatan BLU tercatat sebesar Rp3.307.578.529.562,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4.006.979.534.058,-. Dengan demikian, Pendapatan BLU pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp699.401.004.496,- atau 17,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi pendapatan BLU tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Komposisi Pendapatan BLU - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan Jasa BLU - LO	3.161.753.622.047	3.883.664.446.663	-18,59%
Pendapatan Hibah BLU - LO	26.751.931.440	3.585.190.372	646,
Pendapatan Lainnya BLU - LO	119.072.976.075	119.729.897.023	-0,55%
Pendapatan BLU - LO	3.307.578.529.562	4.006.979.534.058	-17,45%

Penurunan pendapatan BLU dipengaruhi oleh berkurangnya Pendapatan Jasa BLU yang menjadi Rp3.161.753.622.047,- pada tahun 2025 dari Rp3.883.664.446.663,- pada tahun 2024, meskipun Pendapatan Hibah BLU meningkat menjadi Rp26.751.931.440,- dari Rp3.585.190.372,-. Sementara itu, Pendapatan Lainnya BLU relatif stabil, menjadi Rp119.072.976.075,- pada tahun 2025 dari Rp119.729.897.023,- pada tahun 2024. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan BLU pada tahun 2025 mengalami pelemahan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada komponen pendapatan jasa.

C.1.5. Pendapatan Hibah - LO

Pada tahun 2025, Pendapatan Hibah-LO tercatat sebesar Rp1.653.851.048.066,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.270.296.211.138,-. Dengan demikian, Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp616.445.163.072,- atau 27,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan hibah terhadap pendapatan operasional pemerintah konsolidasian pada tahun 2025 menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2024, sehingga peran hibah dalam menopang struktur pendapatan operasional menjadi semakin terbatas.

C.1.6. Pendapatan Lainnya - LO

Pada tahun 2025, Pendapatan Lainnya-LO tercatat sebesar Rp313.305.570.691,- meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4.663.191.232,-. Dengan demikian, pos Pendapatan Lainnya-LO pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp308.642.379.459,- dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pada pos pendapatan lain-lain di luar komponen utama pendapatan operasional. Detail pendapatan lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Komposisi Pendapatan Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

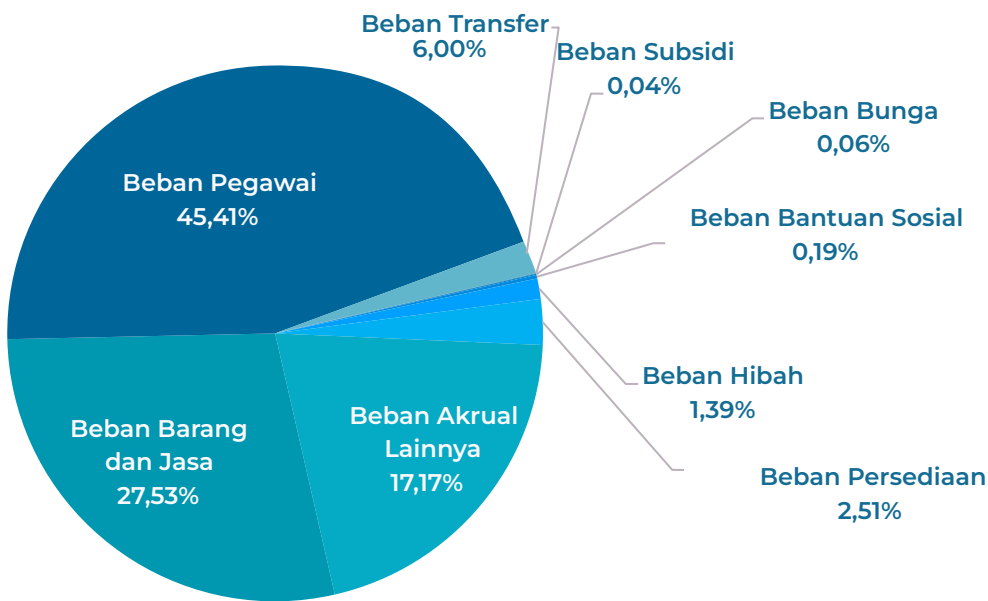
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Pendapatan lainnya Pemda	296.568.172.601	-	-
Pendapatan Penyesuaian Akrua	16.737.398.090	4.663.191.232	258,93%
Jumlah Pendapatan Lainnya	313.305.570.691	4.663.191.232	6.618%

C.2. Beban Operasional

Beban operasional merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset maupun timbulnya kewajiban. Pada tahun 2025, Beban Operasional Konsolidasian tercatat sebesar Rp69.388.408.647.613,- menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp73.333.201.368.646,-. Dengan demikian, Beban Operasional Konsolidasian pada tahun 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp3.944.792.721.033,- atau 5,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan beban yang ditanggung pemerintah konsolidasian, terutama pada beberapa komponen utama beban operasional, sehingga secara umum mencerminkan berkurangnya tekanan beban operasional dibandingkan tahun 2024. Beban operasional tahun 2025 dan 2024 secara rinci disajikan sebagai berikut.

Grafik 9. Komposisi Beban Operasional Konsolidasian



Tabel 13. Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban Pegawai	31.507.081.696.985	29.436.384.947.496	7,03%
Beban persediaan	1.743.129.003.821	2.133.074.573.534	-18,28%
Beban barang dan jasa	19.104.546.243.428	22.570.793.830.721	-15,36%
Beban Bunga	44.466.756.915	58.016.818.159	-23,36%
Beban subsidi	29.748.499.073	6.462.995.127	360,29%
Beban hibah	965.496.614.650	2.254.425.547.273	-57,17%
Beban bantuan sosial	133.273.135.986	131.054.845.223	1,69%
Beban lain-lain/beban tidak terduga	15.835.095.485	31.520.696.793	-49,76%
Beban akrual lainnya	11.911.477.619.030	12.580.130.709.337	-5,32%
Beban Transfer	3.933.353.982.240	4.131.336.404.983	-4,79%
Beban Operasional	69.388.408.647.613	73.333.201.368.646	-5,38%

C.2.1. Beban Pegawai

Pada tahun 2025, Beban Pegawai tercatat sebesar Rp31.507.081.696.985,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp29.436.384.947.496,-. Dengan demikian, Beban Pegawai pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.070.696.749.489,- atau 7,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya beban honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito menjadi Rp2.322.080.250.434,- pada tahun 2025 dari Rp2.016.578.125.597,- pada tahun 2024, dan beban gaji dan tunjangan yang menjadi Rp29.185.001.446.551,- dari Rp27.419.806.821.899,-. Detail beban pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Komposisi Beban Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban gaji dan tunjangan	29.185.001.446.551	27.419.806.821.899	6,44%
Beban honorarium/lembur/ vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transito	2.322.080.250.434	2.016.578.125.597	15,15%
Beban Pegawai	31.507.081.696.985	29.436.384.947.496	7,03%

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Beban Pegawai pada tahun 2025 relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya.

C.2.2 Beban Persediaan

Pada tahun 2025, Beban Persediaan tercatat sebesar Rp1.743.129.003.821,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.133.074.573.534,-. Dengan demikian, Beban Persediaan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp389.945.569.713,- atau 18,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa penggunaan atau konsumsi persediaan pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

C.2.3 Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025, Beban Barang dan Jasa tercatat sebesar Rp19.104.546.243.428,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp22.570.793.830.721,-. Dengan demikian, Beban Barang dan Jasa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.466.247.587.293,- atau 15,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya beberapa komponen utama, yaitu beban barang dari Rp9.823.450.467.039,- menjadi Rp7.841.530.388.990,-, beban jasa dari Rp5.780.842.321.587,- menjadi Rp5.544.774.534.205,-, serta beban perjalanan dinas dari Rp3.009.823.594.415,- menjadi Rp1.605.165.360.006,-. Di sisi lain, beban pemeliharaan meningkat dari Rp1.655.120.910.110,- menjadi Rp1.773.541.503.153,-, dan beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga juga naik dari Rp1.552.440.922.493,- menjadi Rp1.617.276.445.373,-.

Detail beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel pada laman berikut.

Tabel 15. Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban barang	7.841.530.388.990	9.823.450.467.039	-20,18%
Beban jasa	5.544.774.534.205	5.780.842.321.587	-4,08%
Beban pemeliharaan	1.773.541.503.153	1.655.120.910.110	7,15%
Beban perjalanan dinas	1.605.165.360.006	3.009.823.594.415	-46,67%
Beban BLU/BLUD	722.258.011.702	749.115.615.077	-3,59%
Beban barang untuk diserahkan/ dijual kepada masyarakat/pemda /pihak ketiga	1.617.276.445.373	1.552.440.922.493	4,18%
Beban Barang dan Jasa	19.104.546.243.428	22.570.793.830.721	-15,36%

Penurunan beban barang dan jasa pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya beban barang, beban jasa, dan beban perjalanan dinas. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah pada tahun 2025 yang

menekankan pembatasan belanja non-prioritas, termasuk perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, sehingga belanja pemerintah menjadi lebih selektif dan berorientasi pada prioritas.

C.2.4 Beban Bunga

Pada tahun 2025, Beban Bunga tercatat sebesar Rp44.466.756.915,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp58.016.818.159,-. Dengan demikian, Beban Bunga pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.550.061.244,- atau -23,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa beban yang timbul dari pembayaran bunga utang pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024.

Penurunan beban bunga pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pokok utang pemerintah daerah yang menjadi dasar perhitungan bunga, sehingga kewajiban pembayaran bunga pada tahun berjalan menjadi lebih rendah. Di samping itu, penurunan tingkat suku bunga juga turut mendorong berkurangnya beban bunga dibandingkan tahun sebelumnya.

C.2.5 Beban Subsidi

Pada tahun 2025, Beban Subsidi tercatat sebesar Rp29.748.499.073,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp6.462.995.127,-. Dengan demikian, Beban Subsidi pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.285.503.946,- atau 360,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa alokasi beban subsidi pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sehingga kontribusi terhadap beban operasional pemerintah konsolidasian juga meningkat pada tahun berjalan.

Peningkatan beban subsidi pada tahun 2025 dipengaruhi oleh bertambahnya alokasi subsidi pemerintah daerah dalam APBD, terutama untuk mendukung pemenuhan kewajiban pelayanan publik dan pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi digunakan Pemprov Sulsel untuk subsidi potongan harga tiket transportasi udara dan subsidi integrasi transportasi publik metropolitan Minassamata, sedangkan subsidi dari Pemkab Tana Toraja untuk pengendalian harga pangan pokok.

C.2.6. Beban Hibah

Pada tahun 2025, Beban Hibah tercatat sebesar Rp965.496.614.650,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.254.425.547.273,-. Dengan demikian, Beban Hibah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.288.928.932.623,- atau 57,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya beban hibah kepada pemerintah daerah dari Rp811.202.045.383,- pada tahun 2024 menjadi Rp283.749.926.506,- pada tahun 2025, serta berkurangnya beban hibah lainnya dari Rp1.443.223.501.890,- menjadi Rp681.746.688.145,-. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi beban hibah pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Detail beban Hibah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Komposisi Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban hibah kepada pemerintah daerah	283.749.926.506	811.202.045.383	-65,02%
Beban Hibah Lainnya	681.746.688.145	1.443.223.501.890	-52,76%
Beban Hibah	965.496.614.650	2.254.425.547.273	-57,17%

Penurunan beban hibah pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya kebutuhan penyaluran hibah dibandingkan tahun 2024, seiring telah berakhirnya tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 yang pada periode sebelumnya

mendorong pemberian hibah kepada penyelenggara pemilu. Selain itu, kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 lebih diarahkan pada pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pelayanan dasar masyarakat.

C.2.7 Beban Bantuan Sosial

Pada tahun 2025, Beban Bantuan Sosial tercatat sebesar Rp133.273.135.986,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp131.054.845.223,-. Dengan demikian, Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.218.290.763,- atau sekitar 1,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dari Rp80.503.150.000,- pada tahun 2024 menjadi Rp84.840.050.000,- pada tahun 2025. Sementara itu, Beban Bantuan Sosial

untuk Rehabilitasi Sosial menurun dari Rp24.985.143.330,- menjadi Rp22.841.772.616,-, dan Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana juga sedikit menurun dari Rp25.566.551.893,- menjadi Rp25.591.313.370. Secara keseluruhan, Beban Bantuan Sosial pada tahun 2025 relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis dibandingkan tahun sebelumnya.

Detail beban bantuan sosial per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Komposisi Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	22.841.772.616	24.985.143.330	-8,58%
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	84.840.050.000	80.503.150.000	5,39%
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	25.591.313.370	25.566.551.893	0,10%
Beban Bantuan Sosial	133.273.135.986	131.054.845.223	1,69%

C.2.8 Beban Lain-lain/ Beban Tidak Terduga

Pada tahun 2025, Beban Lain-lain/Beban Tidak Terduga tercatat sebesar Rp15.835.095.485,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp31.520.696.793,-. Dengan demikian, pada tahun 2025 pos ini mengalami penurunan sebesar Rp15.685.601.308,- atau -49,76%

dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan Beban Lain-lain/Beban Tidak Terduga pada tahun 2025 disebabkan oleh tingginya kebutuhan diluar dugaan yang terjadi pada tahun 2024.

C.2.9 Beban Akrual Lainnya

Pada tahun 2025, Beban Akrual Lainnya tercatat sebesar Rp11.911.477.619.030,-, menurun sebesar Rp668.653.090.307,- atau 5,32% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp12.580.130.709.337,-. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh Beban Penyusutan Aset Tetap yang menjadi Rp11.237.284.319.110,- dari Rp11.922.201.663.942,-, serta Beban

Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi yang menjadi Rp152.481.832.788,- dari Rp174.398.663.994,-. Di sisi lain, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih meningkat menjadi Rp521.711.467.133,- dari Rp483.530.381.401,-. Detail beban akrual lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Komposisi Beban Akrual Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban Penyusutan Aset Tetap	11.237.284.319.110	11.922.201.663.942	-5,74%
Beban Penyusutan Aset Lainnya/ Amortisasi Aset Lainnya	152.481.832.788	174.398.663.994	-12,57%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	521.711.467.133	483.530.381.401	7,90%
Beban Akrual Lainnya	11.911.477.619.030	12.580.130.709.337	-5,32%

C.3. Beban Transfer

Pada tahun 2025, Beban Transfer tercatat sebesar Rp3.933.353.982.240,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4.131.336.404.983,-. Dengan demikian, Beban Transfer pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp197.982.422.743,- atau 4,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh

Dana Desa dari Rp2.079.607.659.137,- pada tahun 2024 menjadi Rp1.818.644.491.884,- pada tahun 2025. Beban Transfer Pemda sendiri mengalami peningkatan dari Rp2.051.728.745.846,- menjadi Rp2.114.709.490.356,-. Detail beban transfer per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Komposisi Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	1.818.644.491.884	2.079.607.659.137	-12,55%
Beban Transfer Pemda	2.114.709.490.356	2.051.728.745.846	3,07%
Beban Transfer	3.933.353.982.240	4.131.336.404.983	-4,79%

Penurunan Beban Transfer pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi Dana Desa. Di samping itu, dalam penyusunan LKPK, perubahan nilai beban transfer juga

dipengaruhi oleh akun resiprokal dan proses eliminasi dalam konsolidasi, sehingga nilai yang tersaji mencerminkan transaksi transfer setelah penyesuaian antar entitas pemerintah.

C.3.1. Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dan Dana Desa

Pada tahun 2025, Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dan Dana Desa tercatat sebesar Rp1.818.644.491.884,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.079.607.659.137,-. Dengan demikian, pada tahun 2025 pos ini mengalami penurunan sebesar Rp260.963.167.253,- atau -12,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh realisasi pos ini berasal dari realisasi Dana Desa yang belum tercatat posnya.

C.3.2. Beban Transfer Pemda

Pada tahun 2025, Beban Transfer Pemda tercatat sebesar Rp2.114.709.490.356,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.051.728.745.846,-. Dengan demikian, Beban Transfer Pemda pada tahun 2025 mengalami kenaikan

sebesar Rp62.980.744.510,- atau 3,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Detail Beban Transfer Pemda per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 20. Komposisi Beban Transfer Pemda Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	159.646.506.606	86.188.765.852	85,23%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	135.955.362.098	10.389.312.039	1.208%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	347.046.730.688	240.136.939	144.420%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.472.060.890.964	1.954.910.531.016	-24,70%
Beban Transfer Pemda	2.114.709.490.356	2.051.728.745.846	3,07%

C.4. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tercatat **defisit** sebesar Rp38.710.087.448.237,-, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang defisit sebesar Rp40.231.346.109.121,-. Dengan demikian, defisit dari kegiatan operasional pada tahun 2025 mengalami pengurangan sebesar Rp1.521.258.660.884,- atau 3,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan pendapatan operasional pada tahun 2025 cukup mengimbangi besarnya beban operasional yang harus ditanggung, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang fokus dalam melakukan efisiensi, sehingga defisit operasional pada tahun berjalan menjadi lebih ringan dibandingkan tahun 2024.

C.5. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional tercatat sebesar Rp299.792.625.690,-, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yang defisit sebesar Rp169.633.975.369,-. Dengan demikian, defisit kegiatan non operasional pada tahun 2025 mengalami peningkatan defisit sebesar Rp130.158.650.321,- atau 76,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi non operasional pada tahun 2025 masih membentuk defisit, dan nilainya lebih besar dibandingkan tahun 2024. Detail Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Komposisi Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Surplus (Defisit) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	3.494.991	-100%
Surplus (Defisit) Pempus Pelepasan Aset Non Lancar	- 280.587.404.722	- 134.128.758.365	- 109,19%
Surplus (Defisit) Pempus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	109.729.708.233	112.080.479.162	-2,10%
Surplus (Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar	- 68.133.312.909	- 80.877.723.075	15,76%
Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	- 22.908.490.257	-	-
Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya	- 37.893.126.035	- 66.711.468.082	43,20%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	- 299.792.625.690	- 169.633.975.369	-76,73%

C.6. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Defisit Laporan Operasional tercatat sebesar Rp39.032.759.973.793,-, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang defisit sebesar Rp40.009.523.498.479,-. Dengan demikian, defisit Laporan Operasional pada tahun 2025 mengalami pengurangan defisit sebesar Rp976.763.524.686,- atau 2,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah termasuk Pos Luar Biasa tahun 2025 yang tercatat sebesar minus Rp22.879.899.866, yang seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2025 belum mampu menutupi seluruh beban yang timbul, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional, sehingga posisi Laporan Operasional pada tahun berjalan masih mencatat defisit dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun 2024..

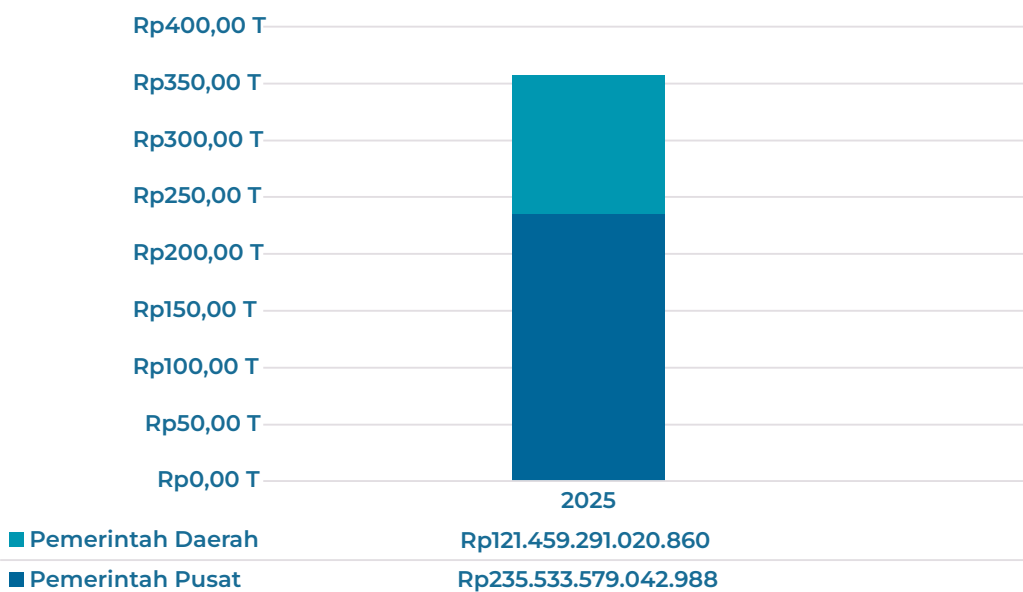
D. Catatan Atas Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

D.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal pemerintah konsolidasian untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp356.992.870.063.848,-, yang berasal dari ekuitas akhir tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian pada

periode tahun ini. Nilai tersebut terdiri atas Ekuitas Awal Pemerintah Pusat sebesar Rp235.533.579.042.988,- dan Ekuitas Awal Pemerintah Daerah sebesar Rp121.459.291.020.860,-.

Grafik 10. Komposisi Ekuitas Awal Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025



D.2. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Defisit Laporan Operasional tercatat sebesar Rp38.379.531.336.821,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2025 jumlah pendapatan operasional belum mampu menutupi keseluruhan beban yang timbul, sehingga ekuitas pemerintah konsolidasian terpengaruh oleh defisit pada tahun berjalan.

D.3. Koreksi - Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas tercatat sebesar -Rp1.201.390.781.048,-. Detail koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Komposisi Koreksi- koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2025
Koreksi Nilai Persediaan	773.446.780
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	- 2.730.879.456.506
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	2.317.421.298.419
Koreksi Lain-lain	- 775.007.699.748
Total Koreksi	- 1.201.390.781.048

D.4. Transaksi Antar Entitas

Pada tahun 2025, Transaksi Antar Entitas tercatat sebesar Rp42.396.251.684.440,-. Pos ini mencerminkan transaksi yang terjadi antar entitas pemerintah dalam lingkup konsolidasi, sehingga memengaruhi perubahan ekuitas selama tahun berjalan.

D.5. Ekuitas Akhir

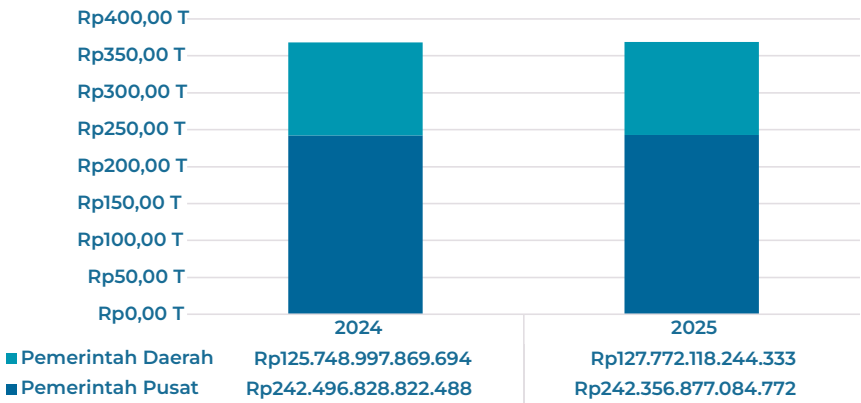
Pada tahun 2025, Ekuitas Akhir tercatat sebesar Rp359.558.947.466.976,-, dengan penjelasan lebih lanjut dituangkan pada bagian CALK neraca.

E. Catatan Atas Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

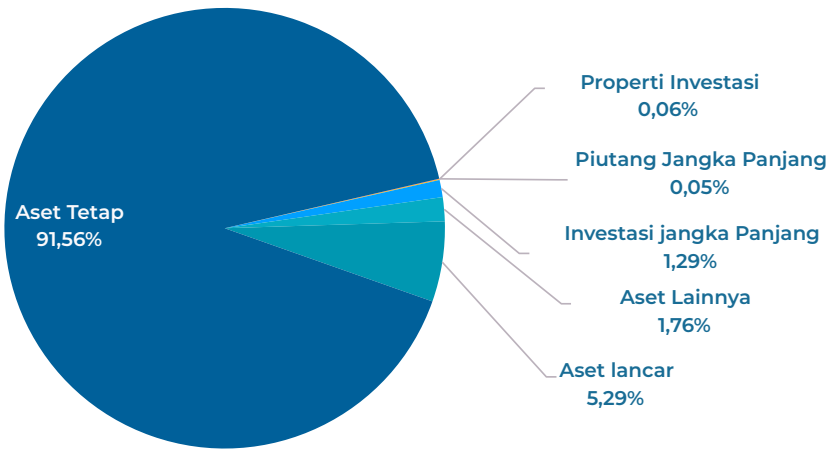
E.1. Aset Konsolidasian

Jumlah aset pada neraca pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp370.119.783.990.077,- dan Rp368.076.682.019.588,-. Jumlah Aset pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar Rp2.043.101.970.489,- atau 0,56% dibandingkan dengan tahun 2024. Jumlah Aset tersebut terdiri dari aset Pemerintah Pusat sebesar Rp242.356.877.084.772,- dan aset Pemerintah Daerah sebesar Rp127.772.118.244.333,-, setelah dikurangi eliminasi akun resiprokal sebesar Rp9.211.339.028,- dengan gambaran sebagai berikut.

Grafik 11. Perbandingan Komposisi Aset Konsolidasian Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024



Grafik 12. Komposisi Aset Konsolidasian Tahun 2025



Tabel 23. Komposisi Aset Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Aset lancar	19.561.256.343.737	17.240.476.332.101	13,46%
Investasi jangka Panjang	4.766.089.585.223	4.595.972.200.024	3,70%
Aset Tetap	338.887.820.994.270	339.446.209.208.587	-0,16%
Properti Investasi	230.693.560.525	232.597.001.161	-0,82%
Dana Cadangan	0	0	-
Piutang Jangka Panjang	172.956.936.636	115.098.270.054	50,27%
Aset Lainnya	6.500.966.569.685	6.446.329.007.661	0,85%
Aset	370.119.783.990.077	368.076.682.019.588	0,56%

Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Aset Lancar dari Rp17.240.476.332.101,- menjadi Rp19.561.256.343.737,-, meskipun Aset Tetap mengalami penurunan dari Rp339.446.209.208.587,- menjadi Rp338.887.820.994.270,-.

Peningkatan aset konsolidasian pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh kenaikan aset lancar, khususnya pada kas dan setara kas, piutang, dan persediaan. Meskipun aset tetap mengalami penurunan, peningkatan pada komponen aset lancar tersebut lebih dominan sehingga mendorong kenaikan total aset konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2025.

E.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Konsolidasian tercatat sebesar Rp19.561.256.343.737,-, meningkat sebesar Rp2.320.780.011.636,- atau 13,46% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp17.240.476.332.101,-. Aset lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Aset Lancar Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Kas dan setara kas	4.669.644.806.736	3.613.266.690.213	29,24%
Investasi jangka pendek	95.500.000.000	75.500.000.000	26,49%
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	62.445.434.697	118.760.853.014	-47,42%
Piutang	2.789.710.926.173	2.429.709.574.048	14,82%
Persediaan	11.943.955.176.131	11.003.239.214.826	8,55%
Aset Lancar	19.561.256.343.737	17.240.476.332.101	13,46%

Peningkatan aset lancar terutama dipengaruhi oleh kenaikan kas dan setara kas dari Rp3.613.266.690.213,- menjadi Rp4.669.644.806.736,-, piutang dari Rp2.429.709.574.048,- menjadi Rp2.789.710.926.173,-, persediaan dari Rp11.003.239.214.826,- menjadi Rp11.943.955.176.131,-, serta investasi jangka pendek dari Rp75.500.000.000,- menjadi Rp95.500.000.000,-.

Peningkatan aset lancar pada tahun 2025

tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek sebagaimana tersaji dalam neraca, tetapi juga didukung oleh kuatnya penyaluran Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. Terdapat pertumbuhan rekening kas daerah dengan persentase yang signifikan pada kabupaten Bone, Takalar, dan Bantaeng dengan total pertumbuhan Rp200.756.404.997,- atau mencapai 16% dari total pertumbuhan seluruh kab/kota.

E.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang pemerintah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp4.766.089.585.223,-. Angka tersebut meningkat sebesar Rp170.117.385.199,- atau 3,7% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.595.972.200.024,-.

Investasi jangka panjang pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2025 tersebut seluruhnya berasal dari neraca pemerintah daerah. Investasi jangka panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara rinci disajikan dalam tabel laman berikut.

Tabel 25. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Investasi jangka panjang non permanen	5.242.733.097	5.401.144.409	-2,93%
Investasi jangka panjang permanen	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Investasi Jangka Panjang	4.766.089.585.223	4.595.972.200.024	3,70%

Investasi jangka panjang tersebut terdiri atas investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp5.242.733.097,- dan investasi jangka panjang permanen sebesar Rp4.760.846.852.126,-. Kenaikan investasi jangka panjang pada tahun 2025

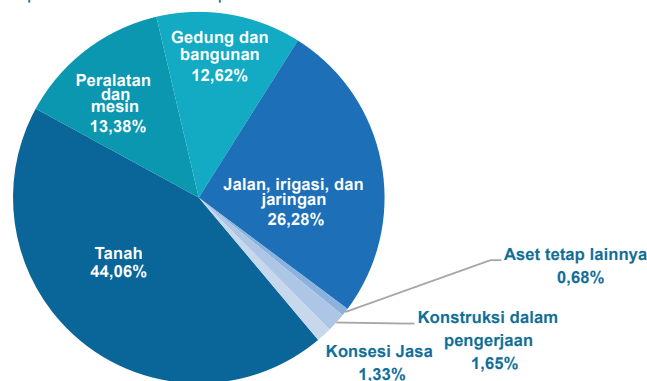
disebabkan oleh adanya penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada tahun berjalan, sehingga mendorong peningkatan nilai investasi jangka panjang pemerintah konsolidasian dibandingkan tahun sebelumnya.

E.1.3. Aset Tetap Konsolidasian

Aset Tetap Konsolidasian tercatat sebesar Rp338.887.820.994.270,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp339.446.209.208.587,-. Dengan demikian, aset tetap konsolidasian pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp558.388.214.317,- atau turun 0,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai aset tetap tersebut terdiri atas tanah sebesar Rp211.344.110.589.031,-, peralatan dan mesin sebesar Rp64.197.383.678.014,-, gedung dan bangunan sebesar Rp60.512.012.605.308,-, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp126.030.971.963.983,-, aset tetap lainnya

sebesar Rp3.261.878.693.809,-, konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp7.923.169.191.186,-, serta konsesi jasa sebesar Rp6.384.888.583.525,-. Akumulasi penyusutan sampai periode ini tercatat sebesar -Rp140.766.594.310.585,-. Secara umum, penurunan aset tetap konsolidasian pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kenaikan pada beberapa komponen aset tetap belum mampu mengimbangi peningkatan akumulasi penyusutan dan pengurangan aset tetap lainnya.

Grafik 13. Komposisi Aset Tetap Konsolidasian Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024



Tabel 26. Komposisi Aset Tetap Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Tanah	211.344.110.589.031	210.248.806.811.208	0,52%
Peralatan dan mesin	64.197.383.678.014	60.838.163.960.093	5,52%
Gedung dan bangunan	60.512.012.605.308	57.454.233.214.818	5,32%
Jalan, irigasi, dan jaringan	126.030.971.963.983	122.497.050.955.142	2,88%
Aset tetap lainnya	3.261.878.693.809	4.343.637.685.861	-24,90%
Konstruksi dalam pengerjaan	7.923.169.191.186	7.710.411.284.126	2,76%
Konsesi Jasa	6.384.888.583.525	6.532.578.329.525	-2,26%
Akumulasi penyusutan	-140.766.594.310.585	-130.178.673.032.186	-8,13%
Aset Tetap	338.887.820.994.270	339.446.209.208.587	-0,16%

a. Tanah

Tanah pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp211.344.110.589.031,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp210.248.806.811.208,-. Dengan demikian, nilai tanah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.095.303.777.823,- atau 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari tanah pemerintah pusat sebesar Rp153.146.766.507.610,- dan tanah pemerintah daerah sebesar Rp58.197.344.081.421,-. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan atau penyesuaian nilai aset tanah baik pada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp64.197.383.678.014,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp60.838.163.960.093,-. Dengan demikian, nilai peralatan dan mesin pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.359.219.717.921,- atau 5,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari peralatan dan mesin pemerintah pusat sebesar Rp41.639.775.701.022,- dan peralatan dan mesin pemerintah daerah sebesar Rp22.557.607.976.992,-. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan aset peralatan dan mesin baik pada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama tahun berjalan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp60.512.012.605.308,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp57.454.233.214.818,-. Dengan demikian, nilai gedung dan bangunan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.057.779.390.490,- atau 5,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari gedung dan bangunan pemerintah pusat sebesar Rp22.534.888.278.297,- dan gedung dan bangunan pemerintah daerah

sebesar Rp37.977.124.327.011,-. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan atau penyesuaian nilai aset gedung dan bangunan baik pada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama tahun berjalan.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp126.030.971.963.983,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp122.497.050.955.142,-. Dengan demikian, nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.533.921.008.841,- atau 2,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pemerintah pusat sebesar Rp54.795.880.805.727,- dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pemerintah daerah sebesar Rp71.235.091.158.256,-. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan atau penyesuaian nilai aset infrastruktur baik pada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama tahun berjalan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp3.261.878.693.809,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4.343.637.685.861,-. Dengan demikian, nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.081.758.992.052,- atau 24,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari Aset Tetap Lainnya pemerintah pusat sebesar Rp1.648.922.192.243,- dan Aset Tetap Lainnya pemerintah daerah sebesar Rp1.612.956.501.566,-.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp7.923.169.191.186,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp7.710.411.284.126,-. Dengan demikian, nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp212.757.907.060,- atau 2,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pemerintah

pusat sebesar Rp6.372.643.099.405,- dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pemerintah daerah sebesar Rp1.550.526.091.781,-. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan nilai atas pekerjaan pembangunan aset yang masih dalam proses penyelesaian pada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2025.

g. Konsesi Jasa

Konsesi Jasa pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp6.384.888.583.525,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp6.532.578.329.525,-. Dengan demikian, nilai Konsesi Jasa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp147.689.746.000,- atau 2,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah tidak terdapat saldo konsesi jasa. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian nilai aset konsesi jasa pada entitas pemerintah pusat sampai dengan 31 Desember 2025.

h. Aset Tetap Belum Diregister

Tidak terdapat saldo Aset Tetap Belum Diregister per 31 Desember 2025 maupun per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perolehan aset tetap sampai dengan akhir periode pelaporan telah teridentifikasi dan tercatat pada akun definitif.

i. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan pada aset tetap konsolidasian tercatat sebesar Rp140.766.594.310.585,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp130.178.673.032.186,-. Dengan demikian, akumulasi penyusutan pada tahun 2025 mengalami penambahan sebesar Rp10.587.921.278.399,- atau 8,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari akumulasi penyusutan pemerintah pusat sebesar Rp63.997.571.507.532,- dan akumulasi penyusutan pemerintah daerah sebesar Rp76.769.022.803.054,-. Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, baik pada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sampai dengan 31 Desember 2025.

E.1.4. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, serta atau tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi tercatat sebesar Rp230.693.560.525,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp232.597.001.161,-. Dengan demikian, nilai Properti Investasi pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.903.440.636,- atau 0,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah tidak terdapat saldo properti investasi.

E.1.5. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang tercatat sebesar Rp172.956.936.636,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp115.098.270.054,-. Dengan demikian, piutang jangka panjang pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp57.858.666.582,- atau 50,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari piutang jangka panjang pemerintah pusat sebesar Rp25.018.060,- dan tagihan jangka panjang pemerintah daerah sebesar Rp172.931.918.576,-. Detail piutang jangka panjang disajikan dalam tabel pada laman berikut.

Tabel 27. Komposisi Piutang jangka Panjang Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Tagihan piutang penjualan angsuran	40.016.171.717	40.011.745.045	-1,88%
Tagihan tuntutan perbendaharaan /tagihan tuntutan ganti rugi	135.324.341.055	76.711.295.069	76,41%
Penyisihan piutang jangka panjang	-1.625.270.000	-1.624.770.060	-0,03%
Jumlah Piutang Jangka Panjang	172.956.936.636	115.098.270.054	50,27%

Secara rinci, piutang jangka panjang tersebut terdiri atas tagihan piutang penjualan angsuran sebesar Rp39.257.865.581,- dan tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi sebesar Rp135.324.341.055,-, setelah dikurangi penyisihan piutang jangka panjang sebesar negatif Rp1.625.270.000,-.

Peningkatan piutang jangka panjang pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh bertambahnya tagihan jangka panjang pada pemerintah daerah, khususnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan tagihan penjualan angsuran, sedangkan kontribusi piutang jangka panjang pemerintah pusat relatif kecil.

E.1.6. Aset Lainnya

Aset Lainnya tercatat sebesar Rp6.500.966.569.685,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp6.446.329.007.661,-. Dengan demikian, Aset Lainnya pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.637.562.024,- atau 0,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari Aset Lainnya pemerintah pusat sebesar Rp4.635.540.588.718,- dan Aset Lainnya pemerintah daerah sebesar Rp1.865.425.980.967,-, yang dalam konsolidasi turut memperhitungkan penyesuaian antar entitas. Detail aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 28. Komposisi Aset Lainnya Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Kemitraan dengan pihak ketiga	250.240.838.543	247.521.872.143	1,10%
Aset tidak berwujud	1.762.415.839.314	1.398.896.008.132	25,99%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	573.061.515.059	404.944.577.294	41,52%
Aset lain-lain	8.296.459.422.605	6.759.726.468.966	22,73%
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-4.381.211.045.837	-2.364.759.918.874	-85,27%
Aset Lainnya	6.500.966.569.685	6.446.329.007.661	0,85%

a. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp250.240.838.543,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp247.521.872.143,-. Dengan demikian, nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.718.966.400,- atau 1,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah daerah, sedangkan pada

pemerintah pusat tidak terdapat saldo kemitraan dengan pihak ketiga. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan nilai kerja sama pemanfaatan aset atau bentuk kemitraan lainnya yang diakui dalam laporan keuangan pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2025.

b. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud tercatat sebesar Rp1.762.415.839.314,-, meningkat

dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.398.896.008.132,-. Dengan demikian, nilai Aset Tak Berwujud pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp363.519.831.182,- atau 25,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari Aset Tak Berwujud pemerintah pusat sebesar Rp1.073.847.628.747,- dan Aset Tak Berwujud pemerintah daerah sebesar Rp688.568.210.567,-. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan atau penyesuaian nilai atas aset non fisik yang memberikan manfaat ekonomi atau manfaat jasa di masa mendatang dalam laporan keuangan pemerintah konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2025.

c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya tercatat sebesar Rp573.061.515.059,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp404.944.577.294,-. Dengan demikian, nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp168.116.937.765,- atau 41,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah tidak terdapat saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Kenaikan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh adanya saldo RPATA yang sebagian besar bersumber dari Satker PU, sehingga sejumlah dana belum dapat disalurkan kepada penerima dan pada akhir periode pelaporan masih tercatat sebagai dana yang penggunaannya dibatasi. Kondisi ini umumnya terjadi karena terdapat kendala pada proses pengadaan.

d. Aset Lain - Lain

Aset Lain-lain tercatat sebesar Rp8.296.459.422.605,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp6.759.726.468.966,-. Dengan demikian, nilai Aset Lain-lain pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.732.953.639,- atau 22,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari Aset

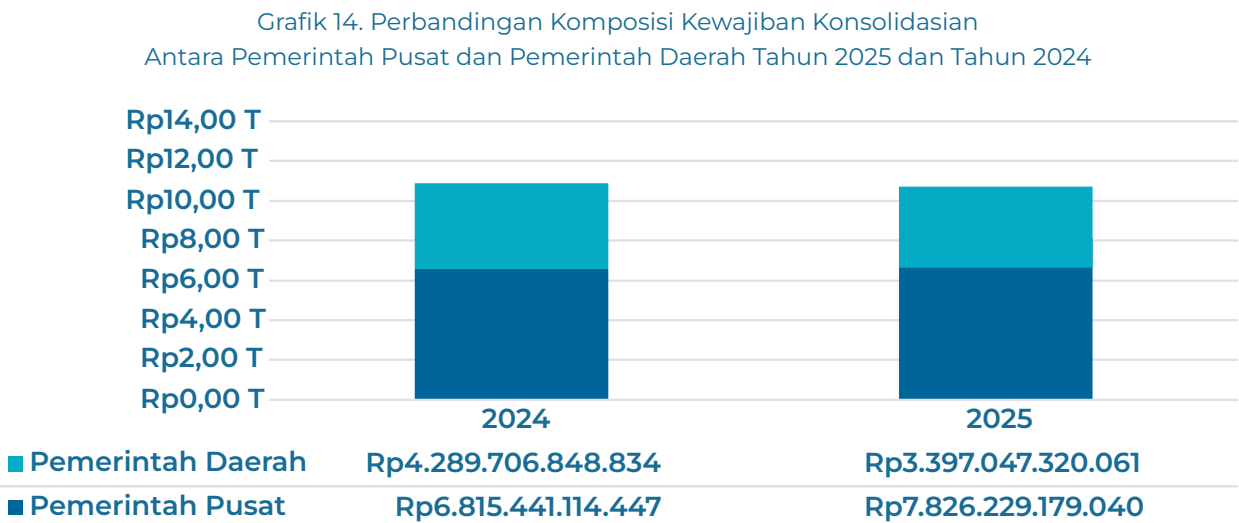
Lain-lain pemerintah pusat sebesar Rp4.651.061.540.901,- dan Aset Lain-lain pemerintah daerah sebesar Rp3.645.397.881.704,-. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian nilai pada kelompok aset lain-lain, baik pada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sampai dengan 31 Desember 2025.

e. Akumulasi Amortisasi-Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya tercatat sebesar Rp4.381.211.045.837,-, bertambah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.364.759.918.874,-. Dengan demikian, nilai akumulasi amortisasi aset lainnya pada tahun 2025 mengalami penambahan sebesar Rp2.016.451.126.963,- atau 85,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut terutama berasal dari pemerintah pusat, karena pada aset pemerintah pusat terdapat akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya yang signifikan, sedangkan pada pemerintah daerah penyajian aset lainnya dilakukan secara lebih ringkas. Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya akumulasi amortisasi atas aset tak berwujud dan penyusutan atas aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2025, sehingga menurunkan nilai buku bersih aset lainnya pada laporan keuangan pemerintah konsolidasian.

E.2. Kewajiban Konsolidasi

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Perkembangan kewajiban tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.



Grafik 15. Komposisi Kewajiban Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024



Tabel 29. Komposisi Kewajiban Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Kewajiban Jangka Pendek	4.184.028.018.246	3.856.476.211.765	8,49%
Kewajiban Jangka Panjang	6.376.808.504.855	7.014.797.407.738	-9,09%
Kewajiban	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%

Kewajiban/Utang Konsolidasian tercatat sebesar Rp10.560.836.523.101,-, turun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp10.871.273.619.503,-. Dengan demikian, kewajiban/utang konsolidasian pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp310.437.096.402,- atau 2,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Kewajiban tersebut terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar

Rp4.184.028.018.246,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp6.376.808.504.855,-. Secara umum, penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kewajiban pemerintah konsolidasian, baik yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek maupun kewajiban yang bersifat jangka panjang, sampai dengan 31 Desember 2025.

E.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.184.028.018.246,- dan Rp3.856.476.211.765,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,49%. Jumlah tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.330.874.643.710,- dan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.515.593.350.536,-, setelah dikurangi eliminasi akun resiprokal sebesar Rp662.439.976.000,-. Adapun kewajiban jangka pendek secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	13.338.425.066	3.474.833.812	283,86%
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.730.708.837.068	3.123.025.728.163	-12,56%
Utang Bunga	2.379.756.412	65.843.529.903	-96,39%
Utang Transfer	59.038.778.540	0	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	429.751.783.743	380.543.043.924	12,93%
Utang Yang Belum Ditagihkan	18.000.000.000	0	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	76.105.707.517	69.986.473.865	8,74%
Pendapatan Diterima Dimuka	774.412.709.001	88.925.710.034	770,85%
Uang Muka	23.078.000	7.519.054	206,93%
Utang Jangka Pendek Lainnya	80.268.942.900	124.669.373.010	-35,61%
Kewajiban Jangka Pendek	4.184.028.018.246	3.856.476.211.765	8,49%

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp13.338.425.066,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp3.474.833.812,-. Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada tahun 2025 seluruhnya berasal dari pemerintah daerah, sedangkan pada pemerintah pusat tidak terdapat saldo pada pos tersebut.

b. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga tercatat sebesar Rp2.730.708.837.068,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp3.123.025.728.163,-. Dengan demikian, utang kepada pihak ketiga pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp392.316.891.095,- atau 12,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari utang kepada pihak ketiga pemerintah pusat sebesar Rp755.633.683.975,- dan utang belanja pemerintah daerah sebesar Rp1.975.075.153.093,-. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kewajiban pemerintah konsolidasian kepada pihak ketiga atas barang, jasa, atau belanja yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya.

c. Utang Bunga

Utang Bunga tercatat sebesar Rp2.379.756.412,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar

Rp65.843.529.903,-. Dengan demikian, pada tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp63.463.773.491 atau 96,39%. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah daerah, sedangkan pada pemerintah pusat tidak terdapat saldo utang bunga. Pos ini mencerminkan kewajiban pemerintah daerah atas bunga yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 hampir seluruhnya lunas relatif dengan jumlah utang dari tahun lalu.

d. Utang Transfer

Utang Transfer tercatat sebesar Rp59.038.778.540,-, meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp0,-. Dengan demikian, pada tahun 2025 terdapat pengakuan utang transfer sebesar Rp59.038.778.540,- yang seluruhnya merupakan kewajiban pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah tidak terdapat saldo utang transfer pada pos ini. Pos tersebut mencerminkan kewajiban transfer yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disalurkan atau belum diselesaikan pembayarannya kepada entitas penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tercatat sebesar Rp429.751.783.743,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp380.543.043.924,-. Dengan demikian, nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp49.208.739.819,- atau 12,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah daerah, sedangkan pada pemerintah pusat tidak terdapat saldo pada pos ini. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kewajiban jangka panjang pemerintah daerah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

f. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan tercatat sebesar Rp18.000.000.000,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang

sebesar Rp0,-. Dengan demikian, pada tahun 2025 terdapat pengakuan utang yang belum ditagihkan sebesar Rp18.000.000.000,-. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah tidak terdapat saldo pada pos ini. Pos ini mencerminkan kewajiban pemerintah yang sampai dengan 31 Desember 2025 telah timbul, namun tagihan atau dokumen penagihannya belum diterima secara lengkap pada tanggal pelaporan.

g. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan tercatat sebesar Rp76.105.707.517,-, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp69.986.473.865,-. Dengan demikian, nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.119.233.652,- atau 8,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut terutama berasal dari pemerintah pusat, yang pada neraca pemerintah pusat tercatat sebesar Rp76.134.760.071,-. Pos ini mencerminkan kewajiban pemerintah untuk mengembalikan kelebihan penerimaan yang telah dibayarkan oleh pihak lain dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diselesaikan pengembaliannya.

h. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka tercatat sebesar Rp774.412.709.001,-, meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp88.925.710.034,-. Dengan demikian, nilai Pendapatan Diterima Dimuka pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp685.486.998.967,- atau 770,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut terutama berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp752.716.650.937,-, sedangkan sisanya berasal dari pemerintah daerah. Kenaikan signifikan Pendapatan Diterima di Muka sebagian besar disebabkan karena Pendapatan Pajak Diterima Dimuka. Akun tersebut muncul karena implementasi awal Coretax di akhir tahun 2025, karena dampak status jenis pajak yang belum dapat didefinisikan

i. Uang Muka

Uang Muka tercatat sebesar Rp23.078.000,- meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp7.519.054,-. Dengan demikian, nilai Uang Muka pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp15.558.946,- atau 206,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah tidak terdapat saldo pada pos ini. Pos ini mencerminkan kewajiban pemerintah atas uang muka yang sampai dengan 31 Desember 2025 masih tercatat dan belum diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

j. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya tercatat

sebesar Rp80.268.942.900,-, turun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp124.669.373.010,-. Dengan demikian, nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.400.430.110,- atau 35,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan gabungan dari utang jangka pendek lainnya pemerintah pusat sebesar Rp6.916.768.741,- dan utang jangka pendek lainnya pemerintah daerah sebesar Rp73.352.174.159,-. Pos ini mencerminkan kewajiban jangka pendek pemerintah konsolidasian selain pos-pos yang telah disajikan secara tersendiri, yang sampai dengan 31 Desember 2025 masih harus diselesaikan.

E.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang tercatat sebesar Rp6.376.808.504.855,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp7.014.797.407.738,-. Dengan demikian, kewajiban jangka panjang pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp637.988.902.883,- atau 9,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah daerah, sedangkan pada pemerintah pusat tidak terdapat saldo kewajiban jangka panjang selain kewajiban konsesi jasa. Pos ini mencerminkan kewajiban pemerintah daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Keberadaan pos Utang Jangka Panjang Dalam Negeri pada Pemda Sulawesi Selatan disebabkan oleh masih adanya kewajiban pinjaman dalam negeri yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025.

E.2.3. Kewajiban Konsesi Jasa

Pada tahun 2025, Kewajiban Konsesi Jasa tercatat sebesar Rp5.495.354.535.330,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp5.745.759.594.445,-. Dengan demikian, nilai kewajiban konsesi jasa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp250.405.059.115,- atau 4,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada pemerintah daerah tidak terdapat saldo kewajiban konsesi jasa.

Kewajiban konsesi jasa merupakan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama antara pemerintah dan mitra dalam penyediaan layanan publik melalui pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur untuk jangka waktu tertentu. Pada tahun 2025, pos ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dengan penyesuaian nilai kewajiban sesuai perkembangan pelaksanaan perjanjian konsesi.

E.2.4. Ekuitas

Ekuitas pemerintah konsolidasian tercatat sebesar Rp359.558.947.466.976,-, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp357.205.408.400.085,-. Dengan demikian, ekuitas pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.353.539.066.891,-

atau 0,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2025, hak residual pemerintah atas aset setelah dikurangi kewajiban mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh perubahan nilai aset, kewajiban, serta hasil operasional selama tahun berjalan.

CALK LSKP TINGKAT WILAYAH



PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) di Kabupaten Sidrap

LKPK dan LSKP Tingkat Wilayah Periode Tahun 2025
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

A. Penjelasan Umum

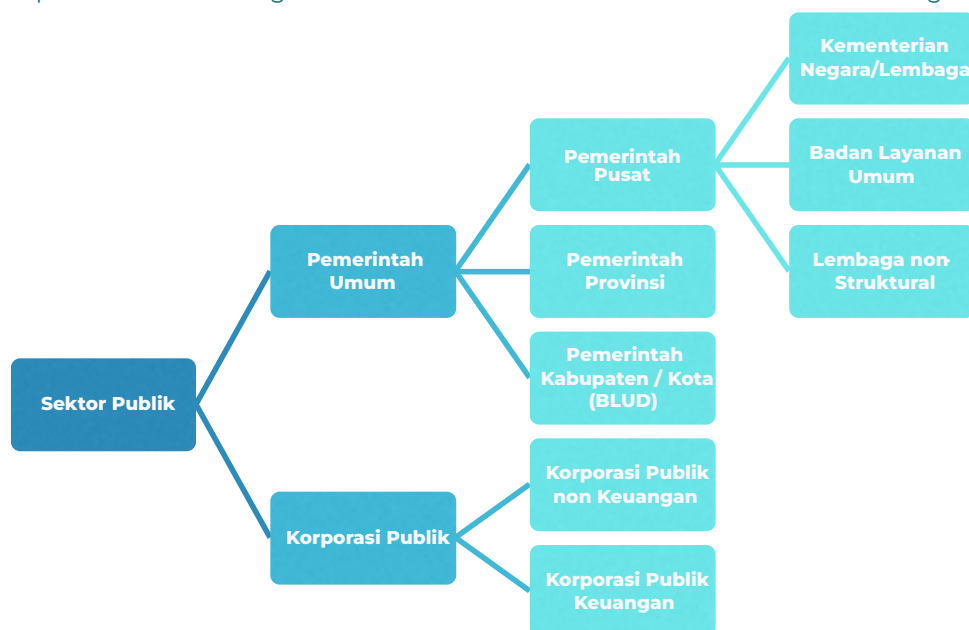
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah. Sebagai perwujudan dari amanah tersebut, Pemerintah telah mulai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) sejak tahun 2013. Penyusunan LKPK dan LSKP tersebut masih terdapat beberapa keterbatasan, karena belum menggunakan data informasi akuntansi yang berbasis akrual. Namun demikian dengan upaya keras, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah berhasil menyusun petunjuk teknis penyusunan LKPK dan LSKP sehingga mampu menghasilkan LKPK dan LSKP yang lebih berkualitas dengan data yang relevan dan andal karena mendasarkan pada informasi pada laporan keuangan yang berbasis akrual.

Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) disusun berdasarkan informasi akuntansi berbasis akrual dan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan telah mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi yang digunakan dalam kompilasi statistik. Selain itu, pengaturan tersebut menjadi panduan penyajian statistik fiskal dalam suatu kerangka analitis sehingga laporan statistik keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi pengguna (*stakeholders*). Beberapa manfaat laporan statistik keuangan, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, analisis perbandingan antar negara, dan sebagai jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi sehingga dapat lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi.

Data statistik keuangan pemerintah secara keseluruhan dikompilasi dari laporan sektor korporasi publik dan sektor pemerintahan umum. Adapun cakupan statistik keuangan sektor publik berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah, dapat dilihat pada bagan berikut.

Grafik 16. Cakupan Statistik Keuangan Sektor Publik Berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah



Sektor Pemerintah Umum

Laporan statistik pada sektor pemerintah umum meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi. Sektor pemerintah umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksi, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan

tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan.

Lebih lanjut, statistik keuangan pada Pemerintah Pusat terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun tetap berada dalam kendali Pemerintah Pusat.

Sektor Korporasi Publik

Laporan statistik pada sektor korporasi publik meliputi subsektor korporasi publik non keuangan dan subsektor korporasi publik keuangan. Pada subsektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sementara subsektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan. Mereka dapat memunculkan

kewajiban keuangan atas tanggung jawabnya sendiri.

Sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LKPK TW dan LSKP TW Pada Kanwil DJPb, maka Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Provinsi Sulawesi Selatan ini, tidak disusun secara keseluruhan (sektor publik), namun hanya Laporan Statistik Keuangan pada Pemerintah Umum, belum termasuk Statistik Keuangan pada sektor Korporasi Publik.

B. Pendekatan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) membutuhkan sumber data yang bisa diyakini keandalannya karena informasi statistik keuangan tersebut akan digunakan *stakeholder* dalam cakupan yang sangat luas. Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara pemetaan Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi

dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

Pemetaan BAS mutlak diperlukan karena adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik keuangan Pemerintah. Adapun data yang dipetakan merupakan data akun detail pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, data hasil pemetaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi laporan statistik keuangan sektor pemerintah umum, yaitu: Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi

Lainnya, Neraca, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas, dan Meta Data.

LSKP-TW disusun melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW, melalui pemetaan BAS detail data LKPP-TW;
2. Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui pemetaan BAS detail data LKPDK-TW;
3. Konsolidasian kertas kerja LSKPPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW akan menghasilkan LSKP-TW.

Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Konsolidasian dilakukan dengan pemetaan BAS detail kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) ke dalam *Government Financial Statistics (GFS) Classification Assistant* yang menyediakan kerangka pemetaan masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW terdiri dari beberapa laporan sebagai berikut:

1. Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah

Tingkat Wilayah

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah
Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah
Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
5. Meta data LSKP
Meta data LKSP-TW berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Informasi dasar
 - b. Definisi Data
 - c. Cakupan Data
 - d. Periode Publikasi
 - e. Ketepatan Waktu Publikasi
 - f. Sumber Data
 - g. Metodologi
 - h. Integritas Data
 - i. Akses Data

C. Penjelasan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 3 (tiga) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yaitu Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Ekonomi Pemerintah Lainnya.

Laporan operasi menyajikan informasi atas transaksi operasi (pendapatan dan beban) dan Transaksi aset (non keuangan dan keuangan). Laporan ini disusun untuk mengetahui komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (*net cost*) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (*full cost*) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), laporan operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

a. Saldo Operasi Neto (*net operating balance*), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban, d

b. Pinjaman Neto (*net lending/borrowing*), yang juga dikenal dengan saldo fiskal (*fiscal balance*) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.

Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum merupakan hasil konsolidasi LO-Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan LO-Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

Berdasarkan Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tahun 2025, secara umum *revenue* tercatat Rp26.708.337.122.825,- dan *expense* mencapai Rp53.281.013.537.863,-. Saldo operasi neto atau *net operating balance* sebesar -Rp26.572.676.415.037,- yang setelah dikurangi dengan akuisisi aset non keuangan neto atau *net transactions in assets and liabilities* tercatat sebesar -Rp26.572.676.415.037,- menghasilkan angka Peminjaman Neto atau *net lending* sebesar Rp38.303.919.524.052,-. *Net lending* tersebut dipenuhi dengan *net acquisition of financial assets* sebesar -Rp38.653.615.924.110,- dan *net incurrence of liabilities* sebesar -Rp349.696.400.058,-.

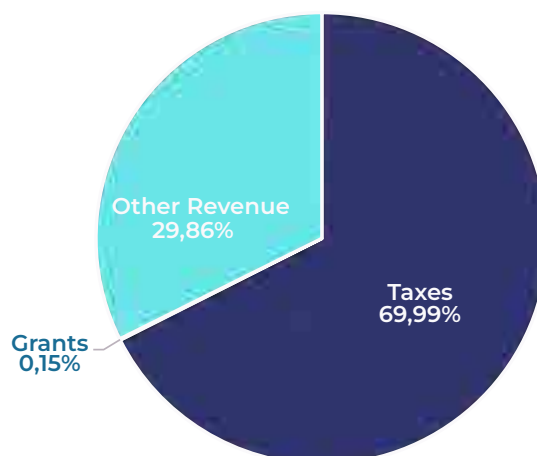
C.1. Pendapatan Operasional Statistik (Revenue)

Pendapatan operasional statistik berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah tahun 2025 sebesar Rp26.708.337.122.825,- dan tahun 2024 sebesar Rp29.318.567.898.125,-. Pendapatan operasional statistik (*revenue*) tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 8,9% atau sebesar Rp2.610.230.775.300,- dibandingkan dengan *revenue* tahun 2024. Detail perbandingan pendapatan operasional statistik disajikan pada laman berikut.

Tabel 31. Komposisi Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Taxes	18.692.525.690.612	21.589.867.976.422	-13,42%
Grants	40.289.984.954	517.386.891.378	-92,21%
Other Revenue	7.975.521.447.260	7.211.313.030.325	10,60%
Revenue	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%

Grafik 17. Proporsi Komponen Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025

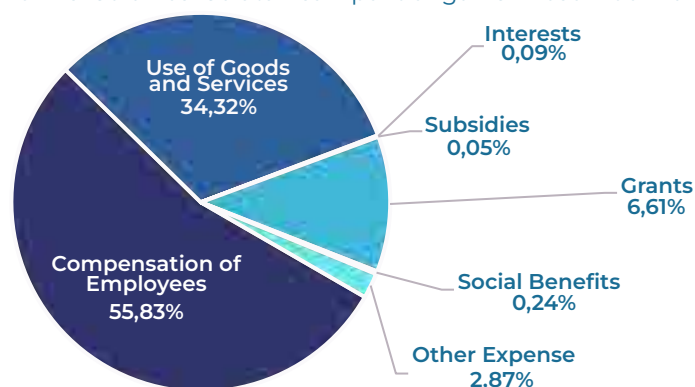


Jumlah pendapatan operasional statistik terdiri dari pendapatan perpajakan konsolidasian (*taxes*) sebesar Rp18.692.525.690.612,- atau 69,99% dari total *revenue*. Pendapatan hibah konsolidasian (*grants*) sebesar Rp40.289.984.954,- atau 0,15% dari total *revenue*, dan pendapatan lainnya konsolidasian (*other revenue*) sebesar Rp7.975.521.447.260,- atau 29,86% dari total *revenue* tahun 2025.

C.2. Beban Operasional Statistik (*Expenses*)

Beban operasional statistik tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp53.281.013.537.863,-. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.376.041.150.058,- atau turun 5,96% dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp56.657.054.687.921,-. Proporsi komponen beban operasional statistik tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 tersebut digambarkan pada grafik halaman berikut.

Grafik 18. Proporsi Komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025



Tabel 32. Komposisi Beban Operasional Statistik Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Compensation of Employees	29.744.821.791.039	27.951.993.319.603	6,41%
Use of Goods and Services	18.284.209.090.972	21.612.813.718.658	-15,40%
Consumption of Fixed Capital	-	-	-
Interests	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Subsidies	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Grants	3.520.748.237.268	4.781.567.885.738	-26,37%
Social Benefits	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Other Expense	1.529.928.544.280	2.128.678.796.084	-28,13%
Expenses	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%

Beban Operasional Statistik didominasi berasal dari belanja pegawai dengan proporsi 55,83% dari total beban operasional statistik atau sebesar Rp29.744.821.791.039,-. Proporsi beban terbesar berikutnya ialah penggunaan barang dan jasa dengan proporsi sebesar 34,32% dari total beban operasional statistik atau sebesar Rp18.284.209.090.972,-. Selanjutnya, hibah, beban lainnya, manfaat sosial, bunga, dan

subsidi masing-masing memiliki proporsi sebesar 6,61%, 2,87%, 0,24%, 0,09%, dan 0,05% terhadap total beban operasional statistik tahun 2025.

Penurunan dengan persentase terbesar terjadi pada belanja lainnya sebesar 28,13%, diikuti oleh bunga yang turun sebesar 22,34%, dan beban barang dan jasa sebesar 15,4%.

C.3. Saldo Operasi Bruto dan Saldo Operasi Neto (Gross Operating Balance - Net Operating Balance)

Saldo Operasi Bruto (*Gross Operating Balance*/GOB) diperoleh dari pendapatan operasional statistik setelah dikurangi dengan beban operasional statistik tanpa memasukkan komponen konsumsi aset tetap. Saldo operasi bruto tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan periode 31 Desember 2025 sebesar negatif Rp26.572.676.415.037,-.

Sementara itu, saldo operasi neto (*net operating balance*/NOB) berasal dari

revenue dikurangi dengan expenses. Saldo operasi neto tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar -Rp26.572.676.415.037,-. Nilai tersebut sama dengan GOB dikarenakan tidak terdapat saldo tercatat pada komponen pengurang GOB berupa konsumsi aset tetap. Informasi detail terkait komponen NOB dan GOB Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

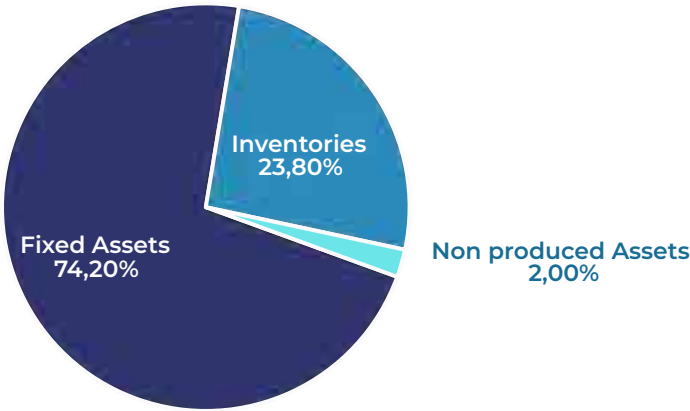
Tabel 33. Komposisi GOB-NOB Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Gross Operating Balance	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
Net Operating Balance	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%

C.4. Investasi Aset non Keuangan Neto (Net Investment in Nonfinancial Assets)

Investasi aset non keuangan neto (*Net Investment in Nonfinancial Assets*) tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp11.731.243.109.014,- mengalami penurunan sebesar Rp1.772.508.568.413,- atau sebesar -13,13% dari posisi per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp13.503.751.677.427,-.

Grafik 19. Proporsi Akuisisi Aset non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025



Investasi aset non keuangan neto (*Net Investment of Nonfinancial Assets*) berasal dari akuisisi aset tetap sebesar Rp8.704.737.373.510,-, persediaan sebesar Rp2.791.671.485.877,-, dan akuisisi atas aset non produksi sebesar Rp234.834.249.627,-.

Selanjutnya informasi detail komponen akuisisi aset non keuangan neto (*Net Acquisition of Nonfinancial Assets*) per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 34. Komposisi Akuisisi Aset non Keuangan Neto Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Fixed Assets	8.704.737.373.510	11.519.678.407.346	-24,44%
Inventories	2.791.671.485.877	1.939.146.590.841	43,96%
Non produced Assets	234.834.249.627	44.926.679.240	422,71%
Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%

C.5. Saldo Utang/Piutang Neto (*Net Lending/Borrowing*)

Saldo peminjaman/pinjaman neto (*Net Lending/Borrowing*) menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan atau diperoleh dari sektor ekonomi lain. peminjaman/pinjaman neto sama dengan total kebutuhan pembiayaan.

Saldo peminjaman/pinjaman neto pemerintah umum tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat meminjam Rp38.303.919.524.052,- yang berkurang sebesar Rp2.538.318.943.171,- dari nilai peminjaman tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp40.842.238.467.223,-.

Tabel 35. Komposisi Saldo Utang/Piutang Neto Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Net Operating Balance	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%
Net Lending (Borrowing)	- 38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%

Nilai saldo peminjaman/pinjaman neto pemerintah umum tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan posisi *net borrowing* atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. Sementara itu, apabila saldo *net lending* bernilai positif menunjukkan adanya kelebihan sumber daya keuangan.

C.6. Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban (*pembiayaan*) (*Transaction in Financial Assets and Liabilities (financing)*)

Transaksi aset keuangan dan kewajiban (*pembiayaan*) berasal dari akuisisi aset keuangan neto (*net acquisition of financial assets*) dikurangi dengan kewajiban neto (*net incurrence of liabilities*).

Tabel 36. Komposisi Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Net Acquisition of Financial Assets	- 38.653.615.924.110	- 41.276.623.545.923	6,35%
Net Incurrence of Liabilities	- 349.696.400.058	- 434.385.078.700	19,50%
Transactions In Financial Assets and Liabilities (Financing)	- 38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%

D. Penjelasan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta kewajiban yang dimiliki pemerintah pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan panjang.

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik

Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam Aset Non-keuangan, Aset Keuangan dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban dikelompokkan berdasarkan residen pihak debitur / kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, pengubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur.

D.1. Kekayaan Bersih (Net Worth)

Kekayaan bersih merupakan total kekayaan pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban. kekayaan bersih tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp359.558.947.466.976,- mengalami pertumbuhan sebesar Rp2.353.539.066.891,- atau tumbuh 0,66% dari posisi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp357.205.408.400.085,-.

Nilai kekayaan bersih berasal dari aset non keuangan (*nonfinancial assets*) sebesar Rp356.740.133.947.009,- dan aset keuangan (*financial assets*) sebesar Rp13.379.650.043.067,- setelah dikurangi kewajiban (*liabilities*) yang keseluruhannya merupakan kewajiban dalam negeri sebesar Rp10.560.836.523.101,-.

Tabel 37. Komposisi Kekayaan Bersih Tahun 2025 dan Tahun 2024

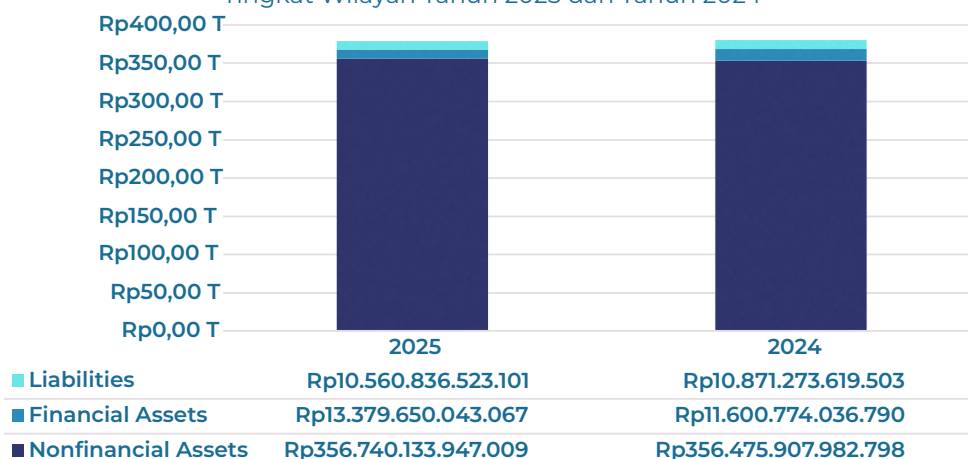
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
<i>Nonfinancial Assets</i>	356.740.133.947.009	356.475.907.982.798	0,07%
<i>Financial Assets</i>	13.379.650.043.067	11.600.774.036.790	15,33%
<i>Liabilities</i>	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Net Worth	359.558.947.466.976	357.205.408.400.085	0,66%

D.2. Aset (Assets)

Aset dalam terdiri dari aset non keuangan dan aset keuangan. Aset Non Keuangan mendominasi total aset pada neraca statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dengan proporsi sebesar 96,39%.

Sementara itu, proporsi aset keuangan tercatat sebesar 3,61% dari total aset per 31 Desember 2025. Proporsi nilai aset non keuangan dan aset keuangan per 31 Desember 2025 disampaikan pada halaman berikut.

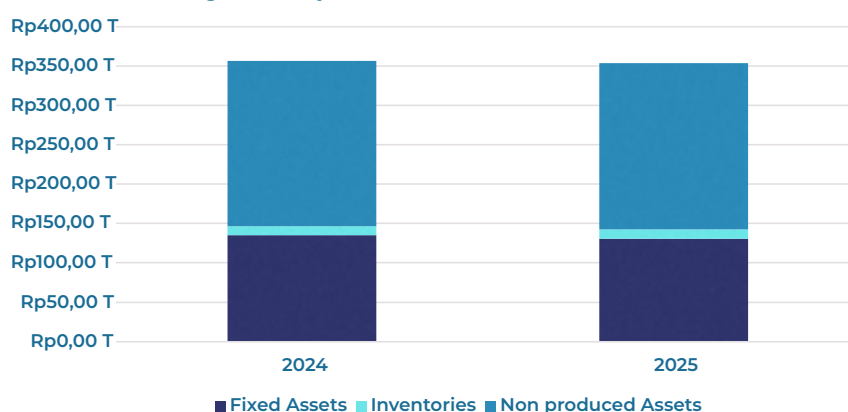
Grafik 20. Perbandingan Komposisi Aset Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024



D.2.1. Aset non Keuangan

Aset non keuangan tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp356.740.133.947.009,-. Nilai tersebut mengalami pertumbuhan sebesar Rp264.225.964.211,- atau 0,07% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp356.475.907.982.798,-.

Grafik 21. Perbandingan Komposisi Aset Non Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024



Tabel 38. Komposisi Aset non Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Fixed Assets	133.374.844.994.984	135.223.705.950.764	-1,37%
Inventories	11.943.955.176.131	11.003.239.214.826	8,55%
Non produced Assets	211.421.333.775.894	210.248.962.817.208	0,56%
Nonfinancial Assets	356.740.133.947.009	356.475.907.982.798	0,07%

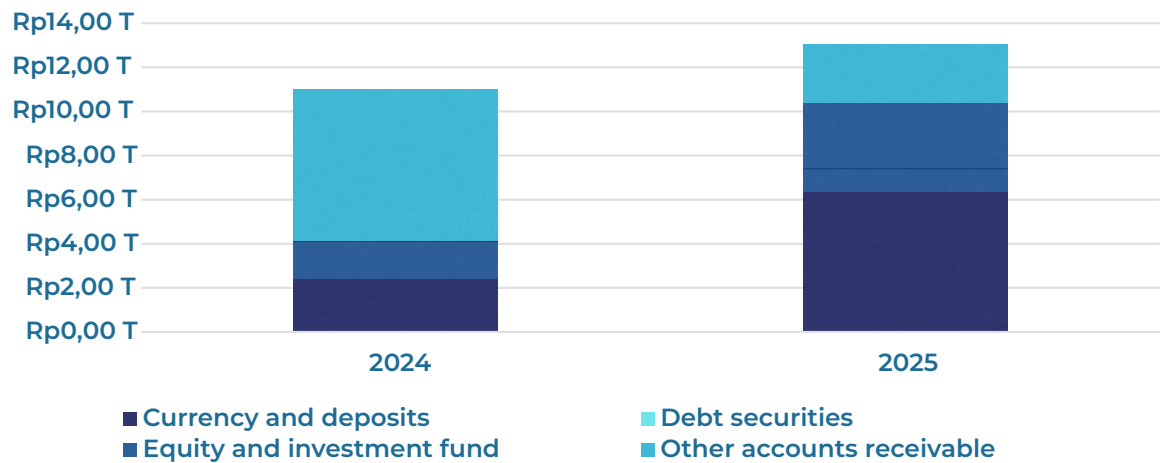
Aset non keuangan didominasi oleh aset non produksi dengan proporsi 59,26% dari total aset non keuangan atau sebesar. Proporsi terbesar berikutnya ialah aset tetap dengan proporsi sebesar 37,39% dari total aset non keuangan. Terakhir, persediaan memiliki proporsi sebesar 3,35% terhadap total aset non keuangan.

D.2.2. Aset Keuangan

Aset keuangan tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember

2025 tercatat sebesar Rp13.379.650.043.067,-. Nilai tersebut tumbuh sebesar Rp1.778.876.006.277,- atau 15,33% apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp11.600.774.036.790,-. Proporsi komponen aset keuangan tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2025 tersebut disajikan sebagai berikut.

Grafik 22. Perbandingan Komposisi Aset Keuangan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024



Tabel 39. Komposisi Aset Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Currency and deposits	5.328.206.321.795	4.093.711.267.507	30,16%
Debt securities	15.242.733.097	5.401.144.409	182,21%
Equity and investment fund	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Other accounts receivable	3.275.354.136.050	2.911.090.569.259	12,51%
Financial Assets	13.379.650.043.067	11.600.774.036.790	15,33%

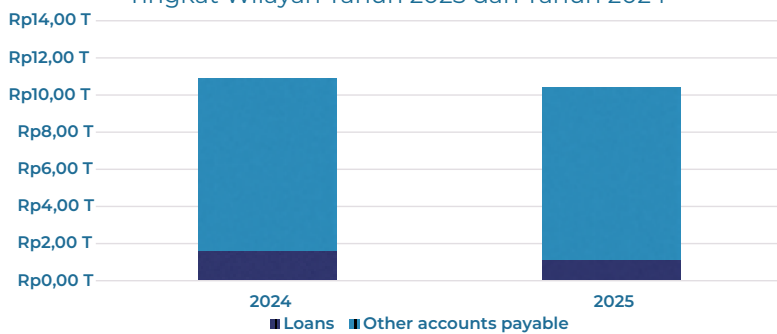
Pertumbuhan posisi *Financial Assets* terutama ditopang oleh pos *Currency and deposits*, yang naik Rp1.234.495.054.288,- atau menyumbang 69,4% dari total pertumbuhan, diikuti *Other accounts receivable* sebesar Rp364.263.566.791,- (20,5%). Dengan proporsi 39,82% dari total *Financial Assets* dan pertumbuhan instrumen lain yang relatif terbatas, komposisi ini menunjukkan alokasi aset yang konservatif dan cenderung bertumpu pada kas (*cash-heavy*). Kondisi tersebut perlu dibaca bersama kebutuhan likuiditas jangka pendek pemerintah daerah pada awal tahun anggaran berikutnya.

D.3. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban per 31 Desember 2025 seluruhnya merupakan Kewajiban Dalam Negeri, dengan nilai sebesar Rp10.560.836.523.101,-. Jumlah ini mengalami kontraksi sebesar Rp310.437.096.402,- atau 2,86% dibandingkan dengan posisi kewajiban per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp10.871.273.619.503,-.

Kewajiban tersebut terdiri dari komponen Pinjaman sebesar Rp1.311.205.753.269,- yang mengalami penurunan sebesar 20,51% dibandingkan tahun sebelumnya, serta Utang Lainnya sebesar Rp9.249.630.769.832,- yang meningkat sebesar 0,3%.

Grafik 23. Perbandingan Komposisi Kewajiban Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2025 dan Tahun 2024



Tabel 40. Komposisi Kewajiban Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
<i>Loans</i>	1.311.205.753.269	1.649.580.857.217	-20,51%
<i>Other Account Payable</i>	9.249.630.769.832	9.221.692.762.286	0,30%
<i>Liabilities</i>	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%

E. Penjelasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Tingkat Wilayah

Laporan sumber dan penggunaan kas pemerintah umum memberikan gambaran menyeluruh mengenai arus kas masuk dan keluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dialokasikan ke berbagai aktivitas serta pengaruh bersihnya terhadap saldo kas pada tahun anggaran 2025. Laporan ini mengungkapkan secara jelas bagaimana pemerintah memperoleh dan memanfaatkan kas selama periode pelaporan.

Laporan ini menyajikan dua ukuran fiskal penting, yaitu kenaikan bersih kas dan surplus/defisit kas. Kenaikan bersih kas mencerminkan total arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Sementara itu, surplus/defisit kas dihitung dari kas bersih aktivitas

operasi ditambah hasil penjualan dan dikurangi pembelian aset non keuangan.

Penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas pemerintah umum periode ini dilaksanakan melalui *high-level mapping* dengan pendekatan tidak langsung (*indirect method*), yaitu memetakan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian serta Laporan Operasi berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah.

Laporan per 31 Desember 2025 ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

E.1. Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (*Net Cash Flows from Operating Activities*)

Arus kas neto dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar -Rp26.572.676.415.037,-, mengalami penurunan defisit sebesar Rp765.810.374.759,- atau turun 2,8% dibandingkan arus kas neto dari aktivitas

operasi per 31 Desember 2024 yang sebesar -Rp27.338.486.789.796,-. Arus kas neto dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus kas masuk dari aktivitas operasi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi.

Tabel 41. Komposisi Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Cash receipts from operating activities	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%
Cash payments for operating activities	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%
Net Cash Inflow from Operating Activities	- 26.572.676.415.037	-27.338.486.789.796	2,80%

E.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp26.708.337.122.825,-, mengalami penurunan sebesar Rp2.610.230.775.300,- atau 8,9% dibandingkan arus kas masuk dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024

yang tercatat Rp29.318.567.898.125,-. Detail arus kas masuk dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel halaman berikut.

Tabel 42. Komposisi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
<i>Taxes</i>	18.692.525.690.612	21.589.867.976.422	-13,42%
<i>Grants</i>	40.289.984.954	517.386.891.378	-92,21%
<i>Other Receipts</i>	7.975.521.447.260	7.211.313.030.325	10,60%
Cash Receipts from Operating Activities	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%

E.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp53.281.013.537.863,-, mengalami penurunan arus keluar sebesar Rp3.376.041.150.058,- atau 5,96% dibandingkan arus kas keluar dari aktivitas

operasi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp56.657.054.687.921,-. Arus kas keluar dari aktivitas operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Komposisi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
<i>Compensation of Employees</i>	29.744.821.791.039	27.951.993.319.603	6,41%
<i>Purchase of Goods and Service</i>	18.284.209.090.972	21.612.813.718.658	-15,40%
<i>Interest</i>	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
<i>Subsidies</i>	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
<i>Grants</i>	3.520.748.237.268	4.781.567.885.738	-26,37%
<i>Social Benefits</i>	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
<i>Other Payments</i>	1.529.928.544.280	2.128.678.796.084	-28,13%
Cash payments for operating activities	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%

E.2. Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi Aset non Finansial (Net Cash Flows from Investments in Nonfinancial Assets)

Arus kas neto dari aktivitas investasi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp11.731.243.109.014,-, mengalami penurunan sebesar Rp1.772.508.568.413,- atau turun 13,13% dibandingkan arus kas neto dari aktivitas investasi per 31

Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp13.503.751.677.427,-. Arus kas neto dari aktivitas investasi berasal dari pembelian aset non keuangan dan penjualan aset non keuangan dengan detail sebagai berikut.

Tabel 44. Komposisi Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi Aset non Finansial Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
<i>Purchases of nonfinancial assets</i>	14.020.173.111.706	16.062.464.152.217	-12,71%
<i>Fixed Assets</i>	8.741.415.413.749	11.539.676.291.476	-24,25%
<i>Inventories</i>	5.032.638.474.099	4.475.999.447.101	12,44%
<i>Non-produced Assets</i>	246.119.223.858	46.788.413.640	426,03%
<i>Sales of nonfinancial assets</i>	2.288.930.002.691	2.558.712.474.790	-10,54%
<i>Fixed Assets</i>	36.678.040.239	19.997.884.130	83,41%
<i>Inventories</i>	2.240.966.988.222	2.536.852.856.260	-11,66%
<i>Non-produced Assets</i>	11.284.974.231	1.861.734.400	506,15%
Net Cash Flows from Investments in Nonfinancial Assets	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%

E.3. Surplus (Defisit) Kas (Cash Surplus (Deficit))

Surplus/(defisit) kas berasal dari arus kas neto dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi (pembelian aset non keuangan). Per 31 Desember 2025, tercatat defisit sebesar Rp38.303.919.524.052,-, mengalami pengurangan defisit sebesar Rp2.538.318.943.171,- atau 6,21% dibandingkan defisit Kas per 31 Desember 2024 yang tercatat Rp40.842.238.467.223,-.

E.4. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Cash Flow From Transaction in Financial Assets and Liabilities)

Arus kas neto dari aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp426.465.680.564,-, menurun sebesar Rp35.850.771.265,- atau 7,75% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp462.316.451.829,-. Nilai tersebut merupakan akuisisi neto aset keuangan selain kas sebesar Rp76.769.280.506,- dikurangi pengakuan neto kewajiban sebesar minus Rp349.696.400.058,-, yang seluruhnya berasal dari dalam negeri.

METADATA



Benteng Rotterdam, peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo

LKPK dan LSKP Tingkat Wilayah Periode Tahun 2025
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

METADATA

INFORMASI DATA

1.	Nama Data	:	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025
2.	Penyelenggara Statistik	:	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	Alamat	:	Gedung Keuangan Negara II Lantai 2 & 3 Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar
4.	Nomor Telepon	:	0411-456955, 456133
5.	Nomor Faksimili	:	0411-456134
6.	Surel	:	papk.sulsel@gmail.com

DEFINISI DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts – SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*). LSKP-TW merupakan konsolidasi dari Kertas Kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang termasuk dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKP-TW Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah;
2. Laporan Operasi Statistik Keuangan Pemerintah;
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah; dan
4. Metadata.

CAKUPAN DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Wilayah meliputi: Lembar muka Laporan Operasional Statistik, Neraca Statistik, Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah dan Metadata Tahun 2025.

Data dinyatakan dalam rupiah.

PERIODE PUBLIKASI

Triwulanan, Semester, dan Tahunan

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

Data Triwulan dan Semester diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data. *Preliminary* tahunan diterbitkan 2 (dua) bulan setelah berakhirnya periode data. Data tahunan (*Unaudited*) diterbitkan 4 (empat) bulan setelah berakhirnya periode data sedangkan data tahunan final (*Audited*) diterbitkan 9 (Sembilan) bulan setelah berakhirnya periode data

WAKTU PUBLIKASI

Satu bulan sebelum publikasi berikutnya diterbitkan

STATUS DATA

LKPK-TW dan LSKP-TW Tahun 2025 berstatus **final (*Audited*)**.

SUMBER DATA

1. Sumber data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah (LKPP-TW) berasal dari Konsolidasian data SiAP yang telah direkonsiliasi dengan data SAI.
2. Sumber data laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK-TW) berasal dari Konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Laporan Keuangan UAKKBUN Kanwil Sulawesi Selatan Tahun 2025 *Audited*.
4. Sumber data LRA, Neraca, LO Pemerintah Pusat diambil dari aplikasi SIKRI MP, pada hari Senin, 14 April 2026.
5. Sumber data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berasal dari LKPD Konsolidasian *Audited* Seluruh Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

METODOLOGI

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). LSKPP-TW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan pemetaan BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam *GFS classification assistant* yang berupa kertas kerja MS Excel yang menyediakan kerangka pemetaan masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKPU-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui pemetaan BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW), (2) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), melalui pemetaan BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW); dan (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW).

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data tahun 2025 (*Audited*) terdiri dari 804 UAKPA dari 47 Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025, proses konsolidasi dilakukan terhadap 25 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota (1 Pemerintah Provinsi, 3 Pemerintah Kota, dan 21 Pemerintah Kabupaten) yang sumber data berasal dari masing-masing pemerintah daerah.
3. Sumber data berasal dari 25 LKPD Pemda periode Tahun 2025 (*Audited*) yang terkumpul secara lengkap yang selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data pada publikasi berikutnya apabila kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung Keuangan Negara II Lantai 2&3 Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.

Analisis Rasio



Cagar Alam Karaengta Maros

LKPK dan LSKP Tingkat Wilayah Periode Tahun 2025
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Analisis pada bagian ini menempatkan neraca konsolidasian sebagai objek utama. Dua rasio yang digunakan solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. LKPK (Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian) menggabungkan seluruh entitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Selatan setelah eliminasi transaksi resiprokal, sehingga menggambarkan posisi keuangan sektor pemerintah secara keseluruhan di wilayah. Sementara LKPDK (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian) hanya menggabungkan 25 entitas pemerintah daerah, sehingga lebih relevan sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang menjadi kewenangan kepala daerah

A. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek atau *current ratio* dalam literatur keuangan komersial, mengukur kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini dirumuskan sebagai perbandingan antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar bantalan likuiditas yang tersedia. Nilai rasio yang terlampaui tinggi juga perlu dibaca sebagai sinyal bahwa sumber daya keuangan belum sepenuhnya dikonversi menjadi manfaat bagi masyarakat.

1. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 *Audited* tercatat sebesar 467,52%, yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp19.561.256.343.737,- dibagi dengan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp4.184.028.018.246,-. Secara fundamental, postur ini menunjukkan tingkat likuiditas

Ukuran likuiditas	LKPK	LKPDK
Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	467,52%	183,10%
Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	182,06%	148,46%
Rasio Kas (<i>cash ratio</i>)	111,61%	100,73%
Modal Kerja Neto	Rp15,38 T	Rp2,09 T

operasional maupun utang jangka pendek berada pada titik yang sangat nyaman.

Selisih positif antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, atau modal kerja neto (*net working capital*) mencapai Rp15,38 triliun. Angka ini berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan (*financial buffer*) yang sangat tangguh, cukup untuk menyerap tekanan arus kas maupun kebutuhan pendanaan rutin yang tidak terduga dalam waktu dekat tanpa memerlukan instrumen pembiayaan baru.

Namun demikian, angka rasio agregat perlu diurai lebih jauh agar tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu optimistis. Aset lancar konsolidasian didominasi oleh Persediaan sebesar Rp11.943.955.176.131,- atau 61,06% dari total aset lancar, sementara Kas dan Setara Kas hanya berkontribusi 23,87% (Rp4.669.644.806.736,-) dan Piutang 14,26% (Rp2.789.710.926.173,-). Dominasi persediaan ini sepenuhnya berasal dari sisi Pemerintah Pusat, di mana persediaan mencapai 73,99% dari aset lancar Pemerintah Pusat di wilayah.

Karena persediaan bukan merupakan instrumen yang siap digunakan untuk melunasi kewajiban, pembacaan yang lebih konservatif dilakukan melalui dua rasio turunan berikut:

Hasilnya menegaskan bahwa kesimpulan likuiditas tetap kokoh sekalipun diuji

dengan ukuran yang paling ketat. Rasio kas LKPK sebesar 111,61% berarti seluruh kewajiban jangka pendek konsolidasian dapat dilunasi hanya dengan saldo kas dan setara kas, tanpa perlu menagih piutang maupun mencairkan persediaan. Ini adalah posisi likuiditas yang tidak lazim ditemui pada entitas non-pemerintah dan mengonfirmasi bahwa risiko likuiditas jangka pendek di wilayah Sulawesi Selatan berada pada tingkat minimal.

Dari perspektif manajemen keuangan publik, rasio yang melampaui angka 400% justru membuka pertanyaan kebijakan yang berbeda: apakah sumber daya yang tersedia telah bekerja secara optimal? Persediaan senilai hampir Rp12 triliun yang mengendap pada akhir tahun anggaran mengindikasikan adanya ruang perbaikan pada tata kelola persediaan, mulai dari akurasi perencanaan kebutuhan, siklus pengadaan, hingga distribusi barang kepada unit pengguna. Setiap rupiah yang tertahan sebagai persediaan adalah rupiah yang belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh sebab itu, optimalisasi sistem pengelolaan persediaan dan percepatan penyerapan anggaran perlu ditempatkan sebagai agenda perbaikan tata kelola, bukan sekadar catatan teknis akuntansi.

2. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 *Audited* tercatat sebesar 183,10%, yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp4.606.043.425.592,- dibagi dengan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2.515.593.350.537,-. Artinya, untuk setiap satu rupiah kewajiban jangka pendek, pemerintah daerah wilayah Sulawesi Selatan secara konsolidasian memiliki aset lancar sebesar 1,83 rupiah. Modal kerja neto pada tingkat ini sebesar Rp2,09 triliun.

Terdapat perbedaan karakter yang penting antara komposisi aset lancar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pada LKPK, Kas dan Setara Kas mendominasi dengan porsi 55,01% (Rp2.534.006.214.521,-),

diikuti Piutang 24,95% dan Persediaan hanya 18,92%. Struktur ini membuat kualitas likuiditas pemerintah daerah relatif lebih baik dibanding yang tampak dari angka rasio semata: rasio kas LKPK sebesar 100,73% berarti saldo kas daerah masih sedikit melampaui seluruh kewajiban jangka pendek.

Meskipun demikian, dominasi kas justru memunculkan isu kebijakan yang berbeda dari isu persediaan di tingkat pusat. Saldo kas sebesar Rp2,53 triliun pada akhir tahun anggaran, ditambah SiLPA agregat yang terbentuk, menandakan bahwa kapasitas belanja belum sepenuhnya terealisasi. Dana yang mengendap di kas daerah tidak menghasilkan pengganda ekonomi (*multiplier effect*) sebagaimana dana yang telah dibelanjakan untuk layanan publik atau infrastruktur. Fokus ke depan seyogianya diarahkan pada perbaikan disiplin perencanaan kas, percepatan proses pengadaan pada semester pertama, serta penajaman kualitas dokumen perencanaan agar kapasitas fiskal yang kuat ini benar-benar dikonversi menjadi stimulus ekonomi riil bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Perlu dicatat pula bahwa rasio konsolidasian (183,10%) berada di bawah rata-rata sederhana rasio 25 entitas (251,85%) maupun nilai median (211,19%). Perbedaan ini terjadi karena konsolidasi menimbang setiap entitas berdasarkan besaran nominal, sehingga entitas berukuran besar dengan rasio rendah, terutama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menarik angka agregat ke bawah. Pembacaan agregat karena itu harus selalu didampingi pembacaan sebaran antar entitas.

3. Sebaran Solvabilitas Jangka Pendek Antar Pemerintah Daerah

Rentang solvabilitas jangka pendek antar pemerintah daerah di Sulawesi Selatan sangat lebar, yaitu dari 27,86% hingga 1.012,79%, selisih lebih dari 36 kali lipat. Sebaran ini menunjukkan bahwa kesimpulan agregat tidak dapat digeneralisasi ke seluruh daerah.

Daerah peringkat teratas dan terbawah Rasio Solvabilitas Jangka Pendek

Peringkat teratas	Rasio	Peringkat terbawah	Rasio
1. Kota Makassar	1.012,79%	21. Kota Palopo	74,25%
2. Kab. Kepulauan Selayar	488,59%	22. Kab. Toraja Utara	66,44%
3. Kab. Luwu Timur	440,57%	23. Prov. Sulawesi Selatan	61,01%
4. Kab. Maros	416,96%	24. Kab. Enrekang	28,97%
5. Kab. Pangkajene dan Kepulauan	414,36%	25. Kab. Luwu Utara	27,86%

Kota Makassar menempati posisi tertinggi dengan rasio 1.012,79%, ditopang aset lancar sebesar Rp1,23 triliun, terbesar di antara seluruh kabupaten/kota yang berhadapan dengan kewajiban jangka pendek yang relatif kecil. Posisi ini konsisten dengan kapasitas PAD Kota Makassar yang mencapai Rp1,94 triliun atau 40,65% dari total pendapatannya.

Pada sisi berlawanan, terdapat lima entitas dengan rasio di bawah 100%, yang berarti aset lancar yang dimiliki belum cukup untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendek pada tanggal neraca. Dua di antaranya memerlukan perhatian khusus:

- Kabupaten Luwu Utara (27,86%). Aset lancar hanya Rp55,44 miliar dengan komposisi kas yang sangat tipis, kas dan setara kas hanya 10,92% dari aset lancar, terendah kedua di Sulawesi Selatan. Kondisi ini menempatkan daerah pada risiko tekanan arus kas apabila terdapat percepatan jatuh

tempo kewajiban.

- Kabupaten Enrekang (28,97%). Selain rasio likuiditas terendah kedua, Kabupaten Enrekang juga mencatat rasio utang terhadap aset tertinggi di Sulawesi Selatan (18,98%) dan kewajiban jangka panjang terbesar di antara kabupaten/kota (Rp185,12 miliar). Kombinasi likuiditas tipis dan eksposur utang tertinggi menjadikan daerah ini prioritas utama pendampingan pengelolaan kewajiban.

Posisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (61,01%) perlu dibaca dengan konteks tersendiri. Sebagai entitas dengan skala belanja terbesar dan fungsi penyaluran bagi hasil kepada kabupaten/kota, kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi secara struktural memang lebih besar. Meskipun demikian, rasio di bawah 100% tetap menuntut pengelolaan perencanaan kas yang cermat, khususnya pada penjadwalan penyaluran transfer bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota.

Rekomendasi Solvabilitas Jangka Pendek

- Melakukan penguatan tata kelola persediaan pada satuan kerja Pemerintah Pusat di wilayah, mencakup akurasi perencanaan kebutuhan, siklus pengadaan, dan pemantauan umur persediaan;
- Mendorong pemerintah daerah menyusun anggaran kas yang lebih realistis serta memajukan jadwal pengadaan ke semester pertama untuk menekan penumpukan kas akhir tahun;
- Khusus bagi Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Enrekang perlu menyusun rencana penyelesaian kewajiban jangka pendek dan penguatan proyeksi arus kas bulanan.

B. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang

Rasio Solvabilitas Jangka Panjang mengukur kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun, dengan membandingkan Total Aset terhadap Kewajiban Jangka Panjang. Rasio ini menjawab pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan fiskal antar generasi, apakah kekayaan yang dimiliki hari ini cukup menopang komitmen keuangan yang akan jatuh tempo di masa depan?

1. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan

Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 *Audited* tercatat sebesar 5.804,15%, yang berasal dari Total Aset sebesar Rp370.119.783.990.077,- dibagi dengan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp6.376.808.504.855,-. Dengan kata lain, total kekayaan sektor pemerintah di wilayah Sulawesi Selatan mencapai 58,04 kali lipat nilai kewajiban jangka panjangnya. Akumulasi aset yang menembus Rp370 triliun ini merupakan bantalan ekonomi (*economic cushion*) yang sangat kokoh terhadap eksposur utang jangka panjang yang berada di kisaran Rp6,38 triliun.

Dibaca dari sisi struktur permodalan, kesimpulan yang sama muncul dengan lebih tajam. Rasio utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) konsolidasian hanya sebesar 2,85%, sehingga 97,15% aset sektor pemerintah di wilayah dibiayai oleh ekuitas (Rp359.558.947.466.976,-) dan bukan oleh kewajiban. Ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan eksternal jangka panjang dalam rangka menyediakan aset untuk pelayanan publik berada pada tingkat yang sangat minim, sehingga risiko insolvensi atas kewajiban masa depan praktis dapat diabaikan.

Temuan yang layak digarisbawahi, dan tidak tampak apabila hanya membaca

angka agregat adalah komposisi kewajiban jangka panjang Pemerintah Pusat di wilayah. Dari Rp5.495.354.535.330,- kewajiban jangka panjang satuan kerja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan, seluruhnya merupakan Kewajiban Konsesi Jasa; tidak terdapat utang jangka panjang dalam negeri maupun luar negeri sama sekali. Kewajiban ini berpasangan dengan Aset Konsesi Jasa sebesar Rp6.384.888.583.525,- pada sisi aset. Artinya, eksposur jangka panjang Pemerintah Pusat di wilayah bukanlah utang dalam pengertian pinjaman, melainkan konsekuensi akuntansi dari skema kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah menghasilkan aset produktif dengan nilai lebih besar daripada kewajibannya. Ini merupakan karakteristik kualitas kewajiban yang sangat berbeda, dan jauh lebih aman dibandingkan utang pinjaman konvensional.

Pada sisi aset, kekuatan neraca ditopang oleh Aset Tetap senilai Rp338.887.820.994.270,- atau 91,56% dari total aset, dengan Tanah sebagai komponen dominan (62,36% dari aset tetap) serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai komponen terbesar kedua. Komposisi ini perlu dibaca dengan kehati-hatian, aset tetap bersifat tidak likuid dan tidak dimaksudkan untuk dijual guna melunasi kewajiban. Rasio solvabilitas jangka panjang yang sangat tinggi karena itu lebih tepat dimaknai sebagai ukuran kelayakan kredit dan ruang fiskal, bukan sebagai ukuran kesiapan pembayaran.

Dari perspektif manajemen kapasitas fiskal, postur solvabilitas ini memberikan keleluasaan strategis bagi para pengambil kebijakan di Sulawesi Selatan. Surplus yang jauh di atas batas aman membuktikan bahwa pengelolaan aset dan kewajiban telah dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Ruang fiskal yang terbukti aman ini menunjukkan bahwa pemerintah di wilayah memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung program pembangunan lanjutan tanpa kekhawatiran membebani generasi mendatang dengan risiko utang yang tidak proporsional.

2. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPDK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan

Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPDK Tingkat Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 *Audited* tercatat sebesar 14.495,61%, yang berasal dari Total Aset sebesar Rp127.772.118.244.329,- dibagi dengan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp881.453.969.525,-. Total aset pemerintah daerah mencapai 144,96 kali lipat kewajiban jangka panjangnya, hampir dua setengah kali lebih longgar dibandingkan posisi konsolidasian LKPK. Porsi kewajiban jangka panjang terhadap total aset hanya sebesar 0,69%, sementara rasio utang terhadap aset secara keseluruhan (termasuk kewajiban jangka pendek) sebesar 2,66% dan porsi ekuitas mencapai 97,34%.

Seluruh kewajiban jangka panjang pemerintah daerah di Sulawesi Selatan berupa utang jangka panjang dalam negeri; tidak terdapat satu pun utang luar negeri. Hal ini menempatkan pemerintah daerah di wilayah pada posisi bebas dari risiko nilai tukar atas kewajiban jangka panjangnya.

Ketimpangan positif yang masif antara kepemilikan aset dan beban kewajiban ini menegaskan bahwa kemandirian finansial dan kelayakan kredit pemerintah daerah di Sulawesi Selatan sangat terjaga. Rasio ini

juga mencerminkan manajemen keuangan daerah yang sangat berhati-hati dan berkelanjutan, sehingga tersedia ruang fiskal yang longgar untuk berekspansi, merencanakan pembangunan infrastruktur strategis, serta mengelola alokasi belanja modal tanpa dibebani utang struktural. Kapasitas fiskal pada tingkat LKPDK ini tidak hanya mengamankan APBD dari potensi gagal bayar, tetapi juga memastikan prinsip keadilan antar generasi, beban kewajiban yang dibentuk saat ini tidak akan diwariskan secara tidak proporsional kepada generasi penerus.

3. Struktur Kewajiban Jangka Panjang Antar Pemerintah Daerah

Fakta paling menonjol dari sebaran kewajiban jangka panjang adalah tingkat pemanfaatannya yang sangat rendah. Dari 25 entitas pemerintah daerah, 14 entitas (56%) sama sekali tidak memiliki kewajiban jangka panjang, yaitu Kabupaten Pinrang, Wajo, Tana Toraja, Maros, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Pangkajene dan Kepulauan, Luwu Timur, Toraja Utara, serta Kota Makassar. Pada entitas-entitas ini rasio solvabilitas jangka panjang secara matematis tidak terdefinisi dan pada tabel data disajikan bernilai nol. Angka nol tersebut harus dibaca sebagai nihil kewajiban, bukan sebagai nihil kemampuan.

Pemerintah daerah dengan kewajiban jangka panjang dan rasio utang terhadap aset

Pemerintah Daerah	Kewajiban Jangka Panjang	Total Aset (Rp Miliaran)	Utang Terhadap Aset
Prov. Sulawesi Selatan	256.599.500.111	20.887	4,82%
Kab. Enrekang	185.115.324.552	1.756	18,98%
Kab. Bone	143.255.240.380	3.599	8,82%
Kab. Takalar	136.114.205.986	2.293	10,86%
Kab. Soppeng	63.464.480.748	2.447	4,54%
Kab. Barru	28.106.062.528	2.180	3,59%
Kab. Luwu Utara	20.524.454.198	4.034	12,50%
Kab. Gowa	20.460.345.023	4.712	3,53%
Kab. Sinjai	16.718.148.605	2.332	2,10%
Kota Pare Pare	6.830.048.417	2.489	2,17%
Kota Palopo	4.266.158.977	2.326	7,74%

Dominasi entitas tanpa kewajiban jangka panjang memunculkan pembacaan kebijakan yang berlawanan arah dengan kesimpulan konvensional. Rendahnya utang memang menghilangkan risiko gagal bayar, tetapi juga menandakan bahwa instrumen pembiayaan jangka panjang belum dimanfaatkan sebagai sarana percepatan pembangunan. Dengan rasio utang terhadap aset rata-rata hanya 4,25% dan median 2,26%, jauh di bawah batas kehati-hatian yang lazim digunakan sebagian besar pemerintah daerah di Sulawesi Selatan sesungguhnya memiliki ruang untuk mempertimbangkan pembiayaan infrastruktur produktif secara terukur, sepanjang memenuhi ketentuan batas maksimal pinjaman daerah, kapasitas fiskal untuk pembayaran kembali, dan kelayakan proyek yang dibiayai.

Pertimbangan ini perlu disampaikan dengan kehati-hatian dan tidak dapat digeneralisasi. Bagi daerah dengan solvabilitas jangka pendek tipis, khususnya Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu Utara, prioritas justru pada arah sebaliknya, yaitu konsolidasi kewajiban yang ada terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penambahan komitmen baru. Kabupaten Enrekang, misalnya, telah membayar pokok utang sebesar Rp62,36 miliar pada tahun 2025 dengan rasio utang terhadap aset tertinggi di wilayah.

Rekomendasi Solvabilitas Jangka Panjang

- Mendorong pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan solvabilitas jangka pendek sehat untuk mengkaji pemanfaatan pembiayaan jangka panjang secara terukur bagi proyek infrastruktur produktif, disertai analisis kelayakan dan kemampuan bayar.
- Memprioritaskan konsolidasi kewajiban, bukan penambahan komitmen baru. Hal ini terutama bagi Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Takalar yang memiliki rasio utang terhadap aset tertinggi.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian ini menganalisis lima rasio keuangan pemerintah daerah pada 25 entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berbeda dengan Bagian I yang menekankan posisi neraca konsolidasian, kelima rasio berikut menggabungkan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Neraca, sehingga mampu menangkap dinamika kinerja fiskal tahunan sekaligus posisi struktural masing-masing daerah.

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh pendapatan daerah, termasuk bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} \div \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini sekaligus menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya, karena PAD sebagian besar terbentuk dari pajak dan retribusi yang dibayarkan warga dan pelaku usaha setempat.

Pada Tahun 2025 Audited, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi antara 6,93% hingga 50,50%, dengan rata-rata 18,80% dan median 15,75%. Rasio tertinggi dicatat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 50,50%, sedangkan rasio terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebesar 6,93%.

Distribusi kategori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kategori	Rentang	Jumlah	Entitas
Sangat Baik	> 50%	1	Prov. Sulawesi Selatan (50,50%)
Baik	40–50%	1	Kota Makassar (40,65%)
Cukup	30–40%	1	Kota Pare Pare (32,31%)
Sedang	20–30%	4	Kota Palopo (25,57%); Luwu Timur (24,89%); Bantaeng (22,43%); Maros (22,24%)
Kurang	10–20%	14	Gowa; Sidenreng Rappang; Pangkep; Soppeng; Wajo; Bulukumba; Pinrang; Luwu; Takalar; Jeneponto; Bone; Barru; Tana Toraja; Sinjai
Sangat Kurang	< 10%	4	Kepulauan Selayar (9,87%); Luwu Utara (9,08%); Enrekang (9,01%); Toraja Utara (6,93%)

Distribusi ini menunjukkan bahwa 18 dari 25 entitas (72%) berada pada kategori Kurang atau Sangat Kurang. Secara umum, tingkat kemandirian fiskal di Sulawesi Selatan masih rendah dengan ketergantungan yang signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pada 24 kabupaten/kota, porsi pendapatan transfer berkisar antara 59,35% (Kota Makassar) hingga 93,07% (Kabupaten Toraja Utara) dari total pendapatan daerah.

Kualitas PAD: kemandirian yang tidak selalu berarti keleluasaan fiskal

Analisis yang berhenti pada besaran rasio berisiko menghasilkan simpulan yang keliru. Penelusuran atas komposisi PAD tahun 2025 menemukan bahwa pada sebagian besar kabupaten, PAD tidak terbentuk dari pajak daerah melainkan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pendapatan BLUD, yaitu penerimaan rumah sakit daerah yang sebagian besar

merupakan penerimaan atas layanan kesehatan. Penerimaan jenis ini memang sah dicatat sebagai PAD, namun secara ekonomi bersifat terikat: ia datang bersamaan dengan beban operasional layanan kesehatan dalam besaran yang sepadan, sehingga tidak menambah keleluasaan fiskal daerah.

Porsi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pendapatan BLUD dan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah	PAD (Rp miliar)	Kesehatan + BLUD	Pajak Daerah
Kota Pare Pare	311	68,7%	21,0%
Kab. Bantaeng	225	65,6%	27,3%
Kab. Soppeng	210	65,0%	21,2%
Kab. Jeneponto	183	65,0%	25,1%
Kota Palopo	253	61,8%	26,3%
Kab. Kepulauan Selayar	97	58,3%	17,8%
pembanding			
Kab. Luwu Timur	483	23,7%	65,1%
Kab. Gowa	424	19,3%	68,2%
Prov. Sulawesi Selatan	4.737	7,0%	83,2%
Kota Makassar	1.943	2,2%	90,5%

Implikasinya jelas. Kota Pare Pare yang secara nominal masuk kategori “Cukup” dengan rasio 32,31% sesungguhnya memiliki kemandirian fiskal diskresioner yang jauh lebih terbatas daripada yang tampak, karena 68,7% PAD-nya berasal dari layanan kesehatan dan BLUD. Sebaliknya, Kabupaten Luwu Timur dengan rasio 24,89% memiliki basis PAD yang jauh lebih kokoh: 65,1% berasal dari pajak daerah, terutama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp178,84 miliar, tertinggi di Sulawesi Selatan. Karena itu, rasio kemandirian sebaiknya dibaca bersama komposisi PAD-nya, bukan sebagai angka tunggal.

Arah optimalisasi penerimaan daerah

Bagi empat daerah pada kategori Sangat Kurang (Kabupaten Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Enrekang, dan Toraja Utara) penguatan basis penerimaan perlu diarahkan pada objek pajak yang benar-benar menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu:

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), melalui pemutakhiran basis data objek pajak,

penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak, dan perluasan kanal pembayaran.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melalui integrasi data dengan Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menutup kebocoran nilai transaksi.
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, dan hiburan, melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik pada wajib pajak potensial.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), khususnya bagi daerah dengan aktivitas pertambangan galian C yang belum tereksplor optimal.

Perlu ditegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB merupakan objek pajak provinsi, bukan kabupaten/kota. Penerimaan PKB yang tercatat pada laporan kabupaten/kota berasal dari mekanisme bagi hasil, sehingga optimalisasinya berada pada domain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui perbaikan kepatuhan daftar ulang kendaraan, penertiban tunggakan, dan perluasan layanan Samsat. Rekomendasi peningkatan PKB karena itu ditujukan kepada Pemerintah Provinsi, sementara kabupaten/kota memperoleh manfaatnya melalui peningkatan porsi bagi hasil.

Rekomendasi Kemandirian Keuangan Daerah

- Memfokuskan pendampingan optimalisasi PBB-P2, BPHTB, dan PBJT pada Kabupaten Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Enrekang, dan Toraja Utara.
- Mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan PKB dan BBNKB, yang manfaatnya mengalir ke kabupaten/kota melalui bagi hasil.
- Mengevaluasi tata kelola BLUD rumah sakit daerah agar surplus layanan benar-benar memperkuat posisi fiskal, bukan sekadar menaikkan angka PAD.

B. Rasio Solvabilitas Anggaran

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama satu periode anggaran. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap total belanja setelah dikurangi belanja modal.

$$\text{Rasio Solvabilitas Anggaran} = \frac{[(\text{Pendapatan} - \text{DAK}) \div (\text{Belanja} - \text{Belanja Modal})] \times 100\%}{}$$

Pengurangan DAK dari sisi pendapatan dan belanja modal dari sisi belanja bukan sekadar penyesuaian teknis. Keduanya dikeluarkan agar rasio mengukur kemampuan membiayai operasi rutin dari sumber daya yang tidak terikat, DAK adalah dana bertujuan khusus yang tidak dapat dialihkan, sementara belanja modal bersifat non rutin dan dapat ditunda. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah menopang operasional dasarnya secara mandiri.

Secara rata-rata, Rasio Solvabilitas Anggaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Audited tercatat sebesar 100,20%, dengan median 98,17%. Angka rata-rata yang berada tepat di ambang 100% menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah di Sulawesi Selatan mampu memenuhi kewajiban pengeluaran rutinnya, namun tanpa margin pengaman yang berarti. Median yang berada di bawah 100% menandakan bahwa lebih dari separuh entitas sesungguhnya berada pada posisi defisit anggaran operasional, atau hanya 10 dari 25 entitas yang mencatat rasio di atas atau sama dengan 100%.

Peringkat Teratas dan Terbawah Rasio Solvabilitas Anggaran

Peringkat teratas	Rasio	Peringkat terbawah	Rasio
1. Kota Makassar	120,52%	21. Kab. Sinjai	94,00%
2. Kab. Luwu Timur	110,28%	22. Prov. Sulawesi Selatan	93,98%
3. Kab. Maros	109,11%	23. Kab. Jeneponto	93,26%
4. Kab. Wajo	108,96%	24. Kab. Tana Toraja	92,07%
5. Kab. Gowa	105,91%	25. Kab. Toraja Utara	91,86%

Kota Makassar menempati posisi tertinggi dengan rasio 120,52%, ditopang PAD sebesar Rp1,94 triliun dan porsi DAK yang relatif kecil (11,07% dari pendapatan). Kabupaten Luwu Timur menyusul dengan 110,28%, dengan porsi DAK terendah se-

Sulawesi Selatan (9,88%) berkat basis penerimaan pajak MBLB dan bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp227,44 miliar.

Pada sisi terbawah, Kabupaten Toraja Utara (91,86%) dan Kabupaten Tana Toraja

(92,07%) mencatat rasio terendah. Keduanya juga membukukan defisit realisasi anggaran masing-masing sebesar Rp34,42 miliar dan Rp31,00 miliar, sehingga bergantung pada penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk menutup kekurangan. Kabupaten Jeneponto berada pada pola serupa dengan defisit Rp23,83 miliar.

Rasio di atas 100% menunjukkan kondisi fiskal yang sehat, di mana pendapatan tidak terikat lebih besar daripada belanja rutin. Sebaliknya, rasio di bawah 100% menandakan bahwa pemerintah daerah perlu mengandalkan sumber pembiayaan seperti SiLPA, pinjaman, atau pengurangan belanja modal untuk menutup kekurangan anggaran operasional. Ketergantungan berkelanjutan pada SiLPA merupakan pola yang tidak lestari, karena SiLPA merupakan sumber daya terbatas yang tidak selalu terbentuk setiap tahun.

Anomali antara solvabilitas anggaran dan kemandirian

Korelasi antara Rasio Kemandirian dan Rasio Solvabilitas Anggaran tercatat sebesar +0,48, positif namun tidak kuat. Artinya, daerah dengan PAD besar cenderung memiliki solvabilitas anggaran lebih baik, tetapi hubungan tersebut jauh dari deterministik. Kabupaten Wajo, misalnya, berada pada peringkat keempat solvabilitas anggaran (108,96%) meskipun kemandiriannya hanya 15,79%; sebaliknya Kota Pare Pare dengan kemandirian 32,31% hanya menempati peringkat keenam (105,09%).

Penjelasannya terletak pada struktur belanja, bukan pada struktur pendapatan. Kabupaten Wajo memiliki porsi belanja pegawai terendah ketiga (39,27% dari total

belanja) dan porsi belanja modal tertinggi (19,24%). Karena belanja modal dikeluarkan dari penyebut, daerah dengan disiplin belanja pegawai yang baik dan alokasi modal yang besar akan menghasilkan rasio solvabilitas anggaran yang lebih tinggi meskipun pendapatannya sebagian besar berasal dari transfer. Dengan kata lain, solvabilitas anggaran lebih mencerminkan efisiensi belanja daripada kekuatan pendapatan.

C. Rasio Solvabilitas Layanan

Rasio Solvabilitas Layanan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah aset yang dikuasai pemerintah daerah terhadap jumlah penduduk yang dilayani.

$$\text{Rasio Solvabilitas Layanan} = \text{Total Aset} \div \text{Jumlah Penduduk}$$

Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kapasitas aset yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan layanan kepada setiap warga. Data jumlah penduduk yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Tahun 2025.

Rata-rata Rasio Solvabilitas Layanan pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Audited sebesar Rp1.050.333.325,- per jiwa, dengan median Rp880.148.869,-. Apabila Pemerintah Provinsi dikeluarkan dari perhitungan, karena asetnya melayani seluruh penduduk provinsi sehingga tidak sebanding dengan kabupaten/kota rata-rata 24 kabupaten/kota menjadi Rp1.084.900.657,- per jiwa.

Peringkat Teratas dan Terbawah Rasio Solvabilitas Layanan

Peringkat teratas	Rp per jiwa	Peringkat terbawah	Rp per jiwa
1. Kab. Toraja Utara	3.412.459.753	21. Kab. Jeneponto	558.239.326
2. Kota Makassar	2.445.759.718	22. Kab. Pangkajene dan Kepulauan	556.914.839
3. Kab. Kepulauan Selayar	1.607.137.512	23. Kab. Luwu Utara	520.051.745
4. Kota Pare Pare	1.445.681.029	24. Kab. Bone	433.610.735
5. Kab. Luwu Timur	1.289.990.840	25. Prov. Sulawesi Selatan	220.717.361

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mencatat rasio tertinggi sebesar Rp3.412.459.753,- per jiwa. Posisi ini didorong oleh kombinasi total aset sebesar Rp9,48 triliun, tertinggi kedua di antara kabupaten/kota setelah Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil (277.800 jiwa). Kota Makassar menempati peringkat kedua dengan Rp2.445.759.718,- per jiwa, mencerminkan kapasitas aset perkotaan yang besar meskipun melayani penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan (1.464.600 jiwa).

Rasio terendah di antara kabupaten/kota terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp433.610.735,- per jiwa. Meskipun berada di posisi terendah, angka tersebut tetap menunjukkan kapasitas yang memadai dalam penyediaan layanan dasar. Rendahnya rasio disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar (830.100 jiwa, terbanyak kedua setelah Kota Makassar) berhadapan dengan total aset Rp3,60 triliun.

Posisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Rp220.717.361,- per jiwa) tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan kabupaten/kota. Penyebut rasio menggunakan seluruh penduduk provinsi (9.463.400 jiwa), sedangkan aset yang dicatat hanya aset yang dikuasai Pemerintah Provinsi. Aset yang melayani warga di suatu wilayah pada kenyataannya merupakan gabungan aset pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang secara konsolidasian mencapai Rp39,11 juta per jiwa pada tingkat LKPK.

Catatan metodologis: kapasitas aset bukan kualitas layanan

Rasio ini memiliki keterbatasan yang perlu disampaikan secara jujur. Pertama, nilai aset mencerminkan nilai perolehan yang telah disusutkan, bukan nilai manfaat atau kondisi fisik aset. Kedua, komponen Tanah yang mendominasi aset tetap belum tentu menghasilkan layanan secara langsung, sehingga daerah dengan penguasaan tanah luas akan tampak unggul tanpa perbedaan kualitas layanan yang setara. Ketiga, dan yang paling penting, korelasi antara Rasio Solvabilitas Layanan dan Rasio

Solvabilitas Operasional hanya sebesar +0,01, alias mendekati nihil. Ini berarti daerah dengan aset per kapita tinggi tidak lebih mampu membiayai operasionalnya. Kabupaten Toraja Utara adalah ilustrasi paling tajam: aset per kapita tertinggi di Sulawesi Selatan, namun kemandirian terendah (6,93%) dan solvabilitas operasional terendah kedua (83,70%).

Bukti paling kuat atas keterbatasan tersebut terlihat pada penelusuran komposisi aset. Total aset Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp9,48 triliun ternyata 83,1% di antaranya berupa Tanah (Rp7,88 triliun). Sebaliknya, Kabupaten Bone yang menempati posisi terendah hanya mencatat nilai Tanah sebesar Rp626,60 miliar atau 17,4% dari total asetnya, meskipun memiliki nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang jauh lebih besar (Rp3,12 triliun berbanding Rp1,48 triliun pada Toraja Utara). Dengan kata lain, perbedaan peringkat pada rasio ini lebih banyak ditentukan oleh perbedaan penilaian aset tanah daripada oleh perbedaan kapasitas layanan. Perbedaan tersebut dapat bersumber dari kemajuan pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) barang milik daerah, kelengkapan pencatatan bukti kepemilikan, maupun perbedaan nilai pasar tanah antarwilayah. Hal ini sekaligus menjadi catatan bagi penguatan kualitas penatausahaan barang milik daerah, khususnya pada daerah dengan nilai tanah yang terindikasi belum termutakhirkan.

Temuan ini membawa implikasi kebijakan yang penting: aset yang besar menuntut biaya pemeliharaan yang besar pula. Tanpa kapasitas pendapatan yang memadai, aset justru dapat berubah menjadi beban fiskal. Karena itu rasio ini sebaiknya dibaca berdampingan dengan rasio solvabilitas operasional, bukan berdiri sendiri sebagai ukuran keberhasilan.

D. Rasio Solvabilitas Operasional

Rasio Solvabilitas Operasional menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional selama satu periode anggaran.

Berbeda dengan Rasio Solvabilitas Anggaran yang berbasis kas (Laporan Realisasi Anggaran), rasio ini disusun atas dasar akrual (Laporan Operasional), sehingga turut memperhitungkan beban yang belum dibayarkan seperti penyusutan, amortisasi, dan penyisihan piutang.

$$\text{Rasio Solvabilitas Operasional} = \left[\frac{\text{Pendapatan LO} - \text{DAK}}{\text{Beban Operasi LO}} \right] \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan untuk menutupi seluruh beban operasional. Karena berbasis akrual, rasio ini memberikan gambaran keberlanjutan

fiskal yang lebih konservatif dan lebih jujur dibandingkan ukuran berbasis kas.

Pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 Audited secara rata-rata memiliki Rasio Solvabilitas Operasional sebesar 94,83%, dengan median 92,43%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendapatan operasional belum sepenuhnya mampu menutupi seluruh beban operasional. Hanya 5 dari 25 entitas yang mencatat rasio di atas 100%, yaitu Kota Makassar (129,13%), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (121,40%), Kabupaten Luwu Timur (111,62%), Kota Palopo (101,69%), dan Kabupaten Luwu Utara (101,51%). Dua puluh entitas lainnya berada dalam posisi defisit operasional.

Peringkat Teratas dan Terbawah Rasio Solvabilitas Operasional

Peringkat Teratas	Rasio	Peringkat terbawah	Rasio
1. Kota Makassar	129,13%	21. Kab. Pangkajene dan Kepulauan	86,51%
2. Prov. Sulawesi Selatan	121,40%	22. Kab. Sinjai	84,90%
3. Kab. Luwu Timur	111,62%	23. Kab. Kepulauan Selayar	84,74%
4. Kota Palopo	101,69%	24. Kab. Toraja Utara	83,70%
5. Kab. Luwu Utara	101,51%	25. Kab. Tana Toraja	81,72%

Rasio tertinggi dicatat Kota Makassar sebesar 129,13%. Posisi ini ditopang basis pajak daerah yang sangat kuat: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp353,59 miliar dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp282,30 miliar, dimana keduanya tertinggi se-Sulawesi Selatan, sehingga 90,5% PAD-nya berasal dari pajak daerah. Kabupaten Luwu Timur (111,62%) memperoleh keunggulan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp178,84 miliar, Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp227,44 miliar, dan dividen atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp27,12 miliar, seluruhnya berada di atas rata-rata pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan.

Rasio terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebesar 81,72%, diikuti Kabupaten Toraja Utara (83,70%) dan Kabupaten Kepulauan Selayar (84,74%). Pada ketiga daerah ini, kombinasi basis pendapatan yang tipis dan struktur beban yang kaku menjadi penyebab utama. Kabupaten Toraja Utara mencatat PAD terendah se-Sulawesi Selatan (Rp73,42 miliar) dengan porsi belanja pegawai mencapai 51,84% dari total belanja. Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi persoalan berbeda, belanja per kapita tertinggi kedua (Rp6,86 juta per jiwa) akibat karakter kepulauan yang menuntut biaya penyelenggaraan layanan lebih mahal, dengan PAD hanya Rp97,26 miliar.

Pengaruh belanja pegawai terhadap solvabilitas operasional

Analisis atas komposisi belanja menemukan hubungan yang konsisten, daerah dengan porsi belanja pegawai tinggi cenderung memiliki solvabilitas operasional rendah. Enam daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 50%, Kabupaten Sinjai (53,10%), Toraja Utara (51,84%), Kota Palopo (51,04%), Kabupaten Enrekang (50,56%), Luwu Utara (50,52%), dan Bantaeng (50,24%), lima di antaranya berada di paruh bawah peringkat solvabilitas operasional. Sebaliknya, Kabupaten Luwu Timur (35,46%), Kota Makassar (39,09%), dan

Kabupaten Wajo (39,27%) yang memiliki porsi belanja pegawai terendah menempati posisi yang jauh lebih baik.

Perlu digarisbawahi bahwa belanja pegawai adalah komponen belanja yang paling sulit disesuaikan dalam jangka pendek. Karena itu, perbaikan solvabilitas operasional pada daerah-daerah tersebut lebih realistis ditempuh melalui penguatan sisi pendapatan dan efisiensi belanja barang dan jasa, disertai penataan kebutuhan pegawai secara bertahap, bukan melalui pemotongan belanja pegawai secara mendadak yang berisiko mengganggu penyelenggaraan layanan.

E. Rasio Fleksibilitas Keuangan

Rasio Fleksibilitas Keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang. Rasio ini mengukur ruang gerak yang tersisa setelah seluruh beban operasional dan kewajiban pembayaran pokok utang terpenuhi.

$$\text{Rasio Fleksibilitas Keuangan} = \frac{[(\text{Pendapatan LO} - \text{DAK} - \text{Beban Operasi} - \text{Pembayaran Pokok Utang}) \div (\text{Beban Operasi} + \text{Pembayaran Pokok Utang})] \times 100\%}{}$$

Semakin tinggi Rasio Fleksibilitas Keuangan, semakin baik kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi fiskal. Nilai nol berarti pendapatan hanya cukup menutup beban dan kewajiban pokok utang, sedangkan nilai negatif berarti terdapat kekurangan yang harus ditutup dari sumber lain.

Pada Tahun 2025 Audited, rata-rata Rasio Fleksibilitas Keuangan pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar negatif 5,95%, dengan median negatif 7,57%. Sebanyak 21 dari 25 entitas (84%) mencatat rasio negatif. Artinya, pendapatan operasional setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus belum cukup untuk menutupi beban operasional dan pembayaran pokok utang, sehingga terdapat keterbatasan nyata dalam meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri.

Peringkat Teratas dan Terbawah Rasio Fleksibilitas Keuangan

Peringkat Teratas	Rasio	Peringkat terbawah	Rasio
1. Kota Makassar	29,13%	21. Kab. Kepulauan Selayar	-15,26%
2. Prov. Sulawesi Selatan	19,11%	22. Kab. Toraja Utara	-16,30%
3. Kab. Luwu Timur	11,62%	23. Kab. Sinjai	-16,70%
4. Kota Palopo	1,39%	24. Kab. Enrekang	-17,48%
5. Kab. Luwu Utara	-1,62%	25. Kab. Tana Toraja	-18,28%

Rasio tertinggi dicatat Kota Makassar sebesar 29,13%, disusul Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (19,11%) dan Kabupaten Luwu Timur (11,62%). Ketiganya memiliki basis pajak daerah yang kuat, dan Kabupaten Luwu Timur beroperasi tanpa kewajiban pembayaran pokok utang sama sekali sehingga seluruh surplus operasionalnya tersedia sebagai ruang fiskal.

Rasio terendah terdapat pada Pemerintah

Kabupaten Tana Toraja sebesar negatif 18,28%, diikuti Kabupaten Enrekang (negatif 17,48%) dan Kabupaten Sinjai (negatif 16,70%). Pada Kabupaten Enrekang, tekanan berlipat karena selain defisit operasional, daerah ini juga menanggung pembayaran pokok utang sebesar Rp62,36 miliar pada tahun 2025, terbesar di antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kombinasi antara defisit operasional dan kewajiban pokok utang inilah yang menjadikan posisi fiskal

Kabupaten Enrekang paling memerlukan perhatian di antara seluruh entitas.

Hubungan dengan solvabilitas operasional

Korelasi antara Rasio Fleksibilitas Keuangan dan Rasio Solvabilitas Operasional tercatat sebesar +0,99, hampir sama. Hal ini bukan kebetulan statistik, melainkan konsekuensi konstruksi rumus, apabila suatu daerah tidak memiliki pembayaran pokok utang, Rasio Fleksibilitas Keuangan persis sama dengan Rasio Solvabilitas Operasional dikurangi 100%. Karena 14 dari 25 entitas tidak memiliki kewajiban jangka panjang dan sebagian besar lainnya memiliki pembayaran pokok utang yang kecil, kedua rasio hampir sepenuhnya bergerak seiring.

Implikasinya, kedua rasio tersebut tidak memberikan informasi yang saling melengkapi dan sebaiknya tidak disajikan sebagai dua temuan yang berdiri sendiri. Nilai tambah Rasio Fleksibilitas Keuangan justru terletak pada selisih antara keduanya, yang mengukur seberapa besar beban pokok utang menggerus ruang fiskal. Selisih terbesar terdapat pada Kabupaten Enrekang (5,59 poin persentase; pokok utang Rp62,36 miliar), Kabupaten Takalar (3,72 poin; Rp38,89 miliar), Kabupaten Luwu Utara (3,13 poin; Rp37,00 miliar), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2,29 poin; Rp133,88 miliar). Keempat daerah ini menanggung pembayaran pokok utang yang signifikan relatif terhadap beban operasionalnya.

Rekomendasi Solvabilitas Anggaran, Layanan, Operasional, dan Fleksibilitas

- Menyusun program penguatan pendapatan dan efisiensi belanja barang dan jasa bagi enam daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 50%, disertai penataan kebutuhan pegawai secara bertahap.
- Memberikan pendampingan intensif kepada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Kepulauan Selayar, Sinjai, dan Enrekang yang secara konsisten berada di peringkat terbawah pada tiga rasio sekaligus.
- Melakukan penilaian kembali dan pemutakhiran pencatatan barang milik daerah, khususnya aset tanah, agar Rasio Solvabilitas Layanan dapat diperbandingkan secara adil antardaerah.

Simpulan

Analisis atas Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian, dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Audited menghasilkan enam simpulan utama berikut.

1. Posisi neraca sektor pemerintah di wilayah Sulawesi Selatan sangat kuat. Solvabilitas jangka pendek konsolidasian mencapai 467,52% dan solvabilitas jangka panjang 5.804,15%, dengan hanya 2,85% aset yang dibiayai kewajiban. Kekuatan ini bertahan bahkan ketika diuji dengan ukuran paling ketat, dengan rasio kas sebesar 111,61% berarti seluruh kewajiban jangka pendek dapat dilunasi hanya dengan saldo kas.
2. Kekuatan neraca tidak diikuti oleh kekuatan operasional. Sebanyak 20 dari 25 pemerintah daerah mencatat rasio solvabilitas operasional di bawah 100%, dan 21 dari 25 mencatat fleksibilitas keuangan negatif. Pemerintah Umum tingkat wilayah membukukan defisit operasi sebesar Rp12,69 triliun. Persoalan fiskal di wilayah Sulawesi Selatan bersifat struktural pada sisi operasi, bukan pada sisi permodalan maupun beban utang.
3. Kemandirian fiskal masih rendah dan kualitasnya perlu dibaca lebih cermat. Delapan belas dari 25 entitas berada pada kategori Kurang atau Sangat Kurang. Lebih jauh, pada sebagian besar kabupaten, PAD didominasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pendapatan BLUD yang bersifat terikat, sehingga tidak menambah keleluasaan fiskal.
4. Ruang pembiayaan jangka panjang sangat longgar namun belum dimanfaatkan. Empat belas dari 25 entitas tidak memiliki kewajiban jangka panjang, dengan rasio utang terhadap aset rata-rata hanya 4,25%, dan tidak terdapat pembiayaan perbankan, non-perbankan, maupun luar negeri pada tingkat wilayah. Bagi daerah dengan likuiditas dan solvabilitas operasional yang sehat, pemanfaatan pembiayaan produktif secara terukur merupakan opsi kebijakan yang layak dikaji.
5. Terdapat lima daerah yang memerlukan pendampingan prioritas. Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Kepulauan Selayar, Sinjai, dan Enrekang secara konsisten menempati peringkat terbawah pada beberapa rasio sekaligus. Kabupaten Enrekang merupakan prioritas tertinggi karena menggabungkan solvabilitas jangka pendek terendah kedua (28,97%), rasio utang terhadap aset tertinggi (18,98%), dan beban pembayaran pokok utang terbesar di antara kabupaten/kota (Rp62,36 miliar).
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah penggerak utama konsumsi pemerintah di daerah. Kontribusinya terhadap Belanja Konsumsi Final Pemerintah mencapai 54,40%, melampaui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Keterlambatan penyerapan anggaran pada level ini karena itu berdampak paling besar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan.

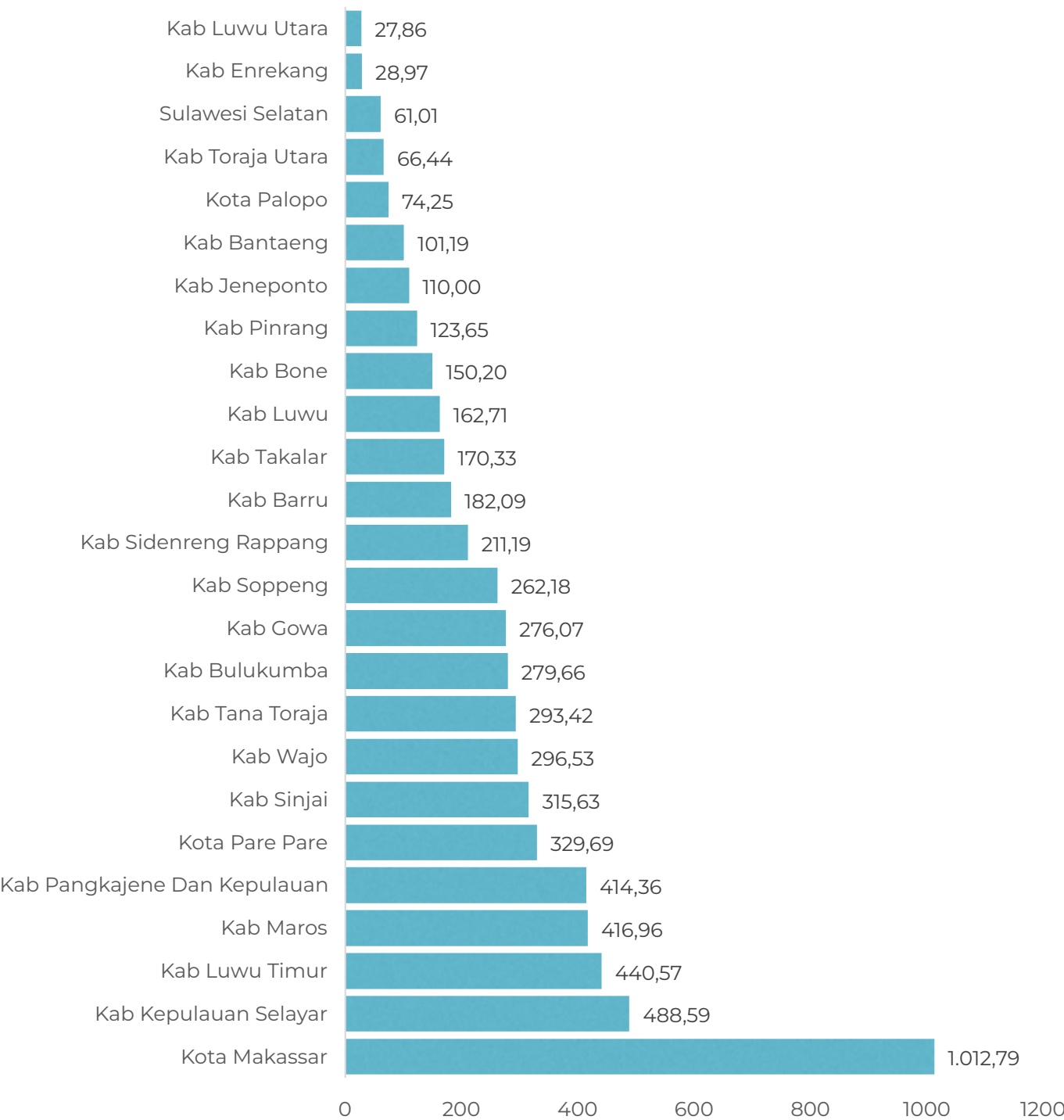
Informasi Perhitungan

A. Analisis Rasio Keuangan Pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Kategori	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek		Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	
	2025	2024	2025	2024
LKPK-TW	467,52%	447,05%	5.804,15%	5.247,15%
LKPKD-TW	183,10%	107,68%	14.495,61%	9.909,%

2. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Daerah



2. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Daerah

Kategori	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	
	2025	2024
Sulawesi Selatan	8.140,07%	5.281,50%
Kab Gowa	23.028,05	6.698,52%
Kab Bone	2.512,58%	1.880,78%
Kab Sinjai	13.946,43%	9.207,09%
Kab Takalar	1.405,64%	10.85,23%
Kab Barru	7.756,80%	23.500,34%
Kab Soppeng	3.899,68%	2.998,71%
Kab Enrekang	1.322,08%	1.008,61%
Kab Luwu Utara	8.556,69%	2.716,54%
Kota Pare Pare	34.056,87%	31.704,01%
Kota Palopo	58.339,04%	36.052,26%

B. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian Keuda	Kategori Kemandirian	Rasio Solvabilitas Anggaran	Rasio Solvabilitas Layanan	Rasio Solvabilitas Operasional	Rasio Fleksibilitas Keuangan
Sulawesi Selatan	50,50	Sangat Baik	93,98	220.717.361	121,40	19,11
Kab Pinrang	40,65	Baik	100,28	739.615.508	94,29	-5,71
Kab Gowa	32,31	Cukup	105,91	578.823.013	92,43	-7,57
Kab Wajo	25,57	Sedang	108,96	938.014.247	97,31	-2,69
Kab Bone	24,89	Sedang	96,72	433.610.735	94,86	-7,24
Kab Tana Toraja	22,43	Sedang	92,07	1.217.860.017	81,72	-18,28
Kab Maros	22,24	Sedang	109,11	880.148.869	95,40	-4,60
Kab Luwu	18,94	Kurang	96,82	802.706.270	91,78	-8,22
Kab Sinjai	18,57	Kurang	94,00	862.272.464	84,90	-16,70
Kab Bulukumba	18,08	Kurang	100,60	640.181.546	92,72	-7,28
Kab Bantaeng	17,65	Kurang	98,17	1.250.244.571	93,08	-6,92
Kab Jeneponto	15,79	Kurang	93,26	558.239.326	90,97	-9,03
Kab Kepulauan Selayar	15,75	Kurang	95,56	1.607.137.512	84,74	-15,26
Kab Takalar	15,64	Kurang	99,07	603.557.278	97,03	-6,69
Kab Barru	15,61	Kurang	97,29	1.152.289.569	87,62	-12,70
Kab Sidenreng Rappang	14,79	Kurang	97,89	768.624.110	88,07	-12,10
Kab Pangkajene Dan Kepulauan	14,55	Kurang	96,75	556.914.839	86,51	-13,49
Kab Soppeng	13,95	Kurang	102,33	1.033.798.872	90,33	-9,67
Kab Enrekang	13,94	Kurang	99,20	1.027.872.972	88,11	-17,48
Kab Luwu Utara	12,34	Kurang	94,56	520.051.745	101,51	-1,62
Kab Luwu Timur	10,96	Kurang	110,28	1.289.990.840	111,62	11,62
Kab Toraja Utara	9,87	Sangat Kurang	91,86	3.412.459.753	83,70	-16,30
Kota Makassar	9,08	Sangat Kurang	120,52	2.445.759.718	129,13	29,13
Kota Pare Pare	9,01	Sangat Kurang	105,09	1.445.681.029	89,73	-10,57
Kota Palopo	6,93	Sangat Kurang	104,71	1.271.760.972	101,69	1,39

C. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

Indikator	Pemkab/Pemkot	Pemprov	Pemerintah Pusat	Pemerintah Konsolidasian
<i>Net Operating Balance</i>	-7.341.953.883.219	10.842.567.831.311	-16.188.713.782.030	-12.688.099.833.938
<i>Gross Operating Balance</i>	-7.341.953.883.219	10.842.567.831.311	-16.188.713.782.030	-12.688.099.833.938
<i>Net Lending/Borrowing</i>	-7.626.485.817.639	10.702.771.813.815	-18.931.080.871.886	-15.854.794.875.710
<i>Primary Operating Balance</i>	-7.326.949.065.177	10.842.567.831.311	-16.188.713.782.030	-12.673.095.015.896
<i>Primary Balance</i>	-7.611.480.999.597	10.702.771.813.815	-18.931.080.871.886	-15.839.790.057.668
<i>Direct Taxes</i>	-	415.107.881.306	2.161.520.205.711	2.576.628.087.017
<i>Indirect Taxes</i>	1.397.704.085.551	1.404.434.965.380	2.908.546.947.678	5.710.685.998.609
<i>Capital Taxes</i>	-	-	-	-
<i>Government final consumption expenditure</i>	9.838.449.531.172	947.149.639.512	7.299.494.024.574	18.085.093.195.258
<i>Gross Saving</i>	-7.273.741.475.394	10.860.413.006.811	-16.145.729.099.168	-12.559.057.567.751
<i>Total Financing</i>	2.038.232.274.184	1.038.053.721.992	-18.931.080.871.886	-27.644.909.790.548
<i>Domestic Financing</i>	2.038.232.274.184	1.038.053.721.992	-18.931.080.871.886	-27.644.909.790.548
<i>Foreign Financing</i>	-	-	-	-
<i>Gross Debt</i>	2.700.819.579.207	950.251.891.890	8.360.097.907.407	11.606.369.282.605
<i>Net Debt</i>	2.700.819.579.207	950.251.891.890	8.360.097.907.407	11.606.369.282.605

LAMPIRAN



Kampung Wisata Karst Rammang-Rammang

LKPK dan LSKP Tingkat Wilayah Periode Tahun 2025
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI	26.999.399.893.557	29.366.084.668.810	-8,06%
Pendapatan Perpajakan konsolidasi	18.705.293.325.969	21.605.150.488.987	-13,42%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	18.420.409.247.969	21.218.190.433.987	-13,19%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	284.884.078.000	386.960.055.000	-26,38%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.239.921.516.895	7.489.985.770.926	10,01%
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	416.233.660.762	389.319.600.691	6,91%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.416.973.017.059	2.621.134.809.625	68,51%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	-	208.711.381.960	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	-	90.651.640.000	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	26.833.963.650	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	13.205.889.750	-	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	3.366.674.985.675	4.180.168.338.650	-19,46%
Pendapatan hibah	54.185.050.693	270.948.408.897	-80,00%
Pendapatan hibah dalam negeri	54.185.050.693	270.948.408.897	-80,00%
Pendapatan hibah luar negeri	-	-	-
B. Belanja	65.303.319.417.609	70.208.323.136.033	-6,99%
Belanja pegawai	30.454.074.177.543	28.372.941.927.615	7,33%
Belanja gaji dan tunjangan	27.806.397.801.307	26.030.562.040.624	6,82%
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transit	2.326.173.161.319	1.993.681.722.469	16,68%
Belanja kontribusi sosial	321.503.214.916	348.698.164.522	-7,80%
Belanja barang dan jasa	21.051.436.109.419	23.829.198.279.204	-11,66%
Belanja barang	4.824.952.725.074	7.225.829.698.849	-33,23%
Belanja Jasa	4.817.474.424.266	4.960.543.868.200	-2,88%
Belanja Pemeliharaan	1.284.821.329.997	1.405.624.977.788	-8,59%
Belanja Perjalanan Dinas	1.481.773.812.917	2.860.407.218.897	-48,20%
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	2.274.780.579.175	2.180.922.646.835	4,30%
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	4.924.904.124.811	3.961.243.128.085	24,33%
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	1.442.729.113.180	1.234.626.740.550	16,86%
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden	-	-	-
Belanja Modal	8.987.534.637.607	11.586.464.705.116	-22,43%
Belanja Modal Tanah	246.119.223.858	40.780.429.189	503,52%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.069.356.777.932	2.377.210.822.545	-12,95%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.524.651.941.023	3.264.033.839.028	-22,65%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.681.664.019.995	5.232.613.967.955	-29,64%
Belanja Modal Lainnya	212.506.012.283	209.977.027.578	1,20%
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	253.236.662.516	461.848.618.821	-45,17%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Belanja Pembayaran Bunga Utang	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	-	-	-
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	-	-	-
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-
Belanja Denda	-	-	-
Belanja Subsidi	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	-	-	-
Belanja Hibah	974.333.272.548	2.373.306.786.096	-58,95%
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	-	-	-
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	-	-
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	159.694.873.324	952.581.535.314	-83,24%
Belanja Hibah Lainnya	814.638.399.224	1.420.725.250.782	-42,66%

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Belanja Bantuan Sosial	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	16.744.339.268	13.838.010.647	21,00%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	84.840.050.000	80.503.150.000	5,39%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	25.939.699.870	23.740.269.843	9,26%
Belanja Lain-lain	51.967.081.549	35.424.119.740	46,70%
Belanja Lain-lain	51.967.081.549	35.424.119.740	46,70%
C. BELANJA TRANSFER	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	129.219.519.332	89.376.519.986	44,58%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	118.859.959.615	81.292.125.095	46,21%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	10.359.559.718	8.084.394.891	28,14%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.453.448.745.308	3.739.609.830.438	-7,65%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	918.787.524.466	288.841.196.563	218,09%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.313.046.320.146	3.450.768.633.875	-32,97%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	221.614.900.696	-	-
Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	-	-	-
Dana Bagi Hasil	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-
Dana Bagi Hasil Cukai	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Dana Desa	-	-	-
Dana Desa	-	-	-
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	-38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%
E. Pembiayaan	749.205.766.083	1.190.323.737.584	-37,06%
Penerimaan Pembiayaan	1.207.671.446.647	1.653.683.290.482	-26,97%
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.207.671.446.647	1.653.683.290.482	-26,97%
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	-	-	-
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	-	-	-
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	-	-	-
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	-	-	-
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	458.465.680.564	463.359.552.898	-1,06%
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	418.691.680.564	437.359.552.898	-4,27%
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	-	-	-
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	-	-	-
Penyertaan Modal Negara	39.774.000.000	26.000.000.000	52,98%
RDI/RPD	-	-	-
Dukungan Infrastruktur	-	-	-
Pengeluaran Investasi Pemerintah	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
Suspense Pembiayaan	-	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	-37.554.713.757.969	-39.651.914.729.639	5,29%

Laporan Operasional Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
KEGIATAN OPERASIONAL	-42.643.441.430.477	-44.362.682.514.104	3,88%
Pendapatan Operasional-LO	30.678.321.199.376	33.101.855.259.525	-7,32%
Pendapatan perpajakan-LO	19.411.850.290.367	22.303.741.429.503	-12,97%
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	19.127.635.760.367	21.918.437.581.503	-12,73%
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	284.214.530.000	385.303.848.000	-26,24%
Pendapatan bukan pajak-LO	4.976.321.977.159	3.117.798.666.983	59,61%
Pendapatan sumber daya alam-LO	-	-	-
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	489.666.676.358	416.829.589.273	17,47%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	4.486.655.300.800	2.700.969.077.710	66,11%
Pendapatan Transfer - LO	1.015.413.783.532	1.398.376.226.611	-27,39%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	688.255.758.365	1.185.823.308.958	-41,96%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	210.154.380.000	633.997.160.000	-66,85%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	386.940.558.710	-	-
Bantuan Keuangan - LO	267.448.531.296	149.153.201.653	79,31%
Pendapatan BLU-LO	3.307.578.529.562	4.006.979.534.058	-17,45%
Pendapatan Jasa BLU - LO	3.161.753.622.047	3.883.664.446.663	-18,59%
Pendapatan Hibah BLU - LO	26.751.931.440	3.585.190.372	646,18%
Pendapatan Lainnya BLU - LO	119.072.976.075	119.729.897.023	-0,55%
Pendapatan hibah-LO	1.653.851.048.066	2.270.296.211.138	-27,15%
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	1.653.851.048.066	2.270.296.211.138	-27,15%
Pendapatan lainnya-LO	313.305.570.691	4.663.191.232	6.618,69%
Pendapatan lainnya Pemda	296.568.172.601	-	-
Pendapatan Penyesuaian Akruai	16.737.398.090	4.663.191.232	258,93%
Beban Operasional	69.388.408.647.613	73.333.201.368.646	-5,38%
Beban pegawai	31.507.081.696.985	29.436.384.947.496	7,03%
Beban gaji dan tunjangan	29.185.001.446.551	27.419.806.821.899	6,44%
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transit	2.322.080.250.434	2.016.578.125.597	15,15%
Beban kontribusi sosial	-	-	-
Beban persediaan	1.743.129.003.821	2.133.074.573.534	-18,28%
Beban barang dan jasa	19.104.546.243.428	22.570.793.830.721	-15,36%
Beban barang	7.841.530.388.990	9.823.450.467.039	-20,18%
Beban jasa	5.544.774.534.205	5.780.842.321.587	-4,08%
Beban pemeliharaan	1.773.541.503.153	1.655.120.910.110	7,15%
Beban perjalanan dinas	1.605.165.360.006	3.009.823.594.415	-46,67%
Beban BLU/BLUD	722.258.011.702	749.115.615.077	-3,59%
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	1.617.276.445.373	1.552.440.922.493	4,18%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden	-	-	-
Beban bunga	44.466.756.915	58.016.818.159	-23,36%
Beban Pembayaran Bunga Utang	44.466.756.915	58.016.818.159	-23,36%
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	-	-	-
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	-	-	-
Beban Denda	-	-	-
Beban subsidi	29.748.499.073	6.462.995.127	360,29%
Beban subsidi kepada perusahaan publik	29.748.499.073	6.462.995.127	360,29%
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	-	-	-
Beban Subsidi - Estimasi	-	-	-
Beban hibah	965.496.614.650	2.254.425.547.273	-57,17%
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	-	-	-
Beban hibah kepada organisasi internasional	-	-	-
Beban hibah kepada pemerintah daerah	283.749.926.506	811.202.045.383	-65,02%
Beban Hibah Lainnya	681.746.688.145	1.443.223.501.890	-52,76%

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Beban bantuan sosial	133.273.135.986	131.054.845.223	1,69%
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	22.841.772.616	24.985.143.330	-8,58%
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	84.840.050.000	80.503.150.000	5,39%
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	25.591.313.370	25.566.551.893	0,10%
Beban lain-lain/beban tidak terduga	15835095485	31520696793	-49,76%
Beban Lain-lain	15835095485	31520696793	-49,76%
Beban akrual lainnya	11.911.477.619.030	12.580.130.709.337	-5,32%
Beban Penyusutan Aset Tetap	11.237.284.319.110	11.922.201.663.942	-5,74%
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	152.481.832.788	174.398.663.994	-12,57%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	521.711.467.133	483.530.381.401	7,90%
BEBAN TRANSFER	3.933.353.982.240	4.131.336.404.983	-4,79%
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	1.818.644.491.884	2.079.607.659.137	-12,55%
Dana Bagi Hasil	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-
Dana Bagi Hasil Cukai	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-	-
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-
Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-
Dana Desa	1.818.644.491.884	2.079.607.659.137	-12,55%
Dana Desa	1.818.644.491.884	2.079.607.659.137	-12,55%
Beban Transfer Lain-lain	-	-	-
Beban Suspense Transfer	-	-	-
BEBAN TRANSFER PEMDA	2.114.709.490.356	2.051.728.745.846	3,07%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	159.646.506.606	86.188.765.852	85,23%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	135.955.362.098	10.389.312.039	1208,61%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	347.046.730.688	240.136.939	144,420%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.472.060.890.964	1.954.910.531.016	-24,70%
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-38.710.087.448.237	-40.231.346.109.121	3,78%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	-	3494991	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	-280.587.404.722	-134.128.758.365	-109,19%
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	109.729.708.233	112.080.479.162	-2,10%
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	-68133312909	-80877723075	15,76%
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-22908490257	-	-
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	-37893126035	-66711468082	43,20%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	-299.792.625.690	-169.633.975.369	-76,73%
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	-39.009.880.073.927	-40.400.980.084.490	3,44%
POS LUAR BIASA	-22879899866	391.456.586.011	-105,84%
PENDAPATAN LUAR BIASA	5471658565	14.319.994.324	-98,68%
BEBAN LUAR BIASA	-28351558431	-22863408313	-24,00%
SURPLUS (DEFISIT) LO	-39.032.759.973.793	-40.009.523.498.479	2,44%

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
EKUITAS AWAL	357.205.408.400.085	352.023.730.911.924	1%
Ekuitas Awal pemerintah Pusat	235.681.387.708.041	231.819.949.843.268	2%
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	121.459.291.020.860	120.203.781.068.656	1%
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	357.205.408.400.085	232.057.025.464.076	54%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	-39.032.759.973.793	-40.009.523.498.479	2%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Koreksi SILPA	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	773.446.780	-121.306.879.321	101%
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-2.730.879.456.506	314.662.076.966	-968%
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	2.317.421.298.419	76.531.776.404	2928%
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	-	-	-
Koreksi Lain-lain	-826.356.584.995	-188.468.632.446	-338%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	-1.239.041.296.302	81.418.341.603	-1622%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42.396.251.684.440	46.308.263.993.780	-8%
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	-	-	-
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	-	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2.777.679.051.317	6.380.158.836.904	-56%
EKUITAS AKHIR	359.983.087.451.402	357.205.408.400.085	1%

Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Aset	370.119.783.990.077	368.076.682.019.588	0,56%
Aset lancar	19.561.256.343.737	17.240.476.332.101	13,46%
Kas dan setara kas	4.669.644.806.736	3.613.266.690.213	29,24%
Uang muka rekening BUN-khusus pusat	-	-	-
Investasi jangka pendek	95.500.000.000	75.500.000.000	26,49%
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	62.445.434.697	118.760.853.014	-47,42%
Piutang	2.789.710.926.173	2.429.709.574.048	14,82%
Piutang Perpajakan	1.939.506.542.826	1.620.350.557.466	19,70%
Piutang Bukan Pajak	3.021.690.409.816	2.676.912.047.585	12,88%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	23.975.783.858	9.079.865.728	164,05%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	28.445.000	28.445.000	0,00%
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	-	-	-
Piutang lain-lain	243.936.651.434	231.514.560.968	5,37%
Penyisihan piutang tak tertagih	-2.439.426.906.762	-2.108.175.902.699	-15,71%
Persediaan	11.943.955.176.131	11.003.239.214.826	8,55%
Piutang PFK	-	-	-
Investasi jangka panjang	4.766.089.585.223	4.595.972.200.024	3,70%
Investasi jangka panjang non permanen	5.242.733.097	5.401.144.409	-2,93%
Investasi jangka panjang permanen	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-	-	-
Aset tetap	338.887.820.994.270	339.446.209.208.587	-0,16%
Tanah	211.344.110.589.031	210.248.806.811.208	0,52%
Peralatan dan mesin	64.197.383.678.014	60.838.163.960.093	5,52%
Gedung dan bangunan	60.512.012.605.308	57.454.233.214.818	5,32%
Jalan, irigasi, dan jaringan	126.030.971.963.983	122.497.050.955.142	2,88%
Aset tetap lainnya	3.261.878.693.809	4.343.637.685.861	-24,90%
Konstruksi dalam pengerjaan	7.923.169.191.186	7.710.411.284.126	2,76%
Konsesi Jasa	6.384.888.583.525	6.532.578.329.525	-2,26%
Akumulasi penyusutan	-140.766.594.310.585	-130.178.673.032.186	-8,13%
Aset Tetap Yang Belum Diregister	-	-	-
Properti Investasi	230.693.560.525	232.597.001.161	-0,82%
Dana cadangan	-	-	-
Dana cadangan	-	-	-
Piutang jangka panjang	172.956.936.636	115.098.270.054	50,27%
Tagihan piutang penjualan angsuran	39.257.865.581	40.011.745.045	-1,88%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	135.324.341.055	76.711.295.069	76,41%
Piutang jangka panjang kredit pemerintah	-	-	-
Piutang jangka panjang lainnya	-	-	-
Penyisihan piutang jangka panjang	-1.625.270.000	-1.624.770.060	-0,03%
Aset lainnya	6.500.966.569.685	6.446.329.007.661	0,85%
Kemitraan dengan pihak ketiga	250.240.838.543	247.521.872.143	1,10%
Aset tidak berwujud	1.762.415.839.314	1.398.896.008.132	25,99%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	573.061.515.059	404.944.577.294	41,52%
Dana Penjaminan	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-
Aset lain-lain	8.296.459.422.605	6.759.726.468.966	22,73%
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya	-	-	-
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	-	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-4.381.211.045.837	-2.364.759.918.874	-85,27%
Kewajiban / Utang	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Kewajiban jangka pendek	4.184.028.018.246	3.856.476.211.765	8,49%
Utang perhitungan pihak ketiga	13.338.425.066	3.474.833.812	283,86%
Utang kepada pihak ketiga	2.730.708.837.068	3.123.025.728.163	-12,56%
Utang bunga	2.379.756.412	65.843.529.903	-96,39%
Utang subsidi	-	-	-
Utang Transfer	59.038.778.540	-	-
Bagian lancar utang jangka panjang	429.751.783.743	380.543.043.924	12,93%
Utang surat perbendaharaan negara	-	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	18.000.000.000	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	76.105.707.517	69.986.473.865	8,74%
Pendapatan Diterima Dimuka	774.412.709.001	88.925.710.034	770,85%
Uang Muka	2.3078.000	7519.054	206,93%
Utang Jangka Pendek Lainnya	80.268.942.900	124.669.373.010	-35,61%
Kewajiban jangka panjang	6.376.808.504.855	7.014.797.407.738	-9,09%
Utang jangka panjang dalam negeri	881.453.969.525	1.269.037.813.293	-30,54%
Utang jangka panjang luar negeri	-	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	5.495.354.535.330	5.745.759.594.445	-4,36%
Ekuitas	359.558.947.466.976	357.205.408.400.085	0,66%

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
A. Pendapatan Negara dan Hibah			
I. Pendapatan Perpajakan	10.883.546.163.327	13.904.465.913.846	-21,73%
1. Pajak Dalam Negeri	10.598.662.085.327	13.517.505.858.846	-21,59%
2. Pajak Perdagangan Internasional	284.884.078.000	386.960.055.000	-26,38%
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.998.853.665.938	3.632.178.239.586	10,10%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam			
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)			
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	2.762.492.854.387	2.444.408.711.043	13,01%
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.236.360.811.551	1.187.769.528.543	4,09%
III. Pendapatan Hibah			
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	14.882.399.829.265	17.536.644.153.432	-15,14%
B. Belanja Negara			
I. Belanja Pemerintah Pusat	23.705.414.898.066	26.293.264.213.432	-9,84%
1. Belanja Pegawai	10.874.195.431.247	9.955.979.172.098	9,22%
2. Belanja Barang	9.063.475.664.193	11.417.420.601.093	-20,62%
3. Belanja Modal	3.666.159.413.358	4.825.523.279.594	-24,03%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang			
5. Belanja Subsidi			
6. Belanja Hibah			
7. Belanja Bantuan Sosial	101.584.389.268	94.341.160.647	7,68%
8. Belanja Lain-lain			
II. Transfer ke Daerah	31.271.821.500.293	32.055.908.279.335	-2,45%
1. Dana Bagi Hasil	1.042.233.202.600	1.083.145.561.000	-3,78%
2. Dana Alokasi Umum	21.053.118.267.526	20.326.294.346.552	3,58%
3. Dana Alokasi Khusus	7.076.878.142.283	8.332.355.766.817	-15,07%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	789.711.869.973	2.610.747.499.284	-69,75%
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6.287.166.272.310	5.721.608.267.533	9,88%
c. Hibah Kepada Daerah			
4. Dana Otonomi Khusus			
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta			
6. Dana Desa	1.818.644.491.884	2.080.900.211.966	-12,60%
7. Insentif Fiskal	2.809.47E+11	233.212.393.000	20,47%
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	54.977.236.398.359	58.349.172.492.767	-5,78%
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	-40.094.836.569.094	-40.812.528.339.335	1,76%
D. Pembiayaan			
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	-	-	-
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-	-
2. Pemberian Pinjaman	-	-	-
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	-	-	-
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	-	-	-
5. Surat Berharga Negara (Neto)	-	-	-
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	-	-	-
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	-	-	-
6. Pinjaman dalam negeri (Neto)	-	-	-
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
7. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	-	-	-
8. Kewajiban Penjaminan	-	-	-
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	-	-	-
10. Pembiayaan Lain-lain	-	-	-
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-	-	-
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	-	-	-
a. Penarikan Pinjaman Tunai	-	-	-
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	-	-	-
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	-	-	-
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	-40.094.836.569.094	-40.812.528.339.335	1,76%

Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan	5.255.687.321.392	7.504.488.834.446	-29,97%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	5.582.508.796.039	6.265.810.760.316	-10,91%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	95.072.603.448	93.611.690.421	1,56%
Pendapatan Cukai	107.175.880.000	103.853.532.000	3,20%
Pendapatan Pajak Lainnya	100.497.587.381	200.060.380.024	-49,77%
Pendapatan Bea Masuk	233.019.369.000	301.864.476.000	-22,81%
Pendapatan Bea Keluar	51.195.161.000	83.439.372.000	-38,64%
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	11.425.156.718.260	14.553.129.045.207	-21,49%
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Penerimaan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.220.573.603.631	1.061.012.838.219	15,04%
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.856.644.886.421	2.432.741.947.785	17,42%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.077.218.490.052	3.493.754.786.004	16,70%
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah	-18.000.000.000	18.000.000.000	-200,00%
Jumlah Pendapatan Hibah	-18.000.000.000	18.000.000.000	-200,00%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	15.484.375.208.312	18.064.883.831.211	-14,28%
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	11.810.800.964.747	10.816.068.546.659	9,20%
Beban Persediaan	1.742.585.101.640	2.132.132.161.261	-18,27%
Beban Barang dan Jasa	3.458.527.489.605	5.628.452.121.886	-38,55%
Beban Pemeliharaan	1.394.093.123.312	1.276.544.836.467	9,21%
Beban Perjalanan Dinas	566.690.723.513	1.479.943.916.238	-61,71%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.597.050.565.985	1.465.159.842.832	9,00%
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	107.681.822.616	105.488.293.330	2,08%
Beban Transfer	31.159.248.238.098	31.954.124.681.491	-2,49%
Beban Lain-lain	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.27824E+12	5.623.429.021.292	-6,14%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	358.739.639.297	326.815.716.961	9,77%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	57.473.659.037.217	60.808.159.138.417	-5,48%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	-41.989.283.828.905	-42.743.275.307.206	1,76%
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12.416.312.456	9.774.872.033	27,02%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	293.003.717.178	143.903.630.398	103,61%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-280.587.404.722	-134.128.758.365	-109,19%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	116.430.261.787	117.255.943.323	-0,70%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.700.553.554	5.171.969.170	29,56%
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	109.729.708.233	112.083.974.153	-2,10%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-170.857.696.489	-22.044.784.212	-675,05%
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	-42.160.141.525.394	-42.765.320.091.418	1,42%

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
EKUITAS AWAL	235.533.579.042.988	232.057.025.464.076	1,50%
Penyesuaian Ekuitas Awal	-	-	-
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	235.533.579.042.988	232.057.025.464.076	1,50%
SURPLUS / (DEFISIT) LO	-42.160.141.525.394	-42.765.320.091.418	1,42%
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Koreksi SILPA	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	773.446.780	-121.306.879.321	101%
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-2.730.879.456.506	314.662.076.966	-968%
Koreksi Atas Reklasifikasi	2.317.421.298.419	76.531.776.404	2.928%
Koreksi Atas Transaksi BMN Lainnya	-	-	-
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	-	-	-
Koreksi Lain-lain	-826.356.584.995	-188.468.632.446	-338%
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	-1.239.041.296.302	81.418.341.603	-1.622%
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42.396.251.684.440	46.308.263.993.780	-8%
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	-	-	-
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	-	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	-1.002.931.137.256	3.624.362.243.965	-128%
EKUITAS AKHIR	234.530.647.905.732	235.681.387.708.041	-0,49%

Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas:			
Rekening Kas BUN di BI			
Rekening Pemerintah Lainnya			
Rekening Kas di KPPN			
Kas dalam Transito			
Kas di Bendahara Pengeluaran	23.078.000	30.597.054	-24,57%
Kas di Bendahara Penerimaan	142.157.197	13.086.818	986,26%
Kas Lainnya dan Setara Kas	489.590.386.932	1.000.536.902.192	-51,07%
Kas pada Badan Layanan Umum	1.645.882.970.086	1.448.061.589.031	13,66%
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.135.638.592.215	2.448.642.175.095	-12,78%
Uang Muka Dari Rekening BUN			
Investasi Jangka Pendek			
Investasi dalam Deposito			
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara			
Investasi Jangka Pendek BLU	85.500.000.000	60.500.000.000	41,32%
Bagian Lancar Investasi Non Permanen			
Investasi Jangka Pendek Lainnya			
Jumlah Investasi Jangka Pendek	85.500.000.000	60.500.000.000	41,32%
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4.206.157.100	10.215.566.025	-58,83%
Uang Muka Belanja (prepayment)			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	17.023.730.003	11.338.017.542	50,15%
Piutang:			
Piutang Perpajakan	1.939.506.542.826	1.620.350.557.466	19,70%
Piutang Bukan Pajak	929.475.909.358	741.224.555.675	25,40%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	284.450.000	284.450.000	0,00%
Piutang Penerusan Pinjaman			
Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)			
Piutang dari Kegiatan BLU	222.182.227.317	202.119.212.672	9,93%
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya			
Piutang PFK			
Jumlah Piutang (Bruto)	3.091.193.124.501	2.563.722.770.813	20,57%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-1.441.672.210.019	-1.203.415.913.733	-19,80%
Jumlah Piutang (Bersih)	1.649.520.914.482	1.360.306.857.080	21,26%
Persediaan	11.072.534.863.372	10.266.045.941.905	7,86%
Persediaan yang Belum Diregister			
Jumlah Aset Lancar	14.964.424.257.172	14.157.048.557.647	5,70%
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Restrukturisasi Perbankan			
Dana Bergulir			
Dana Bergulir Diragukan Tertagih			
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)			
Investasi dalam Obligasi			
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan			
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum			
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Diragukan Tertagih			
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)			
Jumlah Investasi Non Permanen			
Investasi Permanen			
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah			
Investasi Permanen Badan Layanan Umum			
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang			
Aset Tetap			
Tanah	153.146.766.507.610	152.748.697.990.715	0,26%
Peralatan dan Mesin	41.639.775.701.022	39.600.743.002.787	5,15%
Gedung dan Bangunan	22.534.888.278.297	22.130.603.504.339	1,83%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.795.880.805.727	53.796.077.104.069	1,86%
Aset Tetap Lainnya	1.648.922.192.243	1.601.368.602.405	2,97%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.372.643.099.405	6.205.716.823.522	2,69%
Tanah Belum Diregister			
Peralatan dan Mesin Belum Diregister			
Gedung dan Bangunan Belum Diregister			
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister			
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister			
Aset Konsesi Jasa	6.384.888.583.525	6.532.578.329.525	-2,26%
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	286.523.765.167.829	282.615.785.357.362	1,38%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-63.997.571.507.532	-59.083.384.230.510	-8,32%
Jumlah Aset Tetap	222.526.193.660.297	223.532.401.126.852	-0,45%

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Properti Investasi			
Properti Investasi	244.768.428.131	244.406.117.472	0,15%
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	244.768.428.131	244.406.117.472	0,15%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-14.074.867.606	-11.809.116.311	-19,19%
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	230.693.560.525	232.597.001.161	-0,82%
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1.650.288.060	1.636.980.060	0,81%
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman			
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah			
Piutang Jangka Panjang Subsidi			
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	1.650.288.060	1.636.980.060	0,81%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	-1.625.270.000	-1.624.770.060	-0,03%
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	25.018.060	12.210.000	104,90%
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
Aset Tidak Berwujud	1.073.847.628.747	1.075.905.007.842	-0,19%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	573.061.515.059	404.944.577.294	41,52%
Dana Penjaminan			
Dana Kelolaan BLU			
Dana Jangka Panjang			
Aset Lain-lain	4.651.061.540.901	4.713.815.887.928	-1,33%
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya			
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman			
Aset Lainnya yang Belum Diregister			
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	6.297.970.684.707	6.194.665.473.064	1,67%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-1.069.104.489.292	-1.140.948.734.009	6,30%
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-593.325.606.697	-478.946.812.227	-23,88%
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	4.635.540.588.718	4.574.769.926.828	1,33%
JUMLAH ASET	242.356.877.084.772	242.496.828.822.488	-0,06%
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga			
Utang kepada Pihak Ketiga	755.633.683.975	679.804.249.067	11,15%
Utang Bunga			
Utang Subsidi			
Belanja subsidi yang masih harus dibayar			
Utang Transfer	721.478.754.540	233.874.343.778	208,49%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Unamortized Discount			
Unamortized Premium			
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek			
Unamortized Discount			
Unamortized Premium			
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	76.105.707.517	68.185.340.085	11,62%
Pendapatan Diterima Dimuka	752.716.650.937	82.621.599.054	811,04%
Pendapatan Yang Ditangguhkan			
Utang Kepada KUN			
Utang Kepada RPL			
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.916.768.741	5.188.468.964	33,31%
Hibah Yg Belum Disahkan	18000000000		
Uang Muka Rekening Khusus			
Uang Muka			
Uang Muka Dari KPPN	23078000	7519.054	206,93%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.330.874.643.710	1.069.681.520.002	117,90%
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan			
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri			
Unamortized Discount			
Unamortized Premium			
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan			
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT			
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya			
Utang Jangka Panjang Subsidi			
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya			
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Kewajiban Konsesi Jasa			
Kewajiban Konsesi Jasa	5.495.354.535.330	5.745.759.594.445	-4,36%
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	5.495.354.535.330	5.745.759.594.445	-4,36%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.495.354.535.330	5.745.759.594.445	-4,36%
JUMLAH KEWAJIBAN	7.826.229.179.040	6.815.441.114.447	14,83%
EKUITAS	234.530.647.905.732	235.681.387.708.041	-0,49%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	242.356.877.084.772	242.496.828.822.488	-0,06%

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
PENDAPATAN - LRA	43.388.821.564.585	43.885.348.794.713	-1,13%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	11.932.189.568.821	11.225.383.771.809	6,30%
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.821.747.162.642	7.700.684.575.141	1,57%
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.473.637.621.612	1.064.547.767.129	132,37%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	416.233.660.762	389.319.600.691	6,91%
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	1.220.571.123.806	2.070.831.828.848	-41,06%
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	31.140.533.496.020	32.167.758.753.589	-3,19%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	29.001.041.383.966	29.853.646.148.623	-2,86%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	2.099.452.258.654	2.314.112.604.966	-9,28%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	26.833.963.650		
Bantuan Keuangan - LRA	13.205.889.750		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	316.098.499.744	492.206.269.315	-35,78%
Pendapatan Hibah - LRA	54.185.050.693	270.948.408.897	-80,00%
Dana Darurat - LRA			
Pendapatan Lainnya - LRA	261.913.449.051	221.257.860.418	18,37%
BELANJA	41.597.904.519.543	43.915.058.922.601	-5,28%
BELANJA OPERASI	32.641.893.949.105	33.289.707.026.915	-1,95%
Belanja Pegawai	19.579.878.746.296	18.416.962.755.517	6,31%
Belanja Barang dan Jasa	11.987.960.445.226	12.411.777.678.111	-3,41%
Belanja Bunga	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Belanja Subsidi	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Belanja Hibah	974.333.272.548	2.373.306.786.096	-58,95%
Belanja Bantuan Sosial	25.939.699.870	23.740.269.843	9,26%
BELANJA MODAL	5.321.375.224.249	6.760.941.425.522	-21,29%
Belanja Modal Tanah	39.909.588.740	25.575.142.425	56,05%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.598.663.029.052	1.670.577.928.019	-4,30%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.425.329.574.145	2.182.285.181.274	-34,69%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.097.797.537.318	2.556.328.745.574	-17,94%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.952.231.009	163.877.920.043	-40,23%
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	87.044.424		
Belanja Modal Aset Lainnya	15.213.441.081	22.010.952.974	-30,88%
Belanja Modal BLUD	46.422.778.480	140.285.555.213	-66,91%
BELANJA TAK TERDUGA	51.967.081.549	35.424.119.740	46,70%
Belanja Tak Terduga	51.967.081.549	35.424.119.740	46,70%
TRANSFER	3.582.668.264.640	3.828.986.350.424	-6,43%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	129.219.519.332	89.376.519.986	44,58%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	118.859.959.615	81.292.125.095	46,21%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	10.359.559.718	8.084.394.891	28,14%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.453.448.745.308	3.739.609.830.438	-7,65%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	918.787.524.466	288.841.196.563	218,09%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.313.046.320.146	3.450.768.633.875	-32,97%
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	221.614.900.696		
Transfer Dana Otonomi Khusus			
SURPLUS/DEFISIT LRA	1.790.917.045.042	- 29.710.127.888	6127,97%
PEMBIAYAAN	749.205.766.083	1.190.323.737.584	-37,06%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.207.671.446.647	1.653.683.290.482	-26,97%
Penggunaan SILPA	1.175.671.446.647	1.652.640.189.413	-28,86%
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Pinjaman Dalam Negeri	32.000.000.000	33.101.069	96.573%
Penerimaan Kembali Piutang		10.000.000	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		1.000.000.000	
Pinjaman Luar Negeri			
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	458.465.680.564	463.359.552.898	-1,06%
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	39.774.000.000	26.000.000.000	52,98%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	381.696.400.058	434.418.179.769	-12,14%
Pemberian Pinjaman Daerah	36.995.280.506	2.941.373.129	1.157%
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya			
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri			
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya			
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.540.122.811.125	1.160.613.609.696	118,86%

Laporan Operasional Konsolidasian Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31Desember2025	31Desember2024	Growth
PENDAPATAN - LO	45.187.778.374.250	44.846.758.779.484	0,76%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	12.210.201.843.883	11.388.206.197.549	7,22%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.986.693.572.107	7.750.612.384.296	3,05%
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.648.618.168.432	1.111.916.213.502	138,20%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	489.666.676.358	416.829.589.273	17,47%
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	1.085.223.426.985	2.108.848.010.478	-48,54%
PENDAPATAN TRANSFER - LO	29.704.154.282.166	30.421.605.188.333	-2,36%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	29.004.714.911.016	29.835.296.804.267	-2,78%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	393.385.641.000	437.400.817.000	-10,06%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	38.694.055.871		
Bantuan Keuangan - LO	267.359.674.279	148.907.567.066	79,55%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	3.273.422.248.202	3.036.947.393.602	7,79%
Pendapatan Hibah - LO	2.976.854.075.601	2.924.304.947.380	1,80%
Dana Darurat - LO			
Pendapatan Lainnya - LO	296.568.172.601	112.642.446.222	163,28%
BEBAN	41.255.353.356.610	42.399.559.252.583	-2,70%
BEBAN OPERASI - LO	39.140.643.866.254	40.347.830.506.737	-2,99%
Beban Pegawai - LO	19.696.280.732.238	18.620.316.400.837	5,78%
Beban Barang dan Jasa	12.088.728.243.194	12.721.635.525.571	-4,98%
Beban Bunga	44.466.756.915	58.016.818.159	-23,36%
Beban Subsidi	29.748.499.073	6.462.995.127	360,29%
Beban Hibah	965.496.614.650	2.254.425.547.273	-57,17%
Beban Bantuan Sosial	25.591.313.370	25.566.551.893	0,10%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.111.524.783.494	6.473.171.306.644	-5,59%
Beban Penyisihan Piutang	162.971.827.836	156.714.664.440	3,99%
Beban Lain-lain	15.835.095.485	31.520.696.793	-49,76%
BEBAN TRANSFER	2.114.709.490.356	2.051.728.745.846	3,07%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	159.646.506.606	86.188.765.852	85,23%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	135.955.362.098	10.389.312.039	1.208%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	218.772.975.200	240.136.939	91.003%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.472.060.890.964	1.954.910.531.016	-24,70%
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	128.273.755.488		
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus			
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	3.932.425.017.640	2.447.199.526.901	60,69%
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	75.223.435.967	28.670.021.483	162,38%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	10.480.802.089	8.346.500	125,471%
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.079.319.155		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	59.663.314.723	28.661.674.983	108,16%
DEFISIT NON OPERASIONAL	204.158.365.168	176.259.212.640	15,83%
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	78.614.114.997	80.886.069.575	-2,81%
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	27.987.809.412		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	97.556.440.758	95.373.143.065	2,29%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-128.934.929.201	-147.589.191.157	12,64%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3.803.490.088.439	2.299.610.335.744	65,40%
POS LUAR BIASA			
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.471.658.565	414.319.994.324	-98,68%
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.471.658.565	414.319.994.324	-98,68%
BEBAN LUAR BIASA	28.351.558.431	22.863.408.313	24,00%
Beban Luar Biasa	28.351.558.431	22.863.408.313	24,00%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-22.879.899.866	391.456.586.011	-105,84%
SURPLUS/DEFISIT-LO	3.780.610.188.573	2.691.066.921.755	40,49%

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025
EKUITAS AWAL	121.459.291.020.860
Surplus/Defisit-LO	3.780.610.188.585
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	- 864.830.285.160
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Lainnya	- 864.830.285.160
JUMLAH EKUITAS AKHIR	124.375.070.924.285

Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
ASET	127.772.118.244.333	125.748.997.869.694	1,61%
ASET LANCAR	4.606.043.425.593	3.252.572.447.048	41,61%
Kas dan Setara Kas	2.534.006.214.521	1.164.624.515.118	117,58%
Investasi Jangka Pendek	10.000.000.000	15.000.000.000	-33,33%
Piutang Pendapatan	2.101.425.839.486	2.104.832.164.504	-0,16%
Piutang Lainnya	61.004.908.716	53.178.098.035	14,72%
Penyisihan Piutang	-997.754.696.743	-904.759.988.966	-10,28%
Beban Dibayar Dimuka	25.940.846.853	82.504.385.436	-68,56%
Persediaan	871.420.312.759	737.193.272.921	18,21%
Aset Untuk Dikonsolidasikan			
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.766.089.585.223	4.595.972.200.024	3,70%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.242.733.097	5.401.144.409	-2,93%
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
ASET TETAP	116.361.627.333.973	115.913.808.081.735	0,39%
Tanah	58.197.344.081.421	57.500.108.820.493	1,21%
Peralatan dan Mesin	22.557.607.976.992	21.237.420.957.306	6,22%
Gedung dan Bangunan	37.977.124.327.011	35.323.629.710.479	7,51%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.235.091.158.256	68.700.973.851.073	3,69%
Aset Tetap Lainnya	1.612.956.501.566	2.742.269.083.456	-41,18%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.550.526.091.781	1.504.694.460.604	3,05%
Akumulasi Penyusutan	-76.769.022.803.053	-71.095.288.801.676	-7,98%
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan			
ASET LAINNYA	2.038.357.899.543	1.986.645.140.887	2,60%
Tagihan Jangka Panjang	172.931.918.576	115.086.060.054	50,26%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	250.240.838.543	247.521.872.143	1,10%
Aset Tidak Berwujud	-2.030.212.739.280	-421.873.372.348	-381,24%
Aset Lain-lain	3.645.397.881.704	2.045.910.581.038	78,18%
KEWAJIBAN	3.397.047.320.061	4.289.706.848.834	-20,81%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.515.593.350.536	3.020.669.035.541	-16,72%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.338.425.066	3.474.833.812	283,86%
Utang Bunga	2.379.756.412	65.843.529.903	-96,39%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	429.751.783.743	380.543.043.924	12,93%
Pendapatan Diterima Dimuka	64.499.536.943	71.902.618.270	-10,30%
Utang Belanja	1.975.075.153.093	2.443.221.479.096	-19,16%
Utang Jangka Pendek Lainnya	30.548.695.279	55.683.530.536	-45,14%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	881.453.969.525	1.269.037.813.293	-30,54%
Utang Dalam Negeri	723.339.763.539	1.097.274.643.693	-34,08%
Utang Jangka Panjang Lainnya	158.114.205.986	171.763.169.600	-7,95%
EKUITAS	124.375.070.924.272	121.459.291.020.860	2,40%

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
REVENUE	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%
Taxes	18.692.525.690.612	21.589.867.976.422	-13,42%
Social contributions			
Grants	40.289.984.954	517.386.891.378	-92,21%
Other revenue	7.975.521.447.260	7.211.313.030.325	10,60%
EXPENSE	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%
Compensation of employees	29.744.821.791.039	27.951.993.319.603	6,41%
Use of goods and services	18.284.209.090.972	21.612.813.718.658	-15,40%
Consumption of fixed capital			
Interests	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Subsidies	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Grants	3.520.748.237.268	4.781.567.885.738	-26,37%
Social benefits	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Other expense	1.529.928.544.280	2.128.678.796.084	-28,13%
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
Net operating balance (1-2+NOBz)	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	- 26.572.676.415.037	- 27.338.486.789.796	2,80%
Net/gross investment in nonfinancial assets	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%
Fixed Assets	8.704.737.373.510	11.519.678.407.346	-24,44%
Weapon systems			
Inventories	2.791.671.485.877	1.939.146.590.841	43,96%
Nonproduced assets	234.834.249.627	44.926.679.240	422,71%
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	- 38.303.919.524.052	- 40.842.238.467.223	6,21%
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):			
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	- 38.653.615.924.110	- 41.276.623.545.923	6,35%
Domestic debtors	- 38.653.615.924.110	- 41.276.623.545.923	6,35%
External debtors			
Net incurrence of liabilities [331+332]	- 349.696.400.058	- 434.385.078.700	19,50%
Domestic creditors	- 349.696.400.058	- 434.385.078.700	19,50%
External creditors			

Neraca Konsolidasian Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
NET WORTH	359.558.947.466.976	357.205.408.400.085	0,66%
Nonfinancial assets	356.740.133.947.009	356.475.907.982.798	0,07%
Fixed assets	133.374.844.994.984	135.223.705.950.764	-1,37%
Buildings and structures	118.581.320.651.381	114.773.545.685.549	3,32%
Dwellings	17.846.660.374.264	17.925.726.879.965	-0,44%
Buildings other than dwellings	45.297.159.996.863	40.506.455.302.939	11,83%
Other structures	55.437.500.280.254	56.341.363.502.645	-1,60%
Land improvements			
Machinery and equipment	9.935.017.168.888	14.332.441.219.664	-30,68%
Transport equipment	- 1.445.751.402.135	3.155.218.563.354	-145,82%
Machinery and equipment other than transport equipment	11.380.768.571.022	11.177.222.656.310	1,82%
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	3.352.225.460.620	4.334.718.709.485	-22,67%
Machinery and equipment not elsewhere classified	8.028.543.110.402	6.842.503.946.825	17,33%
Other fixed assets	4.858.507.174.715	6.117.719.045.551	-20,58%
Cultivated biological resources	26.485.310.510	26.464.527.991	0,08%
Animal resources yielding repeat products	10.159.289.012	10.169.733.784	-0,10%
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	16.326.021.498	16.294.794.207	0,19%
Intellectual property products	4.832.021.864.205	6.091.254.517.560	-20,67%
Research and development	556.109.562.253	303.403.475.152	83,29%
Mineral exploration and evaluation			
Computer software and databases	1.351.519.518.630	1.340.096.655.220	0,85%
Entertainment, literary, and artistic originals	1.126.934.310.870	1.116.283.175.560	0,95%
Other intellectual property products	1.797.458.472.452	3.331.471.211.628	-46,05%
Weapon systems			
Inventories	11.943.955.176.131	11.003.239.214.826	8,55%
Strategic stocks	12.005.379.160	12.034.572.960	-0,24%
Other inventories	11.931.949.796.971	10.991.204.641.866	8,56%
Materials and supplies	6.304.753.208.548	6.179.411.011.641	2,03%
Work in progresss			
Finished goods			
Goods for resale	5.627.196.588.423	4.811.793.630.225	16,95%
Military inventories			
Valuables			
Nonproduced assets	211.421.333.775.894	210.248.962.817.208	0,56%
Land	211.344.696.995.031	210.248.962.817.208	0,52%
Mineral and energy resources			
Other naturally occurring assets			
Noncultivated biological resources			
Water resources			
Other natural resources			
Radio spectrum			
Natural resources not elsewhere classified			
Intangible nonproduced assets	76.636.780.863		
Contracts, leases, and licenses			
Marketable operating leases			
Permits to use natural resources			
Permits to undertake specific activities			
Goodwill and marketing assets	76.636.780.863		
Financial assets [621+622]	13.379.650.043.067	11.600.774.036.790	15,33%
Monetary gold and SDRs			
Currency and deposits [6212+6222]	5.328.206.321.795	4.093.711.267.507	30,16%
Debt securities [6213+6223]	15.242.733.097	5.401.144.409	182,21%
Loans [6216+6226]			
Equity and investment fund shares [6215+6225]	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Equity [62151+62251]	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Investment fund shares [62152+62252]			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]			
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]			
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]			
Pension entitlements [62163 + 62263]			
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]			
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]			
Financial derivatives [62171 + 62271]			
Employee stock options [62172 + 62272]			
Other accounts receivable [6218+6228]	3.275.354.136.050	2.911.090.569.259	12,51%
Trade credit and advances [62181 + 62281]	72.017.555.500	66.325.684.873	8,58%
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	3.203.336.580.550	2.844.764.884.386	12,60%

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Domestic debtors	13.379.650.043.067	11.600.774.036.790	15,33%
Monetary gold and SDRs			
Currency and deposits	5.328.206.321.795	4.093.711.267.507	30,16%
Debt securities	15.242.733.097	5.401.144.409	182,21%
Loans			
Equity and investment fund shares	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Equity	4.760.846.852.126	4.590.571.055.615	3,71%
Investment fund shares			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Life insurance and annuities entitlements			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable	3.275.354.136.050	2.911.090.569.259	12,51%
Trade credit and advances	72.017.555.500	66.325.684.873	8,58%
Miscellaneous other accounts receivable	3.203.336.580.550	2.844.764.884.386	12,60%
External creditors			
Monetary gold and SDRs			
Currency and deposits			
Debt securities			
Loans			
Equity and investment fund shares			
Equity			
Investment fund shares			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Life insurance and annuities entitlements			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable			
Trade credit and advances			
Miscellaneous other accounts receivable			
Liabilities [631+632]	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]			
Currency and deposits [6212+6222]			
Debt securities [6213+6223]			
Loans [6216+6226]	1.311.205.753.269	1.649.580.857.217	-20,51%
Equity and investment fund shares [6215+6225]			
Equity [62151+62251]			
Investment fund shares [62152+62252]			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]			
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]			
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]			
Pension entitlements [62163 + 62263]			
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]			
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]			
Financial derivatives [62171 + 62271]			
Employee stock options [62172 + 62272]			
Other accounts payable [6218+6228]	9.249.630.769.832	9.221.692.762.286	0,30%
Trade credit and advances [62181 + 62281]	380.075.079.324	293.880.962.482	29,33%
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	8.869.555.690.509	8.927.811.799.804	-0,65%
Domestic creditors	10.560.836.523.101	10.871.273.619.503	-2,86%
Currency and deposits			
Debt securities			
Loans	1.311.205.753.269	1.649.580.857.217	-20,51%
Equity and investment fund shares			
Equity			
Investment fund shares			

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Life insurance and annuities entitlements			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable	9.249.630.769.832	9.221.692.762.286	0,30%
Trade credit and advances	380.075.079.324	293.880.962.482	29,33%
Miscellaneous other accounts payable	8.869.555.690.509	8.927.811.799.804	-0,65%
External creditors			
Special Drawing Rights (SDRs)			
Currency and deposits			
Debt securities			
Loans			
Equity and investment fund shares			
Equity			
Investment fund shares			
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes			
Nonlife insurance technical reserves			
Pension entitlements			
Claims of pension funds on pension manager			
Provisions for calls under standardized guarantee schemes			
Financial derivatives and employee stock options			
Financial derivatives			
Employee stock options			
Other accounts receivable			
Trade credit and advances			
Miscellaneous other accounts receivable			

**Laporan Sumber Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Growth
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
Cash receipts from operating activities	26.708.337.122.825	29.318.567.898.125	-8,90%
Taxes	18.692.525.690.612	21.589.867.976.422	-13,42%
Social Contribution			
Grants	40.289.984.954	517.386.891.378	-92,21%
Other Receipts	7.975.521.447.260	7.211.313.030.325	10,60%
Cash payments for operating activities	53.281.013.537.863	56.657.054.687.921	-5,96%
Compensation of Employees	29.744.821.791.039	27.951.993.319.603	6,41%
Purchase of Goods and Service	18.284.209.090.972	21.612.813.718.658	-15,40%
Interest	45.581.152.094	58.693.448.105	-22,34%
Subsidies	28.200.633.071	5.226.089.243	439,61%
Grants	3.520.748.237.268	4.781.567.885.738	-26,37%
Social Benefits	127.524.089.138	118.081.430.490	8,00%
Other Payments	1.529.928.544.280	2.128.678.796.084	-28,13%
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	-26.572.676.415.037	-27.338.486.789.796	2,80%
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS			
Purchases of nonfinancial assets	14.020.173.111.706	16.062.464.152.217	-12,71%
Fixed Assets	8.741.415.413.749	11.539.676.291.476	-24,25%
Inventories	5.032.638.474.099	4.475.999.447.101	12,44%
Valuables			
Nonproduced Assets	246.119.223.858	46.788.413.640	426,03%
Sales of nonfinancial assets	2.288.930.002.691	2.558.712.474.790	-10,54%
Fixed Assets	36.678.040.239	19.997.884.130	83,41%
Inventories	2.240.966.988.222	2.536.852.856.260	-11,66%
Valuables			
Nonproduced Assets	11.284.974.231	1.861.734.400	506,15%
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	11.731.243.109.014	13.503.751.677.427	-13,13%
CASH SURPLUS/DEFISIT	-38.303.919.524.052	-40.842.238.467.223	6,21%
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)			
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	76.769.280.506	27.931.373.129	174,85%
Domestic debtors	76.769.280.506	27.931.373.129	174,85%
External creditors			
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	-349.696.400.058	-434.385.078.700	19,50%
Domestic creditors	-349.696.400.058	-434.385.078.700	19,50%
External creditors			
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	426.465.680.564	462.316.451.829	-7,75%
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	-38.730.385.204.616	-41.304.554.919.052	6,23%



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

dan

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2025

FACE

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025**

Uraian		(Dalam Rupiah)
		31 DESEMBER 2025
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI		26.999.399.893.557
Pendapatan Perpajakan konsolidasi		18.705.293.325.969
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		18.420.409.247.969
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		284.884.078.000
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		8.239.921.516.895
Pendapatan Sumber Daya Alam		
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan		416.233.660.762
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		4.416.973.017.059
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		26.833.963.650
Bantuan Keuangan - LRA		13.205.889.750
Pendapatan Badan Layanan Umum		3.366.674.985.675
Pendapatan hibah		54.185.050.693
Pendapatan hibah dalam negeri		54.185.050.693
Pendapatan hibah luar negeri		
B. Belanja		65.303.319.417.609
Belanja pegawai		30.454.074.177.543
Belanja gaji dan tunjangan		27.806.397.801.307
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito		2.326.173.161.319
Belanja kontribusi sosial		321.503.214.916
Belanja barang dan jasa		21.051.436.109.419
Belanja barang		4.824.952.725.074
Belanja Jasa		4.817.474.424.266
Belanja Pemeliharaan		1.284.821.329.997
Belanja Perjalanan Dinas		1.481.773.812.917
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)		2.274.780.579.175
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda		4.924.904.124.811
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS		1.442.729.113.180
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden		
Belanja Modal		8.987.534.637.607
Belanja Modal Tanah		246.119.223.858
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.069.356.777.932
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.524.651.941.023
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		3.681.664.019.995
Belanja Modal Lainnya		212.506.012.283
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)		253.236.662.516
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		45.581.152.094
Belanja Pembayaran Bunga Utang		45.581.152.094
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara		
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption		
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara		
Belanja Denda		
Belanja Subsidi		28.200.633.071
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		28.200.633.071
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Hibah		974.333.272.548
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri		
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional		
Belanja Hibah Kepada Pemerintah		159.694.873.324
Belanja Hibah Lainnya		814.638.399.224
Belanja Bantuan Sosial		127.524.089.138
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		16.744.339.268
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial		84.840.050.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana		25.939.699.870
Belanja Lain-lain		51.967.081.549

Belanja Lain-lain	51.967.081.549
C. BELANJA TRANSFER	3.582.668.264.640
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	3.582.668.264.640
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	129.219.519.332
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	118.859.959.615
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	10.359.559.718
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.453.448.745.308
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	918.787.524.466
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.313.046.320.146
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	221.614.900.696
Transfer Dana Otonomi Khusus	
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	
Dana Desa	
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	(38.303.919.524.052)
E. Pembiayaan	749.205.766.083
Penerimaan Pembiayaan	1.207.671.446.647
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.207.671.446.647
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan	458.465.680.564
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	418.691.680.564
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
Penyertaan Modal Negara	39.774.000.000
RDI/RPD	
Dukungan Infrastruktur	
Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Suspense Pembiayaan	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	(37.554.713.757.969)

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025

		(Dalam Rupiah)
Uraian		31 DESEMBER 2025
Aset		370.119.783.990.077
Aset lancar		19.561.256.343.737
Kas dan setara kas		4.669.644.806.736
Uang muka rekening BUN-khusus pusat		
Investasi jangka pendek		95.500.000.000
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja		62.445.434.697
Piutang		2.789.710.926.173
Piutang Perpajakan		1.939.506.542.826
Piutang Bukan Pajak		3.021.690.409.816
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		23.975.783.858
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		28.445.000
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman		
Piutang lain-lain		243.936.651.434
Penyisihan piutang tak tertagih		(2.439.426.906.762)
Persediaan		11.943.955.176.131
Piutang PFK		
Investasi jangka panjang		4.766.089.585.223
Investasi jangka panjang non permanen		5.242.733.097
Investasi jangka panjang permanen		4.760.846.852.126
Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
Aset tetap		338.887.820.994.270
Tanah		211.344.110.589.031
Peralatan dan mesin		64.197.383.678.014
Gedung dan bangunan		60.512.012.605.308
Jalan, irigasi, dan jaringan		126.030.971.963.983
Aset tetap lainnya		3.261.878.693.809
Konstruksi dalam pengerjaan		7.923.169.191.186
Konsesi Jasa		6.384.888.583.525
Akumulasi penyusutan		(140.766.594.310.585)
Aset Tetap Yang Belum Diregister		
Properti Investasi		230.693.560.525
Dana cadangan		
Dana cadangan		
Piutang jangka panjang		172.956.936.636
Tagihan piutang penjualan angsuran		39.257.865.581
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi		135.324.341.055
Piutang jangka panjang kredit pemerintah		
Piutang jangka panjang lainnya		
Penyisihan piutang jangka panjang		(1.625.270.000)
Aset lainnya		6.500.966.569.685
Kemitraan dengan pihak ketiga		250.240.838.543
Aset tidak berwujud		1.762.415.839.314
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		573.061.515.059
Dana Penjaminan		
Dana Kelolaan BLU		
Aset lain-lain		8.296.459.422.605
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya		
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(4.381.211.045.837)
Kewajiban / Utang		10.560.836.523.101
Kewajiban jangka pendek		4.184.028.018.246
Utang perhitungan pihak ketiga		13.338.425.066
Utang kepada pihak ketiga		2.730.708.837.068
Utang bunga		2.379.756.412
Utang subsidi		
Utang Transfer		59.038.778.540
Bagian lancar utang jangka panjang		429.751.783.743
Utang surat perbendaharaan negara		
Utang Yang Belum Ditagihkan		18.000.000.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		76.105.707.517
Pendapatan Diterima Dimuka		774.412.709.001
Uang Muka		23.078.000
Utang Jangka Pendek Lainnya		80.268.942.900
Kewajiban jangka panjang		6.376.808.504.855

Utang jangka panjang dalam negeri	881.453.969.525
Utang jangka panjang luar negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	5.495.354.535.330
Ekuitas	359.558.947.466.976

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	356.992.870.063.850
Ekuitas Awal pemerintah Pusat	235.533.579.042.988
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	121.459.291.020.862
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	356.992.870.063.850
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(38.379.531.336.821)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	1.070.276.322
Selisih Revaluasi Aset	(13.995.199.534)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(2.730.879.456.506)
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	2.317.421.298.419
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	(775.007.699.748)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(1.201.390.781.048)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42.396.251.684.440
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2.815.329.566.571
EKUITAS AKHIR	359.808.199.630.421

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	(42.643.441.430.477)
Pendapatan Operasional-LO	30.678.321.199.376
Pendapatan perpajakan-LO	19.411.850.290.367
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	19.127.635.760.367
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	284.214.530.000
Pendapatan bukan pajak-LO	4.976.321.977.159
Pendapatan sumber daya alam-LO	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	489.666.676.358
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	4.486.655.300.800
Pendapatan Transfer - LO	1.015.413.783.532
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	688.255.758.365
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	21.015.438.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	38.694.055.871
Bantuan Keuangan - LO	267.448.531.296
Pendapatan BLU-LO	3.307.578.529.562
Pendapatan Jasa BLU - LO	3.161.753.622.047
Pendapatan Hibah BLU - LO	26.751.931.440
Pendapatan Lainnya BLU - LO	119.072.976.075
Pendapatan hibah-LO	1.653.851.048.066
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	1.653.851.048.066
Pendapatan lainnya-LO	313.305.570.691
Pendapatan lainnya Pemda	296.568.172.601
Pendapatan Penyesuaian Akrua	16.737.398.090
Beban Operasional	69.388.408.647.613
Beban pegawai	31.507.081.696.985
Beban gaji dan tunjangan	29.185.001.446.551
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transit	2.322.080.250.434
Beban kontribusi sosial	
Beban persediaan	1.743.129.003.821
Beban barang dan jasa	19.104.546.243.428
Beban barang	7.841.530.388.990
Beban jasa	5.544.774.534.205
Beban pemeliharaan	1.773.541.503.153
Beban perjalanan dinas	1.605.165.360.006
Beban BLU/BLUD	722.258.011.702
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	1.617.276.445.373
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil	
Presiden	
Beban bunga	44.466.756.915
Beban Pembayaran Bunga Utang	44.466.756.915
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Beban Denda	
Beban subsidi	29.748.499.073
Beban subsidi kepada perusahaan publik	29.748.499.073
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	
Beban Subsidi - Estimasi	
Beban hibah	965.496.614.650
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	
Beban hibah kepada organisasi internasional	
Beban hibah kepada pemerintah daerah	283.749.926.506
Beban Hibah Lainnya	681.746.688.145
Beban bantuan sosial	133.273.135.986
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	22.841.772.616
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	84.840.050.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	25.591.313.370
Beban lain-lain/beban tidak terduga	15.835.095.485
Beban Lain-lain	15.835.095.485
Beban akrual lainnya	11.911.477.619.030
Beban Penyusutan Aset Tetap	11.237.284.319.110
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	152.481.832.788

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	521.711.467.133
BEBAN TRANSFER	3.933.353.982.240
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	1.818.644.491.884
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	1.818.644.491.884
Dana Desa	1.818.644.491.884
Beban Transfer Lain-lain	
Beban Suspense Transfer	
BEBAN TRANSFER PEMDA	2.114.709.490.356
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	159.646.506.606
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	135.955.362.098
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	347.046.730.688
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.472.060.890.964
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(38.710.087.448.237)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	(280.587.404.722)
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	109.729.708.233
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	(68.133.312.909)
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	(22.908.490.257)
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	(37.893.126.035)
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(299.792.625.690)
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(39.009.880.073.927)
POS LUAR BIASA	(22.879.899.866)
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.471.658.565
BEBAN LUAR BIASA	(28.351.558.431)
SURPLUS (DEFISIT) LO	(39.032.759.973.793)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)**

(Dalam Rupiah)	
Uraian	2025
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL	
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	1.131.591.526.895
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih	
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian	1.131.591.526.895
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	1.131.591.526.895
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(22.448.806.431.492)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(21.317.214.904.597)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	261.942.724.734
2. Penyesuaian Lain-lain	21.055.272.179.863
Total Penyesuaian SAL (A.II)	21.317.214.904.597
Rincian Penyesuaian Pembukuan:	
Koreksi SILPA	261.942.724.734
Selisih Kurs (Unrealized)	
Koreksi Kas BUN	
Koreksi Kas KPPN	
Koreksi Kas BLU	
Koreksi Kas Hibah	430.400.000
Koreksi Utang PFK	
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:	
Penyesuaian Transaksi RPL	
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL	
Pembulatan	21.055.272.179.863
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	
2. PERHITUNGAN FISIK SAL	
SALDO AKHIR KAS BUN	
SALDO AKHIR KAS KPPN	
SALDO AKHIR KAS BLU	1.006.140.680.631
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice	
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	
Selisih Kiriman Uang	
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan	
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	
Pengembalian Escrow PNPB	
Transito BLU	
Dana Optimalisasi Kas	
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

FACE

**LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT
WILAYAH**

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
REVENUE	26.708.337.122.825
Taxes	18.692.525.690.612
Social contributions	
Grants	40.289.984.954
Other revenue	7.975.521.447.260
EXPENSE	53.281.013.537.863
Compensation of employees	29.744.821.791.039
Use of goods and services	18.284.209.090.972
Consumption of fixed capital	
Interests	45.581.152.094
Subsidies	28.200.633.071
Grants	3.520.748.237.268
Social benefits	127.524.089.138
Other expense	1.529.928.544.280
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	(26.572.676.415.037)
Net operating balance (1-2+NOBz)	(26.572.676.415.037)
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	(26.572.676.415.037)
Net/gross investment in nonfinancial assets	11.731.243.109.014
Fixed Assets	8.704.737.373.510
Weapon systems	
Inventories	2.791.671.485.877
Nonproduced assets	234.834.249.627
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	(38.303.919.524.052)
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	(38.653.615.924.110)
Domestic debtors	(38.653.615.924.110)
External debtors	
Net incurrence of liabilities [331+332]	(349.696.400.058)
Domestic creditors	(349.696.400.058)
External creditors	
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)	

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
NET WORTH	359.558.947.466.976
Nonfinancial assets	356.740.133.947.009
Fixed assets	133.374.844.994.984
Buildings and structures	118.581.320.651.381
Dwellings	17.846.660.374.264
Buildings other than dwellings	45.297.159.996.863
Other structures	55.437.500.280.254
Land improvements	
Machinery and equipment	9.935.017.168.888
Transport equipment	(1.445.751.402.135)
Machinery and equipment other than transport equipment	11.380.768.571.022
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	3.352.225.460.620
Machinery and equipment not elsewhere classified	8.028.543.110.402
Other fixed assets	4.858.507.174.715
Cultivated biological resources	26.485.310.510
Animal resources yielding repeat products	10.159.289.012
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	16.326.021.498
Intellectual property products	4.832.021.864.205
Research and development	556.109.562.253
Mineral exploration and evaluation	
Computer software and databases	1.351.519.518.630
Entertainment, literary, and artistic originals	1.126.934.310.870
Other intellectual property products	1.797.458.472.452
Weapon systems	
Inventories	11.943.955.176.131
Strategic stocks	12.005.379.160
Other inventories	11.931.949.796.971
Materials and supplies	6.304.753.208.548
Work in progress	
Finished goods	
Goods for resale	5.627.196.588.423
Military inventories	
Valuables	
Nonproduced assets	211.421.333.775.894
Land	211.344.696.995.031
Mineral and energy resources	
Other naturally occurring assets	
Noncultivated biological resources	
Water resources	
Other natural resources	
Radio spectrum	
Natural resources not elsewhere classified	
Intangible nonproduced assets	76.636.780.863
Contracts, leases, and licenses	
Marketable operating leases	
Permits to use natural resources	
Permits to undertake specific activities	
Goodwill and marketing assets	76.636.780.863
Financial assets [621+622]	13.379.650.043.067
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits [6212+6222]	5.328.206.321.795
Debt securities [6213+6223]	15.242.733.097
Loans [6216+6226]	
Equity and investment fund shares [6215+6225]	4.760.846.852.126
Equity [62151+62251]	4.760.846.852.126
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	

Employee stock options [62172 + 62272]	3.275.354.136.050
Other accounts receivable [6218+6228]	72.017.555.500
Trade credit and advances [62181 + 62281]	3.203.336.580.550
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	13.379.650.043.067
Domestic debtors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	5.328.206.321.795
Debt securities	15.242.733.097
Loans	
Equity and investment fund shares	4.760.846.852.126
Equity	4.760.846.852.126
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	3.275.354.136.050
Trade credit and advances	72.017.555.500
Miscellaneous other accounts receivable	3.203.336.580.550
External creditors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	
Liabilities [631+632]	10.560.836.523.101
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]	
Currency and deposits [6212+6222]	
Debt securities [6213+6223]	
Loans [6216+6226]	1.311.205.753.269
Equity and investment fund shares [6215+6225]	
Equity [62151+62251]	
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts payable [6218+6228]	9.249.630.769.832
Trade credit and advances [62181 + 62281]	380.075.079.324
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	8.869.555.690.509
Domestic creditors	10.560.836.523.101
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	1.311.205.753.269
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	

Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	9.249.630.769.832
Trade credit and advances	380.075.079.324
Miscellaneous other accounts payable	8.869.555.690.509
External creditors	
Special Drawing Rights (SDRs)	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Cash receipts from operating activities	26.708.337.122.825
Taxes	18.692.525.690.612
Social Contribution	
Grants	40.289.984.954
Other Receipts	7.975.521.447.260
Cash payments for operating activities	53.281.013.537.863
Compensation of Employees	29.744.821.791.039
Purchase of Goods and Service	18.284.209.090.972
Interest	45.581.152.094
Subsidies	28.200.633.071
Grants	3.520.748.237.268
Social Benefits	127.524.089.138
Other Payments	1.529.928.544.280
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(26.572.676.415.037)
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS	
Purchases of nonfinancial assets	14.020.173.111.706
Fixed Assets	8.741.415.413.749
Inventories	5.032.638.474.099
Valuables	
Nonproduced Assets	246.119.223.858
Sales of nonfinancial assets	2.288.930.002.691
Fixed Assets	36.678.040.239
Inventories	2.240.966.988.222
Valuables	
Nonproduced Assets	11.284.974.231
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	11.731.243.109.014
CASH SURPLUS/DEFISIT	(38.303.919.524.052)
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	76.769.280.506
Domestic debtors	76.769.280.506
External creditors	
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	(349.696.400.058)
Domestic creditors	(349.696.400.058)
External creditors	
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	426.465.680.564
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	(38.730.385.204.616)
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities	
.....Central government	
.....Budgetary central government	

LEMBAR PEMERIKSAAN DAN REVIU BERJENJANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tanggal Cetak :
 Tanggal LKPP :
 Tanggal LKPD :

LAPORAN REALISASI

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... 	 NIP..... 	 NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... 	 NIP..... 	 NIP.....

NERACA

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... 	 NIP..... 	 NIP.....

LAPORAN ARUS KAS

Penyusun Laporan	Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Arus Kas dan SAL	Kepala Subdirektorat PLKPP
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN OPERASIONAL

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Audited)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	10.883.546.163.327
1. Pajak Dalam Negeri	10.598.662.085.327
2. Pajak Perdagangan Internasional	284.884.078.000
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.998.853.665.938
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	2.762.492.854.387
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.236.360.811.551
III. Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	14.882.399.829.265
B. Belanja Negara	
I. Belanja Pemerintah Pusat	23.705.414.898.066
1. Belanja Pegawai	10.874.195.431.247
2. Belanja Barang	9.063.475.664.193
3. Belanja Modal	3.666.159.413.358
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
5. Belanja Subsidi	
6. Belanja Hibah	
7. Belanja Bantuan Sosial	101.584.389.268
8. Belanja Lain-lain	
II. Transfer ke Daerah	31.271.821.500.293
1. Dana Bagi Hasil	1.042.233.202.600
2. Dana Alokasi Umum	21.053.118.267.526
3. Dana Alokasi Khusus	7.076.878.142.283
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	789.711.869.973
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6.287.166.272.310
c. Hibah Kepada Daerah	
4. Dana Otonomi Khusus	
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
6. Dana Desa	1.818.644.491.884
7. Insentif Fiskal	280.947.396.000
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	54.977.236.398.359
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(40.094.836.569.094)
D. Pembiayaan	
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	
2. Pemberian Pinjaman	
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
5. Surat Berharga Negara (Neto)	
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	
6. Pinjaman dalam negeri (Neto)	
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
7. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	
8. Kewajiban Penjaminan	
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	
10. Pembiayaan Lain-lain	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	
a. Penarikan Pinjaman Tunai	
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	(40.094.836.569.094)

**NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas:	
Rekening Kas BUN di BI	
Rekening Pemerintah Lainnya	
Rekening Kas di KPPN	
Kas dalam Transito	
Kas di Bendahara Pengeluaran	23.078.000
Kas di Bendahara Penerimaan	142.157.197
Kas Lainnya dan Setara Kas	489.590.386.932
Kas pada Badan Layanan Umum	1.645.882.970.086
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.135.638.592.215
Uang Muka Dari Rekening BUN	
Investasi Jangka Pendek	
Investasi dalam Deposito	
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
Investasi Jangka Pendek BLU	85.500.000.000
Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Investasi Jangka Pendek	85.500.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4.206.157.100
Uang Muka Belanja (prepayment)	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	17.023.730.003
Piutang:	
Piutang Perpajakan	1.939.506.542.826
Piutang Bukan Pajak	929.475.909.358
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	28.445.000
Piutang Penerusan Pinjaman	
Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	
Piutang dari Kegiatan BLU	222.182.227.317
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	
Piutang PFK	
Jumlah Piutang (Bruto)	3.091.193.124.501
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(1.441.672.210.019)
Jumlah Piutang (Bersih)	1.649.520.914.482
Persediaan	11.072.534.863.372
Persediaan yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lancar	14.964.424.257.172
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	
Dana Restrukturisasi Perbankan	
Dana Bergulir	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)	
Investasi dalam Obligasi	
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Diragukan Tertagih	
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)	
Jumlah Investasi Non Permanen	
Investasi Permanen	
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Permanen Lainnya	
Jumlah Investasi Permanen	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	
Aset Tetap	
Tanah	153.146.766.507.610
Peralatan dan Mesin	41.639.775.701.022
Gedung dan Bangunan	22.534.888.278.297

Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.795.880.805.727
Aset Tetap Lainnya	1.648.922.192.243
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.372.643.099.405
Tanah Belum Diregister	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	
Aset Konsepsi Jasa	6.384.888.583.525
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	286.523.765.167.829
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(63.997.571.507.532)
Jumlah Aset Tetap	222.526.193.660.297
Properti Investasi	
Properti Investasi	244.768.428.131
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	244.768.428.131
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(14.074.867.606)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	230.693.560.525
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1.650.288.060
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
Piutang Jangka Panjang Subsidi	
Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	1.650.288.060
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(1.625.270.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	25.018.060
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	1.073.847.628.747
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	573.061.515.059
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Dana Jangka Panjang	
Aset Lain-lain	4.651.061.540.901
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Aset Lainnya yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	6.297.970.684.707
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.069.104.489.292)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(593.325.606.697)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	4.635.540.588.718
JUMLAH ASET	242.356.877.084.772
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
Utang kepada Pihak Ketiga	755.633.683.975
Utang Bunga	
Utang Subsidi	
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	
Utang Transfer	721.478.754.540
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	76.105.707.517
Pendapatan Diterima Dimuka	752.716.650.937
Pendapatan Yang Ditangguhkan	
Utang Kepada KUN	
Utang Kepada RPL	
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.916.768.741
Hibah Yg Belum Disahkan	18.000.000.000
Uang Muka Rekening Khusus	
Uang Muka	
Uang Muka Dari KPPN	23.078.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.330.874.643.710
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	
Utang Jangka Panjang Subsidi	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Kewajiban Konsesi Jasa	5.495.354.535.330
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	5.495.354.535.330
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.495.354.535.330
JUMLAH KEWAJIBAN	7.826.229.179.040
EKUITAS	234.530.647.905.732
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	242.356.877.084.772

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	235.533.579.042.988
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	235.533.579.042.988
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(42.160.141.525.394)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	773.446.780
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(2.730.879.456.506)
Koreksi Atas Reklasifikasi	2.317.421.298.419
Koreksi Atas Transaksi BMN Lainnya	
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	(826.356.584.995)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI	(1.239.041.296.302)
EKUITAS	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	42.396.251.684.440
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.002.931.137.256)
EKUITAS AKHIR	234.530.647.905.732

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	5.255.687.321.392
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	5.582.508.796.039
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	95.072.603.448
Pendapatan Cukai	107.175.880.000
Pendapatan Pajak Lainnya	100.497.587.381
Pendapatan Bea Masuk	233.019.369.000
Pendapatan Bea Keluar	51.195.161.000
Pendapatan Pajak Lain-lain	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	11.425.156.718.260
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Penerimaan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.220.573.603.631
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.856.644.886.421
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.077.218.490.052
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	(18.000.000.000)
Jumlah Pendapatan Hibah	(18.000.000.000)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	15.484.375.208.312
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	11.810.800.964.747
Beban Persediaan	1.742.585.101.640
Beban Barang dan Jasa	3.458.527.489.605
Beban Pemeliharaan	1.394.093.123.312
Beban Perjalanan Dinas	566.690.723.513
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.597.050.565.985
Beban Bunga	
Beban Subsidi	
Beban Hibah	
Beban Bantuan Sosial	107.681.822.616
Beban Transfer	31.159.248.238.098
Beban Lain-lain	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.278.241.368.404
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	358.739.639.297
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	57.473.659.037.217
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(41.989.283.828.905)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	12.416.312.456
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	293.003.717.178
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(280.587.404.722)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	116.430.261.787
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.700.553.554
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	109.729.708.233
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(170.857.696.489)
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(42.160.141.525.394)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	5.089.760.480.322
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	4.654.221.178.218
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	76.370.833.150
e. Pendapatan Cukai	107.175.880.000
f . Pendapatan Pajak Lainnya	671.133.713.637
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	284.884.078.000
Total Penerimaan Perpajakan	10.883.546.163.327
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
c. Pendapatan PNBPN Lainnya	1.223.944.499.095
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	2.762.492.854.387
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.986.437.353.482
3. Penerimaan Hibah	
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	14.869.983.516.809
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	10.874.195.431.247
2. Belanja Barang dan Jasa	9.063.475.664.193
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
4. Belanja Subsidi	
5. Belanja hibah	
6. Belanja Bantuan Sosial	101.584.389.268
7. Belanja Lain-lain	
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	552.527.394.500
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	466.568.856.100
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	23.136.952.000
11. Dana Alokasi Umum	21.053.118.267.526
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	789.711.869.973
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	280.947.396.000
14. Transfer Lainnya	6.287.166.272.310
15. Dana Desa	1.818.644.491.884
16. Hibah Kepada Daerah	
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	51.311.076.985.001
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	(36.441.093.468.192)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	12.416.312.456
2. Penerimaan Kembali Investasi	
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	12.416.312.456
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	3.666.159.413.358
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penyertaan Modal Negara	
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	3.666.159.413.358
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(3.653.743.100.902)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	

II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	174.075.152.926
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	174.075.152.926
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(39.920.761.416.168)
Penggunaan SAL	
Penyesuaian Pembukuan	(262.373.124.734)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(40.183.134.540.902)
SALDO AWAL KAS	1.131.568.448.895
SALDO AKHIR KAS	(39.051.566.092.007)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(39.051.566.092.007)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Total)	
1. Penggunaan SAL BUN	
2. Penggunaan SAL BLU	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(40.094.836.569.094)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(40.094.836.569.094)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	
Total Penyesuaian SAL (A.II)	
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	(40.094.836.569.094)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
PENDAPATAN - LRA	43.388.821.564.585
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	11.932.189.568.821
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.821.747.162.642
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	2.473.637.621.612
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	416.233.660.762
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	1.220.571.123.806
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	31.140.533.496.020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	29.001.041.383.966
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	2.099.452.258.654
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	26.833.963.650
Bantuan Keuangan - LRA	13.205.889.750
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	316.098.499.744
Pendapatan Hibah - LRA	54.185.050.693
Dana Darurat - LRA	
Pendapatan Lainnya - LRA	261.913.449.051
BELANJA	41.597.904.519.543
BELANJA OPERASI	32.641.893.949.105
Belanja Pegawai	19.579.878.746.296
Belanja Barang dan Jasa	11.987.960.445.226
Belanja Bunga	45.581.152.094
Belanja Subsidi	28.200.633.071
Belanja Hibah	974.333.272.548
Belanja Bantuan Sosial	25.939.699.870
BELANJA MODAL	5.321.375.224.249
Belanja Modal Tanah	39.909.588.740
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.598.663.029.052
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.425.329.574.145
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.097.797.537.318
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.952.231.009
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	87.044.424
Belanja Modal Aset Lainnya	15.213.441.081
Belanja Modal BLUD	46.422.778.480
BELANJA TAK TERDUGA	51.967.081.549
Belanja Tak Terduga	51.967.081.549
TRANSFER	3.582.668.264.640
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	129.219.519.332
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	118.859.959.615
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	10.359.559.718
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.453.448.745.308
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	918.787.524.466
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.313.046.320.146
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	221.614.900.696
Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT LRA	1.790.917.045.042
PEMBIAYAAN	749.205.766.083
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.207.671.446.647
Penggunaan SiLPA	1.175.671.446.647
Pencairan Dana Cadangan	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Pinjaman Dalam Negeri	32.000.000.000
Penerimaan Kembali Piutang	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
Pinjaman Luar Negeri	
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	458.465.680.564
Pembentukan Dana Cadangan	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	39.774.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	381.696.400.058
Pemberian Pinjaman Daerah	36.995.280.506
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.540.122.811.125
--	-------------------

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
ASET	127.772.118.244.333
ASET LANCAR	4.606.043.425.593
Kas dan Setara Kas	2.534.006.214.521
Investasi Jangka Pendek	10.000.000.000
Piutang Pendapatan	2.101.425.839.486
Piutang Lainnya	61.004.908.716
Penyisihan Piutang	(997.754.696.743)
Beban Dibayar Dimuka	25.940.846.853
Persediaan	871.420.312.759
Aset Untuk Dikonsolidasikan	
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.766.089.585.223
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.242.733.097
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.760.846.852.126
ASET TETAP	116.361.627.333.973
Tanah	58.197.344.081.421
Peralatan dan Mesin	22.557.607.976.992
Gedung dan Bangunan	37.977.124.327.011
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.235.091.158.256
Aset Tetap Lainnya	1.612.956.501.566
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.550.526.091.781
Akumulasi Penyusutan	(76.769.022.803.053)
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	2.038.357.899.543
Tagihan Jangka Panjang	172.931.918.576
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	250.240.838.543
Aset Tidak Berwujud	(2.030.212.739.280)
Aset Lain-lain	3.645.397.881.704
KEWAJIBAN	3.397.047.320.061
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.515.593.350.536
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.338.425.066
Utang Bunga	2.379.756.412
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	429.751.783.743
Pendapatan Diterima Dimuka	64.499.536.943
Utang Belanja	1.975.075.153.093
Utang Jangka Pendek Lainnya	30.548.695.279
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	881.453.969.525
Utang Dalam Negeri	723.339.763.539
Utang Jangka Panjang Lainnya	158.114.205.986
EKUITAS	124.375.070.924.272

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	121.459.291.020.862
Surplus/Defisit-LO	3.780.610.188.573
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	37.650.515.254
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	
Koreksi Nilai Persediaan	296.829.542
Selisih Revaluasi Aset Tetap	(13.995.199.534)
Koreksi Lainnya	51.348.885.247
JUMLAH EKUITAS AKHIR	125.277.551.724.689

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
PENDAPATAN - LO	45.187.778.374.250
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	12.210.201.843.883
Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.986.693.572.107
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.648.618.168.432
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	489.666.676.358
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	1.085.223.426.985
PENDAPATAN TRANSFER - LO	29.704.154.282.166
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	29.004.714.911.016
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	393.385.641.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	38.694.055.871
Bantuan Keuangan - LO	267.359.674.279
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	3.273.422.248.202
Pendapatan Hibah - LO	2.976.854.075.601
Dana Darurat - LO	
Pendapatan Lainnya - LO	296.568.172.601
BEBAN	41.255.353.356.610
BEBAN OPERASI - LO	39.140.643.866.254
Beban Pegawai - LO	19.696.280.732.238
Beban Barang dan Jasa	12.088.728.243.194
Beban Bunga	44.466.756.915
Beban Subsidi	29.748.499.073
Beban Hibah	965.496.614.650
Beban Bantuan Sosial	25.591.313.370
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.111.524.783.494
Beban Penyisihan Piutang	162.971.827.836
Beban Lain-lain	15.835.095.485
BEBAN TRANSFER	2.114.709.490.356
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	159.646.506.606
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	135.955.362.098
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	218.772.975.200
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.472.060.890.964
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	128.273.755.488
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	3.932.425.017.640
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	75.223.435.967
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	10.480.802.089
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.079.319.155
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	59.663.314.723
DEFISIT NON OPERASIONAL	204.158.365.168
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	78.614.114.997
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	27.987.809.412
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	97.556.440.758
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(128.934.929.201)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3.803.490.088.439
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.471.658.565
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.471.658.565
BEBAN LUAR BIASA	28.351.558.431
Beban Luar Biasa	28.351.558.431
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	(22.879.899.866)
SURPLUS/DEFISIT-LO	3.780.610.188.573

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	(6.811.188.158.911)
Penerimaan Retribusi Daerah	(2.473.637.621.612)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(416.233.660.762)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(1.220.571.123.806)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(759.254.435.065)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(313.237.083.309)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(21.014.258.077.521)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(6.914.291.788.071)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	
Penerimaan Dana Penyesuaian	
Penerimaan Hibah	(54.185.050.693)
Penerimaan Dana Darurat	
Penerimaan Lainnya	(261.913.449.051)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
Jumlah Arus Masuk Kas	(40.238.770.448.800)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	19.579.878.746.296
Pembayaran Barang	11.986.577.164.966
Pembayaran Bunga	45.581.152.094
Pembayaran Subsidi	28.200.633.071
Pembayaran Beban Hibah	974.333.272.548
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	25.939.699.870
Pembayaran Tak Terduga	51.967.081.549
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	118.859.959.615
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	10.359.559.718
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	10.359.559.718
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
Jumlah Arus Keluar Kas	32.832.056.829.444
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(73.070.827.278.244)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	
Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan Aset Tetap Lainnya	
Penjualan Aset Lainnya	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	

Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	37.235.899.740
Perolehan Tanah	
Perolehan Peralatan dan Mesin	1.574.581.750.146
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.425.279.754.145
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.093.436.880.853
Perolehan Aset Tetap Lainnya	97.400.341.609
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	37.774.000.000
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	5.265.708.626.493
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(5.265.708.626.493)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	(22.000.000.000)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	(10.000.000.000)
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Masuk Kas	(32.000.000.000)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	45.097.008.648
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	3.053.031.264
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	264.400.124.186
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	36.995.280.506
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Keluar Kas	349.545.444.604
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(381.545.444.604)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	(78.718.081.349.341)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
Saldo Akhir Kas	(78.718.081.349.341)

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Sub Total	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
Sub Total	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4)	
Lain-lain	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

LAMPIRAN I
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1110100- Kas di Kas Daerah	0	2254420039710,28	2254420039710,28
1110200- Kas di Bendahara Penerimaan	0	5201213319,73	5201213319,73
1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2310464347,5	2310464347,5
1110400- Kas di BLUD	0	225521496575,81	225521496575,81
1110500- Kas Lainnya	0	10494887160,25	10494887160,25
1110600- Setara Kas	0	36058113407,34	36058113407,34
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	35.920.000	(17.960.000)	17.960.000
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	10.236.000	(5.118.000)	5.118.000
111711- Kas di Bendahara Penerimaan	13.086.818	129.070.379	142.157.197
111819- Setara Kas lainnya	30.000.000.000	(30.000.000.000)	0
111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	178.265.283	596.587.697	774.852.980
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	812.652.318.880	(406.326.159.440)	406.326.159.440
111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	5.395.169.276	(1.236.856.194)	4.158.313.082
111826- Kas Lainnya di BLU	63.106.941.522	15.224.119.908	78.331.061.430
111827- Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	18.000.000.000	(18.000.000.000)	0
111911- Kas dan Bank - BLU	1.320.797.822.952	275.373.552.113	1.596.171.375.065
111929- Setara kas Lainnya - BLU	69.186.755.958	(19.475.160.937)	49.711.595.021
1120600- Investasi Jangka Pendek BLUD	0	10.000.000.000	10.000.000.000
1130100- Piutang Pajak Daerah	0	1432246384704,86	1432246384704,86
1130200- Piutang Retribusi	0	338910138465,11	338910138465,11
1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	617.390.668	617.390.668
1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	215776728554,39	215776728554,39
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	9211339028,01	9211339028,01
1130600- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0	104.663.858.066	104.663.858.066
113311- Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	60.500.000.000	25.000.000.000	85.500.000.000
1140100- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	1133438808,48	1133438808,48
1140300- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	461.259.175	461.259.175
1140400- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	23514524683,39	23514524683,39
1140500- Uang Muka	0	15.274.700.741	15.274.700.741
114111- Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	14.995.058	51.569.808	66.564.866
114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	10.200.570.967	(6.060.978.733)	4.139.592.234
114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	11.338.017.542	5.685.712.461	17.023.730.003
114ZZZZ- Piutang Lainnya (BAS Level 4)	0	20620985308,3	20620985308,3
1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan	0	-818334356044,08	-818334356044,08
1150200- Penyisihan Piutang Lainnya	0	-152452685429,41	-152452685429,41
115111- Piutang PPh Minyak Bumi	848.383.126	(60.000.000)	788.383.126
115121- Piutang PPh Pasal 21	39.583.683.270	4.975.332.685	44.559.015.955
115122- Piutang PPh Pasal 22	8.227.300.942	(617.278.134)	7.610.022.808
115123- Piutang PPh Pasal 22 Impor	8.649.525	10.316.600	18.966.125
115124- Piutang PPh Pasal 23	31.998.632.097	9.634.376.595	41.633.008.692
115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	63.567.483.966	33.746.596.460	97.314.080.426
115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	526.203.508.489	55.700.841.829	581.904.350.318
115127- Piutang PPh Pasal 26	5.722.349.887	4.151.830.248	9.874.180.135
115128- Piutang PPh Final	91.136.433.379	(669.909.133)	90.466.524.246
115129- Piutang PPh Non Migas Lainnya	0	182.515.698	182.515.698
115131- Piutang PPN Dalam Negeri	729.282.730.756	104.029.289.984	833.312.020.740
115132- Piutang PPN Impor	5.983.875.971	4.806.921.404	10.790.797.375
115153- Piutang PBB Perkebunan	27.307.620.976	(26.912.291.150)	395.329.826
115154- Piutang PBB Perhutanan	24.339.588	958.298.569	982.638.157
115155- Piutang PBB Pertambangan	9.047.930.673	91.234.628.626	100.282.559.299
115159- Piutang PBB Lainnya	300.143.596	(299.607.972)	535.624
115165- Piutang Bea Materai	6.730.000	84.794.000	91.524.000
115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh	44.918.380.961	13.843.478.597	58.761.859.558
115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN	34.285.700.264	9.150.797.584	43.436.497.848
115179- Piutang Bunga/Denda Penagihan PTLL	0	15.881.723.870	15.881.723.870
115181- Piutang Bea masuk	227.589.000	(101.060.000)	126.529.000
115183- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.005.371.000	(558.090.000)	447.281.000
115184- Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	646.199.000	0	646.199.000
115185- Piutang Pajak/pungutan ekspor	17.521.000	(17.521.000)	0
115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	476.355.352.279	72.264.938.538	548.620.290.817
115212- Piutang Lainnya	13.547.999.261	(711.969.941)	12.836.029.320
115231- Piutang Transfer ke Daerah - Dana Transfer Umum (DTU)	250.028.651.306	(92.441.213.306)	157.587.438.000

115232- Piutang Transfer ke Daerah - Dana Transfer Khusus (DTK)	0	209.418.008.785	209.418.008.785
115239- Piutang Transfer ke Daerah (TKD) - Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK)	1.292.552.829	(278.410.393)	1.014.142.436
115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	28.445.000	0	28.445.000
115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	194.374.116.064	20.669.280.464	215.043.396.528
115712- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	2.125.719.000	(179.100.000)	1.946.619.000
115719- Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	3.378.998.500	396.892.410	3.775.890.910
115741- Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	384.444.000	(384.444.000)	0
115811- Piutang Sewa Tanah - BLU	0	60.000.000	60.000.000
115812- Piutang Sewa Gedung - BLU	44.000.000	(16.000.000)	28.000.000
115813- Piutang Sewa Ruangan - BLU	11.100.000	37.200.000	48.300.000
115891- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	1.800.835.108	(520.814.229)	1.280.020.879
115ZZZZ- Penyisihan Piutang (BAS Level 4)	0	-26967655269,16	-26967655269,16
1160100- Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0	84.116.889	84.116.889
1160200- Beban Barang Dibayar Dimuka	0	17551934772,39	17551934772,39
1160300- Beban Jasa Dibayar Dimuka	0	2327701289,92	2327701289,92
1160400- Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0	371210266,82	371210266,82
1160500- Beban Lainnya	0	355236748,76	355236748,76
116111- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Migas	(424.191.562)	(339.643.280)	(763.834.842)
116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas	(384.462.260.592)	(144.183.213.685)	(528.645.474.277)
116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN	(370.066.358.143)	(84.695.215.151)	(454.761.573.294)
116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(10.803.184.262)	(15.752.753.235)	(26.555.937.497)
116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	(44.624.183.436)	(17.223.742.406)	(61.847.925.842)
116118- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(1.643.805.725)	561.518.655	(1.082.287.070)
116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	(362.693.176.096)	17.156.186.197	(345.536.989.899)
116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(10.910.574.728)	(81.505.813)	(10.992.080.541)
116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(28.445.000)	0	(28.445.000)
116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(17.016.032.914)	6.214.131.777	(10.801.901.137)
116612- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(165.552.410)	(311.344.205)	(476.896.615)
116619- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(31.155.833)	(36.539.324)	(67.695.157)
116641- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	(192.222.000)	192.222.000	0
116711- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU	0	(300.000)	(300.000)
116712- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	(220.000)	95.000	(125.000)
116713- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	(55.500)	(186.000)	(241.500)
116791- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(354.495.532)	243.993.184	(110.502.348)
116ZZZZ- Beban Dibayar Dimuka (BAS Level 4)	0	5250646886,26	5250646886,26
1170100- Persediaan Bahan Pakai Habis	0	758972461805,08	758972461805,08
1170200- Persediaan Bahan/Material	0	28166668272,05	28166668272,05
1170300- Persediaan Barang Lainnya	0	84281182682,310002	84281182682,310002
117111- Barang Konsumsi	399.770.626.720	1.710.756.289	401.481.383.009
117112- Amunisi	977.562.894.734	19.964.968.241	997.527.862.975
117113- Bahan untuk Pemeliharaan	4.470.460.757	(115.878.669)	4.354.582.088
117114- Suku Cadang	4.112.970.429.208	(18.380.447.326)	4.094.589.981.882
117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	348.919.891.491	148.103.854.189	497.023.745.680
117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3.919.078.811	(1.616.679.113)	2.302.399.698
117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	40.911.819.576	13.558.825.891	54.470.645.467
117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	3.620.980.813.222	420.677.059.003	4.041.657.872.225

117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	103.592.407.106	(15.813.327.222)	87.779.079.884
117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	149.694.600	149.694.600
117128- Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	11.492.977.154	800.445.666	12.293.422.820
117129- Persediaan Dalam Proses	488.451.396.166	255.229.733.257	743.681.129.423
117131- Bahan Baku	35.135.440.812	(19.639.123.295)	15.496.317.517
117141- Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	2.566.557.868	(1.250.591.943)	1.315.965.925
117151- Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	373.800.000	3.790.151.000	4.163.951.000
117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	12.034.572.960	(29.193.800)	12.005.379.160
117199- Persediaan Lainnya	102.892.775.320	(651.325.301)	102.241.450.019
1210300- Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	5.000.000.000	5.000.000.000
1210400- Dana Bergulir	0	22928411553,95	22928411553,95
1210700- Cadangan Dana Bergulir	0	-22685678456,95	-22685678456,95
1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	4760846852125,96	4760846852125,96
1310100- Tanah Perkampungan	0	63263793037,91	63263793037,91
1310200- Tanah Pertanian	0	116.450.000	116.450.000
1310800- Tanah Tandus/Rusak	0	4.308.490.000	4.308.490.000
1310900- Alang-alang dan Padang Rumput	0	1.317.724.500	1.317.724.500
1311000- Tanah Pengguna Lain	0	982579614351,17	982579614351,17
1311100- Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	586700972024,28	586700972024,28
131111- Tanah	152.748.697.990.715	398.068.516.895	153.146.766.507.610
1311300- Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	23.991.067.717	23.991.067.717
131ZZZZ- Tanah (BAS Level 4)	0	56535065969790,62	56535065969790,62
1320100- Alat-Alat Besar Darat	0	461250890116,82	461250890116,82
1320200- Alat-Alat Besar Apung	0	254.370.000	254.370.000
1320300- Alat-alat Bantu	0	21569285976,42	21569285976,42
1320400- Alat Angkutan Darat Bermotor	0	1845926905919,48	1845926905919,48
1320500- Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	0	480.714.380	480.714.380
1320600- Alat Angkut Apung Bermotor	0	14.604.289.743	14.604.289.743
1320700- Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	679.993.500	679.993.500
1320800- Alat Angkut Bermotor Udara	0	3.621.499.495	3.621.499.495
1320900- Alat Bengkel Bermesin	0	137068776334,71	137068776334,71
1321000- Alat Bengkel Tak Bermesin	0	6729616840,08	6729616840,08
1321100- Alat Ukur	0	11516532175,94	11516532175,94
132111- Peralatan dan Mesin	39.600.743.002.787	2.039.032.698.235	41.639.775.701.022
1321200- Alat Pengolahan	0	124174777754,56	124174777754,56
1321300- Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0	1.039.299.087	1.039.299.087
1321400- Alat Kantor	0	1455775708209,32	1455775708209,32
1321500- Alat Rumah Tangga	0	1503128821933,66	1503128821933,66
1321600- Komputer	0	1840500855220,86	1840500855220,86
1321700- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	36940885226,44	36940885226,44
1321800- Alat Studio	0	296973784380,35	296973784380,35
1321900- Alat Komunikasi	0	11471753438,94	11471753438,94
1322000- Peralatan Pemancar	0	44477143751,21	44477143751,21
1322100- Alat Kedokteran	0	3856859168527,5301	3856859168527,5301
1322200- Alat Kesehatan	0	146492664756,85	146492664756,85
1322300- Unit-Unit Laboratorium	0	1625728852142,77	1625728852142,77
1322400- Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	164221904977,13	164221904977,13
1322500- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	10296232782,999878	10296232782,999878
1322600- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	3008808337,69	3008808337,69
1322700- Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0	22549119166,2	22549119166,2
1322800- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0	706406444,63	706406444,63
1322900- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	5138043846,11	5138043846,11
1323000- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	23189056468,84	23189056468,84
1323100- Senjata Api	0	7745125734,2	7745125734,2
1323200- Persenjataan Non Senjata Api	0	1033175801,29	1033175801,29
1323500- Alat Keamanan dan Perlindungan	0	44002057683,1	44002057683,1
132ZZZZ- Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	8828451456838,479734	8828451456838,479734
1330100- Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	23847181557385,63	23847181557385,63
1330200- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	506471256668,61	506471256668,61
1330300- Bangunan Menara	0	6335774641,12	6335774641,12
1330500- Tugu Peringatan	0	5250681554,24023	5250681554,24023
1330600- Candi	0	21.627.402.431	21.627.402.431
1330700- Monumen/Bangunan Bersejarah	0	74072691443,08	74072691443,08
1330800- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	607337397778,43	607337397778,43
133111- Gedung dan Bangunan	22.130.603.504.339	404.284.773.958	22.534.888.278.297
133ZZZZ- Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	12908847565108,58	12908847565108,58
1340100- Jalan	0	35697652333605,39	35697652333605,39

1340200- Jembatan	0	832588056791,2	832588056791,2
1340300- Bangunan Air Irigasi	0	4586577759378,63	4586577759378,63
1340400- Bangunan Air Pasang Surut	0	28472281061,07	28472281061,07
1340500- Bangunan Air Rawa	0	9.876.829.533	9.876.829.533
1340600- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	724402789815,85	724402789815,85
1340700- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	75585730508,8	75585730508,8
1340800- Bangunan Air Bersih/Baku	0	277106921931,43	277106921931,43
1340900- Bangunan Air Kotor	0	95863944624,61	95863944624,61
1341000- Bangunan Air	0	910183745719,4289063	910183745719,4289063
1341100- Instalasi Air Minum Bersih	0	729845012615,6899	729845012615,6899
134111- Jalan dan Jembatan	22.750.893.977.680	658.968.326.703	23.409.862.304.383
134112- Irigasi	29.999.594.264.436	484.994.095.325	30.484.588.359.761
134113- Jaringan	1.045.588.861.953	(144.158.720.370)	901.430.141.583
1341200- Instalasi Air Kotor	0	50293461167,96	50293461167,96
1341300- Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	0	14192905843,78	14192905843,78
1341400- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	8718449407,700195	8718449407,700195
1341500- Instalasi Pembangkit Listrik	0	53.768.887.608	53.768.887.608
1341600- Instalasi Gardu Listrik	0	19960056747,33	19960056747,33
1341700- Instalasi Pertahanan	0	950.521.290	950.521.290
1341800- Instalasi Gas	0	6.284.114.042	6.284.114.042
1341900- Instalasi Pengaman	0	752.655.150	752.655.150
1342000- Jaringan Air Minum	0	460480736848,14	460480736848,14
1342100- Jaringan Listrik	0	220738983574,7298	220738983574,7298
1342200- Jaringan Telepon	0	48.220.394.720	48.220.394.720
1342300- Jaringan Gas	0	25774874829,71	25774874829,71
134ZZZZ- Jalan, Irigasi, dan Jaringan (BAS Level 4)	0	26356799711441,99	26356799711441,99
1350100- Buku	0	44422845117,03	44422845117,03
1350200- Terbitan	0	1.626.316.005	1.626.316.005
1350300- Barang-Barang Perpustakaan	0	1054107631285,08	1054107631285,08
1350400- Barang Bercorak Kebudayaan	0	26777518462,3998779	26777518462,3998779
1350500- Alat Olah Raga Lainnya	0	4.743.708.548	4.743.708.548
1350600- Hewan	0	10159289012,18	10159289012,18
1350700- Tanaman	0	16326021497,58	16326021497,58
1350800- Aset Tetap Renovasi	0	69749003340,94	69749003340,94
135111- Aset Tetap Renovasi	1.191.307.656.279	119.297.163.051	1.310.604.819.330
135121- Aset Tetap Lainnya	410.060.946.126	(71.743.573.213)	338.317.372.913
135ZZZZ- Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	385044168298,01	385044168298,01
1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	1550526091780,55	1550526091780,55
136111- Konstruksi Dalam pengerjaan	6.205.716.823.522	166.926.275.883	6.372.643.099.405
1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-21303719790010,77	-21303719790010,77
1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	-9520364247499,86	-9520364247499,86
1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0	-45728452516546,5	-45728452516546,5
1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	-216486248996,32037	-216486248996,32037
137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30.661.006.318.402)	(2.297.640.400.713)	(32.958.646.719.115)
137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.547.331.373.110)	(647.367.787.592)	(5.194.699.160.702)
137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(14.514.239.522.903)	(941.170.061.787)	(15.455.409.584.690)
137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi	(8.105.730.787.265)	(915.503.808.847)	(9.021.234.596.112)
137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan	(414.706.544.521)	26.331.558.140	(388.374.986.381)
137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(488.423.044.223)	(7.344.542.913)	(495.767.587.136)
138111- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	495.130.654.528	(147.689.746.000)	347.440.908.528
138121- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	6.037.447.674.997	0	6.037.447.674.997
138211- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	(36.963.718.256)	(3.359.068.058)	(40.322.786.314)
138221- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(314.982.921.830)	(128.133.165.252)	(443.116.087.082)
138311- Properti Investasi	244.406.117.472	362.310.659	244.768.428.131
138411- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(11.809.116.311)	(2.265.751.295)	(14.074.867.606)
1510100- Tagihan Penjualan Angsuran	0	39.257.865.581	39.257.865.581
1510200- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	133579292121,23	133579292121,23
151ZZZZ- Tagihan Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	94.760.874	94.760.874
1520100- Sewa	0	5.236.667.087	5.236.667.087
1520200- Kerjasama Pemanfaatan	0	83.031.799.129	83.031.799.129
1520300- Bangun guna serah	0	65670956552,33	65670956552,33
152111- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1.636.980.060	13.308.000	1.650.288.060
152ZZZZ- Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BAS Level 4)	0	96.301.415.775	96.301.415.775
1530100- Goodwill	0	76.636.780.863	76.636.780.863

1530200- Lisensi dan frenchise	0	81.651.625.675	81.651.625.675
1530300- Hak Cipta	0	6841613036,45	6841613036,45
1530400- Paten	0	2.032.624.310	2.032.624.310
1530500- Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	470989426601,36	470989426601,36
1530600- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	-2718780949847,59	-2718780949847,59
153ZZZZ- Aset Tidak Berwujud (BAS Level 4)	0	50416140081,48	50416140081,48
1540100- Aset Lain-lain	0	3645397881703,95	3645397881703,95
156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(1.624.770.060)	(499.940)	(1.625.270.000)
162121- Hak Cipta	0	30.800.000	30.800.000
162141- Paten	5.650.000	30.100.000	35.750.000
162151- Software	600.994.248.089	68.313.703.434	669.307.951.523
162161- Lisensi	47.219.767.085	56.473.030.909	103.692.797.994
162171- Hasil Kajian/Penelitian	160.613.629.946	(75.493.494.294)	85.120.135.652
162191- Aset Tak Berwujud Lainnya	261.182.476.234	(51.411.519.144)	209.770.957.090
162311- Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5.889.236.488	0	5.889.236.488
163119- Dana Lainnya	3.259.838.827	(1.942.170.554)	1.317.668.273
163139- Dana di Rekening Penampungan- Kementerian/Lembaga	393.785.008.328	174.052.074.926	567.837.083.254
163141- Dana di Rekening Penampungan - BLU	7.899.730.139	(3.992.966.607)	3.906.763.532
166111- Aset Lain-lain	156.006.000	430.400.000	586.406.000
166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4.671.869.052.064	(123.505.815.365)	4.548.363.236.699
166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	41.571.505.364	31.822.119.342	73.393.624.706
166114- BMN Dalam Proses PMPP	219.324.500	0	219.324.500
166115- Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	0	28.498.948.996	28.498.948.996
169121- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(62.505.756)	(5.434.519)	(67.940.275)
169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(1.140.886.228.253)	71.849.679.236	(1.069.036.549.017)
169312- Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	(604.000)	(604.000)
169314- Akumulasi Amortisasi Paten	(5.367.500)	(3.257.500)	(8.625.000)
169315- Akumulasi Amortisasi Software	(415.352.150.659)	(128.916.571.772)	(544.268.722.431)
169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi	(17.500.158.078)	(11.324.211.270)	(28.824.369.348)
169317- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(45.215.859.057)	27.014.875.229	(18.200.983.828)
169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(873.276.933)	(1.149.025.157)	(2.022.302.090)
2110200- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0	(25.012.275)	(25.012.275)
2110300- Utang PPh Pusat	0	(28.638.843)	(28.638.843)
2110400- Utang PPN Pusat	0	(43.123.879)	(43.123.879)
2110700- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0	-62327611,01	-62327611,01
211116- Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggotaan Polri/PNS Polri	(26.413.424.000)	26.413.424.000	0
211166- Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	26.413.424.000	(26.413.424.000)	0
211ZZZZ- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (BAS Level 4)	0	-13179322457,54	-13179322457,54
2120100- Utang Bunga kepada Pemerintah	0	-532733491,71	-532733491,71
2120300- Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	0	(373.985.002)	(373.985.002)
212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(120.575.599.148)	(55.122.973.229)	(175.698.572.377)
212112- Belanja barang yang masih harus dibayar	(19.734.944.479)	(31.310.195.842)	(51.045.140.321)
212113- Belanja modal yang masih harus dibayar	(663.967.787)	663.967.787	0
212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(152.313.644.951)	(298.050.162)	(152.611.695.113)
212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(299.669.780.010)	(6.421.817.313)	(306.091.597.323)
212192- Dana Pihak Ketiga	(6.291.731.297)	2.708.326.717	(3.583.404.580)
212193- Dana Pihak Ketiga BLU	(80.554.581.395)	13.951.307.134	(66.603.274.261)
212ZZZZ- Utang Bunga (BAS Level 4)	0	(1.473.037.918)	(1.473.037.918)
2130200- Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(133.212.159.524)	(133.212.159.524)
2130300- Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	0	-55099232489,24	-55099232489,24
213ZZZZ- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	(241.440.391.730)	(241.440.391.730)
2140100- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0	-520703913,34	-520703913,34
2140200- Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0	-719671512,5	-719671512,5
2140400- Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0	-41563103453,8	-41563103453,8
214ZZZZ- Pendapatan Diterima Dimuka (BAS Level 4)	0	-21696058063,5	-21696058063,5
2150100- Utang Belanja Pegawai	0	-449959800035,85	-449959800035,85
2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa	0	-605658117261,7	-605658117261,7
2150300- Utang Belanja Modal	0	-459759257398,65	-459759257398,65
2150400- Utang Belanja Subsidi	0	-1818279352,47	-1818279352,47

2150500- Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	-129655196944,19	-129655196944,19
2150600- Utang Belanja Lain-lain	0	-139843575588,7	-139843575588,7
215111- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	(233.874.343.778)	233.874.343.778	0
215112- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Dana Transfer Umum (DTU)	0	(662.439.976.000)	(662.439.976.000)
215113- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Dana Transfer Khusus (DTK)	0	(59.038.778.540)	(59.038.778.540)
215ZZZZ- Utang Belanja (BAS Level 4)	0	-188380926511,32	-188380926511,32
2160100- Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0	(1.728.955.469)	(1.728.955.469)
2160400- Utang Transfer	0	(72.178.311)	(72.178.311)
2160500- Utang Jangka Pendek Lainnya	0	(28.747.561.499)	(28.747.561.499)
218211- Hibah Langsung yang Belum Disahkan	(18.000.000.000)	0	(18.000.000.000)
219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	(10.319.778.025)	(5.938.790.365)	(16.258.568.390)
219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	(57.865.562.060)	(1.903.854.806)	(59.769.416.866)
219119- Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Lainnya	0	(77.722.261)	(77.722.261)
219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(10.564.614.003)	(17.000.943.362)	(27.565.557.365)
219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	(18.349.319.089)	8.077.878.703	(10.271.440.386)
219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU	(53.707.665.962)	44.647.334.896	(9.060.331.066)
219241- Pajak Diterima Dimuka PPh	0	(99.594.798.314)	(99.594.798.314)
219242- Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPN	0	(5.233.217.993)	(5.233.217.993)
219249- Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Pajak Lainnya	0	(600.991.305.813)	(600.991.305.813)
219511- Uang Muka dari KPPN	(23.078.000)	0	(23.078.000)
219913- Utang Jangka Pendek Lain-lain	(5.175.278.295)	(1.200.852.076)	(6.376.130.371)
219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	(116.717.067)	0	(116.717.067)
219964- Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	(423.921.303)	0	(423.921.303)
2210200- Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(562.882.253.237)	(562.882.253.237)
2210400- Utang Pemerintah Pusat	0	-153627461885,26	-153627461885,26
221ZZZZ- Utang Dalam Negeri (BAS Level 4)	0	(6.830.048.417)	(6.830.048.417)
2220100- Utang Jangka Panjang Lainnya	0	(158.114.205.986)	(158.114.205.986)
226112- Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pembayaran Kepada Mitra	(914.683.238.540)	170.486.728.323	(744.196.510.217)
226113- Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra	(4.831.076.355.905)	79.918.330.792	(4.751.158.025.113)
3110100- Ekuitas	0	-124375070924271,86	-124375070924271,86
311111- SAL	83.446.445.069.242	0	83.446.445.069.242
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(83.736.656.300.239)	(52.242.355.425.257)	(135.979.011.725.496)
313121- Diterima dari Entitas Lain	216.315.813.103	12.878.448.524.370	13.094.764.337.473
313211- Transfer Keluar	0	100.073.493.269.711	100.073.493.269.711
313221- Transfer Masuk	0	(102.949.689.132.469)	(102.949.689.132.469)
3910100- Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	0	-121459291020862,32	-121459291020862,32
391111- Ekuitas	(234.238.401.949.376)	31.159.248.238.098	(203.079.153.711.278)
391113- Koreksi Nilai Persediaan	0	(773.446.780)	(773.446.780)
391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2.730.500.529.815	2.730.500.529.815
391118- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	378.926.691	378.926.691
391119- Koreksi Lainnya	(89.690.148.823)	824.414.414.441	734.724.265.618
391121- Ekuitas Transaksi Lainnya	0	1.942.170.554	1.942.170.554
391131- Pengesahan Hibah Langsung	0	(119.601.681.362)	(119.601.681.362)
391132- Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	187.956.579	187.956.579
391133- Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(36.735.196.012)	(36.735.196.012)
391151- Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	(2.317.421.298.419)	(2.317.421.298.419)
3920100- Koreksi Nilai Persediaan	0	-296829541,51	-296829541,51
3920200- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	13995199534,09	13995199534,09
3920300- Koreksi terhadap Ekuitas Lainnya	0	-51348885246,58	-51348885246,58
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BP KL	(23.078.000)	0	(23.078.000)
399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BLU KL	(725.242.289.455)	0	(725.242.289.455)
399913- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas Hibah KL	(406.326.159.440)	0	(406.326.159.440)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(47.919.740)	(47.919.740)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(1.745.653)	(1.745.653)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(1.654.200.528.678)	(1.654.200.528.678)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(143.549.795.886)	(143.549.795.886)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(143.327.998.947)	(143.327.998.947)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(370.298.923.146)	(370.298.923.146)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(339.490.767.367)	(339.490.767.367)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.749.166.094.988)	(1.749.166.094.988)

411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(22.009.746.874)	(22.009.746.874)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(832.161.910.815)	(832.161.910.815)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(1.431.889.298)	(1.431.889.298)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(4.694.893.508.511)	(4.694.893.508.511)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(735.806.228.648)	(735.806.228.648)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(6.958.826.637)	(6.958.826.637)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(22.470.180.408)	(22.470.180.408)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(253.737.850)	(253.737.850)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(215.498.530)	(215.498.530)
411241- Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	0	(121.910.815.455)	(121.910.815.455)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(936.979.184)	(936.979.184)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(57.377.000)	(57.377.000)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(94.070.999.951)	(94.070.999.951)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(7.247.313)	(7.247.313)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(93.533.809.000)	(93.533.809.000)
411512- Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	0	(1.595.000)	(1.595.000)
411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	0	(7.505.550.000)	(7.505.550.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(6.093.148.000)	(6.093.148.000)
411519- Pendapatan Cukai Lainnya	0	(41.778.000)	(41.778.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(3.874.446.804)	(3.874.446.804)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	(12.384.433)	(12.384.433)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(57.346.252.897)	(57.346.252.897)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(15.495.326.215)	(15.495.326.215)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(3.759.489.610)	(3.759.489.610)
411659- Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	0	(19.866.598.187)	(19.866.598.187)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(224.673.619.000)	(224.673.619.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(3.314.340.000)	(3.314.340.000)
412119- Pendapatan Pabean Lainnya	0	(177.117.000)	(177.117.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(3.713.743.000)	(3.713.743.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(1.140.550.000)	(1.140.550.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(51.194.810.000)	(51.194.810.000)
412213- Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	(351.000)	(351.000)
419999- Pendapatan Pajak lain-lain	0	(143.089.235)	(143.089.235)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(1.553.729.708.904)	(1.553.729.708.904)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(1.134.296.776.715)	(1.134.296.776.715)
424113- Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	(16.536.621.748)	(16.536.621.748)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(6.256.871.539)	(6.256.871.539)
424231- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Perorangan - Barang/Jasa	0	(18.451.254.704)	(18.451.254.704)
424232- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	0	(38.764.000)	(38.764.000)
424235- Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	0	(5.380.823.735)	(5.380.823.735)
424241- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Perorangan - Barang / Jasa	0	(356.337.000)	(356.337.000)
424242- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	0	(2.408.202.001)	(2.408.202.001)
424243- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Pemda - Barang / Jasa	0	(116.550.000)	(116.550.000)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(376.540.396)	(376.540.396)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(43.921.878.762)	(43.921.878.762)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(1.997.893.100)	(1.997.893.100)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(13.077.986.286)	(13.077.986.286)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(359.087.907)	(359.087.907)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(31.479.572.526)	(31.479.572.526)
424913- Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	0	(14.081.824)	(14.081.824)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(405.843.274)	(405.843.274)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(13.660.310.075)	(13.660.310.075)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(1.612.321.468)	(1.612.321.468)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(1.892.265.970)	(1.892.265.970)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(7.685.070.707)	(7.685.070.707)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan	0	(1.642.912.374)	(1.642.912.374)

dan Mesin			
424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	(31.825.000)	(31.825.000)
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	(1.321.229.680)	(1.321.229.680)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(3.281.073.782)	(3.281.073.782)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(4.954.000)	(4.954.000)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(229.350.900)	(229.350.900)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(8.157.328.945)	(8.157.328.945)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(4.029.632.611)	(4.029.632.611)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(24.926.578.889)	(24.926.578.889)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(263.115.412)	(263.115.412)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(3.081.561.937)	(3.081.561.937)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(6.934.240.625)	(6.934.240.625)
425211- Pendapatan Paspor	0	(94.526.450.000)	(94.526.450.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.222.000.000)	(1.222.000.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(6.845.050.000)	(6.845.050.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(3.905.700.000)	(3.905.700.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(110.862.000)	(110.862.000)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(4.060.000)	(4.060.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(175.160.000)	(175.160.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(1.063.638.500)	(1.063.638.500)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(1.848.003.150)	(1.848.003.150)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(4.704.459.700)	(4.704.459.700)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(1.953.864.820)	(1.953.864.820)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(4.409.966.295)	(4.409.966.295)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(855.217.687)	(855.217.687)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(4.735.500.000)	(4.735.500.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(110.183.259.488)	(110.183.259.488)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(802.533.000)	(802.533.000)
425245- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	0	(2.419.413.500)	(2.419.413.500)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(1.935.000.035)	(1.935.000.035)
425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	(8.704.766.736)	(8.704.766.736)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(962.709.596)	(962.709.596)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(45.300.000)	(45.300.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(2.272.948.777)	(2.272.948.777)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(16.708.830.000)	(16.708.830.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(16.899.395.000)	(16.899.395.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(77.545.300.000)	(77.545.300.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(1.155.840.000)	(1.155.840.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(68.387.700.000)	(68.387.700.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(41.524.440.000)	(41.524.440.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(873.600.000)	(873.600.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.708.100.000)	(1.708.100.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(15.720.000.000)	(15.720.000.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan	0	(8.381.730.000)	(8.381.730.000)

Kepolisian			
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(6.582.975.000)	(6.582.975.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(888.385.000)	(888.385.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(11.901.294.849)	(11.901.294.849)
425282- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(7.902.975)	(7.902.975)
425284- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	0	(158.800.000)	(158.800.000)
425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	(13.849.266.000)	(13.849.266.000)
425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	0	(916.716.000)	(916.716.000)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(7.583.166.623)	(7.583.166.623)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(21.049.332.032)	(21.049.332.032)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(147.082.289.542)	(147.082.289.542)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(57.196.204.568)	(57.196.204.568)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.267.320.000)	(1.267.320.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(4.918.020.000)	(4.918.020.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(927.752.219)	(927.752.219)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(6.803.366.367)	(6.803.366.367)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(454.790.000)	(454.790.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(69.811.776.423)	(69.811.776.423)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(27.577.200.000)	(27.577.200.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(3.521.805.513)	(3.521.805.513)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(1.045.600.000)	(1.045.600.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(85.993.187.350)	(85.993.187.350)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(2.814.023.200)	(2.814.023.200)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(27.418.976.181)	(27.418.976.181)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(227.740.000)	(227.740.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(4.425.486.000)	(4.425.486.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(170.215.000)	(170.215.000)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(1.173.673)	(1.173.673)
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(72.936.125)	(72.936.125)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(129.000.000)	(129.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(31.071.940.245)	(31.071.940.245)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.305.814.290)	(10.305.814.290)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(5.946.753.400)	(5.946.753.400)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(4.024.864.315)	(4.024.864.315)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(1.934.326.701)	(1.934.326.701)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(20.798.995.703)	(20.798.995.703)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(2.346.325.733)	(2.346.325.733)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(281.346.100)	(281.346.100)
425533- Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	(193.499.977)	(193.499.977)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(2.856.560.000)	(2.856.560.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(462.841.484)	(462.841.484)
425619- Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	0	(5.136.659)	(5.136.659)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	(432.022.678)	(432.022.678)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(46.374.870)	(46.374.870)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(1.497.993.381)	(1.497.993.381)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(131.493)	(131.493)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(17.863.757)	(17.863.757)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(18.196.739)	(18.196.739)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(32.900.000)	(32.900.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(30.343.367.828)	(30.343.367.828)

425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(9.340.491.088)	(9.340.491.088)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(12.907.133.866)	(12.907.133.866)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(115.201.555)	(115.201.555)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(46.019.567)	(46.019.567)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(18.858.307.088)	(18.858.307.088)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(607.902.023)	(607.902.023)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(2.062.127.772)	(2.062.127.772)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(7.904.471.323)	(7.904.471.323)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(931.643.045)	(931.643.045)
425917- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(34.000.000)	(34.000.000)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(3.510.890.999)	(3.510.890.999)
439999- Pendapatan Hibah Lain-lain	0	18.000.000.000	18.000.000.000
491315- Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa	0	(79.918.330.792)	(79.918.330.792)
491421- Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	(16.737.398.090)	(16.737.398.090)
491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	(24.236.328.128)	(24.236.328.128)
491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(891.497.886)	(891.497.886)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(31.159.248.238.098)	(31.159.248.238.098)
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	1.895.879.844.602	1.895.879.844.602
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	30.731.503	30.731.503
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	127.090.787.942	127.090.787.942
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	36.342.188.894	36.342.188.894
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	15.709.587.900	15.709.587.900
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	230.413.311.545	230.413.311.545
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	28.107.269.775	28.107.269.775
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	91.239.382.660	91.239.382.660
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	313.120.546.692	313.120.546.692
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	2.206.022.850	2.206.022.850
511138- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	51.050.000	51.050.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.429.980.000	1.429.980.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	26.802.267.937	26.802.267.937
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	517.195.268.531	517.195.268.531
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	263.179.780.333	263.179.780.333
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	112.701.757.720	112.701.757.720
511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	6.726.865.000	6.726.865.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	8.668.704.000	8.668.704.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	107.407.305.825	107.407.305.825
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	1.420.115	1.420.115
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	6.133.810.800	6.133.810.800
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	1.732.137.967	1.732.137.967
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	3.879.715.000	3.879.715.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	523.365.000	523.365.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	728.810.161	728.810.161
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	4.749.250.183	4.749.250.183
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	16.425.504.375	16.425.504.375
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	1.084.780.000	1.084.780.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	3.099.880.521	3.099.880.521
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.789.531.661.136	1.789.531.661.136
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	27.312.625	27.312.625
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	120.371.725.911	120.371.725.911
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	36.777.836.390	36.777.836.390
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	69.694.569.401	69.694.569.401
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	250.807.500	250.807.500
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	18.153.127.374	18.153.127.374
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	145.639.743.213	145.639.743.213
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	949.758.370.000	949.758.370.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	830.800.000	830.800.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	3.652.650.000	3.652.650.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	4.674.600.000	4.674.600.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	1.173.050.000	1.173.050.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	14.187.496.750	14.187.496.750
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	547.440.000	547.440.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	7.381.455.000	7.381.455.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada	0	27.403.115.725	27.403.115.725

Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI			
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	656.360.000	656.360.000
511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri	0	500.000	500.000
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	36.547.289.546	36.547.289.546
511324- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	39.497.165.951	39.497.165.951
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	35.717.759.786	35.717.759.786
511339- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	186.036.897.000	186.036.897.000
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	2.382.702.588	2.382.702.588
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	189.150.018	189.150.018
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	84.175.000	84.175.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	570.015.152.460	570.015.152.460
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	8.826.000.000	8.826.000.000
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	724.856.000	724.856.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	500.553.894.391	500.553.894.391
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	8.187.284	8.187.284
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	28.815.085.326	28.815.085.326
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	8.481.600.722	8.481.600.722
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	43.551.790.104	43.551.790.104
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	28.198.108.985	28.198.108.985
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	104.908.852.344	104.908.852.344
511632- Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	1.050.000	1.050.000
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4.805.691.813	4.805.691.813
512111- Belanja Uang Honor Tetap	0	8.859.851.000	8.859.851.000
512211- Belanja Uang Lembur	0	56.043.831.700	56.043.831.700
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	6.555.803.250	6.555.803.250
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1.948.579.616.038	1.948.579.616.038
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	302.041.148.446	302.041.148.446
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	467.905.565.680	467.905.565.680
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	189.340.456.193	189.340.456.193
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	6.885.528.282	6.885.528.282
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	2.253.651.154	2.253.651.154
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	132.773.898.351	132.773.898.351
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	610.151.273.112	610.151.273.112
521211- Belanja Bahan	0	237.896.060.366	237.896.060.366
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	141.203.848.357	141.203.848.357
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	279.671.034.420	279.671.034.420
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	2.003.400.000	2.003.400.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	6.739.840.003	6.739.840.003
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	16.195.276.218	16.195.276.218
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	303.735.939	303.735.939
521723- Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	73.300.111.977	73.300.111.977
522111- Belanja Langganan Listrik	0	135.475.895.619	135.475.895.619
522112- Belanja Langganan Telepon	0	6.797.407.034	6.797.407.034
522113- Belanja Langganan Air	0	13.014.935.950	13.014.935.950
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	31.813.661.943	31.813.661.943
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	136.284.201	136.284.201
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	65.328.331.676	65.328.331.676
522141- Belanja Sewa	0	79.742.734.300	79.742.734.300
522151- Belanja Jasa Profesi	0	46.348.475.114	46.348.475.114
522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	341.516.286	341.516.286
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	190.598.943.114	190.598.943.114
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	251.914.953.981	251.914.953.981
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	4.551.495.577	4.551.495.577
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	212.501.607.850	212.501.607.850
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	50.868.500	50.868.500
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	4.108.776.611	4.108.776.611
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	162.637.588.813	162.637.588.813
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	183.074.058.685	183.074.058.685
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1.973.268.205	1.973.268.205
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	6.175.118.715	6.175.118.715
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	361.782.409.401	361.782.409.401
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	882.371.176	882.371.176

524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	48.893.158.274	48.893.158.274
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	55.934.389.634	55.934.389.634
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	42.012.796.805	42.012.796.805
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	5.931.850.938	5.931.850.938
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	876.001.356.139	876.001.356.139
525112- Belanja Barang	0	247.975.411.960	247.975.411.960
525113- Belanja Jasa	0	237.555.447.021	237.555.447.021
525114- Belanja Pemeliharaan	0	147.465.758.580	147.465.758.580
525115- Belanja Perjalanan	0	51.253.747.285	51.253.747.285
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	234.435.551.250	234.435.551.250
525143- Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	262.139.500	262.139.500
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	2.029.461.971	2.029.461.971
526121- Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	115.000.000	115.000.000
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	51.000.000	51.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	162.500.000	162.500.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	151.615.500.000	151.615.500.000
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	354.485.386.243	354.485.386.243
571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	14.801.329.000	14.801.329.000
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	8.040.443.616	8.040.443.616
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	84.840.050.000	84.840.050.000
591111- Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2.363.915.080.737	2.363.915.080.737
591211- Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	691.825.208.169	691.825.208.169
591311- Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	995.692.337.682	995.692.337.682
591312- Belanja Penyusutan Irigasi	0	920.465.467.926	920.465.467.926
591313- Belanja Penyusutan Jaringan	0	33.043.076.398	33.043.076.398
591411- Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	7.965.360.699	7.965.360.699
591511- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	3.359.068.058	3.359.068.058
591521- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	128.133.165.252	128.133.165.252
591611- Beban Penyusutan Properti Investasi	0	1.582.997.627	1.582.997.627
592112- Belanja Amortisasi Hak Cipta	0	456.000	456.000
592114- Belanja Amortisasi Paten	0	2.522.500	2.522.500
592115- Belanja Amortisasi Software	0	102.991.737.770	102.991.737.770
592116- Belanja Amortisasi Lisensi	0	9.715.791.079	9.715.791.079
592117- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	3.865.809.369	3.865.809.369
592118- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	130.568.019	130.568.019
592221- Belanja Penyusutan Aset Lain-lain	0	5.434.519	5.434.519
592222- Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	15.547.286.600	15.547.286.600
593111- Belanja Persediaan konsumsi	0	1.079.570.761.982	1.079.570.761.982
593112- Belanja Persediaan amunisi	0	160.053.528.106	160.053.528.106
593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	7.371.363.482	7.371.363.482
593114- Belanja Persediaan suku cadang	0	412.223.364.313	412.223.364.313
593121- Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	543.902.181	543.902.181
593122- Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	32.680.989.453	32.680.989.453
593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	19.454.097.068	19.454.097.068
593124- Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	10.708.654.921	10.708.654.921
593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	782.477.558.889	782.477.558.889
593126- Belanja Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	31.043.980.026	31.043.980.026
593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	213.711.997.204	213.711.997.204
593131- Belanja Persediaan bahan baku	0	27.667.550.244	27.667.550.244
593141- Belanja Persediaan untuk tujuan	0	29.193.800	29.193.800

strategis/berjaga-jaga			
593149- Belanja persediaan lainnya	0	475.264.067.508	475.264.067.508
593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.618.329.518	1.618.329.518
594111- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Migas	0	339.643.280	339.643.280
594112- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas	0	167.851.789.408	167.851.789.408
594113- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN	0	106.126.421.443	106.126.421.443
594115- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB	0	15.752.753.235	15.752.753.235
594117- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	0	18.552.480.343	18.552.480.343
594118- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	(561.518.655)	(561.518.655)
594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	48.846.735.359	48.846.735.359
594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	93.142.881	93.142.881
594249- Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	126.813	126.813
594611- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	1.449.471.357	1.449.471.357
594612- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	423.342.615	423.342.615
594619- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	36.539.324	36.539.324
594651- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	0	(192.222.000)	(192.222.000)
594711- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU	0	300.000	300.000
594712- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	0	125.000	125.000
594713- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	241.500	241.500
594791- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	19.767.454	19.767.454
594931- Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	499.940	499.940
595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	47.612.614	47.612.614
595113- Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	44.900.000	44.900.000
596111- Beban Pelepasan Aset	0	293.003.717.178	293.003.717.178
596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang	0	1.738.666.823	1.738.666.823
596211- Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	3.343.557.213	3.343.557.213
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	394.975.931.900	394.975.931.900
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	20.646.083.400	20.646.083.400
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	21.538.235.700	21.538.235.700
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	92.855.758.500	92.855.758.500
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	72.448.602.000	72.448.602.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	10.888.265.000	10.888.265.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	250.327.301.000	250.327.301.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	343.437.100	343.437.100
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	687.693.000	687.693.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	35.035.292.000	35.035.292.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	22.508.630.000	22.508.630.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	22.562.136.000	22.562.136.000
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	17.456.253.021.000	17.456.253.021.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	361.209.518.026	361.209.518.026
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	138.500.000.000	138.500.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.707.198.093.500	1.707.198.093.500

621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	903.436.303.000	903.436.303.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	486.521.332.000	486.521.332.000
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	789.711.869.973	789.711.869.973
643111- Insentif Fiskal	0	280.947.396.000	280.947.396.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	3.454.604.257.700	3.454.604.257.700
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	79.325.807.700	79.325.807.700
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	13.384.000.000	13.384.000.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.800.239.627.030	1.800.239.627.030
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	555.756.926.102	555.756.926.102
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	120.335.328.325	120.335.328.325
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	119.072.042.150	119.072.042.150
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	66.571.810.000	66.571.810.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	10.679.365.693	10.679.365.693
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	5.806.975.230	5.806.975.230
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	31.779.059.163	31.779.059.163
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	2.915.500.000	2.915.500.000
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	11.538.148.022	11.538.148.022
662111- Belanja Dana Desa	0	1.818.644.491.884	1.818.644.491.884
8110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	0	(1.844.423.260.630)	(1.844.423.260.630)
8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	0	(1.154.164.579.014)	(1.154.164.579.014)
8110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	0	(985.895.889.038)	(985.895.889.038)
8110400- Pajak Air Permukaan - LO	0	-254952783106,78	-254952783106,78
8110500- Pajak Rokok - LO	0	(728.614.874.904)	(728.614.874.904)
8110600- Pajak Hotel - LO	0	-127889528244,04	-127889528244,04
8110700- Pajak Restoran - LO	0	-295889014989,67	-295889014989,67
8110800- Pajak Hiburan - LO	0	-39143133154,14	-39143133154,14
8110900- Pajak Reklame - LO	0	-98035896886,45	-98035896886,45
8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO	0	(527.581.085.307)	(527.581.085.307)
8111100- Pajak Parkir - LO	0	(12.625.420.898)	(12.625.420.898)
8111200- Pajak Air Tanah - LO	0	-15261431609,16	-15261431609,16
8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO	0	(162.721.170)	(162.721.170)
8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0	-390365078593,94	-390365078593,94
8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	0	-691597164511,71	-691597164511,71
8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	0	-560774489053,7	-560774489053,7
811ZZZZ- Pendapatan Pajak Daerah - LO (BAS Level 4)	0	-259317220996,05	-259317220996,05
8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0	-2377370678812,71	-2377370678812,71
8120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	0	-45822994534,18	-45822994534,18
8120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	0	(9.308.476.000)	(9.308.476.000)
8120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0	-56720316754,24	-56720316754,24
8121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0	(886.190.000)	(886.190.000)
8121400- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0	(28.695.000)	(28.695.000)
8121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	0	-26896107114,76	-26896107114,76
8121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	0	(17.768.865.266)	(17.768.865.266)
8121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0	(2.799.945.135)	(2.799.945.135)
8121800- Retribusi Terminal - LO	0	(990.055.000)	(990.055.000)
8121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	0	(8.165.900.599)	(8.165.900.599)
8122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	0	(844.507.000)	(844.507.000)
8122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	0	(12.819.518.320)	(12.819.518.320)
8122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO	0	-2285835975,67	-2285835975,67
8122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0	-18148979066,95	-18148979066,95
8122400- Retribusi Penyebrangan Air - LO	0	(79.296.000)	(79.296.000)
8122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0	(3.002.467.200)	(3.002.467.200)
8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0	(58.248.719.737)	(58.248.719.737)
8122900- Retribusi Izin Trayek - LO	0	(25.000)	(25.000)

8123000- Retribusi Izin Perikanan - LO	0	(115.000.000)	(115.000.000)
8123100- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	0	-36631666,67	-36631666,67
8123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0	(6.278.964.250)	(6.278.964.250)
8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	0	-445459186743,46	-445459186743,46
8130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	0	(6.602.138.944)	(6.602.138.944)
8130300- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO	0	-15088758008,97	-15088758008,97
813ZZZZ- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO (BAS Level 4)	0	(22.516.592.662)	(22.516.592.662)
8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0	(17.323.293.169)	(17.323.293.169)
8140200- Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	0	-14937893319,07	-14937893319,07
8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO	0	-103041714091,98	-103041714091,98
8140400- Pendapatan Bunga - LO	0	-18733334498,83	-18733334498,83
8140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0	-100475881550,49	-100475881550,49
8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	0	-24523835256,73	-24523835256,73
8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0	-43574065978,53	-43574065978,53
8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO	0	-58416298224,08	-58416298224,08
8140900- Pendapatan Denda Retribusi - LO	0	-261429004,0099988	-261429004,0099988
8141000- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	0	-59321211,18	-59321211,18
8141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(8.750.000)	(8.750.000)
8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO	0	-244086459785,59	-244086459785,59
8141800- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0	-8758650737,82	-8758650737,82
8141900- Pendapatan Zakat* - LO	0	(88.857.017)	(88.857.017)
8142000- Pendapatan BLUD - LO	0	-450933643140,97	-450933643140,97
8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0	-,000002	-,000002
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	(958.145.283.638)	(958.145.283.638)
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	(106.794.082.175)	(106.794.082.175)
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	(20.507.718.074.232)	(20.507.718.074.232)
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	(6.743.801.712.606)	(6.743.801.712.606)
821ZZZZ- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO (BAS Level 4)	0	(688.255.758.365)	(688.255.758.365)
8220100- Dana Otonomi Khusus - LO	0	(147.144.463.000)	(147.144.463.000)
8220300- Dana Penyesuaian - LO	0	(14.573.145.000)	(14.573.145.000)
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	(225.225.740.000)	(225.225.740.000)
822ZZZZ- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO (BAS Level 4)	0	(6.442.293.000)	(6.442.293.000)
823ZZZZ- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO (BAS Level 4)	0	(38.694.055.871)	(38.694.055.871)
8240100- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0	(217.805.825.228)	(217.805.825.228)
824ZZZZ- Bantuan Keuangan - LO (BAS Level 4)	0	(49.553.849.051)	(49.553.849.051)
8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0	-2843648462559,22	-2843648462559,22
8310200- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0	-87311457095,74	-87311457095,74
8310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0	-22263241865,65	-22263241865,65
8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0	-2214836916,55	-2214836916,55
831ZZZZ- Pendapatan Hibah - LO (BAS Level 4)	0	-21416077164,06	-21416077164,06
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	-296568172600,69	-296568172600,69
8410100- Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	-10480802088,91	-10480802088,91
8420100- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	-5079319154,83	-5079319154,83
8430100- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	-59663314723,09	-59663314723,09
8510100- Pendapatan Pos Luar Biasa - LO	0	-5471658564,81	-5471658564,81
9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO	0	11014052945304,02	11014052945304,02
9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0	5461819563041,87	5461819563041,87
9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	0	399706140444,61	399706140444,61
9110500- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0	1.238.735.435	1.238.735.435
9110600- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	3.347.500	3.347.500

911ZZZZ- Beban Pegawai - LO (BAS Level 4)	0	2819460000512,33	2819460000512,33
9120100- Beban Bahan Pakai Habis	0	2577810756138,6	2577810756138,6
9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material	0	612119512384,94	612119512384,94
9120300- Beban Jasa Kantor	0	3674497814777,48	3674497814777,48
9120400- Beban Premi Asuransi	0	711275228068,36	711275228068,36
9120500- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0	1.685.606.543	1.685.606.543
9120600- Beban Cetak dan Penggandaan	0	4.990.694.952	4.990.694.952
9120700- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	19863577858,07	19863577858,07
9120800- Beban Sewa Sarana Mobilitas	0	36850697386,33	36850697386,33
9120900- Beban Sewa Alat Berat	0	80.361.307.955	80.361.307.955
9121000- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	12198402077,92	12198402077,92
9121100- Beban Makanan dan Minuman	0	36.976.096.655	36.976.096.655
9121200- Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0	2.228.374.998	2.228.374.998
9121300- Belanja Pakaian Kerja	0	192.696.853	192.696.853
9121400- Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0	1.290.302.288	1.290.302.288
9121500- Beban Perjalanan Dinas	0	1038474636492,58	1038474636492,58
9121800- Beban Pemeliharaan	0	377762773298,31	377762773298,31
9121900- Beban Jasa Konsultasi	0	53581038631,9	53581038631,9
9122000- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	20769781568,82	20769781568,82
9122200- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0	3.930.551.849	3.930.551.849
9122300- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	57.488.991.116	57.488.991.116
9122400- Beban Honorarium Non Pegawai	0	4.679.042.144	4.679.042.144
9122500- Honorarium PNS	0	6.518.394.401	6.518.394.401
9122600- Honorarium Non PNS	0	83.446.567.341	83.446.567.341
9122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	11905471587,85	11905471587,85
9122800- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	0	269.913.261.567	269.913.261.567
9122900- Beban Jaminan kesehatan Nasional (BPJS)	0	91.750.776.611	91.750.776.611
9123000- Beban Jasa Pihak Ketiga	0	11.645.415.647	11.645.415.647
9123100- Beban Barang dan Jasa BLUD	0	1397126290821,18	1397126290821,18
9123200- Beban Barang dan Jasa dana BOS	0	854.762.004.934	854.762.004.934
9123300- Beban Penghargaan atau Prestasi	0	1.333.356.800	1.333.356.800
9123400- Beban Pemeliharaan Kesehatan Pejabat Negara	0	16.415.928.205	16.415.928.205
9123600- Beban Paket Meeting	0	7.040.000	7.040.000
9123700- Beban alat-alat olahraga	0	877.960.443	877.960.443
9123800- Beban Peralatan Rumah Tangga	0	8.512.385.584	8.512.385.584
9123900- Beban Alat Pendukung Penyuluhan	0	4.620.000	4.620.000
912ZZZZ- Beban Barang dan Jasa (BAS Level 4)	0	5.480.885.216	5.480.885.216
9130100- Bunga Utang Pinjaman	0	44466756914,54	44466756914,54
9140100- Beban Subsidi	0	29.748.499.073	29.748.499.073
9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah	0	257181675724,23	257181675724,23
9150200- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	26568250781,36	26568250781,36
9150300- Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0	91684840796,44	91684840796,44
9150400- Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	44.692.934.359	44.692.934.359
9150500- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	274089973300,88	274089973300,88
9150600- Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	0	257564740022,24	257564740022,24
915ZZZZ- Beban Hibah (BAS Level 4)	0	13.714.199.666	13.714.199.666
9160100- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	101.420.000	101.420.000
9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	25.004.893.370	25.004.893.370
916ZZZZ- Beban Bantuan Sosial (BAS Level 4)	0	485.000.000	485.000.000
9170100- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1798623825070,81	1798623825070,81
9170200- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	859178646656,36	859178646656,36
9170300- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	3433500084834,79	3433500084834,79
9170400- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	20222226931,55	20222226931,55
9180100- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	134030414825,14	134030414825,14
9180200- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	27847281792,82	27847281792,82
918ZZZZ- Beban Penyisihan Piutang (BAS Level 4)	0	1094131217,69	1094131217,69
9190100- Beban Penurunan Nilai Investasi	0	1.869.447.490	1.869.447.490
9190300- Beban Lain-lain	0	13.965.647.995	13.965.647.995
9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	159646506606,35	159646506606,35
9220100- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	135955362097,9	135955362097,9
9230100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	0	76.782.727.280	76.782.727.280
9230200- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	141.990.247.920	141.990.247.920

9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	1472060890964,09	1472060890964,09
9250100- Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0	128.273.755.488	128.273.755.488
9310100- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	78614114997,48	78614114997,48
9320100- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	27987809412,3	27987809412,3
9330100- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	97556440757,85	97556440757,85
9410100- Beban Luar Biasa	0	28351558431,12	28351558431,12
9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah	0	3780610188572,971895	3780610188572,971895
Jumlah	0	- 121496941536116,3598526	- 121496941536116,3598526

LAMPIRAN II

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	17.960.000	(17.960.000)	0
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	5.118.000	(5.118.000)	0
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	406.326.159.440	(406.326.159.440)	0
111911- Kas dan Bank - BLU	725.242.289.455	280.898.391.176	1.006.140.680.631
211116- Utang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan dan Anggotaan Polri/PNS Polri	(26.413.424.000)	26.413.424.000	0
211166- Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	26.413.424.000	(26.413.424.000)	0
311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	61.978.422.415	261.942.724.734	323.921.147.149
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(187.388.183.118.530)	(53.132.208.378.674)	(240.520.391.497.204)
313121- Diterima dari Entitas Lain	66.924.004.284.494	13.074.501.606.036	79.998.505.890.530
391111- Ekuitas	119.294.814.892.302	31.271.821.500.293	150.566.636.392.595
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BP KL	(23.078.000)	23.078.000	0
399918- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas KPPN	4.546.600	0	4.546.600
399919- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas BLU	(26.509.358.098)	0	(26.509.358.098)
399921- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas Hibah	2.321.881.922	430.400.000	2.752.281.922
4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0	(1.839.298.423.538)	(1.839.298.423.538)
4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0	(1.154.444.324.594)	(1.154.444.324.594)
4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0	(976.059.043.352)	(976.059.043.352)
4110400- Pajak Air Permukaan - LRA	0	-222214969796,78	-222214969796,78
4110500- Pajak Rokok - LRA	0	(728.614.874.904)	(728.614.874.904)
4110600- Pajak Hotel - LRA	0	-7820104203,45	-7820104203,45
4110700- Pajak Restoran - LRA	0	-54820493880,24	-54820493880,24
4110800- Pajak Hiburan - LRA	0	-2572581226,28	-2572581226,28
4110900- Pajak Reklame - LRA	0	-93736888001,01	-93736888001,01
4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA	0	(220.808.620.678)	(220.808.620.678)
4111100- Pajak Parkir - LRA	0	(3.013.160.828)	(3.013.160.828)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(107.919.740)	(107.919.740)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(1.745.653)	(1.745.653)
4111200- Pajak Air Tanah - LRA	0	-14907339076,16	-14907339076,16
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(1.749.014.300.597)	(1.749.014.300.597)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(154.624.451.015)	(154.624.451.015)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(10.140.299)	(10.140.299)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(365.139.305.794)	(365.139.305.794)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(305.105.623.475)	(305.105.623.475)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.641.085.071.162)	(1.641.085.071.162)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(18.324.833.502)	(18.324.833.502)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(854.978.544.766)	(854.978.544.766)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(1.368.544.319)	(1.368.544.319)
4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0	(184.146.170)	(184.146.170)
4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0	-370305891864,21	-370305891864,21
4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0	-561539250245,22	-561539250245,22
4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	0	-560848046553,7	-560848046553,7
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(4.606.080.134.789)	(4.606.080.134.789)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(18.190.853.598)	(18.190.853.598)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(6.991.757.478)	(6.991.757.478)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(22.489.195.973)	(22.489.195.973)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(253.737.850)	(253.737.850)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(215.498.530)	(215.498.530)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(940.994.222)	(940.994.222)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(57.377.000)	(57.377.000)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(75.365.214.615)	(75.365.214.615)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(7.247.313)	(7.247.313)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(93.533.809.000)	(93.533.809.000)
411512- Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	0	(1.595.000)	(1.595.000)
411513- Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	0	(7.505.550.000)	(7.505.550.000)

411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(6.093.148.000)	(6.093.148.000)
411519- Pendapatan Cukai Lainnya	0	(41.778.000)	(41.778.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(3.805.373.804)	(3.805.373.804)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	0	(12.384.433)	(12.384.433)
411618- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	0	(601.074.885.656)	(601.074.885.656)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(57.345.864.387)	(57.345.864.387)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(2.962.653.979)	(2.962.653.979)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(1.947.677.061)	(1.947.677.061)
411659- Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	0	(3.984.874.317)	(3.984.874.317)
411ZZZZ- Pendapatan Pajak Daerah - LRA (BAS Level 4)	0	-1010559003730,6803	-1010559003730,6803
4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	0	-2221290088421,17	-2221290088421,17
4120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	0	-33417200495,76	-33417200495,76
4120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	0	(9.944.185.000)	(9.944.185.000)
4120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	0	(26.005.110.739)	(26.005.110.739)
4121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	0	(889.485.000)	(889.485.000)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(224.767.556.000)	(224.767.556.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(3.872.430.000)	(3.872.430.000)
412119- Pendapatan Pabean Lainnya	0	(177.117.000)	(177.117.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(3.713.743.000)	(3.713.743.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(1.140.550.000)	(1.140.550.000)
4121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0	(36.592.071.303)	(36.592.071.303)
4121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	0	(12.989.842.100)	(12.989.842.100)
4121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0	(1.669.094.485)	(1.669.094.485)
4121800- Retribusi Terminal - LRA	0	(909.910.000)	(909.910.000)
4121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	0	(8.499.817.599)	(8.499.817.599)
4122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	0	(1.227.152.000)	(1.227.152.000)
4122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	0	(12.819.518.320)	(12.819.518.320)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(51.212.331.000)	(51.212.331.000)
412213- Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	(351.000)	(351.000)
4122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	0	(5.042.309.412)	(5.042.309.412)
4122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	0	-18584480909,45	-18584480909,45
4122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	0	(21.263.592.430)	(21.263.592.430)
4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	0	(57.083.289.088)	(57.083.289.088)
4123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	0	(5.410.474.310)	(5.410.474.310)
4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0	-389760261412,52	-389760261412,52
4130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	0	(26.222.599.349)	(26.222.599.349)
4130300- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	0	(250.800.000)	(250.800.000)
4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0	-24261727783,07	-24261727783,07
4140200- Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	0	-11284974230,61999909	-11284974230,61999909
4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA	0	-102935163621,51	-102935163621,51
4140400- Pendapatan Bunga - LRA	0	-19148707057,83	-19148707057,83
4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0	-47654565021,35	-47654565021,35
4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	0	-49464471722,41	-49464471722,41
4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0	-47049013535,52999809	-47049013535,52999809
4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA	0	-51214680472,57	-51214680472,57
4140900- Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0	-218945378,48	-218945378,48
4141000- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	0	(4.089.025.570)	(4.089.025.570)
4141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	-1257035654,35	-1257035654,35
4141200- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	0	(3.750.000)	(3.750.000)
4141300- Pendapatan dari Pengembalian	0	-243099756262,17	-243099756262,17
4141600- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0	(9.873.356.153)	(9.873.356.153)

4141700- Pendapatan Zakat* - LRA	0	(88.836.499)	(88.836.499)
4141800- Pendapatan BLUD - LRA	0	- 604182131287,950000 004656613	- 604182131287,95000000 4656613
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	(4.744.983.556)	(4.744.983.556)
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	(759.254.435.065)	(759.254.435.065)
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	(313.237.083.309)	(313.237.083.309)
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	(21.014.258.077.521)	(21.014.258.077.521)
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	(6.914.291.788.071)	(6.914.291.788.071)
4220400- Dana Insentif Daerah	0	(280.947.396.000)	(280.947.396.000)
4220500- Dana Desa	0	-1818504862654,01	-1818504862654,01
4230200- Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	0	(26.833.963.650)	(26.833.963.650)
4240200- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	0	(13.205.889.750)	(13.205.889.750)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(1.485.237.956.381)	(1.485.237.956.381)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(1.093.173.198.256)	(1.093.173.198.256)
424113- Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	0	(17.654.896.975)	(17.654.896.975)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(6.963.130.979)	(6.963.130.979)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(376.540.396)	(376.540.396)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(44.014.098.566)	(44.014.098.566)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(1.997.893.100)	(1.997.893.100)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(46.800.391.536)	(46.800.391.536)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(6.021.619.307)	(6.021.619.307)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(31.430.455.151)	(31.430.455.151)
424913- Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	0	(14.081.824)	(14.081.824)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(407.855.718)	(407.855.718)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(13.811.530.315)	(13.811.530.315)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(1.752.472.027)	(1.752.472.027)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(1.908.265.970)	(1.908.265.970)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(7.593.687.173)	(7.593.687.173)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(1.643.809.374)	(1.643.809.374)
424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	(31.825.000)	(31.825.000)
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	(1.659.146.339)	(1.659.146.339)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(3.273.317.282)	(3.273.317.282)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(4.954.000)	(4.954.000)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(229.350.900)	(229.350.900)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(8.157.328.945)	(8.157.328.945)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(4.029.632.611)	(4.029.632.611)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(41.619.473.448)	(41.619.473.448)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(263.115.412)	(263.115.412)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(3.081.561.937)	(3.081.561.937)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(6.918.946.001)	(6.918.946.001)
425211- Pendapatan Paspor	0	(94.025.900.000)	(94.025.900.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.222.000.000)	(1.222.000.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(6.935.150.000)	(6.935.150.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(3.905.700.000)	(3.905.700.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(110.862.000)	(110.862.000)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(4.060.000)	(4.060.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(175.160.000)	(175.160.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(1.051.756.500)	(1.051.756.500)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil	0	(1.878.782.150)	(1.878.782.150)

Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan			
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(2.728.621.800)	(2.728.621.800)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(1.853.864.820)	(1.853.864.820)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(4.409.966.295)	(4.409.966.295)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(855.217.687)	(855.217.687)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(4.735.500.000)	(4.735.500.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(11.848.209.717)	(11.848.209.717)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(802.533.000)	(802.533.000)
425245- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	0	(2.323.813.500)	(2.323.813.500)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(1.935.000.035)	(1.935.000.035)
425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	(8.704.766.736)	(8.704.766.736)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(904.709.596)	(904.709.596)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(45.300.000)	(45.300.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(1.555.057.832)	(1.555.057.832)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(16.708.830.000)	(16.708.830.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(16.899.395.000)	(16.899.395.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(77.545.300.000)	(77.545.300.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(1.155.840.000)	(1.155.840.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(68.387.700.000)	(68.387.700.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(41.524.440.000)	(41.524.440.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(873.600.000)	(873.600.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.708.100.000)	(1.708.100.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(15.730.000.000)	(15.730.000.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(8.381.730.000)	(8.381.730.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(6.582.975.000)	(6.582.975.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(888.385.000)	(888.385.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(11.904.169.849)	(11.904.169.849)
425282- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(7.902.975)	(7.902.975)
425284- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	0	(158.800.000)	(158.800.000)
425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	(13.563.884.000)	(13.563.884.000)
425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	0	(916.716.000)	(916.716.000)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(7.539.271.006)	(7.539.271.006)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(21.049.332.032)	(21.049.332.032)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(136.725.415.927)	(136.725.415.927)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(38.864.454.289)	(38.864.454.289)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.267.320.000)	(1.267.320.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(4.918.020.000)	(4.918.020.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(927.752.219)	(927.752.219)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(6.803.366.367)	(6.803.366.367)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(454.790.000)	(454.790.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(62.895.247.399)	(62.895.247.399)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(27.577.200.000)	(27.577.200.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(3.521.805.513)	(3.521.805.513)

425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(1.045.100.000)	(1.045.100.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(86.259.127.600)	(86.259.127.600)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(2.769.608.200)	(2.769.608.200)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(27.418.976.181)	(27.418.976.181)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(227.740.000)	(227.740.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(4.425.486.000)	(4.425.486.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(170.215.000)	(170.215.000)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(1.173.673)	(1.173.673)
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(72.936.125)	(72.936.125)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(129.000.000)	(129.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(30.840.732.773)	(30.840.732.773)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.305.814.290)	(10.305.814.290)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(5.946.753.400)	(5.946.753.400)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(4.030.467.748)	(4.030.467.748)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(1.934.326.701)	(1.934.326.701)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(20.414.420.827)	(20.414.420.827)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(2.346.325.733)	(2.346.325.733)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(289.863.800)	(289.863.800)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(2.866.590.000)	(2.866.590.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(462.841.484)	(462.841.484)
425619- Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	0	(5.136.659)	(5.136.659)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	(432.022.678)	(432.022.678)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(26.595.380)	(26.595.380)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(1.497.993.381)	(1.497.993.381)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(131.493)	(131.493)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(17.863.757)	(17.863.757)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(18.635.230)	(18.635.230)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(32.900.000)	(32.900.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(30.329.121.650)	(30.329.121.650)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(9.335.757.988)	(9.335.757.988)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(12.907.815.192)	(12.907.815.192)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(110.186.101)	(110.186.101)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(38.474.567)	(38.474.567)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(18.885.527.207)	(18.885.527.207)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(607.902.023)	(607.902.023)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(2.130.623.576)	(2.130.623.576)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(9.780.139.809)	(9.780.139.809)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(54.690.740.116)	(54.690.740.116)
425917- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(34.000.000)	(34.000.000)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(74.948.797.529)	(74.948.797.529)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(3.501.592.900)	(3.501.592.900)
4310200- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	0	(250.131.554)	(250.131.554)
4310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	0	(50.581.029.191)	(50.581.029.191)
4310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	0	-3353889948,01	-3353889948,01
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	-261913449050,68	-261913449050,68
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(31.271.821.500.293)	(31.271.821.500.293)
5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	12596047156918,02	12596047156918,02
5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	6182374714103,337	6182374714103,337
5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan	0	479.953.660.358	479.953.660.358

anggota DPRD serta KDH/WKDH			
5110900- Belanja Pegawai Dana BLUD	0	321503214916,22	321503214916,22
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	1.894.125.992.095	1.894.125.992.095
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	24.765.635	24.765.635
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	127.002.690.574	127.002.690.574
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	36.319.762.606	36.319.762.606
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	15.700.098.000	15.700.098.000
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	229.566.661.045	229.566.661.045
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	28.044.353.191	28.044.353.191
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	91.166.723.250	91.166.723.250
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	313.197.091.492	313.197.091.492
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	2.206.022.850	2.206.022.850
511138- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	51.050.000	51.050.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.429.980.000	1.429.980.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	26.676.723.801	26.676.723.801
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	517.194.941.531	517.194.941.531
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	267.284.761.933	267.284.761.933
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	116.827.984.920	116.827.984.920
511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	6.729.565.000	6.729.565.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	8.668.704.000	8.668.704.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	107.407.935.125	107.407.935.125
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	1.420.214	1.420.214
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	6.133.846.630	6.133.846.630
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	1.732.152.299	1.732.152.299
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	3.879.715.000	3.879.715.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	523.365.000	523.365.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	728.810.161	728.810.161
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	4.749.250.183	4.749.250.183
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	16.488.387.375	16.488.387.375
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	1.084.780.000	1.084.780.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	3.099.880.521	3.099.880.521
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.789.531.661.136	1.789.531.661.136
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	27.312.625	27.312.625
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	120.371.725.911	120.371.725.911
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	36.777.836.390	36.777.836.390
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	69.697.139.401	69.697.139.401
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	250.807.500	250.807.500
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	18.153.127.374	18.153.127.374
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	145.639.743.213	145.639.743.213
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	949.758.370.000	949.758.370.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	830.800.000	830.800.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	3.652.650.000	3.652.650.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	4.674.600.000	4.674.600.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	1.173.050.000	1.173.050.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	14.187.496.750	14.187.496.750
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	547.440.000	547.440.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	7.381.455.000	7.381.455.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	27.403.115.725	27.403.115.725
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	656.360.000	656.360.000
511243- Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri	0	500.000	500.000
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	36.547.289.546	36.547.289.546
511324- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	23.988.964.659	23.988.964.659
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	35.717.759.786	35.717.759.786
511339- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	133.265.647.000	133.265.647.000
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	2.382.556.588	2.382.556.588
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	223.794.078	223.794.078
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	84.175.000	84.175.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	570.015.152.460	570.015.152.460
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	8.959.000.000	8.959.000.000
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	724.856.000	724.856.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	499.906.551.067	499.906.551.067
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	8.179.241	8.179.241
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	28.789.100.746	28.789.100.746
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	8.474.247.970	8.474.247.970
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	43.465.315.104	43.465.315.104
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	28.166.533.865	28.166.533.865
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	103.732.898.044	103.732.898.044
511632- Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	0	1.050.000	1.050.000

511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4.806.593.318	4.806.593.318
5120100- Belanja Bahan Pakai Habis	0	2150164300959,89	2150164300959,89
5120200- Belanja Bahan/Material	0	12077847485,85	12077847485,85
5120300- Belanja Jasa Kantor	0	3199977817351,28	3199977817351,28
5120400- Belanja Premi Asuransi	0	816.700.142.799	816.700.142.799
5120700- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	26.590.409.952	26.590.409.952
5120800- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	30.197.371.418	30.197.371.418
5120900- Belanja Sewa Alat Berat	0	52.478.106.231	52.478.106.231
5121000- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	48.755.537.288	48.755.537.288
512111- Belanja Uang Honor Tetap	0	8.859.851.000	8.859.851.000
5121500- Belanja Perjalanan Dinas	0	965447248888,58	965447248888,58
5121800- Belanja Pemeliharaan	0	360291397412,55	360291397412,55
5121900- Belanja Jasa Konsultansi	0	68030099912,84	68030099912,84
5122000- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	78.724.839.776	78.724.839.776
512211- Belanja Uang Lembur	0	56.072.117.700	56.072.117.700
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	6.555.806.250	6.555.806.250
5122200- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	948.250.000	948.250.000
5122300- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	86.605.127.333	86.605.127.333
5122400- Belanja Honorarium Non Pegawai	0	926.429.543	926.429.543
5122500- Honorarium PNS	0	476.723.999	476.723.999
5122600- Honorarium Non PNS	0	12.397.876.575	12.397.876.575
5122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	201.413.043.035	201.413.043.035
5122900- Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	2.247.429.952	2.247.429.952
5123000- Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	2429398051874,16	2429398051874,16
5123100- Belanja Barang dan Jasa dana BOS	0	1.442.729.113.180	1.442.729.113.180
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1.960.288.566.238	1.960.288.566.238
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	294.396.820.131	294.396.820.131
512ZZZZ- Belanja Barang dan Jasa (BAS Level 4)	0	1.383.280.260	1.383.280.260
5130100- Bunga Utang Pinjaman	0	45581152093,85	45581152093,85
5140100- Belanja Subsidi	0	28.200.633.071	28.200.633.071
5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah	0	140.198.375.084	140.198.375.084
5150200- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	19.496.498.240	19.496.498.240
5150300- Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0	25.116.930.759	25.116.930.759
5150400- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	25.845.028.360	25.845.028.360
5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	410433648365,97	410433648365,97
5150600- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***	0	353242791739,24	353242791739,24
5160100- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	111.420.000	111.420.000
5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	25.828.279.870	25.828.279.870
5210100- Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0	3.693.985.100	3.693.985.100
5210200- Belanja modal PengadaanTanah Pertanian	0	85.000.000	85.000.000
5211100- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	30.097.967.335	30.097.967.335
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	468.625.091.051	468.625.091.051
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	194.393.990.916	194.393.990.916
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	6.892.422.666	6.892.422.666
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	2.261.711.282	2.261.711.282
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	131.581.048.407	131.581.048.407
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	610.724.721.795	610.724.721.795
5211300- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	3.358.947.305	3.358.947.305
521211- Belanja Bahan	0	238.077.048.981	238.077.048.981
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	141.221.283.357	141.221.283.357
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	285.060.995.329	285.060.995.329
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	2.003.400.000	2.003.400.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	6.674.630.000	6.674.630.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	12.467.988.447	12.467.988.447
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	45.125.315	45.125.315
521254- Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	86.252.000	86.252.000
521723- Belanja Ketersediaan Layanan (Availability	0	243.786.840.300	243.786.840.300

Payment)			
521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	198.377.480.162	198.377.480.162
521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	7.575.000	7.575.000
521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	298.214.690	298.214.690
521822- Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	3.090.500.000	3.090.500.000
521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	15.244.819.220	15.244.819.220
521ZZZZ- Belanja Modal Tanah (BAS Level 4)	0	2.673.689.000	2.673.689.000
5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	46.658.585.864	46.658.585.864
5220200- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0	15.637.452.691	15.637.452.691
5220300- Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0	22.834.687.628	22.834.687.628
5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	206.557.183.147	206.557.183.147
5220500- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	9897383547,8	9897383547,8
5220600- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0	995.980.800	995.980.800
5220700- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	52.200.000	52.200.000
5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0	21.978.925.372	21.978.925.372
5221000- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0	173.478.971	173.478.971
5221100- Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0	9.184.188.972	9.184.188.972
522111- Belanja Langganan Listrik	0	133.845.368.942	133.845.368.942
522112- Belanja Langganan Telepon	0	6.772.296.601	6.772.296.601
522113- Belanja Langganan Air	0	12.749.290.146	12.749.290.146
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	31.824.359.522	31.824.359.522
5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0	41156184676,02	41156184676,02
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	136.127.201	136.127.201
5221300- Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0	17.267.909.638	17.267.909.638
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	76.164.377.056	76.164.377.056
5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0	272356108945,6	272356108945,6
522141- Belanja Sewa	0	74.531.915.617	74.531.915.617
5221500- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	51.793.592.011	51.793.592.011
522151- Belanja Jasa Profesi	0	46.498.295.114	46.498.295.114
5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer	0	185661875259,4	185661875259,4
522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	340.766.286	340.766.286
5221700- Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	13.257.734.936	13.257.734.936
5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0	34.800.456.793	34.800.456.793
5221900- Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0	3.086.513.800	3.086.513.800
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	188.686.462.877	188.686.462.877
5222000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0	81.707.000	81.707.000
5222100- Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0	310.806.018.009	310.806.018.009
5222200- Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0	39.521.372.567	39.521.372.567
5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0	63.999.183.215	63.999.183.215
5222400- Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	118856266266,72	118856266266,72
5222500- Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	12.500.000	12.500.000
5222600- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	74.285.152.858	74.285.152.858
5222800- Belanja modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0	174.594.275	174.594.275
5223000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	1.255.000.000	1.255.000.000
5223500- Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	12.239.512.903	12.239.512.903
522ZZZZ- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	24.081.278.906	24.081.278.906
5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	1360462388358,94	1360462388358,94
5230200- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	16069613497,82	16069613497,82
5230500- Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	0	2.787.284.376	2.787.284.376
5230600- Belanja modal Pengadaan Candi	0	536.872.729	536.872.729
5230700- Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0	1.838.300.748	1.838.300.748

5230800- Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	0	6.223.211.010	6.223.211.010
5230900- Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	37190033425,48	37190033425,48
5231000- Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	0	172.050.000	172.050.000
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	255.031.896.361	255.031.896.361
523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	4.124.210.413	4.124.210.413
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	4.551.780.977	4.551.780.977
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	212.819.548.334	212.819.548.334
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	50.868.500	50.868.500
523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	28.147.225.970	28.147.225.970
523125- Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	61.595.004.000	61.595.004.000
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	4.142.776.611	4.142.776.611
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	162.637.588.813	162.637.588.813
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	183.074.058.685	183.074.058.685
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1.973.268.205	1.973.268.205
523134- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	206.587.000	206.587.000
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	6.175.118.715	6.175.118.715
523ZZZZ- Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	49.820.000	49.820.000
5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan	0	1509053285746,08	1509053285746,08
5240200- Belanja modal Pengadaan Jembatan	0	117332518094,11	117332518094,11
5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0	119498257277,15	119498257277,15
5240400- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0	1.601.364.150	1.601.364.150
5240600- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	59465034736,86	59465034736,86
5240800- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0	18.094.540.473	18.094.540.473
5240900- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0	59248854089,26	59248854089,26
5241000- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	0	35.436.870.010	35.436.870.010
5241100- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0	21456202493,99	21456202493,99
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	361.675.284.647	361.675.284.647
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	882.371.176	882.371.176
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	49.647.745.274	49.647.745.274
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	56.103.864.634	56.103.864.634
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	42.085.447.359	42.085.447.359
5241200- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0	18.399.199.198	18.399.199.198
5241300- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0	10.610.862.497	10.610.862.497
5241500- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0	920.064.531	920.064.531
5241600- Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0	2.497.030.910	2.497.030.910
5241700- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	0	1.780.160.000	1.780.160.000
5241800- Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	0	1.841.715.000	1.841.715.000
5241900- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0	2.446.088.800	2.446.088.800
5242000- Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	89563485639,97	89563485639,97
5242100- Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	0	18990505231,77	18990505231,77
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	5.931.850.938	5.931.850.938
5242300- Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	0	2.785.000.000	2.785.000.000
5242400- Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0	2.415.841.975	2.415.841.975
524ZZZZ- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (BAS Level 4)	0	4.360.656.465	4.360.656.465
5250100- Belanja modal Pengadaan Buku	0	3.083.382.928	3.083.382.928
5250200- Belanja modal Pengadaan Terbitan	0	5.000.000	5.000.000
5250300- Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0	7.191.228.335	7.191.228.335
5250400- Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	3.604.009.145	3.604.009.145
5250500- Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	205.290.225	205.290.225
5250600- Belanja modal Pengadaan Hewan	0	29.071.566	29.071.566
5250700- Belanja modal Pengadaan Tanaman	0	16.000.000	16.000.000

5250800- Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN	0	83.266.359.410	83.266.359.410
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	871.179.097.800	871.179.097.800
525112- Belanja Barang	0	248.043.068.006	248.043.068.006
525113- Belanja Jasa	0	235.676.114.957	235.676.114.957
525114- Belanja Pemeliharaan	0	152.083.916.274	152.083.916.274
525115- Belanja Perjalanan	0	50.906.242.964	50.906.242.964
525118- Belanja Ketersediaan Layanan BLU	0	3.916.289.986	3.916.289.986
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	232.028.374.677	232.028.374.677
525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	52.515.099.835	52.515.099.835
525123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	2.202.464.003	2.202.464.003
525125- Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	754.544.100	754.544.100
525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	423.278.575.358	423.278.575.358
525143- Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	262.139.500	262.139.500
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	1.934.651.715	1.934.651.715
525ZZZZ- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	551.889.400	551.889.400
5260100- Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	0	87.044.424	87.044.424
526111- Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	681.560.714	681.560.714
526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	4.779.068.595	4.779.068.595
526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	48.348.622.408	48.348.622.408
526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	1.260.780.336.372	1.260.780.336.372
526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	21.791.246.921	21.791.246.921
526121- Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	115.000.000	115.000.000
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	51.000.000	51.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	162.500.000	162.500.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	151.615.500.000	151.615.500.000
526223- Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	40.813.207.735	40.813.207.735
526224- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	34.324.752.864	34.324.752.864
526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	297.420.008.274	297.420.008.274
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	354.485.386.243	354.485.386.243
5270100- Belanja Modal Aset Lainnya	0	15.213.441.081	15.213.441.081
5280100- Belanja Modal BLUD	0	46.422.778.480	46.422.778.480
5310100- Belanja Tak Terduga	0	51.967.081.549	51.967.081.549
531111- Belanja Modal Tanah	0	18.625.578.130	18.625.578.130
531113- Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	14.700.000	14.700.000
531114- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	258.170.000	258.170.000
531117- Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	101.516.591	101.516.591
531121- Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN	0	187.209.670.397	187.209.670.397
532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	467.611.507.580	467.611.507.580
532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	3.082.241.300	3.082.241.300
533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	945.582.338.632	945.582.338.632
533112- Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	14.565.745.000	14.565.745.000
533113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	8.526.094.719	8.526.094.719
533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	9.399.160.763	9.399.160.763
533118- Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	801.463.937	801.463.937
533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	120.447.563.827	120.447.563.827
534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	135.850.987.022	135.850.987.022
534113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	21.212.000	21.212.000

Pengelola Teknis Jalan dan jembatan			
534118- Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	0	112.837.000	112.837.000
534121- Belanja Modal Irigasi	0	317.203.118.524	317.203.118.524
534122- Belanja Modal Bahan Baku Irigasi	0	143.718.967.377	143.718.967.377
534123- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	0	47.529.817.423	47.529.817.423
534124- Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi	0	9.812.336.144	9.812.336.144
534125- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	0	2.402.394.200	2.402.394.200
534128- Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0	2.525.545.240	2.525.545.240
534131- Belanja Modal Jaringan	0	687.246.266.800	687.246.266.800
534133- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	18.720.000	18.720.000
534138- Belanja Modal Perjalanan Jaringan	0	62.446.000	62.446.000
534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	237.335.597.947	237.335.597.947
534151- Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	26.237.000	26.237.000
536111- Belanja Modal Lainnya	0	97.953.424.179	97.953.424.179
536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	193.062.000	193.062.000
536117- Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	592.309.590	592.309.590
536121- Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	514.500.000	514.500.000
537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	164.766.709.300	164.766.709.300
537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	34.728.638.917	34.728.638.917
537114- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	1.759.086.914	1.759.086.914
537115- Belanja Modal Lainnya - BLU	0	5.559.448.905	5.559.448.905
571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	14.656.129.000	14.656.129.000
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	2.088.210.268	2.088.210.268
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	84.840.050.000	84.840.050.000
6110100- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	118859959614,62	118859959614,62
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	406.694.075.900	406.694.075.900
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	21.056.791.400	21.056.791.400
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	23.050.018.700	23.050.018.700
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	101.726.508.500	101.726.508.500
6120100- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	10359559717,55	10359559717,55
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	2.995.000	2.995.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	91.587.693.000	91.587.693.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	15.163.345.000	15.163.345.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	300.696.394.000	300.696.394.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	886.814.100	886.814.100
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	687.693.000	687.693.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	35.035.292.000	35.035.292.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	22.508.630.000	22.508.630.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	23.136.952.000	23.136.952.000
6210100- Bantuan Keuangan ke Propinsi	0	224.127.810.507	224.127.810.507
6210200- Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	566.102.776.992	566.102.776.992
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	17.456.253.021.000	17.456.253.021.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	361.209.518.026	361.209.518.026
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	138.500.000.000	138.500.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.707.198.093.500	1.707.198.093.500
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	903.436.303.000	903.436.303.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	486.521.332.000	486.521.332.000
621ZZZZ- Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya (BAS Level 4)	0	128.556.936.967	128.556.936.967
6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	2313046320145,92	2313046320145,92
6230100- Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0	221.614.900.696	221.614.900.696

631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	789.711.869.973	789.711.869.973
643111- Insentif Fiskal	0	280.947.396.000	280.947.396.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	3.455.182.695.600	3.455.182.695.600
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	79.325.807.700	79.325.807.700
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	18.745.750.000	18.745.750.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.800.239.627.030	1.800.239.627.030
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	545.921.258.830	545.921.258.830
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	132.436.877.000	132.436.877.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	119.072.042.150	119.072.042.150
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	66.571.810.000	66.571.810.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	11.386.065.000	11.386.065.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	8.032.660.000	8.032.660.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	34.400.767.000	34.400.767.000
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	3.106.500.000	3.106.500.000
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	12.744.412.000	12.744.412.000
662111- Belanja Dana Desa	0	1.818.644.491.884	1.818.644.491.884
7110100- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	0	-1175671446647,04	-1175671446647,04
7140100- Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0	(22.000.000.000)	(22.000.000.000)
7140200- Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping LSKP	0	2540122811125,22312	2540122811125,22312
7220200- Penyertaan Modal pada BUMD	0	37.774.000.000	37.774.000.000
722ZZZZ- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah (BAS Level 4)	0	2.000.000.000	2.000.000.000
7230100- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	0	3053031264,26	3053031264,26
7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	264.400.124.186	264.400.124.186
7230400- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0	45097008647,88	45097008647,88
723ZZZZ- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri (BAS Level 4)	0	69.146.235.960	69.146.235.960
7240100- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara	0	36.995.280.506	36.995.280.506
815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	(43.506.643.547)	(43.506.643.547)
815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(10.106.355.560)	(10.106.355.560)
815114- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu	0	(17.960.000)	(17.960.000)
815131- Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	0	(670.000)	(670.000)
815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	(530.492.256.531)	(530.492.256.531)
815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(66.303.450.315)	(66.303.450.315)
815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(5.118.000)	(5.118.000)
815619- Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	(584.437.112.799)	(584.437.112.799)
817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	(1.818.644.491.884)	(1.818.644.491.884)
817718- Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN	0	(4.736.442.122)	(4.736.442.122)
825111- Pengeluaran Uang Persediaan	0	43.506.643.547	43.506.643.547
825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	10.106.355.560	10.106.355.560
825131- Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	0	670.000	670.000
825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	0	530.492.256.531	530.492.256.531
825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	66.303.450.315	66.303.450.315
825619- Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana	0	410.385.037.873	410.385.037.873

Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga			
827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	1.818.644.491.884	1.818.644.491.884
827718- Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN	0	4.736.442.122	4.736.442.122
Jumlah	0	-,000177184656613	-,000177184656613

LAMPIRAN III
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	-9211339028,01	-9211339028,01
215112- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Dana Transfer Umum (DTU)	0	662.439.976.000	662.439.976.000
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(394.975.931.900)	(394.975.931.900)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(20.646.083.400)	(20.646.083.400)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(21.538.235.700)	(21.538.235.700)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(92.855.758.500)	(92.855.758.500)
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	(72.448.602.000)	(72.448.602.000)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	(10.888.265.000)	(10.888.265.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(250.327.301.000)	(250.327.301.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(343.437.100)	(343.437.100)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(687.693.000)	(687.693.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(35.035.292.000)	(35.035.292.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(22.508.630.000)	(22.508.630.000)
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	(22.562.136.000)	(22.562.136.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(17.456.253.021.000)	(17.456.253.021.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(361.209.518.026)	(361.209.518.026)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(138.500.000.000)	(138.500.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(1.707.198.093.500)	(1.707.198.093.500)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(903.436.303.000)	(903.436.303.000)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(486.521.332.000)	(486.521.332.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(789.711.869.973)	(789.711.869.973)
643111- Insentif Fiskal	0	(280.947.396.000)	(280.947.396.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(3.454.604.257.700)	(3.454.604.257.700)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(79.325.807.700)	(79.325.807.700)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(13.384.000.000)	(13.384.000.000)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.800.239.627.030)	(1.800.239.627.030)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(555.756.926.102)	(555.756.926.102)
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(120.335.328.325)	(120.335.328.325)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(119.072.042.150)	(119.072.042.150)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(66.571.810.000)	(66.571.810.000)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	(10.679.365.693)	(10.679.365.693)
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(5.806.975.230)	(5.806.975.230)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(31.779.059.163)	(31.779.059.163)
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	(2.915.500.000)	(2.915.500.000)
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	(11.538.148.022)	(11.538.148.022)
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	958.145.283.638	958.145.283.638
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	106.794.082.175	106.794.082.175
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	20.507.718.074.232	20.507.718.074.232
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	6.743.801.712.606	6.743.801.712.606
8220100- Dana Otonomi Khusus - LO	0	147.144.463.000	147.144.463.000
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	225.225.740.000	225.225.740.000
8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0	1305003027534,99	1305003027534,99
Jumlah	0	1306457273943,98	1306457273943,98

LAMPIRAN IV

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

ELIMINASI/KONSOLDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	759.254.435.065	759.254.435.065
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	313.237.083.309	313.237.083.309
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	21.014.258.077.521	21.014.258.077.521
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	6.914.291.788.071	6.914.291.788.071
4220400- Dana Insentif Daerah	0	280.947.396.000	280.947.396.000
4220500- Dana Desa	0	1818504862654,01	1818504862654,01
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	171327857672,99	171327857672,99
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(406.694.075.900)	(406.694.075.900)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(21.056.791.400)	(21.056.791.400)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(23.050.018.700)	(23.050.018.700)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(101.726.508.500)	(101.726.508.500)
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	(2.995.000)	(2.995.000)
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	(91.587.693.000)	(91.587.693.000)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	(15.163.345.000)	(15.163.345.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(300.696.394.000)	(300.696.394.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(886.814.100)	(886.814.100)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(687.693.000)	(687.693.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(35.035.292.000)	(35.035.292.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(22.508.630.000)	(22.508.630.000)
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	(23.136.952.000)	(23.136.952.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(17.456.253.021.000)	(17.456.253.021.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(361.209.518.026)	(361.209.518.026)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(138.500.000.000)	(138.500.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(1.707.198.093.500)	(1.707.198.093.500)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(903.436.303.000)	(903.436.303.000)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(486.521.332.000)	(486.521.332.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(789.711.869.973)	(789.711.869.973)
643111- Insentif Fiskal	0	(280.947.396.000)	(280.947.396.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(3.455.182.695.600)	(3.455.182.695.600)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(79.325.807.700)	(79.325.807.700)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(18.745.750.000)	(18.745.750.000)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.800.239.627.030)	(1.800.239.627.030)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(545.921.258.830)	(545.921.258.830)
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(132.436.877.000)	(132.436.877.000)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(119.072.042.150)	(119.072.042.150)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(66.571.810.000)	(66.571.810.000)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	(11.386.065.000)	(11.386.065.000)
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(8.032.660.000)	(8.032.660.000)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(34.400.767.000)	(34.400.767.000)
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	(3.106.500.000)	(3.106.500.000)
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	(12.744.412.000)	(12.744.412.000)
662111- Belanja Dana Desa	0	(1.818.644.491.884)	(1.818.644.491.884)
Jumlah	0	0	0



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Selatan